



LAPORAN  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  
**(LPPD)**  
TAHUN 2022

PEMERINTAH KOTA SIBOLGA  
TAHUN 2023



## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas karunianya lah Pemerintah Kota Sibolga dapat melaksanakan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka mewujudkan tertib pelaksanaan fungsi-fungsi Pemerintahan Daerah.

Wali Kota Sibolga memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Sumatera Utara. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kota Sibolga Tahun 2022 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sibolga Tahun 2016 - 2021 dan 2021 – 2022 selanjutnya diharapkan laporan ini menjadi media informasi eksternal sekaligus menjadi alat koreksi internal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Disadari pula bahwa berbagai kendala dan tantangan masih mewarnai pelaksanaan tugas sebagai upaya implementasi kewenangan pengelolaan pemerintah daerah kedepan. Namun demikian, the show must go on karena banyak inspirasi, inovasi serta keinginan dan kemauan yang masih harus diwujudkan di masa yang akan datang, oleh karenanya menjadikan tantangan dan hambatan menjadi peluang dan awal keberhasilan di masa datang.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Sibolga Tahun 2022 ini disusun semoga bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Sibolga, Maret 2023

WALI KOTA SIBOLGA,

H. JAMALUDDIN POHAN



**DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL		
KATA PENGANTAR		i
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1. LATAR BELAKANG	1
	1.1. PENJELASAN UMUM	1
	1.1.1 Undang-undang Pembentukan Daerah;	1
	1.1.2 Data Geografis Wilayah;	3
	1.1.3 Jumlah Penduduk;	7
	1.1.4 Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan (untuk Kabupaten/Kota);	15
	1.1.5 Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah; dan	15
	1.1.6 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.	18
	1.2. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	21
	1.2.1. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah;	25
	1.2.2 Visi dan Misi Kepala Daerah;	43
	1.2.3 Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah; dan	59
	1.2.4 Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan.	112
	1.3. PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	160
	1.3.1 Dasar Hukum Standar Pelayanan Minimal (SPM)	161
	1.3.2 Arah Kebijakan Strategis	161
BAB II	CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAERAH	164
	2.1 Capaian Kinerja Makro	165
	2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	172
	2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran	172
	2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Hasil	225
	2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	240
	2.3. AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAHAN DAERAH	245
	2.3.1. Capaian Kinerja Organisasi	245
	2.3.2 Kerangka Pengukuran Kinerja	255



	2.3.3	Capaian Kinerja Organisasi	
BAB III		CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	310
	3.1	DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN	310
	3.2	GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN	310
	3.3	CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	311
	3.3.1	Target Kinerja	311
	3.3.2	Realisasi	319
	3.3.3	Permasalahan Dan Kendala	344
	3.3.4	Saran dan Tindak Lanjut	345
BAB IV		PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	346
	4.1	URUSAN PENDIDIKAN	346
	4.1.1.	Jenis Pelayanan Dasar	346
	4.1.2.	Target Capaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah	347
	4.1.3.	Realisasi	348
	4.1.4.	Alokasi Anggaran	349
	4.1.5.	Dukungan Personil	349
	4.1.6	Permasalahan dan Solusi	350
	4.1.7.	Program dan Kegiatan	350
	4.2	URUSAN KESEHATAN	351
	4.2.1.	Jenis Pelayanan Dasar	351
	4.2.2.	Target Capaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah	352
	4.2.3.	Realisasi	352
	4.2.4.	Alokasi Anggaran	353
	4.2.5.	Dukungan Personil	354
	4.2.6.	Permasalahan dan Solusi	355
	4.2.7.	Program dan Kegiatan	357
	4.3.	URUSAN PEKERJAAN UMUM	359
	4.3.1.	Jenis Pelayanan Dasar	359
	4.3.2.	Target Capaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah	359
	4.3.3.	Realisasi	360
	4.3.4.	Alokasi Anggaran	360



4.3.5.	Dukungan Personil	360
4.3.6.	Permasalahan dan Solusi	360
4.3.7.	Program dan Kegiatan	360
4.4.	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT	361
4.4.1	Jenis Pelayanan Dasar	361
4.4.2.	Target Capaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah	361
4.4.3.	Realisasi	362
4.4.4.	Alokasi Anggaran	362
4.4.5.	Dukungan Personil	362
4.4.6.	Permasalahan dan Solusi	362
4.4.7.	Program dan Kegiatan	362
4.5	URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	(363)/(365)
4.5.1/2.1	Jenis Pelayanan Dasar	(363)/(365)
4.5.1/2.2	Target Capaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah	(363)/(365)
4.5.1/2.3	Realisasi	(364)/(366)
4.5.1/2.4	Alokasi Anggaran	(364)/(366)
4.5.1/2.5	Dukungan Personil	(364)/(366)
4.5.1/2.6	Permasalahan dan Solusi	(364)/(367)
4.5.1/2.7	Program dan Kegiatan	(365)/(367)
4.6.	URUSAN SOSIAL	368
4.6.1.	Jenis Pelayanan Dasar	368
4.6.2.	Target Capaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah	369
4.6.3.	Realisasi	370
4.6.4.	Alokasi Anggaran	371
4.6.5.	Dukungan Personil	372
4.6.6.	Permasalahan dan Solusi	372
4.6.7.	Program dan Kegiatan	372
BAB V	PENUTUP	373
INDIKATOR KUNCI URUSAN PEMERINTAH DAERAH		v - lxxxviii



## BAB I PENDAHULUAN

### 1. LATAR BELAKANG

#### 1.1 PENJELASAN UMUM

##### 1.1.1 UNDANG-UNDANG PEMBENTUKAN KOTA SIBOLGA.

- a. Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 Sibolga ditetapkan menjadi Daerah Swatantra Tingkat II dengan Nama Kotapraja Sibolga yang dipimpin oleh seorang Walikota dengan wilayah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Residen Tapanuli Nomor 999 tanggal 19 November 1946.
- b. Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 maka Daerah Swatantra Tingkat II Kotapraja Sibolga diganti sebutannya menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Sibolga, selanjutnya sistem pengaturan pemerintahan ditetapkan dan dijalankan sesuai dengan Undang-undang nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah.
- c. Kewenangan Pemerintah Daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- d. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dirubah kemudian dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, maka sebutan Kotamadya Daerah Tingkat II Sibolga berubah menjadi Kota Sibolga yang statusnya Daerah Otonom yang dipimpin oleh seorang Walikota dan Wakil Walikota sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sibolga.

#### URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, akan dilaksanakan oleh OPD se-Kota Sibolga sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing yang mengacu pada Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Sibolga. Urusan pemerintahan daerah tersebut meliputi:



**1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar**

- Dinas Pendidikan & Kebudayaan
- Dinas Kesehatan
- RSUD Dr F L Tobing
- Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
- Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- Satuan Polisi Pamong Praja
- Kesatuan Bangsa & Politik
- Dinas Sosial

**2. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**

- Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, PP dan Perlindungan Anak
- Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- Dinas Perhubungan
- Dinas Komunikasi dan Informatika
- Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
- Dinas Perpustakaan

**3. Urusan Pilihan**

- Dinas Perikanan Ketahanan Pangan dan Pertanian
- Dinas Pariwisata Pemuda & Olahraga
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan

**4. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang**

- Administrasi Pemerintahan
  - a. DPRD
  - b. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
  - c. Sekretariat Daerah
  - d. Sekretariat DPRD
  - e. Kecamatan Sibolga Utara
  - f. Kecamatan Sibolga Kota
  - g. Kecamatan Sibolga Selatan
  - h. Kecamatan Sibolga Sambas
- Pengawasan
  - a. Inspektorat



- **Perencanaan**
  - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- **Kuangan**
  - a. Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah
- **Kepegawaian**
  - a. Badan Kepegawaian Daerah

### 1.1.2 DATA GEOGRAFIS WILAYAH KOTA SIBOLGA

Kota Sibolga merupakan salah satu kota yang berada di Pantai Barat Sumatera bagian Utara yakni di Teluk Tapian Nauli, wilayahnya berada pada ketinggian 1 - 200 m di atas permukaan laut. Kota Sibolga berada ± 344 km Selatan Kota Medan, ibukota Provinsi Sumatera Utara. Secara geografis wilayah Kota Sibolga terletak pada posisi 01° 42' LU s/d 01° 46' LU dan 98° 44' BT s/d 98° 48' BT dan secara fisik berada di dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, atau dengan kata lain dikelilingi oleh Kabupaten Tapanuli Tengah. Luas Kota Sibolga adalah 1.077 Ha, yang terdiri dari 889,16 Ha daratan pulau Sumatera dan 187,84 Ha daratan berupa kepulauan.

Kota Sibolga termasuk beriklim tropis dengan suhu maksimal pada tahun 2021 mencapai 37,0°C. Jumlah hari hujan di Kota Sibolga pada tahun 2021 adalah sebanyak 211 hari, lebih sedikit dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 246 hari. Sejalan dengan jumlah hari hujan, rata-rata kelembaban udara Kota Sibolga juga mengalami peningkatan menjadi 85,3 % pada tahun 2021. Sementara itu rata-rata kecepatan angin di Kota Sibolga pada tahun 2021 adalah sebesar 1,5 m/det, dengan penguapan udara sebesar 1008,1 mb. Pada tahun 2021 suhu maksimum mencapai 37,0°C.

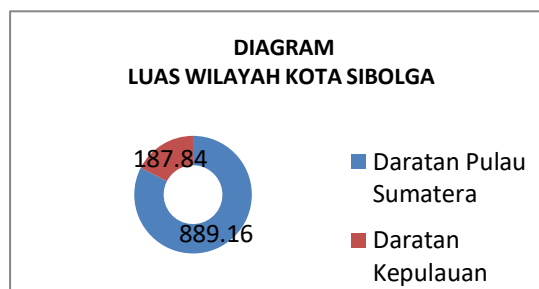
Secara rinci letak geografis dan luas wilayah, batas dan jarak 4 Kecamatan ke Pusat Kota Sibolga disajikan pada Tabel di bawah.

Adapun rincian luas wilayah Kota Sibolga dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

**TABEL 1**  
**LUAS WILAYAH KOTA SIBOLGA**

NO.	WILAYAH	LUAS ( Ha.)
1	2	3
1.	Daratan : Daratan Pulau Sumatera Daratan Kepulauan	889,16 187,84
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.077</b>

Sumber: SIPD Kota Sibolga







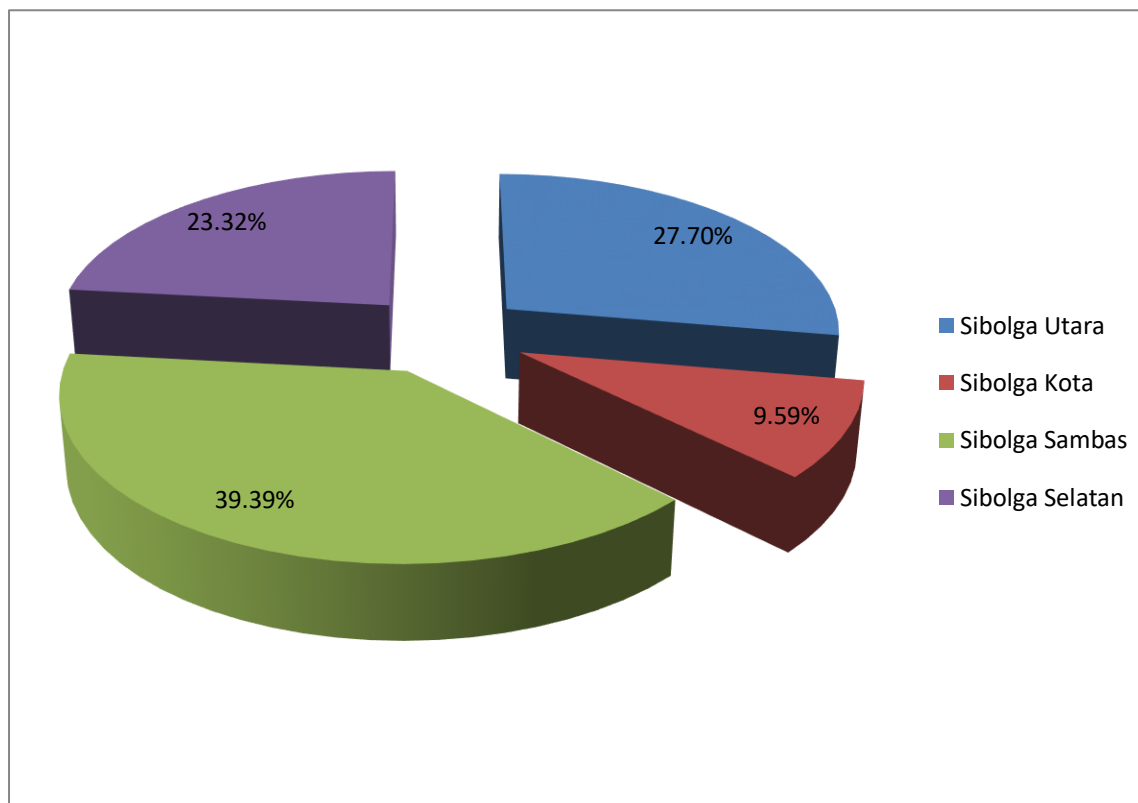
Daratan Kota Sibolga berada pada rata-rata ketinggian antara 1-200 m diatas permukaan laut dengan kondisi permukaan adalah daratan rendah berupa bekas rawa dan pantai serta pegunungan yang permukaannya terjal. Kondisi ini menjadikan keadaan topografi wilayah Kota Sibolga terdiri dari 2 kategori, yaitu :

- Pertama : Wilayah landai/datar mempunyai kemiringan lahan 0-2 % yang luasnya mencapai 29,14% dari total wilayah daratan Kota Sibolga.
- Kedua : wilayah lereng mempunyai kemiringan > 40% dengan luasnya mencapai 638,2 Ha atau mencapai 59,62% dari total wilayah daratan Kota Sibolga.

Dari kondisi topografi yang seperti ini, menyebabkan Kota Sibolga memiliki iklim yang cukup panas dan termasuk daerah beriklim tropis.

Secara administratif Kota Sibolga terbagi kedalam 4 wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Sibolga Utara, Sibolga Kota, Sibolga Sambas dan Sibolga Selatan yang luas wilayah masing-masing tergambar pada diagram berikut.

**Diagram Luas Wilayah Sibolga Menurut Kecamatan (%)**



Sumber: BPN Kantor Pertanahan Kota Sibolga



**TABEL 2**  
**PEMBAGIAN WILAYAH ADMINISTRASI KOTA SIBOLGA**

No.	Kecamatan/ Kelurahan	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	Persentase (%)
1	2	3	4
I	<b>SIBOLGA UTARA</b>	<b>3,333</b>	<b>27,70</b>
	1. Sibolga Ilir	0,78	5,79
	2. Angin Nauli	0,87	6,48
	3. Huta Tonga-tonga	0,40	2,94
	4. Huta Barangan	0,57	7,20
	5. Simare-mare	0,71	5,30
II	<b>SIBOLGA KOTA</b>	<b>2,732</b>	<b>9,59</b>
	1. Kota Baringin	0,29	1,77
	2. Pasar Baru	0,46	1,33
	3. Pasar Belakang	1,08	4,34
	4. Pancuran Gerobak	0,90	2,15
III	<b>SIBOLGA SELATAN</b>	<b>3,139</b>	<b>23,32</b>
	1. Aek Habil	0,614	4,55
	2. Aek Manis	1,235	9,20
	3. Aek Parombunan	0,898	6,66
	4. Aek Muara Pinang	0,392	2,91
IV	<b>SIBOLGA SAMBAS</b>	<b>1,566</b>	<b>39,39</b>
	1. Pancuran Pinang	0,18	7,94
	2. Pancuran Kerambil	0,33	6,83
	3. Pancuran Dewa	0,51	9,19
	4. Pancuran Bambu	0,54	15,42
	<b>KOTA SIBOLGA</b>	<b>10,77</b>	<b>100</b>

Sumber :Kelurahan Dan Kecamatan Kota Sibolga

**TABEL 3**  
**Letak Geografis Kecamatan Kota Sibolga**

DAERAH	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
<b>SIBOLGA UTARA</b>	Letak	010 42"-010 44" LU 980 46" - 980 48" BT
	Letak Di atas Permukaan Laut	0 – 54 m
	Luas Wilayah	333,33 ha
	Batas Wilayah	
	Sebelah Utara	Kabupaten Tapanuli Tengah
	Sebelah Selatan	Sungai Aek Doras dan Kecamatan Sibolga Kota
	Sebelah Barat	Teluk Tapian Nauli



DAERAH	URAIAN	KETERANGAN
	Sebelah Timur	Kabupaten Tapanuli Tengah
	Jarak kantor Camat ke kantor Walikota	0,30 km
<b>SIBOLGA KOTA</b>	Letak	010 42"-010 44" LU 980 45" - 980 47" BT
	Letak Di atas Permukaan Laut	0 - 8 m
	Luas Wilayah	273,23 ha
	Batas Wilayah	
	Sebelah Utara	Kecamatan Sibolga Utara
	Sebelah Selatan	Kecamatan Sibolga Sambas
	Sebelah Barat	Kecamatan Sibolga Utara
	Sebelah Timur	Kabupaten Tapanuli Tengah
	Jarak kantor Camat ke kantor Walikota	0,60 km
	<b>SIBOLGA SELATAN</b>	Letak
Letak Di atas Permukaan Laut		0 - 29 m
Luas Wilayah		313,85 ha
Batas Wilayah		
Sebelah Utara		Kabupaten Tapanuli Tengah
Sebelah Selatan		Teluk Tapan Nauli
Sebelah Barat		Kecamatan Sibolga Sambas
Sebelah Timur		Kabupaten Tapanuli Tengah
Jarak kantor Camat ke kantor Walikota		3,4 km
<b>SIBOLGA SAMBAS</b>		Letak
	Letak Di atas Permukaan Laut	0 - 13 m
	Luas Wilayah	156,59 ha
	Batas Wilayah	
	Sebelah Utara	Kecamatan Sibolga Utara
	Sebelah Selatan	Teluk Tapan Nauli
	Sebelah Barat	Kecamatan Sibolga Kota
	Sebelah Timur	Kecamatan Sibolga Selatan
	Jarak kantor Camat ke kantor Walikota	1,0 km

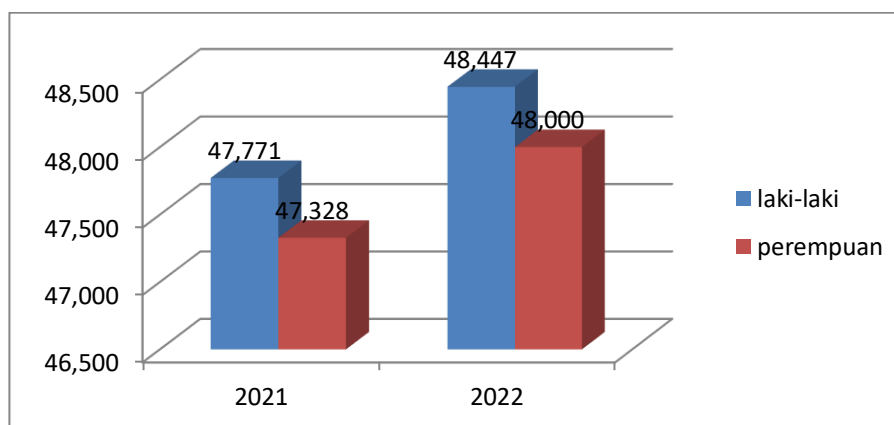
Sumber: BPN Kota Sibolga



### 1.1.3 JUMLAH PENDUDUK KOTA SIBOLGA

Secara demografi, berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, jumlah Penduduk Kota Sibolga tahun 2022 berjumlah **96.447** jiwa yang terdiri dari **48.447** jiwa penduduk laki-laki dan **48.000** jiwa perempuan dengan rata-rata tingkat kepadatan penduduknya mencapai 8.830 jiwa per km<sup>2</sup>. Dengan kepadatan tertinggi di Kecamatan Sibolga Sambas yang mencapai 14.199 jiwa per km<sup>2</sup> dan terendah di Kecamatan Sibolga Kota sebesar 6.071 jiwa per km<sup>2</sup>. Untuk tahun 2021 jumlah penduduk berjumlah 95.098 jiwa dengan 47,771 jiwa penduduk laki-laki dan 47,328 jiwa penduduk perempuan, dengan data demikian bahwa penduduk Kota Sibolga bertambah sebanyak 1.349 dari tahun 2021 dengan persentase 1,42 %.

**Grafik Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Kota Sibolga Tahun 2022**



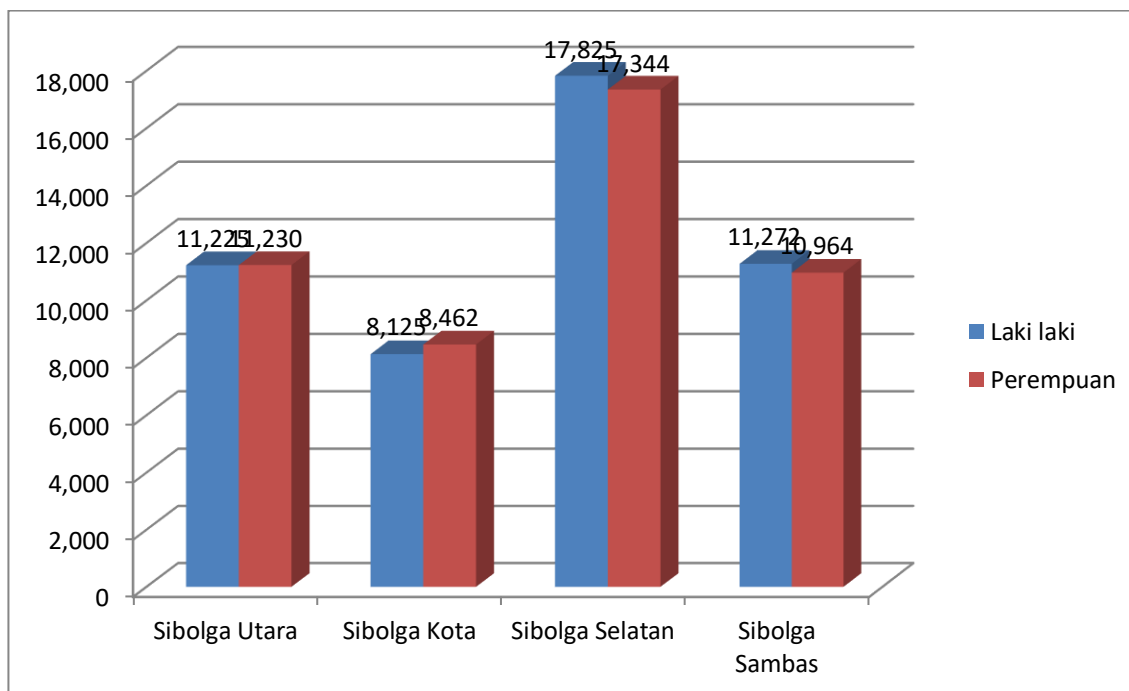
**TABEL 4**  
**Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Kota Sibolga Tahun 2022.**

Kecamatan	Laki-laki		Perempuan		L+P	
	n	%	n	%	n	%
1	2	3	4	5	6	7
Sibolga Utara	11.225	11,64	11.230	11,64	22.455	23,28
Sibolga Kota	8.125	8,42	8.462	8,77	16.587	17,20
Sibolga Selatan	17.825	18,48	17.344	17,98	35.169	36,46
Sibolga Sambas	11.272	11,69	10.964	11,37	22.236	23,06
<b>Kota Sibolga</b>	<b>48.447</b>	50,23	<b>48.000</b>	49,77	<b>96.447</b>	100

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Kemendagri Semester II 2022, diolah



Grafik Jumlah dan Proporsi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kota Sibolga Tahun 2022



TABEL 5  
JUMLAH DAN PROPORSI PENDUDUK BERDASARKAN KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMIN KOTA SIBOLGA TAHUN 2022

No.	Usia Penduduk	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah	
		Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%
1.	Usia 1 Tahun	652	0,68	626	0,65	1.278	1,33
2.	Usia 2 Tahun	713	0,74	656	0,68	1.369	1,42
3.	Usia 3 Tahun	725	0,75	760	0,79	1.485	1,54
4.	Usia 4 Tahun	819	0,85	786	0,81	1.605	1,66
5.	Usia 5 Tahun	822	0,85	781	0,81	1.603	1,66
6.	Usia 6 Tahun	883	0,92	774	0,80	1.657	1,72
7.	Usia 7 Tahun	891	0,92	761	0,79	1.652	1,71
8.	Usia 8 Tahun	932	0,97	875	0,91	1.807	1,87
9.	Usia 9 Tahun	969	1,00	883	0,92	1.852	1,92
10.	Usia 10 Tahun	980	1,02	899	0,93	1.879	1,95
11.	Usia 11 Tahun	945	0,98	898	0,93	1.843	1,91
12.	Usia 12 Tahun	986	1,02	927	0,96	1.913	1,98
13.	Usia 13 Tahun	955	0,99	914	0,95	1.869	1,94
14.	Usia 14 Tahun	990	1,03	902	0,94	1.892	1,96



No.	Usia Penduduk	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah	
		Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%
15.	Usia 15 Tahun	976	1,01	946	0,98	1.922	1,99
16.	Usia 16 Tahun	1048	1,09	951	0,99	1.999	2,07
17.	Usia 17 Tahun	1004	1,04	948	0,98	1.952	2,02
18.	Usia 18 Tahun	479	0,50	473	0,49	952	0,99
19.	Usia 19 Tahun	840	0,87	873	0,91	1.713	1,78
20.	Usia 20 Tahun	1079	1,12	926	0,96	2.005	2,08
21.	Usia 21 Tahun	964	1,00	966	1,00	1.930	2,00
22.	Usia 22 Tahun	916	0,95	867	0,90	1.783	1,85
23.	Usia 23 Tahun	975	1,01	928	0,96	1.903	1,97
24.	Usia 24 Tahun	902	0,94	908	0,94	1.810	1,88
25.	Usia 25 Tahun	774	0,80	830	0,86	1.604	1,66
26.	Usia 26 Tahun	835	0,87	807	0,84	1.642	1,70
27.	Usia 27 Tahun	806	0,84	891	0,92	1.697	1,76
28.	Usia 28 Tahun	830	0,86	825	0,86	1.655	1,72
29.	Usia 29 Tahun	849	0,88	710	0,74	1.559	1,62
30.	Usia 30 Tahun	796	0,83	772	0,80	1.568	1,63
31.	Usia 31 Tahun	804	0,83	725	0,75	1.529	1,59
32.	Usia 32 Tahun	679	0,70	665	0,69	1.344	1,39
33.	Usia 33 Tahun	807	0,84	732	0,76	1.539	1,60
34.	Usia 34 Tahun	782	0,81	737	0,76	1.519	1,57
35.	Usia 35 Tahun	837	0,87	726	0,75	1.563	1,62
36.	Usia 36 Tahun	769	0,80	701	0,73	1.470	1,52
37.	Usia 37 Tahun	812	0,84	731	0,76	1.543	1,60
38.	Usia 38 Tahun	864	0,90	718	0,74	1.582	1,64
39.	Usia 39 Tahun	777	0,81	742	0,77	1.519	1,57
40.	Usia 40 Tahun	742	0,77	781	0,81	1.523	1,58
41.	Usia 41 Tahun	823	0,85	830	0,86	1.653	1,71
42.	Usia 42 Tahun	704	0,73	697	0,72	1.401	1,45
43.	Usia 43 Tahun	856	0,89	806	0,84	1.662	1,72
44.	Usia 44 Tahun	768	0,80	730	0,76	1.498	1,55
45.	Usia 45 Tahun	654	0,68	670	0,69	1.324	1,37
46.	Usia 46 Tahun	643	0,67	634	0,66	1.277	1,32
47.	Usia 47 Tahun	651	0,67	576	0,60	1.227	1,27
48.	Usia 48 Tahun	657	0,68	613	0,64	1.270	1,32
49.	Usia 49 Tahun	592	0,61	539	0,56	1.131	1,17
50.	Usia 50 Tahun	547	0,57	562	0,58	1.109	1,15
51.	Usia 51 Tahun	575	0,60	553	0,57	1.128	1,17



No.	Usia Penduduk	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah	
		Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%
52.	Usia 52 Tahun	470	0,49	466	0,48	936	0,97
53.	Usia 53 Tahun	535	0,55	512	0,53	1.047	1,09
54.	Usia 54 Tahun	474	0,49	444	0,46	918	0,95
55.	Usia 55 Tahun	456	0,47	515	0,53	971	1,01
56.	Usia 56 Tahun	379	0,39	440	0,46	819	0,85
57.	Usia 57 Tahun	325	0,34	361	0,37	686	0,71
58.	Usia 58 Tahun	423	0,44	498	0,52	921	0,95
59.	Usia 59 Tahun	337	0,35	421	0,44	758	0,79
60.	Usia 60 Tahun	287	0,30	353	0,37	640	0,66
61.	Usia 61 Tahun	285	0,30	402	0,42	687	0,71
62.	Usia 62 Tahun	250	0,26	296	0,31	546	0,57
63.	Usia 63 Tahun	335	0,35	363	0,38	698	0,72
64.	Usia 64 Tahun	246	0,26	307	0,32	553	0,57
65.	Usia 65 Tahun	269	0,28	347	0,36	616	0,64
66.	Usia 66 Tahun	233	0,24	284	0,29	517	0,54
67.	Usia 67 Tahun	195	0,20	310	0,32	505	0,52
68.	Usia 68 Tahun	184	0,19	247	0,26	431	0,45
69.	Usia 69 Tahun	176	0,18	242	0,25	418	0,43
70.	Usia 70 Tahun	139	0,14	220	0,23	359	0,37
71.	Usia 71 Tahun	175	0,18	186	0,19	361	0,37
72.	Usia 72 Tahun	89	0,09	125	0,13	214	0,22
73.	Usia 73 Tahun	93	0,10	173	0,18	266	0,28
74.	Usia 74 Tahun	77	0,08	114	0,12	191	0,20
75.	Usia 75 Tahun	62	0,06	123	0,13	185	0,19
76.	Usia 76 Tahun	45	0,05	82	0,09	127	0,13
77.	Usia 77 Tahun	41	0,04	84	0,09	125	0,13
78.	Usia 78 Tahun	42	0,04	109	0,11	151	0,16
79.	Usia 79 Tahun	28	0,03	63	0,07	91	0,09
80.	Usia 80 Tahun	18	0,02	59	0,06	77	0,08
81.	Usia 81 Tahun	30	0,03	59	0,06	89	0,09
82.	Usia 82 Tahun	12	0,01	32	0,03	44	0,05
83.	Usia 83 Tahun	23	0,02	60	0,06	83	0,09
84.	Usia 84 Tahun	7	0,01	31	0,03	38	0,04
85.	Usia 85 Tahun	3	0,00	35	0,04	38	0,04
86.	Usia 86 Tahun	7	0,01	25	0,03	32	0,03
87.	Usia 87 Tahun	7	0,01	18	0,02	25	0,03
88.	Usia 88 Tahun	4	0,00	8	0,01	12	0,01



No.	Usia Penduduk	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah	
		Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%
89.	Usia 89 Tahun	1	0,00	12	0,01	13	0,01
90.	Usia 90 Tahun	0	0,00	8	0,01	8	0,01
91.	Usia 91 Tahun	0	0,00	8	0,01	8	0,01
92.	Usia 92 Tahun	4	0,00	3	0,00	7	0,01
93.	Usia 93 Tahun	1	0,00	6	0,01	7	0,01
94.	Usia 94 Tahun	0	0,00	5	0,01	5	0,01
95.	Usia 95 Tahun	0	0,00	3	0,00	3	0,00
96.	Usia 96 Tahun	1	0,00	2	0,00	3	0,00
97.	Usia 97 Tahun	0	0,00	1	0,00	1	0,00
98.	Usia 98 Tahun	0	0,00	3	0,00	3	0,00
99.	Usia 99 Tahun	0	0,00	1	0,00	1	0,00
100.	Usia 100 Tahun	0	0,00	1	0,00	1	0,00
101.	Usia 101 Tahun	1	0,00	0	0,00	1	0,00
102.	Usia 102 Tahun	0	0,00	2	0,00	2	0,00
<b>JUMLAH</b>		<b>48.447</b>	<b>50,23</b>	<b>48.000</b>	<b>49,77</b>	<b>96.447</b>	<b>100</b>

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Kemendagri Semester II 2022, diolah

### DISTRIBUSI PENDUDUK MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN YANG DITAMATKAN DAN JENIS KELAMIN KOTA SIBOLGA TAHUN 2022

Berdasarkan tingkat pendidikannya, komposisi penduduk Kota Sibolga hampir merata pada pendidikan dasar dan menengah (SD/MI sederajat, SLTP/MTs sederajat, SLTAMA sederajat) dengan persentase terbesar adalah tamatan SLTA / sederajat sebesar 27,53 %. Sedangkan penduduk yang menamatkan pendidikan pada jenjang perguruan tinggi jumlahnya hanya sekitar 7,58 %, yang terdiri dari tamatan Diploma I/II/III sebesar 2,27 % dan tamatan D IV, S1, S2, dan S3 sebesar 5,31 %. Berikut ini tabel penduduk Kota Sibolga dirinci berdasar tingkat pendidikan formal.

**TABEL 6**  
Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin Kota Sibolga Tahun 2022

Jenjang Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	L+P	Persentase (%)
1	2	3	4	
Tidak/Belum Sekolah	12.347	11.512	23.859	24,74
Belum tamat SD/Sederajat	5.631	5.336	10.967	11,37
Tamat SD/Sederajat	6.700	6.756	13.456	13,95





Jenjang Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	L+P	Persentase (%)
1	2	3	4	
SLTP/Sederajat	7.435	6.864	14.299	14,83
SLTA/Sederajat	13.320	13.235	26.555	27,53
Diploma I/II	87	227	314	0,33
Akademi/Diploma III/Sarjana Muda	611	1.261	1.872	1,94
Diploma IV/Strata 1	2.203	2.745	4.948	5,13
Strata 2	109	64	173	0,18
Strata 3	4	0	4	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>48.447</b>	<b>48.000</b>	<b>96.447</b>	<b>100</b>

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Kemendagri Semester II 2022, diolah

#### Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan dan Jenis Kelamin Kota Sibolga Tahun 2022

Berdasarkan mata pencahariannya, sebagian besar penduduk Kota Sibolga bekerja sebagai Nelayan/Perikanan (5,04%), mengurus rumah tangga (19,37%), wiraswasta (8,79%) dan PNS/TNI/POLRI (3,00%), Buruh Harian Lepas (5,21%), Buruh Nelayan/Perikanan (1,43%), Jumlah penduduk menurut mata pencahariannya secara lengkap dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

**TABEL 7**  
**Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan dan Jenis Kelamin Kota Sibolga Tahun 2022**

No.	Jenis Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan	L+P	%
1	2	3	4	5	6
1	Belum/Tidak Bekerja	14.018	12.808	26.826	27,81
2	Mengurus Rumah Tangga	1	18.679	18.680	19,37
3	Pelajar/Mahasiswa	11.016	10.080	21.096	21,87
4	Pensiunan	392	471	863	0,89
5	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	1.016	1.370	2.386	2,47
6	Tentara Nasional Indonesia	321	0	321	0,33
7	Kepolisian RI (Polri)	181	9	190	0,20
8	Perdagangan	0	0	0	0,00
9	Petani/Pekebun	139	93	232	0,24
10	Peternak	2	0	2	0,00
11	Nelayan/Perikanan	4.847	14	4.861	5,04
12	Industri	0	0	0	0,00



No.	Jenis Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan	L+P	%
1	2	3	4	5	6
13	Konstruksi	4	0	4	0,00
14	Transportasi	152	0	152	0,16
15	Karyawan Swasta	1.528	699	2.227	2,31
16	Karyawan BUMN	147	63	210	0,22
17	Karyawan BUMD	53	18	71	0,07
18	Karyawan Honorer	366	334	700	0,73
19	Buruh Harian Lepas	4.562	465	5.027	5,21
20	Buruh Tani/Perkebunan	41	18	59	0,06
21	Buruh Nelayan/Perikanan	1.343	33	1.376	1,43
22	Buruh Peternakan	0	3	3	0,00
23	Pembantu Rumah Tangga	0	41	41	0,04
24	Tukang Cukur	17	0	17	0,02
25	Tukang Listrik	5	0	5	0,01
26	Tukang Batu	11	1	12	0,01
27	Tukang Kayu	23	0	23	0,02
28	Tukang Sol Sepatu	5	0	5	0,01
29	Tukang Las/Pandai Besi	15	0	15	0,02
30	Tukang Jahit	31	31	62	0,06
31	Tukang Gigi	0	0	0	0,00
32	Penata Rias	0	2	2	0,00
33	Penata Busana	0	0	0	0,00
34	Penata Rambut	3	11	14	0,01
35	Mekanik	47	0	47	0,05
36	Seniman	4	0	4	0,00
37	Tabib	0	0	0	0,00
38	Paraji	0	0	0	0,00
39	Perancang Busana	0	0	0	0,00
40	Penterjemah	0	0	0	0,00
41	Imam Masjid	2	0	2	0,00
42	Pendeta	44	6	50	0,05
43	Pastor	57	0	57	0,06
44	Wartawan	13	0	13	0,01
45	Ustadz/Mubaligh	5	0	5	0,01
46	Juru Masak	0	0	0	0,00
47	Promotor Acara	1	0	1	0,00
48	Anggota DPR RI	0	0	0	0,00
49	Anggota DPD RI	0	0	0	0,00
50	Anggota BPK	0	0	0	0,00
51	Presiden	0	0	0	0,00
52	Wakil Presiden	0	0	0	0,00
53	Anggota Mahkamah Konstitusi	0	0	0	0,00
54	Anggota Kabinet Kementrian	0	0	0	0,00
55	Duta Besar	0	0	0	0,00
56	Gubernur	0	0	0	0,00
57	Wakil Gubernur	0	0	0	0,00



No.	Jenis Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan	L+P	%
1	2	3	4	5	6
58	Bupati	0	0	0	0,00
59	Wakil Bupati	0	0	0	0,00
60	Walikota	0	0	0	0,00
61	Wakil Walikota	1	0	1	0,00
62	Anggota DPRD Prop.	0	0	0	0,00
63	Anggota DPRD Kab./Kota	9	3	12	0,01
64	Dosen	15	21	36	0,04
65	Guru	146	431	577	0,60
66	Pilot	0	0	0	0,00
67	Pengacara	4	1	5	0,01
68	Notaris	0	5	5	0,01
69	Arsitek	3	0	3	0,00
70	Akuntan	0	0	0	0,00
71	Konsultan	2	1	3	0,00
72	Dokter	20	40	60	0,06
73	Bidan	0	102	102	0,11
74	Perawat	22	53	75	0,08
75	Apoteker	0	1	1	0,00
76	Psikiater/Psikolog	0	0	0	0,00
77	Penyiar Televisi	0	0	0	0,00
78	Penyiar Radio	0	1	1	0,00
79	Pelaut	42	0	42	0,04
80	Peneliti	0	0	0	0,00
81	Sopir	325	0	325	0,34
82	Pialang	0	0	0	0,00
83	Paranormal	0	0	0	0,00
84	Pedagang	483	517	1.000	1,04
85	Perangkat Desa	4	0	4	0,00
86	Kepala Desa	0	0	0	0,00
87	Biarawan/Biarawati	1	44	45	0,05
88	Wiraswasta	6.952	1.527	8.479	8,79
89	Anggota Lemb. Tinggi Lainnya	6	3	9	0,01
90	Artis	0	0	0	0,00
91	Atlit	0	0	0	0,00
92	Cheff	0	0	0	0,00
93	Manajer	0	0	0	0,00
94	Tenaga Tata Usaha	0	0	0	0,00
95	Operator	0	0	0	0,00
96	Pekerja Pengolahan Kerajinan	0	0	0	0,00
97	Teknisi	0	0	0	0,00
98	Asisten Ahli	0	0	0	0,00
99	Pekerjaan Lainnya	0	1	1	0,00
<b>JUMLAH</b>		<b>48.447</b>	<b>48.000</b>	<b>96.447</b>	

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Kemendagri Semester II 2022, diolah



#### 1.1.4 JUMLAH KECAMATAN DAN KELURAHAN KOTA SIBOLGA

Secara administrasi Kota Sibolga memiliki luas wilayah 10,77 Km<sup>2</sup>, dan terbagi atas 4 Kecamatan dan 17 Kelurahan, secara rinci luas masing-masing kecamatan, seperti yang tertera dalam tabel di bawah ini:

**TABEL 8**  
**Pembagian Wilayah Administrasi Kota Sibolga**

No.	Kecamatan/ Kelurahan	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	Persentase (%)
I	<b>Sibolga Utara</b>	<b>3,33</b>	<b>30,92</b>
	1. Sibolga Ilir	0,78	
	2. Angin Nauli	0,87	
	3. Huta Tonga-tonga	0,40	
	4. Huta Barangan	0,57	
	5. Simare-mare	0,71	
II	<b>Sibolga Kota</b>	<b>2,73</b>	<b>25,37</b>
	1. Kota Baringin	0,29	
	2. Pasar Baru	0,46	
	3. Pasar Belakang	1,08	
	4. Pancuran Gerobak	0,90	
III	<b>Sibolga Selatan</b>	<b>3,14</b>	<b>29,16</b>
	1. Aek Habil	0,61	
	2. Aek Manis	1,24	
	3. Aek Parombunan	0,90	
	4. Aek Muara Pinang	0,39	
IV	<b>Sibolga Sambas</b>	<b>1,57</b>	<b>14,58</b>
	1. Pancuran Pinang	0,18	
	2. Pancuran Kerambil	0,33	
	3. Pancuran Dewa	0,51	
	4. Pancuran Bambu	0,54	
<b>KOTA SIBOLGA</b>		<b>10,77</b>	<b>100</b>

Sumber : SIPD Kota Sibolga tahun 2017

#### 1.1.5 JUMLAH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH DAN PEGAWAI PEMERINTAH

Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, dengan mempertimbangkan efisiensi, efektivitas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, potensi daerah dan fleksibilitas, Pemerintah Kota Sibolga telah menindaklanjuti kebijakan penataan kelembagaan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, maka sebutan Kotamadya Daerah Tingkat II Sibolga berubah menjadi Kota Sibolga, Penataan kelembagaan di Kota Sibolga diatur



Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Sibolga yang terdiri dari 30 Perangkat Daerah, yaitu : Jumlah PNS Pemerintah Kota Sibolga yang menerima pelayanan Kepegawaian se Kota Sibolga berdasarkan data yang terakhir sampai dengan bulan Desember Tahun 2022 sebanyak **2.201** orang, terdiri dari PNS Non Guru dan Kesehatan Sebanyak 1.207 orang, PNS Guru sebanyak 539 orang dan PNS Tenaga Kesehatan Sebanyak 455 orang dengan perincian sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah, yang terdiri dari 6 Bagian
2. Sekretariat DPRD, yang terdiri dari 3 Bagian
3. Inspektorat
4. Dinas : 16
5. Badan : 3
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7. Rumah Sakit Umum Daerah
8. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
9. Kecamatan : 4

- **DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jumlah PNS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sibolga  
 ➤ Pegawai Negeri Sipil (PNS) : 50 orang

- **DINAS KESEHATAN**

Jumlah PNS Dinas Kesehatan Kota Sibolga  
 ➤ Pegawai Negeri Sipil (PNS) : 40 orang

- **RSU Dr F L TOBING**

Jumlah PNS RSU Dr. F.L.Tobing Kota Sibolga  
 ➤ Pegawai Negeri Sipil (PNS) : 46 orang

- **DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG**

Jumlah PNS Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sibolga yang terdiri dari :  
 ➤ Pegawai Negeri Sipil (PNS) : 51 orang

- **DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP**

Jumlah PNS Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Sibolga,  
 ➤ Pegawai Negeri Sipil (PNS) Struktural : 38 orang

- **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Jumlah PNS Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sibolga  
 ➤ Pegawai Negeri Sipil (PNS) : 19 orang

- **KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jumlah Pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga terdiri dari :  
 ➤ Pegawai Negeri Sipil (PNS) : 30 orang



- **SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
Jumlah Pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sibolga terdiri dari :
  - Pegawai Negeri Sipil (PNS) : 21 orang
- **KESATUAN BANGSA & POLITIK**  
Jumlah Pegawai pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sibolga
  - Pegawai Negeri Sipil (PNS) : 16 orang
- **DINAS SOSIAL**  
Jumlah Pegawai pada Dinas Sosial Kota Sibolga
  - 1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) : 24 orang
- **DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
Jumlah Pegawai pada Dinas PMK, PP dan PA terdiri dari :
  - Pegawai Negeri Sipil (PNS) : 19 orang
- **DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**  
Jumlah Pegawai Dinas PP dan KB Kota Sibolga
  - Pegawai Negeri Sipil Daerah : 27 Orang
- **DINAS PERHUBUNGAN**  
Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Kota Sibolga adalah terdiri :
  - Pegawai Negeri Sipil (PNS) : 33 Orang
- **DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari :
  - Pegawai Negeri Sipil (PNS) : 23 Orang
- **DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN KETENAGAKERJAAN**  
Jumlah Pegawai Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan terdiri :
  - Pegawai Negeri Sipil (PNS) : 21 orang
- **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**  
Jumlah Pegawai DPMPPTSP Kota Sibolga
  - Pegawai Negeri Sipil (PNS) : 23 orang
- **DINAS PERPUSTAKAAN**  
Jumlah Pegawai Dinas Perpustakaan Kota Sibolga
  - Pegawai Negeri Sipil (PNS) : 21 orang
- **DINAS PERIKANAN KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN**  
Jumlah Pegawai DPKP dan P Kota Sibolga
  - Pegawai Negeri Sipil (PNS) : 36 orang
- **DINAS PARIWISATA PEMUDA & OLAHRAGA**  
Jumlah Pegawai Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Sibolga
  - Pegawai Negeri Sipil (PNS) : 26 orang
- **DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**  
Jumlah Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sibolga
  - Pegawai Negeri Sipil (PNS) : 47 orang
- **SEKRETARIAT DAERAH**  
Jumlah Pegawai di Sekretariat Daerah Kota Sibolga
  - Pegawai Negeri Sipil (PNS) : 85 orang



- **SEKRETARIAT DPRD KOTA SIBOLGA**  
Jumlah Pegawai di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sibolga
  - Pegawai Negeri Sipil (PNS) : 40 orang
- **KANTOR KECAMATAN SIBOLGA UTARA**  
Jumlah Pegawai di Kantor Kecamatan Sibolga Utara Kota Sibolga
  - Pegawai Negeri Sipil (PNS) : 47 orang
- **KANTOR KECAMATAN SIBOLGA KOTA**  
Jumlah Pegawai di Kantor Kecamatan Sibolga Kota Kota Sibolga
  - Pegawai Negeri Sipil (PNS) : 35 orang
- **KANTOR KECAMATAN SIBOLGA SELATAN**  
Jumlah Pegawai di Kantor Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga
  - Pegawai Negeri Sipil (PNS) : 35 orang
- **KECAMATAN SIBOLGA SAMBAS**  
Jumlah Pegawai di Kantor Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga terdiri dari :
  - Pegawai Negeri Sipil (PNS) Struktural : 41 Orang
- **INSPEKTORAT**  
Jumlah Pegawai di Inspektorat Kota Sibolga
  - Pegawai Negeri Sipil (PNS) : 49 orang
- **BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
Jumlah Pegawai BAPPEDA Kota Sibolga berjumlah
  - Pegawai Negeri Sipil (PNS) : 33 orang
- **BADAN PENGELOLA KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**  
Jumlah Pegawai pada BPKPAD Kota Sibolga terdiri dari :
  - Pegawai Negeri Sipil (PNS) : 53 orang
- **BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**  
Jumlah Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Sibolga terdiri dari :
  - Pegawai Negeri Sipil (PNS) : 37 orang

#### 1.1.6 REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Sibolga berdasarkan data yang terakhir Tahun 2022 Kota Sibolga, dari Pendapatan sebesar Rp. 623.595.882.657,63 yaitu 94,36 % dari Target Rp. 660.855.544.276,48 dan Belanja sebesar Rp. 709.941.348.672,84 yaitu 86,17 % dari Target Rp. 823.827.845.243,00 dengan perincian yang terdapat pada Tabel :



**TABEL 9**  
**Realisasi APBD TA. 2022 dan Realisasi TA 2021**

NO	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
1	<b>PENDAPATAN</b>	<b>660.855.544.276,48</b>	<b>623.595.882.657,63</b>	<b>94,36%</b>	<b>589.661.218.589,27</b>
2	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>				
3	Pendapatan Pajak Daerah	11.425.701.723,40	12.169.731.508,00	106,51%	11.398.529.221,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah	13.776.680.196,00	4.683.973.666,80	34,00%	4.246.987.577,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.955.236.945,30	11.046.702.945,44	100,83%	9.255.412.429,00
6	Lain-lain PAD Yang Sah	82.688.360.703,78	54.497.742.914,07	65,91%	51.362.857.906,27
7	<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>118.845.979.568,48</b>	<b>82.398.151.034,31</b>	<b>69,33%</b>	<b>76.263.787.133,27</b>
8					
9	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>				
10	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan</b>				
11	Dana Bagi Hasil Pajak	19.673.308.009,00	27.763.592.271,00	141,12%	24.351.430.125,00
12	Dana Alokasi Umum	384.535.437.000,00	381.093.828.683,00	99,10%	384.535.437.000,00
13	Dana Alokasi Khusus - Fisik	32.933.404.410,00	31.710.074.701,00	96,29%	33.815.853.302,00
14	Dana Alokasi Khusus – Non Fisik	52.969.336.000,00	50.284.037.649,00	94,93%	27.346.511.619,00
15	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan</b>	<b>490.111.485.419,00</b>	<b>490.851.533.304,00</b>	<b>100,15%</b>	<b>470.049.232.046,00</b>
16					
17	<b>Pendapatan Tranfer Pemerintah Pusat - Lainnya</b>				
18	Dana Insentif Daerah	18.430.524.000,00	18.430.524.000,00	100,00%	9.173.013.000,00
19	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya</b>	<b>18.430.524.000,00</b>	<b>18.430.524.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>9.173.013.000,00</b>
20					
21	<b>Pendapatan Transfer antar Pemerintah Daerah</b>				
22	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	23.078.510.710,00	24.260.121.170,00	105,12%	19.418.510.710,00
23	Bantuan Keuangan	3.000.000.000,00	2.849.978.842,00	95,00%	0,00
24	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>	<b>26.078.510.710,00</b>	<b>27.110.100.012,00</b>	<b>103,96%</b>	<b>19.418.510.710,00</b>
25	<b>Total Pendapatan Transfer</b>	<b>534.620.520.129,00</b>	<b>536.392.157.316,00</b>	<b>100,33%</b>	<b>498.640.755.756,00</b>
26					
27	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>				
28	Pendapatan Hibah	500.000,00	67.651.909,32	13530,38%	0,00
29	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	7.388.544.579,00	4.737.922.398,00	64,13%	14.756.675.700,00
30	<b>Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>7.389.044.579,00</b>	<b>4.805.574.307,32</b>	<b>65,04%</b>	<b>14.756.675.700,00</b>
31	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>660.855.544.276,48</b>	<b>623.595.882.657,63</b>	<b>94,36%</b>	<b>589.661.218.589,27</b>
32					
33	<b>BELANJA</b>	<b>823.827.845.243,00</b>	<b>709.941.348.672,84</b>	<b>86,18%</b>	<b>581.319.532.001,39</b>
34	<b>BELANJA OPERASI</b>				
35	Belanja Pegawai	289.568.023.106,00	257.445.444.071,00	88,91%	246.602.398.284,00
36	Belanja Barang dan Jasa	319.909.242.574,00	275.344.778.304,84	86,07%	221.685.398.219,13
37	Belanja Bunga	1.482.178.588,00	995.246.214,00	67,15%	0,00
38	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00%	0,00
39	Belanja Hibah	15.165.022.850,00	14.205.721.912,00	93,67%	5.787.542.420,00





NO	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
40	Belanja Bantuan Sosial	8.558.835.222,00	7.590.137.180,00	88,68%	7.146.308.000,00
41	<b>Jumlah Belanja Operasi</b>	<b>634.683.302.340,00</b>	<b>555.581.327.681,84</b>	<b>87,54%</b>	<b>481.221.646.923,13</b>
42					
43	<b>BELANJA MODAL</b>				
44	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00%	0,00
45	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.751.171.122,00	17.755.536.383,00	85,56%	29.476.702.047,00
46	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	64.972.612.691,00	45.911.783.872,00	70,66%	25.014.924.501,26
47	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	85.604.127.189,00	73.469.155.847,00	85,82%	24.660.329.503,00
48	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.818.469.501,00	4.548.129.750,00	94,39%	7.952.813.327,00
49	<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>176.146.380.503,00</b>	<b>141.684.605.852,00</b>	<b>80,44%</b>	<b>87.104.769.378,26</b>
50					
51	<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>				
52	Belanja Tak Terduga	12.923.162.400,00	12.600.415.139,00	97,50%	12.993.115.700,00
53	<b>Jumlah Belanja Tak Terduga</b>	<b>12.923.162.400,00</b>	<b>12.600.415.139,00</b>	<b>97,50%</b>	<b>12.993.115.700,00</b>
54					
55	<b>BELANJA TRANSFER</b>				
56	Belanja Transfer	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00%	0,00
57	<b>Jumlah Belanja Transfer</b>	<b>75.000.000,00</b>	<b>75.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
58	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>823.827.845.243,00</b>	<b>709.941.348.672,84</b>	<b>86,18%</b>	<b>581.319.532.001,39</b>
59					
60					
61	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(162.972.300.966,52 )</b>	<b>(86.345.466.015,21)</b>	<b>52,98%</b>	<b>8.341.686.587,88</b>
62	<b>PEMBIAYAAN</b>				
63	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>				
64	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	74.654.080.966,52	92.628.827.506,39	124,08%	87.367.317.513,51
65	Penerimaan Pinjaman Daerah	88.318.220.000,00	83.185.750.711,00	94,19%	0,00
66	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>162.972.300.966,52</b>	<b>175.814.578.217,39</b>	<b>107,88%</b>	<b>87.367.317.513,51</b>
67	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>				
68	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00%	3.080.176.595,00
69	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00%	0,00
70	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>3.080.176.595,00</b>
71	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>162.972.300.966,52</b>	<b>175.814.578.217,39</b>	<b>107,88%</b>	<b>84.287.140.918,51</b>
72					
73	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA)</b>	<b>0,00</b>	<b>89.469.112.202,18</b>	<b>100,00%</b>	<b>92.628.827.506,39</b>



## 1.2 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu yang meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Sebagai perwujudan amanat tersebut, Pemerintah Kota Sibolga telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Sibolga 2005-2025 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010. Salah satu substansi strategis dalam RPJPD tersebut adalah menetapkan Visi Daerah "Kota Jasa yang Nyaman, Aman, Unggul, Lestari dan Indah (NAULI)" di Kawasan Pantai Barat Sumatera Utara", yang terdiri dari 6 (enam) Misi yang di dalamnya memuat mengenai indikator dan target capaian. Sebagaimana diketahui pula pada setiap tahap 5 (lima) tahunan RPJPD tersebut kemudian diuraikan menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yaitu: Tahap I (2006-2010), Tahap II (2011-2015), Tahap III (2016-2020), dan Tahap IV (2021-2025).

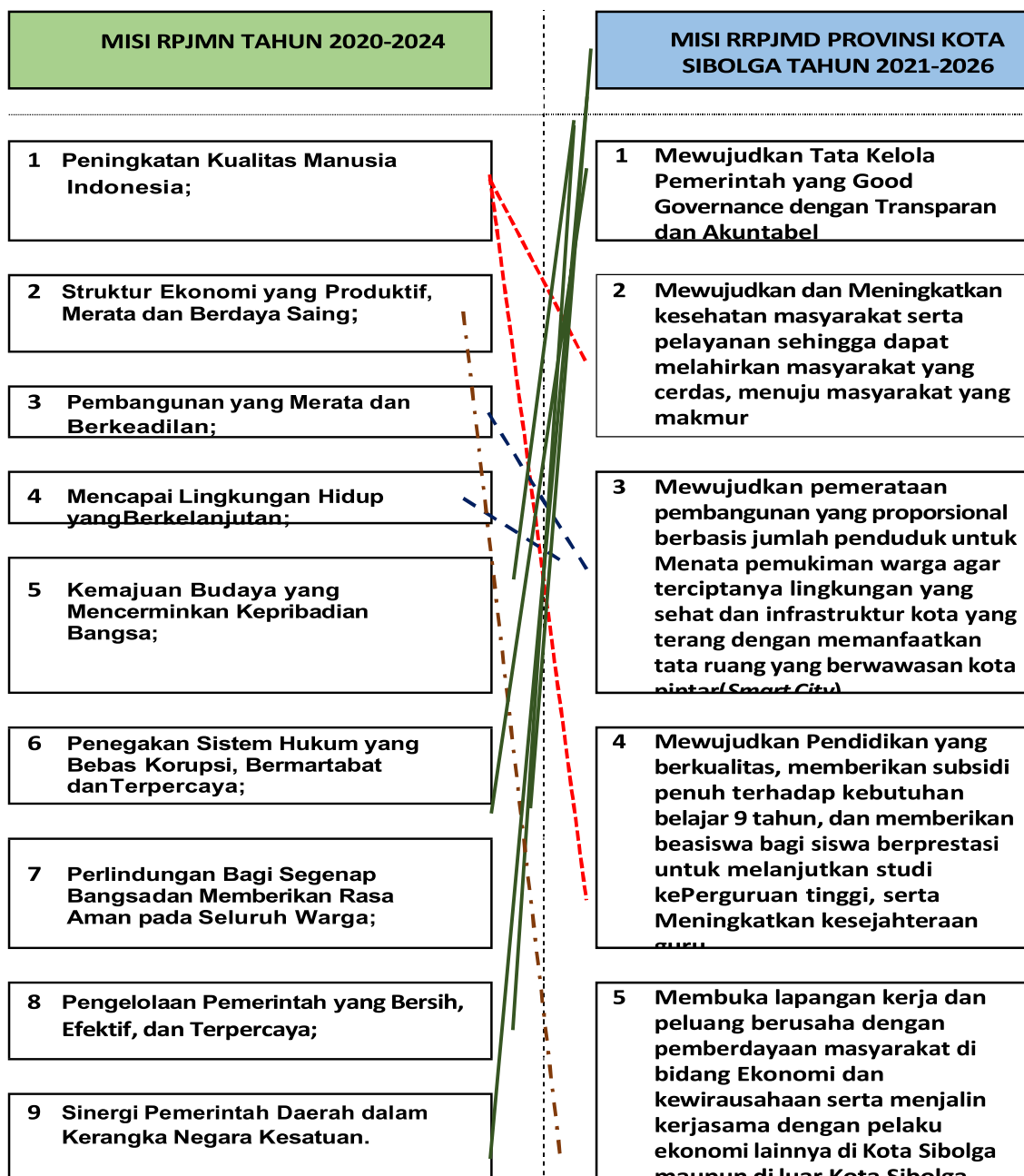
### - **Keselarasan RPJMN Tahun 2020-2024 dengan RPJMD Kota Sibolga Tahun 2021-2026**

Visi Misi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025. RPJMN 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Merata dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya;



7. Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintah yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.



Gambar  
Keselarasan RPJMN Tahun 2020-2024 dengan  
RPJMD Kota Sibolga Tahun 2021-2026.

Sumber: Data diolah



- **Keselarasan RPJMD Kota Sibolga dengan RPJMD Provinsi Sumatera Utara**

RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 sedang dalam proses penyusunan Perubahan RPJMD, namun demikian dari gambaran awal visi misi Provinsi Sumatera Utara, dapat dihubungkan dalam RPJMD Kota Sibolga Tahun 2021-2026.

**Visi Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Utara yaitu:**

**“Sumatera Utara Yang Maju, Aman dan Bermartabat”**

Visi tersebut dijabarkan ke dalam beberapa misi yaitu:

- 1 Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Kehidupan, karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, pendidikan yang baik, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau.
- 2 Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis.
- 3 Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri.
- 4 Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi, dan penyeludupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan Dunia.
- 5 Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Lingkungan karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan, dan beradab.

Korelasi antara Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Utara dengan Gambaran Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Sibolga dapat digambarkan sebagaimana gambar berikut.



MISI RRPJMD PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN

MISI RRPJMD PROVINSI KOTA SIBOLGA TAHUN 2021-

1 Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, pendidikan yang baik, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau.

2 Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis.

3 Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri.

4 Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi, dan penyeludupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan Dunia.

5 Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Lingkungan karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berprestasi, dan beradab.

1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Good Governance dengan Transparan dan Akuntabel

2 Mewujudkan dan Meningkatkan kesehatan masyarakat serta pelayanan sehingga dapat melahirkan masyarakat yang cerdas, menuju masyarakat yang makmur

3 Mewujudkan pemerataan pembangunan yang proporsional berbasis jumlah penduduk untuk Menata pemukiman warga agar terciptanya lingkungan yang sehat dan infrastruktur kota yang terang dengan memanfaatkan tata ruang yang berwawasan kota pintar (Smart City)

4 Mewujudkan Pendidikan yang berkualitas, memberikan subsidi penuh terhadap kebutuhan belajar 9 tahun, dan memberikan beasiswa bagi siswa berprestasi untuk melanjutkan studi ke Perguruan tinggi, serta Meningkatkan kesejahteraan guru

5 Membuka lapangan kerja dan peluang berusaha dengan pemberdayaan masyarakat di bidang Ekonomi dan kewirausahaan serta menjalin kerjasama dengan pelaku ekonomi lainnya di Kota Sibolga maupun di luar Kota Sibolga

Gambar

Keselelarasan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 dengan RPJMD Kota Sibolga Tahun 2021-2026

Sumber: Data diolah



### 1.2.1 PERMASALAHAN STRATEGIS PEMERINTAH DAERAH

Berdasarkan perkembangan pelaksanaan pembangunan yang sudah berjalan sampai dengan saat ini, dengan melihat kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihadapi dalam pelaksanaan RPJMD Kota Sibolga Tahun 2016-2021 dapat digambarkan isu-isu strategis yang memerlukan perhatian dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Masih terbatasnya jaminan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat
- b. Masih perlunya penanggulangan kemiskinan
- c. Masih terbatasnya infrastruktur dasar
- d. Kurangnya sarana pelayanan publik yang aman dan nyaman bagi wanita, anak- anak, lansia, dan difabel
- e. Belum optimalnya penanganan banjir
- f. Belum optimalnya kinerja pemerintahan dan kerjasama dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan keamanan
- g. Masih perlunya pemberdayaan masyarakat kelurahan
- h. Masih perlu ditingkatkannya daya saing perekonomian potensi pariwisata
- i. Belum mantapnya ketahanan dan kemandirian pangan
- j. Belum efektifnya pengendalian pencemaran lingkungan dan masih terbatasnya luas ruang terbuka hijau

### Isu Strategis

Berdasarkan permasalahan pembangunan yang dihadapi, maka isu strategis adalah sebagai berikut :

1. Kualitas pembangunan manusia
2. Pembangunan infrastruktur e-government
3. Reformasi tata kelola birokrasi dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah yang berkompetensi
4. Pengembangan dan penguatan ekonomi yang berbasis sumberdaya unggulan daerah
5. Pengembangan dan penguatan investasi
6. Penanggulangan kemiskinan, permasalahan sosial dan pengangguran



**A. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar:**

**1. Pendidikan, menghadapi permasalahan:**

- a. Masih rendahnya APK PAUD;
- b. Masih rendahnya persentase pendidik PAUD memiliki Kualifikasi S1 dan Sertifikat Pendidik;
- c. Masih rendahnya satuan pendidikan PAUD yang terakreditasi;
- d. Makin menurunnya APM SD dan Masih rendahnya APM SMP;
- e. Masih rendahnya persentase pendidik SD dan SMP memiliki sertifikasi Pendidik;
- f. Rapor Mutu Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Jenjang SD dan SMP di Kota Sibolga masih rendah karena belum sesuai Standar Nasional;
- g. Rapor Mutu Standar Sarana dan Prasarana pada Jenjang SD dan SMP di Kota Sibolga masih rendah karena belum sesuai Standar Nasional;
- h. Perlu dukungan terhadap Peraturan Wali Kota Sibolga Nomor 06 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini Satu Tahun Pra Sekolah Dasar di Kota Sibolga.

**2. Kesehatan, menghadapi permasalahan:**

- a. Derajat kesehatan masyarakat Kota Sibolga dapat dikatakan dalam kondisi baik, hal ini dapat dilihat dari angka harapan hidup yang telah melebihi dari target namun masih perlu ditingkatkan lagi. (menurut *United Nations Development Programme* atau Badan Program Pembangunan PBB angka standar = 85)
- b. Masih terdapatnya angka kematian bayi;
- c. Masih terdapatnya angka kematian balita;
- d. Masih terdapatnya kematian ibu;
- e. Masyarakat Kota Sibolga pada dasarnya telah terlindungi kesehatannya dengan adanya Jaminan Kesehatan Masyarakat namun capaian yang diperoleh pada tahun 2020 masih ada penduduk Kota Sibolga yang belum bertanggung karena data yang tersaji dari sistem



JKN tidak dapat dipisahkan Penduduk Sibolga dan Luar Kota Sibolga.

f. Penurunan angka *Stunting*.

**3. Rumah Sakit Umum, menghadapi permasalahan:**

- a. Pemenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Sarana dan Prasarana Kesehatan yang belum maksimal berdampak pada tingkat kepuasan masyarakat;
- b. Prosedur tetap tentang mutu dan standar pelayanan belum dilaksanakan secara maksimal di unit pelayanan tertentu.

**4. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, menghadapi permasalahan:**

- a. Keterbatasan kemampuan tenaga teknis yang menangani proyek di lapangan sehingga berpengaruh terhadap penanganan pekerjaan fisik di lapangan.
- b. Belum terintegrasinya Mekanisme Perencanaan dan Penganggaran Daerah dengan penerapan SPM, karena penerapan SPM belum sepenuhnya menjadi dasar pertimbangan dalam penetapan penganggaran oleh TAPD.
- c. Belum sinerginya pembangunan SPAM regional baik kewenangan pusat dan kabupaten/kota dikarenakan belum adanya Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) serta *grand design* Air Minum Kota Sibolga yang terbaru berdasarkan Permen PUPR 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum, sehingga masih sulit untuk Merumuskan arahan rencana perbaikan modifikasi /penggantian/ penambahan instalasi produksi, jaringan perpipaan, dan pengembangan untuk perencanaan strategis di bidang air minum yang terintegrasi dan berkesinambungan.
- d. Belum adanya Update data dan Pemeliharaan Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Sibolga, mengingat SSK sangat diperlukan untuk mempercepat implementasi terkait dengan pencapaian target *Universal Access*, dan juga sebagai nilai strategis bagi kota Sibolga dalam membenahi kondisi sarana sanitasi kota, serta dapat menjadi bahan masukan untuk RPJMD Kota Sibolga Tahun 2021-2026.
- e. Semakin tingginya kondisi jalan yang rusak ringan, yang perlu





penanganan untuk rehabilitasi/pemeliharaan jalan.

**5. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, menghadapi permasalahan:**

- a. Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Kota Sibolga masih banyak yaitu 4.311 unit rumah (26,74%);
- b. Urusan Kawasan Permukiman diselenggarakan oleh Dinas Dinas PUPR Kota Sibolga sehingga Dinas PKPLH Kota Sibolga tidak dapat menyajikan data kawasan permukiman secara faktual dan akuntabel.

**6. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, menghadapi permasalahan:**

Urusan ini ditangani oleh Satpol PP dan Pemadam Kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kesbang. Adapun permasalahan adalah:

- a. Penegakan Peraturan Daerah belum optimal karena masih ditemukan pelanggaran
- b. SDM Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS untuk mendukung proses hukum dalam Penegakan Perda dan Perkada sangat minim yaitu hanya 1 orang sehingga ketika akan melakukan penegakkan Peraturan daerah dan Peraturan Walikota mengalami kesulitan untuk menaikannya ke proses yustisi karena memerlukan minimal 2 orang penyidik untuk melakukan proses pemberkasan untuk dinaikkan ke sidang pengadilan.
- c. Belum semua lingkungan memiliki poskamling
- d. Dari 19 Titik Hidran air, 2 yang dapat berfungsi. Untuk itu perlu melakukan perbaikan 17 Titik yang sudah ada dan juga melakukan pembangunan Titik Hidran baru di Kecamatan Sambas dan Kelurahan Aek Muara Pinang, Menambah titik hidran di Sibolga Ilir dan Daerah Padat Penduduk Lainnya sehingga pelayanan Pemadaman Kebakaran dapat lebih optimal dan dapat menekan kerugian materi dan sosial yang akan ditimbulkan.
- e. Masih perlu dibangun 2 Pos Pemadam Kebakaran di Kecamatan Sibolga Utara dan Kecamatan Sibolga Selatan
- f. Wilayah Manajemen bencana Kebakaran (WMK) disertai dengan



kemampuan teknis petugas Damkar, Lahan untuk Tandon Air dan peningkatan sarana prasarana Pemadam Kebakaran sesuai dengan Permendagri Nomor 114 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Miniman Sub Urusan Kebakaran;

- g. Masih terdapat masyarakat yang bertempat tinggal di kawasan rawan bencana;
- h. Belum ada Kelurahan Tangguh Bencana yang dibentuk, ditindaklanjuti dengan kegiatan pengembangan Kelurahan Tangguh Bencana
- i. Mitigasi bencana belum optimal.

#### **7. Sosial, menghadapi permasalahan:**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bidang sosial ada beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Sosial baik secara eksternal maupun internal. Permasalahan yang dihadapi yaitu:

- a. Belum optimalnya pemberian bantuan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) karena keterbatasan anggaran sehingga tingkat kemiskinan masih rentan;
- b. Belum optimalnya pelaksanaan SPM bidang sosial sesuai dengan PP Nomor 2 tahun 2018 dan Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 serta Permensos Nomor 9 Tahun 2018 karena dana yang dianggarkan belum fokus pada pencapaian SPM;
- c. Disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gelandangan dan pengemis di luar panti belum tertangani karena keterbatasan anggaran;
- d. Bencana sering terjadi di daerah yang sama karena warga yang sering terkena dampak bencana masih menempati daerah yang rawan bencana sementara daerah tersebut tidak layak dijadikan daerah permukiman (berada di lereng perbukitan).

### **B. Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**

#### **1. Tenaga kerja, menghadapi permasalahan:**

- a. Belum adanya jabatan fungsional tertentu bidang hubungan industrial, pengantar kerja serta pengawas tenaga kerja;
- b. Kurangnya lowongan kerja serta kurangnya kemampuan



menciptakan kesempatan kerja;

- c. Tidak adanya kewenangan pemerintah kota tentang wajib lapor perusahaan;
- d. Belum adanya Balai Latihan Kerja (BLK) serta instruktur yang bersertifikat di Kota Sibolga;
- e. Belum optimalnya penyampaian informasi tentang Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada masyarakat Kota Sibolga dimana capaian terakhir sebesar 55,74%.

**2. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, menghadapi permasalahan:**

- a. belum optimalnya pelaksanaan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hal ini dapat dilihat masih ditemukannya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- b. Masih belum optimalnya perwujudan Kota layak anak untuk memenuhi kategori utama. Memang Kota Sibolga sudah mendapatkan penghargaan Kota Layak Anak namun perlu ditingkatkan untuk kategori utama.

**3. Pangan, menghadapi permasalahan:**

- a. Ketergantungan terhadap pasokan bahan pangan dari luar daerah sangat berpotensi menimbulkan kerawanan pangan, khususnya jika terjadi permasalahan atau kendala di dalam pemasokan komoditas pangan tersebut;
- b. Harga yang fluktuatif khususnya terhadap bahan pangan tertentu antara lain cabe merah, bawang merah dan ikan;
- c. Pola konsumsi masyarakat yang belum menerapkan pola makan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) yang ditandai oleh nilai Pola Pangan Harapan (PPH) yang masih dibawah nilai ideal;
- d. Masih adanya kondisi rawan pangan kronis yang disebabkan oleh ketidakmampuan rumah tangga untuk memenuhi standar minimum kebutuhan pangan anggotanya pada periode yang lama karena keterbatasan kepemilikan lahan, aset produktif dan kekurangan pendapatan. Hal ini ditandai dengan masih adanya kasus gizi buruk dan kurang gizi balitadi Kota Sibolga;
- e. Adanya potensi rawan pangan transien yang bersifat mendadak/sementara yang disebabkan oleh perbuatan manusia maupun alam seperti kebakaran, banjir, longsor, dan lain-lain;



- f. Pemerintah Kota Sibolga belum dapat menyediakan sarana dan prasarana untuk cadangan pangan pemerintah daerah berupa gudang penyimpanan cadangan pangan.

**4. Pertanian, menghadapi permasalahan:**

Mengacu pada RPJMN 2020-2024 sebagaimana juga telah dikaji oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri yang disertai terbitnya Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 593/5093/SJ kepada Seluruh Gubernur dan Bupati/Walikota Pada 11 September 2020, dikatakan Pemerintah daerah untuk mendukung pemberdayaan terhadap subyek reforma agraria, yaitu:

- a. Inventarisasi subyek dan identifikasi potensi lokasi penerima Tanah Objek Reforma Agraria (TORA);
- b. Koordinasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat antar organisasi perangkat daerah
- c. Penyediaan infrastruktur pendukung sesuai dengan kebutuhan dan potensi wilayah termasuk penyediaan sarana, pengembangan modal dan pemasaran.
- d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat penerima sertifikat tanah

Adapun Tugas dan Fungsi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) adalah:

- a. Mengoordinasikan penyediaan TORA dalam rangka Penataan Aset;
- b. Memberikan usulan dan rekomendasi tanah-tanah untuk ditegaskan sebagai tanah negara sekaligus ditetapkan sebagai TORA kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri;
- c. Memfasilitasi pelaksanaan Penataan Akses di tingkat daerah;
- d. Mengoordinasikan integrasi pelaksanaan Penataan Aset dan Penataan Akses di tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
- e. Memperkuat kapasitas pelaksanaan Reforma Agraria di tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
- f. Menyampaikan laporan hasil Reforma Agraria Provinsi kepada Gugus tugas Reforma Agraria Pusat;
- g. Mengoordinasikan dan memfasilitasi penanganan Sengketa dan Konflik Agraria di tingkat provinsi dan kabupaten/kota; serta
- h. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Gugus Tugas



Reforma Agraria Kabupaten/Kota.

**5. Lingkungan hidup, menghadapi permasalahan:**

- a. Nilai indeks pencemaran air sungai di 3 sungai yang ada di Kota Sibolga menunjukkan tercemar ringan;
- b. Lahan Tempat Pembuangan Akhir Kota Sibolga akan melebihi kapasitas pada Tahun 2021;
- c. Dokumen RPPLH Kota Sibolga sampai saat ini belum ada.

**6. Aministrasi kependudukan dan pencatatan sipil, menghadapi permasalahan:**

- a. Tingkat Kepemilikan KTP-el pada masyarakat Kota Sibolga dapat dikatakan dalam kondisi baik, hal ini dapat dilihat dari persentase pelayanan penerbitan KTP-el yang setiap tahunnya mengalami peningkatan dan telah melebihi target;
- b. Masih terdapatnya tingkat kepemilikan pada akte kelahiran yang masih tergolong rendah dan tidak mencapai target pada tahun yang berkaitan;
- c. Masih adanya kepemilikan akta perkawinan yang tergolong rendah pada tahun berkaitan dan tidak mencapai target pada tahun tersebut;
- d. Masyarakat Kota Sibolga, khususnya anak usia 0-17 tahun telah memudahkan untuk memiliki akte kelahiran dengan adanya penerbitan Kartu Identitas Anak yang telah dilaksanakan.

**7. Pemberdayaan masyarakat dan desa/Kelurahan, menghadapi permasalahan:**

- a. perlu peningkatan pencapaian dasa wisma karena itu membantu kelancaran tugas-tugas pokok dan program PKK;
- b. Berkaitan dengan hal tersebut perlu adanya pemberdayaan terhadap dasa wisma yang ada ditengah tengah masyarakat, karena berdasarkan data persentasi peningkatan dasa wisma perlu ditingkatkan guna untuk memberdayakan potensi-potensi yang ada di masyarakat.



**8. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana, menghadapi permasalahan:**

- a. Masih adanya ditemui perkawinan usia muda
- b. Pelaksanaan KIE belum efektif ditandai dengan pengetahuan KB dan Alat kontrasepsi *unmet need* masih tinggi 8%
- c. Belum optimalnya Program Ketahanan Keluarga yang dilihat dari masih tingginya jumlah anak dalam keluarga; rendahnya pengetahuan masyarakat tentang isu kependudukan, Pelaksanaan KIE masih belum responsif gender, ditandai dari dominannya suami sebagai pengambil keputusan untuk ber KB serta kasus *stunting*.

**9. Perhubungan, menghadapi permasalahan:**

Secara umum permasalahan terkait transportasi di Kota Sibolga adalah Belum optimalnya keselamatan, ketertiban dan kelancaran transportasi di Kota Sibolga masalah tersebut disebabkan:

- a. Rendahnya kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas. Jaringan jalan yang tersedia saat ini tidak sesuai dengan pola distribusi yang dipengaruhi faktor belum adanya terminal khusus angkutan barang yang menjadi sentral distribusi barang ataupun kawasan pergudangan sehingga angkutan ekspedisi melakukan kegiatan bongkar muat barang di pusat perkotaan yang menyebabkan kesemrawutan dan kemacetan lalu lintas.
- b. Pertumbuhan jumlah kendaraan tidak sebanding dengan jaringan jalan yang tersedia. Tidak seimbang nya pertumbuhan jumlah kendaraan pribadi dengan penambahan jaringan jalan/ruas jalan di Kota Sibolga. Adapun faktor yang mempengaruhinya adalah kemudahan konsumen dalam memiliki kendaraan (fasilitas kredit).
- c. Kekurangan ketersediaan alokasi dana yang menyebabkan terkendalanya rencana pembangunan pergudangan, gedung pengujian dan terminal truk beserta fasilitasnya yang direncanakan sebagai tempat pangkalan mobil truk untuk bongkar muat barang dalam mengantisipasi timbulnya kecelakaan serta menghindari kerusakan jalan dan kemacetan yang terjadi di inti kota.
- d. Masih adanya beberapa pemilik usaha yang memakai ruas jalan yang bukan untuk peruntukannya misalnya ruas jalan tersebut dijadikan lahan parkir.
- e. Kemacetan lalu lintas di pagi hari pada saat hari kerja adapun faktor



yang mendorong adalah kecenderungan pergerakan kendaraan dari daerah perbatasan Kota Sibolga menuju daerah perkantoran, sekolah dan sentra usahalainnya.

- f. Terbatasnya SDM aparatur yang memiliki kompetensi di bidang perhubungan atau masih kurangnya Sumber Daya Manusia di Dinas Perhubungan Kota Sibolga yang memiliki latar belakang pengetahuan tentang transportasi.

**10. Komunikasi dan informatika, menghadapi permasalahan:**

- a. Peningkatan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat
- b. Rendahnya Proporsi Rumah Tangga yang memiliki komputer pribadi.

**11. Koperasi, usaha kecil, dan menengah, menghadapi permasalahan:**

- a. Belum adanya produk UMKM binaan Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan Kota Sibolga yang menembus pasar internasional;
- b. Kualitas Produk UMKM belum memadai;
- c. Keterbatasan informasi mengenai akses pemasaran produk dan Informasi kebijakan dari pemerintah daerah dan Pemerintah Sumatera Utara serta Nasional.

**12. Penanaman modal, menghadapi permasalahan:**

- a. Banyaknya Investor Atau Pengusaha Yang Membuka Usahanya Tidak Sesuai Dengan RT/RW Daerah;
- b. Kurangnya Aktivitas Hubungan Perdagangan/ Investasi Produk Unggulan Antar Daerah, Regional, Nasional, Dan Internasional Melalui Pelabuhan Sibolga;
- c. Kecilnya Wilayah Sibolga sehingga Wilayah (Tanah) Untuk Tempat Berinvestasi Terbatas;
- d. Belum Adanya Produk Unggulan Yang Benar-Benar Menarik Untuk Dijual Keluar Daerah;
- e. Kurangnya Kesadaran Para Investor Untuk Melaporkan Kegiatan Usahanya Melalui LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal);
- f. Kurangnya Pengetahuan Tentang Potensi Investasi Yang Ada di Kota Sibolga.



**13. Kepemudaan dan olah raga, menghadapi permasalahan:**

- a. Belum ditindak lanjutnya Peraturan Daerah tentang Kepemudaan yang merupakan syarat ditetapkannya Sibolga menjadi Kota Layak Pemuda
- b. Belum memadainya fasilitas olahraga, khususnya olahraga yang telah mengukir prestasi di tingkat provinsi maupun nasional seperti Karate, Silat, Atletik dan lain-lain

**14. Statistik, menghadapi permasalahan:**

Data sektoral yang harus dihimpun dan diolah hingga dapat disajikan dengan baik sehingga dapat menjadi sumber data bagi pihak yang membutuhkan.

**15. Persandian, menghadapi permasalahan:**

- a. Belum ada perangkat daerah yang menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah;
- b. Belum ada Sumber Daya Manusia yang mampu menerjemahkan setiap kawat sandi;
- c. Pendidikan bagi aparatur persandian (Sandi man)

**16. Kebudayaan, menghadapi permasalahan:**

Belum optimalnya pemajuan kebudayaan dan karakter budaya.

**17. Perpustakaan, menghadapi permasalahan:**

Pada Tahun 2020, Dinas Perpustakaan sudah mendapatkan tambahan Gedung layanan namun sarana dan prasarana pendukung masih kurang seperti sarana komputer untuk internet gratis, sarana pendukung untuk mengakses bahan buku digital, rak buku dan koleksi bahan bacaan serta meubeleur untuk pemustaka.

**18. Kearsipan, menghadapi permasalahan:**

Masih terbatasnya SDM yang ahli dan terampil (bersertifikasi Pengelolaan dan Pengawasan kearsipan) untuk urusan Kearsipan sehingga penyelenggaraan urusan kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kota Sibolga belum dapat dilaksanakan secara maksimal.





### C. **Urusan Pemerintahan Pilihan**

Dalam penyelenggaraan urusan pilihan Pemerintah Daerah di Kota Sibolga, berbagai permasalahan yang dihadapi adalah:

#### 1. **Kelautan dan Perikanan, menghadapi permasalahan:**

- a. Dampak dari terbitnya Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 terhadap jumlah nelayan sedikit meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah kapal motor tempel.
- b. Penggunaan alat tangkap yang dilarang dan tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang ada menyebabkan polemik tersendiri bagi pelaku usaha penangkapan ikan sehingga mengakibatkan penurunan jumlah produksi perikanan
- c. Keterbatasan lahan untuk peningkatan sarana dan prasarana. Dalam hal ini, keterbatasan lahan juga menjadi permasalahan untuk peningkatan usaha budidaya perikanan

#### 2. **Pariwisata, menghadapi permasalahan:**

- a. Belum Optimalnya Budaya Sadar Wisata Masyarakat dalam hal menjaga fasilitas wisata yang sudah dibangun seperti Perusakan lampu hias Pantai Ujung Sibolga dan Lokasi Tango Seratus, Kebersihan pantai dan objek wisata lainnya.
- b. Masih Belum terjalannya konektivitas dengan *stakeholder* pembangunan KSPN (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional) Danau Toba sebagai daerah *hinterland* Kota Sibolga yang memperoleh *multiplier effect* dari pembangunan tersebut
- c. Belum dimaksimalkannya peran Dinas Parpora dalam memberikan rekomendasi izin terkait urusan kepariwisataan (Hotel, Restoran, Cafe, Konser, dan lain-lain).

#### 3. **Pertanian, menghadapi permasalahan:**

- a. Belum optimalnya produksi pertanian baik pada tanaman pangan utama, hortikultura, dan perkebunan dan Peternakan.
- b. Masih kurangnya populasi beberapa komoditas peternakan (kambing, ayam buras), dan produksi daging.
- c. Berkurangnya lahan pertanian, perkebunan dan peternakan menjadi tantangan bagi Kota Sibolga untuk meningkatkan produksinya.



Peningkatan produktifitas pertanian, perkebunan dan peternakan melalui peningkatan kualitas benih akan menjadi prioritas, selain itu peningkatan dalam pemanfaatan teknologi dan penciptaan inovasi bidang pertanian dan peternakan khususnya pertanian perkotaan.

**4. Kehutanan, menghadapi permasalahan:**

Sesuai dengan kewenangan, Kota Sibolga tidak memiliki Taman Hutan Rakyat.

**5. Energi dan Sumber Daya Mineral, menghadapi permasalahan:**

Sesuai dengan kewenangan, Kota Sibolga tidak memiliki Energi Panas Bumi.

**6. Perdagangan, menghadapi permasalahan:**

- a. Penataan berkelanjutan dalam pelayanan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL), karena di Kota Sibolga banyak pedagang kaki lima/asongan musiman.
- b. Masih kurangnya pasar yang memenuhi syarat kesehatan, kebersihan dan kenyamanan sehingga perlu revitalisasi pasarrakyat
- c. Terbatasnya bantuan modal dan sarana usaha bagi pedagang.
- d. Kurangnya fasilitas umum untuk dijadikan ikon di Kota Sibolga guna meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kota Sibolga.

**7. Perindustrian, menghadapi permasalahan:**

- a. Masih rendahnya pertumbuhan industri di Kota Sibolga.
- b. kontribusi sektor industri terhadap PDRB masih labil (capaian turun naik)
- c. Masih rendahnya pembinaan bagi kelompok pengrajin sehingga perlu adanya pembinaan dan pengembangan berkelanjutan bagi kelompok pengrajin di Kota Sibolga

**8. Transmigrasi, menghadapi permasalahan:**

Sesuai dengan kewenangan, Kota Sibolga tidak memiliki Lahan Transmigrasi.



#### D. **Urusan Penunjang Pemerintahan**

##### 1. **Sekretariat Daerah, menghadapi permasalahan:**

Adapun yang menjadi permasalahan pada Sekretariat Daerah Kota Sibolga adalah sebagai berikut:

- a. Server yang dipakai saat ini sudah rusak dan server masih menumpang pada Dinas Kominfo Kota Sibolga yang mana pada Tahun 2021 Sekretariat Kota Sibolga bagian Administrasi Pembangunan telah merencanakan untuk pengadaan server *HPE Proliant DL380g 10*.
- b. Ada 11 personil di UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa) yang memiliki Sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa namun masih belum memiliki Sertifikat Fungsional tentang POKJA Pemilihan sehingga kedepannya menjadi kendala dalam peraturan untuk melakukan tender.
- c. Belum adanya personil/SDM bagian teknis dari Sekretariat Daerah Kota Sibolga. Adapun Personil LPSE saat ini masih dibantu dari Dinas Kominfo Kota Sibolga.
- d. SDM Penyedia Pengadaan Barang dan Jasa kurang memahami/kurang update mengenai peraturan-peraturan tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang mana bisa dilihat pada website LKPP dan website PUPR (Konstruksi).
- e. Belum Terlaksananya Pengisian LKE (Lembaran Kinerja Elektronik) dikarenakan tahun 2016-2019 vakumnya bagian organisasi sehingga tidak menjadi prioritas dan saat ini sulitnya berkoordinasi ke Provinsi terkendala Covid 19.
- f. Kurangnya Pegawai ASN yang terdidik dan terlatih dalam penyusunan perancangan perundang-undangan dan penguatan paralegal hukum karena saat ini pegawai yang ada di bagian hukum hanya 6 orang.

##### 2. **Sekretariat DPRD, menghadapi permasalahan:**

Peningkatan Fasilitas Pelayanan terhadap fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sibolga.

##### 3. **Perencanaan, menghadapi permasalahan:**

- a. Belum optimalnya pencapaian target-target dalam perencanaan pembangunan



- b. Belum seluruh aspirasi masyarakat terakomodir dalam perencanaan dan penganggaran.

**4. Keuangan, menghadapi permasalahan:**

Pendapatan asli daerah yang belum optimal untuk menunjang kemandirian fiskal daerah, disebabkan oleh: kurang akuratnya data objek pajak dan retribusi, rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan objek pajak dan retribusi, dan penerapan sanksi terhadap wajib pajak yang belum optimal.

**5. Kepegawaian (serta pendidikan dan pelatihan), menghadapi permasalahan:**

- a. Adanya kesenjangan kompetensi antara yang dibutuhkan dengan yang tersedia;
- b. Belum terpusatnya pelaksanaan pengembangan kompetensi;
- c. Masih rendahnya kemampuan Pemerintah Kota Sibolga dalam memenuhi kebutuhan diklat pegawai;
- d. Masih ditemukan PNS yang melakukan pelanggaran disiplin;
- e. Masih belum optimalnya distribusi penempatan pegawai.

**6. Penelitian dan Pengembangan, menghadapi permasalahan:**

- a. Belum optimalnya penelitian dan kajian;
- b. Fungsi penelitian masih mengerjakan fungsi perencanaan daerah sehingga ke depannya perlu dikaji peran Penelitian dan Pengembangan baik secara Tugas dan Fungsi, Organisasi atau kelembagaan yang dapat berdiri sendiri, tidak dirumpun dengan Urusan Perencanaan atau digabung dengan Urusan Perencanaan dengan Tugas dan Fungsi yang jelas dan Nomenklatur OPD yang jelas;
- c. Inovasi daerah masih kurang dalam mendukung daya saing daerah sesuai Visi RPJMN 2020-2021 dan RPJPD Kota Sibolga Tahun 2005-2025.

**7. Pengawasan, menghadapi permasalahan:**

- a. Belum optimalnya kapasitas APIP.
- b. Pengawasan kinerja OPD belum optimal.
- c. Belum semua temuan BPK ditindaklanjuti sampai tuntas.



**8. Kecamatan, menghadapi permasalahan:**

**8.1. Kecamatan Sibolga Utara**

- a. Pelaksanaan PATEN dalam pemberian layanan kepada masyarakat dilaksanakan oleh Tenaga Harian Lepas (THL) tanpa adanya pendampingan dari Aparatur Sipil Negara (ASN), hal ini berdampak kepada tidak adanya kontrol dan pengawasan melekat sehingga sulit mengukur kinerjanya. Para THL juga tidak mendapat pelatihan khusus maupun bimbingan dalam pelaksanaan tugasnya sehingga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat hanya mengandalkan pengetahuan dan etika pribadi yang melekat pada masing-masing petugas pelayanan;
- b. Pemberian pelayanan kepada masyarakat yang berhubungan dengan instansi lain tidak memiliki kekuatan hukum dan standar operasional yang baku sehingga berdampak kepada ketidakpastian dalam penetapan persyaratan yang diberikan kepada masyarakat dalam mengurus administrasi yang dibutuhkan. Salah satu ketidakpastian tersebut bisa dilihat pada pemberian surat rekomendasi ijin usaha mikro dan kecil dimana tidak ada standar baku yang memiliki kekuatan hukum tentang persyaratan- persyaratan yang dibutuhkan sehingga PATEN hanya memberikan persyaratan-persyaratan berdasarkan kebiasaan. Masyarakat menjadi pihak yang dirugikan karena sering kembali ke kantor kecamatan untuk mendapatkan persyaratan lain yang dibutuhkan.

**8.2. Kecamatan Sibolga Kota, menghadapi permasalahan:**

- a. Kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia/Aparatur (PNS) di Kecamatan Sibolga Kota, dimana pada saat ini yang dihunjuk sebagai petugas PATEN hanya THL yang berjumlah 6 (enam) orang. Kendala yang dihadapi saat ini tidak adanya PNS yang bisa ditugaskan sebagai Pendamping Petugas PATEN untuk mengkoordinir pelayanan kepada masyarakat ketika salah satu dari THL Petugas PATEN sedang berhalangan sehingga dapat memperlambat pengurusan pelayanan yang ada di Loker PATEN.
- b. Masih kurangnya kesadaran pekerja pemasang tenda di Sibolga



Square, dimana tenda seharusnya dipasang Pukul 17.00 Wib (jam 5 sore) namun pukul 14.00 Wib tenda telah dipasang dan beberapa gerobak jualan sudah diletakkan di badan jalan sebelum waktu yang telah disepakati bersama sehingga mengganggu aktivitas pedagang permanen (Toko) yang ada di Jalan Ahmad Yani Sibolga (sekitar *Sibolga Square*).

**8.3. Kecamatan Sibolga Sambas, menghadapi permasalahan:**

- a. Kurangnya Jumlah SDM Pegawai Kecamatan Sibolga Sambas pada saat ini dimana 6 orang dari THL ditunjuk sebagai Petugas Paten. Kendala saat ini tidak adanya ASN yang bisa ditugaskan sebagai Pendamping Petugas Paten untuk mengkoordinir pelayanan kepada masyarakat ketika salah satu dari Petugas Paten sedang berhalangan sehingga dapat memperlambat tugas-tugas yang di Pelayanan Paten;
- b. Belum adanya Standar Persyaratan terkait persyaratan yang harus dipenuhi dalam kepengurusan rekomendasi izin yang dilimpahkan kewenangannya kepada Kecamatan sesuai dengan Peraturan Wali Kota Sibolga Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pelimpahan sebahagian wewenang walikota kepada camat untuk menangani sebahagian urusan otda sehingga tidak adanya kekuatan hukumnya kepada usaha mikro kecil dan menengah apa bila tidak mengurus surat rekomendasi izin Usaha;
- c. Belum adanya gedung aula pertemuan Kelurahan Pancuran Kerambil, sehingga membuat kendala terhambatnya pelayanan yang dilakukan oleh Kelurahan Pancuran Kerambil kepada masyarakat, dimana saat ada kegiatan yang dilakukan oleh Kelurahan dan kecamatan sering terjadi jadwal bentrok. Jadi terpaksa kegiatan yang dilakukan kelurahan pancuran kerambil di dalam Ruang Kantor;
- d. Tidak adanya lahan parkir yang memadai untuk bisa dijadikan sebagai lahan parkir karena luas tanah sebahagian tempat berdirinya Gedung Kantor Kelurahan Pancuran Kerambil, sehingga masyarakat dan para pegawai yang datang ke Kantor Kecamatan dan kelurahan Pancuran Kerambil terpaksa mempergunakan badan jalan/trotoar jalan Utama yang intens



dan padatarus lalu lintasnya.

**8.4. Kecamatan Sibolga Selatan, menghadapi permasalahan:**

- a. Kurangnya Tenaga Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kecamatan Sibolga Selatan, yang mengakibatkan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) hanya ditangani satu orang ASN yaitu Kasi Pelayanan dibantu 6 orang dari THL yang ditunjuk sebagai Petugas Paten. Hal ini disebabkan tidak adanya ASN yang bisa ditugaskan sebagai Pendamping Petugas Paten untuk mengkoordinir, sehingga dapat memperlambat tugas-tugas Pelayanan kepada masyarakat;
- b. Pengelolaan hasil validasi data penduduk yang dilaksanakan di seluruh lingkungan dan kelurahan se-Kecamatan Sibolga Selatan, khususnya yang berada di setiap kelurahan belum tertata dengan baik akibat terbatasnya fasilitas (lemari data, Map, File Box) yang tersedia.

**9. Kesbangpol, menghadapi permasalahan:**

Unit organisasi kemasyarakatan harus mengantongi Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sebagai bentuk pengakuan keberadaan ormas tersebut. Sehubungan dengan telah diundangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan, Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) ormas diterbitkan langsung oleh Kementerian Dalam Negeri. Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sebuah organisasi masyarakat tidak lagi dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, namun pengajuan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) tetap dari Kesbangpol, ini yang menjadi permasalahan di Kantor Kesbangpol disamping keterbatasan anggaran.



## 1.2.2 VISI DAN MISI KEPALA DAERAH

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sibolga tahun 2021-2026 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025. Penyusunan Rancangan RPJMD ini memerlukan perhatian yang besar, tidak hanya untuk menghadapi permasalahan yang belum terselesaikan, namun juga mengantisipasi tantangan yang muncul di masa mendatang. Dalam menangannya, diperlukan kebersamaan yang bersifat *mutualism* oleh penyelenggara pemerintahan daerah dan segenap pemangku kepentingan (*stakeholders*). Dengan memperhatikan isu-isu strategis berdasarkan kerangka berpikir ilmiah yang dibahas dalam bab sebelumnya.

### VISI

Visi Pembangunan Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu Pemilihan Kepala Daerah (pilkada). Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatansesuai misi yang diemban.

### VISI PEMBANGUNAN DAERAH

Visi ini merupakan janji yang disampaikan kepada masyarakat untuk dipenuhi diakhir masa periode jabatan kepala daerah terpilih. Penyampaian visi yang ditetapkan tersebut diartikan untuk membangun Sibolga, menyejahterakan kehidupan masyarakat, meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan meningkatkan kualitas pendidikan.

Jabaran visi tersebut memprioritaskan pembangunan sumberdaya manusia terutama dari segi peningkatan pendidikan serta infrastruktur demi menciptakan kesejahteraan masyarakat Kota Sibolga, meningkatkan lebih baik lagi penuntasan masalah kesehatan yang terus masih menjadi keluhan dari masyarakat, serta penguatan ekonomi kerakyatan dengan memperbanyak tumbuhnya usaha-usaha kecil masyarakat. Visi pembangunan daerah Kota Sibolga untuk periode RPJMD 2021-2026 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih, adalah:

**“MEWUJUDKAN SIBOLGA SEHAT, PINTAR dan MAKMUR.”**

Visi Kota Sibolga adalah gambaran tentang kondisi Kota Sibolga yang diharapkan terwujud pada akhir periode Rencana Pembangunan





Menengah Daerah (RPJMD) yaitu tahun 2026. Rumusan visi ini terdiri dari pernyataan visi, pokok-pokok visi, penjelasan pernyataan visi, dan penjelasan pokok-pokok visi.

Perumusan visi merupakan salah satu tahap penting dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah sebagai hasil dari analisis permasalahan utama yang terjadi di Kota Sibolga.

- Sehat : Merujuk pada kondisi Kota Sibolga dimana derajat kesehatan masyarakat terjaga dengan baik sesuai dengan standar sistem kesehatan nasional. Kondisi ini ditandai dengan meningkatnya Angka Harapan Hidup (AHH) yang dicapai dengan menurunnya angka kesakitan terhadap penyakit menular dan tidak menular serta penyakit degeneratif lansia. Derajat kesehatan masyarakat juga ditandai dengan meningkatnya kualitas kesehatan ibu dan bayi yang diukur dengan berkurangnya Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Balita. Ada berbagai standar lain yang juga harus dicapai seperti meningkatnya status gizi masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan keluarga berencana. Berbagai kondisi tersebut harus dicapai dengan akses masyarakat yang baik terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang terjangkau dan merata di Kota Sibolga.
- Pintar : Kondisi yang ditandai dengan berkembangnya tingkat pendidikan masyarakat Kota Sibolga ke arah yang semakin baik. Kondisi ini diukur dengan meningkatnya Angka Harapan dan Rata-Rata Lama Sekolah serta Angka Melek Huruf (AMH). Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Sekolah (APS) Jenjang Pendidikan Dasar Sembilan tahun dan Usia Dini. Berbagai kondisi dapat dicapai dengan peningkatan fasilitas pendidikan dasar yang terjangkau dan merata serta pengembangan kualitas tenaga pendidik yang memiliki disiplin dan komitmen kuat.
- Makmur : Kondisi Kota Sibolga yang masyarakatnya memiliki kondisi kehidupan yang lebih sejahtera secara lahir dan batin. Makmur disini dicirikan melalui masyarakat dengan peluang dan kesempatan yang sama untuk meningkatkan taraf kehidupannya menjadi lebih baik dari sebelumnya serta mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial yang



memadai. Hal ini ditandai dengan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan per Kapita yang semakin baik dan menurunnya angka Gini Rasio, Angka Kemiskinan serta Angka Pengangguran.

#### MISI PEMBANGUNAN DAERAH

Misi dalam RPJMD ini dimaknai sebagai upaya-upaya umum yang hendak dijalankan demi terwujudnya Visi Kota Sibolga 2021- 2026. Upaya umum ini memiliki keterkaitan dengan pokok visi yang akan dicapai. Penjelasan setiap misi dibutuhkan agar upaya umum yang dirumuskan dapat lebih menggambarkan penyelesaian isu-isu strategis Kota Sibolga. Adapun rumusan 5 (lima) misi RPJMD Kota Sibolga tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang *Good Governance* dengan Transparan dan Akuntabel
2. Mewujudkan dan Meningkatkan kesehatan masyarakat serta pelayanan sehingga dapat melahirkan masyarakat yang cerdas, menuju masyarakat yang makmur
3. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang proporsional berbasis jumlah penduduk untuk Menata pemukiman warga agar terciptanya lingkungan yang sehat dan infrastruktur kota yang terang dengan memanfaatkan tata ruang yang berwawasan kota pintar (*Smart City*).
4. Mewujudkan Pendidikan yang berkualitas, memberikan subsidi penuh terhadap kebutuhan belajar 9 tahun, dan memberikan beasiswa bagi siswa berprestasi untuk melanjutkan studi ke Perguruan tinggi, serta Meningkatkan kesejahteraan guru.
5. Membuka lapangan kerja dan peluang berusaha dengan pemberdayaan masyarakat di bidang Ekonomi dan kewirausahaan serta menjalin kerjasama dengan pelaku ekonomi lainnya di Kota Sibolga maupun di luar Kota Sibolga.

Lima butir misi di atas didasarkan kepada kebutuhan pembangunan yang telah di temakan dalam bentuk visi pembangunan daerah. Dalam upaya penyamaan persepsi terhadap misi tersebut serta mengurangi potensi ambiguitas dalam memahami butir-butir misi, maka penjabaran misi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### o **Misi Pertama**

**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang *Good Governance* dengan Transparan dan Akuntabel**



Pemerintah daerah memegang peranan penting bagi perkembangan daerah melalui fungsi sebagai regulator serta fasilitator. Dukungan pemerintah dalam pembangunan daerah harus didukung oleh layanan publik yang prima. Untuk mencapai kondisi layanan prima tersebut perlu terwujud pemerintahan yang baik (*good government*) dan tata kelola yang baik (*good governance*). Layanan publik perlu didukung birokrasi yang bersih agar tidak menimbulkan biaya birokrasi tinggi. Pelayanan publik juga diharapkan mampu dinamis dan tangkas menjawab kebutuhan dan permasalahan yang terjadi dilapangan. Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat yang kebutuhannya semakin bervariasi maka dibutuhkan kinerja aparatur pemerintah yang profesional termasuk penataan kelembagaan yang efektif dan efisien dengan melalui digitalisasi manajemen dan birokrasi serta inovasi sehingga tata kelola pemerintah dapat berjalan efektif.

○ **Misi Kedua**

Mewujudkan dan Meningkatkan kesehatan masyarakat serta pelayanan sehingga dapat melahirkan masyarakat yang cerdas, menuju masyarakat yang makmur

Sumberdaya manusia merupakan faktor penting dalam pembangunan daerah. Untuk mencapai tujuan pembangunan yang optimal perlu didukung modal manusia (*human capital*) yang unggul yaitu sumber daya manusia yang sehat jasmani dan rohani serta berkarakter, maka dari itu investasi manusia (*human investment*) menjadi misi penting dalam mendukung tercapainya visi Kota Sibolga kedepan. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia di Kota Sibolga perlu didukung oleh peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.

○ **Misi Ketiga**

Mewujudkan pemerataan pembangunan yang proporsional berbasis jumlah penduduk untuk Menata pemukiman warga agar terciptanya lingkungan yang sehat dan infrastruktur kota yang terang dengan memanfaatkan tata ruang yang berwawasan kota pintar (*Smart City*).

Kota dalam struktur ruang menjadi pusat perekonomian wilayah dan memiliki peran penting bagi pembangunan. Pembangunan perkotaan menjadi bagian bagi pembangunan nasional dan juga Provinsi Sumatera



Utara, maka dari itu harus memperhatikan keselarasan dan keseimbangan antara berbagai kebutuhan baik kebutuhan untuk ekonomi maupun kebutuhan mendasar masyarakat akan infrastruktur kota yang merata dan menjamin hidup masyarakat yang berkualitas dan lingkungan yang sehat.

Pembangunan Kota Sibolga berusaha untuk mewujudkan “**KOTA SIBOLGA NAULI**” yang Nyaman, Aman, Unggul, Lestari dan Indah dengan terpenuhinya infrastruktur yang berkualitas dan merata yang mendukung keterpaduan infrastruktur ekonomi dan sosial masyarakat yang berkelanjutan dengan melakukan upaya perencanaan, pengawasan dan pengendalian tata ruang yang menjamin keberlanjutan sumber daya daerah serta meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

○ **Misi Keempat**

Mewujudkan Pendidikan yang berkualitas, memberikan subsidi penuh terhadap kebutuhan belajar 9 tahun, dan memberikan beasiswa bagi siswa berprestasi untuk melanjutkan studi ke Perguruan tinggi, serta Meningkatkan kesejahteraan guru

Sama seperti uraian misi kedua di atas, Peningkatan kualitas sumberdaya manusia di Kota Sibolga perlu didukung oleh peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, subsidi penuh untuk wajib belajar 9 Tahun disertai dengan Bea siswa *berprestasi* untuk melanjutkan ke jenjang Perguruan tinggi dan juga upaya meningkatkan kesejahteraan Guru.

○ **Misi Kelima**

Membuka lapangan kerja dan peluang berusaha dengan pemberdayaan masyarakat di bidang Ekonomi dan kewirausahaan serta menjalin kerjasama dengan pelaku ekonomi lainnya di Kota Sibolga maupun diluar Kota Sibolga

Pertumbuhan ekonomi merupakan upaya pemerintah daerah dalam pembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi merupakan gambaran bahwa pemerintah mampu mengelola potensi ekonomi daerah untuk menjadi pilar pembangunan khususnya untuk mensejahterakan masyarakat. Pembangunan ekonomi Kota Sibolga berfokus pada pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan dampaknya mampu dirasakan oleh masyarakat banyak, mengedepankan potensil lokal sebagai motor dan pilar utama perekonomian guna kemandirian ekonomi lokal dan daya saing daerah.



Selain itu, pilar ekonomi hendaknya mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang banyak bagi masyarakat sehingga mampu menunjang upaya pengentasan pengangguran dan kemiskinan daerah. Penciptaan iklim investasi menjadi kunci utama keberhasilan pengembangan ekonomi Kota Sibolga tentunya dengan dukungan sistem birokrasi yang efektif dan efisien mendukung perijinan yang cepat dan murah. Penguatan daya saing daerah Kota Sibolga sebagai pusat ekonomi di Pantai Barat Sumatera Utara dalam sektor perdagangan dan jasa.

## TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan, sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara kualitatif maupun kuantitatif, spesifik, mudah dicapai, rasional dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun. Sasaran sendiri biasanya direpresentasikan melalui penetapan indikator kinerja daerah. Penetapan indikator ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) padaakhir periode masa jabatan.

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi, dan mengacu serta menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2020-2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Sibolga Tahun 2005-2025, RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2024, RTRW Kota Sibolga Tahun 2017-2037, Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Sibolga, maka tujuan pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaankemasyarakatan Tahun 2021-2026 adalah:



1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik;
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat;
3. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan;
4. Mewujudkan Pembangunan Kawasan yang Berkelanjutan;
5. Mewujudkan Pendidikan Berkualitas;
6. Mewujudkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi;
7. Mewujudkan Kesejahteraan Sosial;

#### Sasaran Pembangunan

Dalam mewujudkan tujuan pembangunan ditetapkan sasaran- sasaran pokok pembangunan:

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel;
2. Meningkatnya kualitas SDM penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel;
3. Mewujudkan Penataan Karir ASN Sesuai dengan Keahlian dan Profesionalisme;
4. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat;
5. Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung performa wilayah;
6. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
7. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat;
8. Meningkatnya pendapatan masyarakat;
9. Menurunkan Jumlah Penduduk Miskin.



**TABEL 10**  
**Keterkaitan Visi, Misi Tujuan dan Sasaran**

<b>VISI : MEWUJUDKAN SIBOLGA SEHAT, PINTAR DAN MAKMUR</b>				
<b>MISI</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>INDIKATOR TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR SASARAN</b>
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Good Governance Dengan Transparan Dan Akuntabel	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks Reformasi Birokrasi; Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);	1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel; 2. Meningkatnya kualitas SDM penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Daerah (AKIP) 2. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Indeks Kepuasan Masyarakat 4. Indeks Daya Saing Daerah
Mewujudkan Dan Meningkatkan Kesehatan Masyarakat Serta Pelayanan Sehingga Dapat Melahirkan Masyarakat Yang Cerdas, Menuju Masyarakat Yang Makmur	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Sehat	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1. Indeks Kesehatan 2. Pola Pangan Harapan (PPH)
Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Yang Proporsional Berbasis Jumlah Penduduk Untuk Menata Pemukiman Warga Agar Terciptanya Lingkungan Yang Sehat Dan Infrastruktur Kota Yang Terang Dengan Memanfaatkan Tata Ruang Yang Berwawasan Kota Pintar ( <i>Smart City</i> )	Terwujudnya Pembangunan Kawasan yang Berkelanjutan	Indeks Resiko Bencana	1. Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung performa wilayah; 2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 2. RPPLH Kota Sibolga 3. Air Minum Layak dan Berkelanjutan 4. Rumah Tangga Bersanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) 5. Pengurangan Luasan Kumuh.



VISI : MEWUJUDKAN SIBOLGA SEHAT, PINTAR DAN MAKMUR				
MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Mewujudkan Pendidikan Yang Berkualitas, Memberikan Subsidi Penuh Terhadap Kebutuhan Belajar 9 Tahun, Dan Memberikan Beasiswa Bagi Siswa Berprestasi Untuk Melanjutkan Studi Ke Perguruan Tinggi, Serta Meningkatkan Kesejahteraan Guru	Terwujudnya Pendidikan Berkualitas	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	1. Indeks Pendidikan
Membuka Lapangan Kerja Dan Peluang Berusaha Dengan Pemberdayaan Masyarakat Dibidang Ekonomi Dan Kewirausahaan Serta Menjalinkan Kerjasama Dengan Pelaku Ekonomi Lainnya Di Kota Sibolga Maupun Di Luar Kota Sibolga	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terwujudnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi</li> <li>2. Terwujudnya Kesejahteraan Sosial</li> </ol>	Pertumbuhan Ekonomi Gini Rasio Angka Kemiskinan Angka Pengangguran	Meningkatkan pendapatan masyarakat; Menurunkan Jumlah Penduduk Miskin Mempermudah pelayanan Perizinan dan Investasi	Pendapatan Perkapita Penduduk (Juta) Pendapatan Daerah Indeks Pembangunan Gender Indeks Kesetaraan Gender Meningkatnya Jumlah Ekonomi Kreatif Izin yang diterbitkan

Sumber: Data diolah

Untuk indikator target dari dampak (*impacts*) pencapaian sasaran program yang diukur dari hasil (*outcomes*) secara agregat dari misi yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai visi, maka ditetapkan ukuran capaian tujuan dan sasaran jangka menengah yang sering disebut Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:





**TABEL 11**  
 Visi Misi Tujuan dan Sasaran Rencana Jangka Menengah Kota Sibolga Tahun 2021-2026  
**VISI: MEWUJUDKAN SIBOLGA SEHAT, PINTAR DAN MAKMUR**

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi awal 2020	Target					Kondisi Akhir 2026
							2021	2022	2023	2024	2025	
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Good Governance dengan Transparan dan Akuntabel	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Baik;		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	C	C	B	B	B	B	A
				Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE),	Nilai, Maksimal 5	n/a	1,80	2,00	2,20	2,50	2,60	2,80
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel;	Nilai Akuntabilitas Kinerja Daerah (AKIP)	Angka	-	CC	B	B	B	B	B
			Meningkatnya kualitas SDM penyelenggaraan pemerintahan	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
				Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	80,67	81	81,5	82	82,5	83	83,5
				Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	Indeks	0,527	2,6592	2,6625	2,6700	2,6775	2,6850	2,700
				Indeks Penilaian Sistem Merit	Angka Indeks	0,45	0,55	0,60	0,65	0,70	0,75	0,80



No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi awal 2020	Target					Kondisi Akhir 2026
							2021	2022	2023	2024	2025	
2	Mewujudkan dan Meningkatkan kesehatan masyarakat serta pelayanan sehingga dapat melahirkan masyarakat yang cerdas, menuju masyarakat yang makmur	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat;	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai	73,63	73,80	73,85	73,9	74,94	75,00	75,08
				Angka Harapan Hidup	Angka	69,01	69,05	69,27	69,48	69,70	69,91	70,13
				Angka Kematian Ibu	Angka	53,7	217	205	194	183	183	183
				Angka Kematian Bayi	Angka	3,8	19	18	17	15	13	11
				Angka Kematian Balita	Angka	0	30	29	28	27	26	25
				Prevalensi wasting pada Balita	Persen	2%	7%	7%	7%	6%	6%	6%
				Prevalensi Angka Stunting	Persen	3,94%	10%	9,5%	9%	8,5%	8%	8,0%
				Kualitas Makanan dan Minuman	Persen	85%	87%	89%	91%	92%	94%	95%
				Penanganan Penyakit Tidak Menular	Persen	97,66%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi awal 2020	Target					Kondisi Akhir 2026
							2021	2022	2023	2024	2025	
				Ketersediaan Alat Kesehatan Sesuai Standar	Persen	60%	64%	68%	72%	76%	80%	82%
				Tenaga Kesehatan Persatuan Penduduk	Rasio	10,6	10,7	10,8	10,9	11	11	11,1
				Puskesmas Menjadi BLUD	Unit	0	0	0	1	2	2	5 Menjadi BLUD
				Kelurahan Stop BABS	Persen	0%	5,9%	17,6%	29,4%	41,2%	52,9%	64,7%
				Pola Pangan Harapan (PPH)	Persen		80,0%	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%
3	Mewujudkan pemerataan pembangunan yang proporsional berbasis jumlah penduduk untuk Menata pemukiman warga agar terciptanya lingkungan yang sehat dan infrastruktur kota yang terang dengan memanfaatkan tata ruang	Mewujudkan Pemerataan Pembangunan;  Mewujudkan Pembangunan Kawasan yang Berkelanjutan;										129,40
				Indeks Resiko Bencana	Indeks	167,20	167,20	151,30	147,70	137,80	137,80	



No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi awal 2020	Target					Kondisi Akhir 2026
							2021	2022	2023	2024	2025	
	yang berwawas ankota pintar(SmartCity).		Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung performa wilayah;	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks		72,649	72,919	73,149	73,379	73,609	73,839
			Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;	RPPLH KotaSibolga	Ada/TidakAda	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
				Air Minum Layak dan Berkelanjutan	Persen		67,99 %	73,41 %	78,83 %	84,25 %	89,67 %	95,09%
				Rumah Tangga Bersanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Persen		65,00 %	68,00 %	75,00 %	80,00 %	85,00 %	90,00%
					Luasan Kumuh	Ha	203,61	140,10	100,00	70,00	40,00	15,00
4	Mewujudkan Pendidikan yang berkualitas, memberikan subsidi penuh terhadap	Mewujudkan Pendidikan Berkualitas		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai	73,63	73,80	73,85	73,9	74,94	75,00	75,08



No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi awal 2020	Target					Kondisi Akhir 2026
							2021	2022	2023	2024	2025	
	kebutuhan belajar 9 tahun, dan memberikan beasiswa bagasiswa berprestasi untuk melanjutkan studi ke Perguruan tinggi, serta Meningkatkan kesejahteraan guru		Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Rata- Rata Lama Sekolah	Angka	10,40	10,41	10,42	10,50	10,59	10,67	10,76
				Harapan Lama Sekolah	Angka	13,16	13,65	13,81	13,97	14,13	14,30	14,46
5	Membuka lapangan kerjadan peluang berusaha dengan pemberdayaan masyarakat di bidang Ekonomi dan kewirausahaan serta menjalin kerjasama dengan pelaku ekonomi lainnya di Kota Sibolga maupun di luar Kota Sibolga	Mewujudkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi;		Pertumbuhan Ekonomi	Persen	-1,36	2,74	3,00	4,00	5,20	5,55	5,90
		Mewujudkan Kesejahteraan Sosial; Mewujudkan Kemudahan Perizinan dan Investasi		Gini Rasio	Rasio	0,290	0,280	0,2760	0,2740	0,270	0,265	0,260
Angka Kemiskinan				Persen	11,95	11,90	11,00	10,00	9,80	9,50	9,14	
Angka Pengangguran				Jiwa	5533	5300	5070	4840	4610	4380	4150	
			Meningkatnya pendapatan masyarakat;	Pendapatan Perkapita Penduduk (Juta)	Rupiah	62,57	64,32	66,12	67,92	69,72	71,52	73,32



No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi awal 2020	Target					Kondisi Akhir 2026
							2021	2022	2023	2024	2025	
			Menurunkan Jumlah Penduduk Miskin;	Pendapatan Daerah	Rupiah	79.539.316.412	89.181.856.201	89.504.186.535	99.921.203.656	108.106.881.827	116.984.434.387	126.802.647.344
				Indeks Pembangunan Gender	Indeks	97,63	97,73	97,83	97,93	98,03	98,13	98,23
				Indeks Kesetaraan Gender	Indeks		73,53	74,03	74,53	75,03	75,53	76,03
				Meningkatnya Jumlah Ekonomi Kreatif	Unit		5	10	15	20	25	30

Sumber: Data diolah.



A. Keselarasan RPJMD Kota Sibolga dengan Dokumen Perencanaan lain.

**Visi RPJMN, RPJMD Sumatera Utara dan RPJPD Kota Sibolga**



**B. Keselarasan RPJMN Tahun 2020-2024 dengan RPJMD KotaSibolga Tahun 2021-2026**

Visi Misi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025. RPJMN 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Merata dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;



5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya;
7. Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintah yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

### 1.2.3 PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERENCANAAN JANGKA MENENGAH

Untuk mendukung visi “Mewujudkan Sibolga Sehat, Pintar dan Makmur” maka perlu dirumuskan strategi dan arah kebijakan pengembangan Kota Sibolga Tahun 2021-2026. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kota Sibolga melakukan upaya untuk mencapai Visi, Misi, tujuan dan sasaran serta target kinerja RPJMD dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun ke depan.

#### A. Strategi

Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan yang telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan daerah sebagai upaya-upaya operasional yang bermuara pada tercapainya visi pembangunan Pemerintah Kota Sibolga.

- 1 Misi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang GoodGovernance dengan Transparan dan Akuntabel.

Strategi yang dijanjikan selama kampanye untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pertama adalah:

- a) Penataan karir ASN sesuai dengan keahlian dan profesionalisme akuntabel yakni Aparatur Sipil Negara (ASN) harus memiliki kompetensi, inovatif, koordinatif, responsif, akan lebih mengedepankan pelayanan prima berbasis sistem informasi pemerintahan elektronik (E-governance).
- b) Penataan karir ASN sesuai dengan keahlian dan profesionalisme serta secara bertahap akan meningkatkan tambahan bagi ASN sesuai dengan





tanggungjawab dan beban kerja.

- c) Melakukan Pengelolaan Keuangan Daerah secara tertib, efisien, ekonomis, efektif dan transparan, bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatuhan, dengan memprioritaskan kepentingan masyarakat.
- d) Melakukan Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan kegiatan investasi yang bertujuan memberikan manfaat bagi peningkatan Pendapatan Daerah, peningkatan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat.

## 2 Misi Mewujudkan dan Meningkatkan kesehatan masyarakat serta pelayanan sehingga dapat melahirkan masyarakat yang cerdas, menuju masyarakat yang makmur

Strategi yang dijanjikan selama kampanye untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi kedua adalah:

- a) Memberikan/meningkatkan Subsidi/bantuan iuran BPJS bagi keluarga kurang mampu dan mempermudah pengurusan persyaratan administrasi untuk menjadi peserta BPJS;
- b) Memberikan penyuluhan kesehatan/pola hidup masyarakat kurang mampu. Dengan sosialisasi tentang makanan dan minuman yang aman untuk dikonsumsi dan tidak berpotensi menimbulkan penyakit;
- c) Meningkatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum dan Puskesmas dengan menyediakan peralatan dan petugas kesehatan yang lebih baik;
- d) Melakukan Penataan Pemukiman dan sarana prasarana. Khusus MCK dengan memberikan bantuan pembangunan toilet septic tank yang layak di masing-masing rumah penduduk secara bertahap;
- e) Memperbaiki bangunan drainase jalan dan membangun jalan drainase baru di pemukiman warga sehingga tidak menimbulkan penyakit akibat tidak dapat menampung aliran air dengan baik;
- f) Menambah petugas armada kebersihan bagian dari memelihara lingkungan yang sehat;
- g) Memberikan penyuluhan secara kontinu untuk meningkatkan kesadaran kepada masyarakat tentang penting dan bermanfaatnya membuang sampah di tempatnya, dan pengolahan sampah sebagai sumber ekonomi masyarakat.



3 Misi Mewujudkan pemerataan pembangunan yang proporsional berbasis jumlah penduduk untuk Menata pemukiman warga agar terciptanya lingkungan yang sehat dan infrastruktur kota yang terang dengan memanfaatkan tata ruang yang berwawasan kota pintar (*Smart City*)

Strategi yang dijanjikan selama kampanye untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi ketiga adalah:

- a) Melaksanakan program pembangunan yang proporsional dengan berbasis jumlah penduduk di suatu daerah, sehingga capaian pembangunan yang direncanakan/diinginkan oleh masyarakat dapat terpenuhi;
- b) Melaksanakan program perencanaan tata ruang dan pengawasan serta pemanfaatan ruang yang terintegrasi dengan memperhatikan daya dukung kota dalam rangka mewujudkan Kota Sibolga sebagai kota perdagangan dan jasa;
- c) Pembangunan dan penataan Infrastruktur kota yang berkualitas dengan mengedepankan input perencanaan yang komprehensif (luas dan lengkap);
- d) Melakukan program pembangunan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman yang ramah lingkungan dengan sistem pemberdayaan dan swakelola masyarakat bagi kawasan padat pemukiman khususnya pembangunan jalan lingkungan, gorong-gorong drainase;
- e) Melakukan pembangunan dan perbaikan seluruh trotoar jalan di Kota Sibolga sehingga bermanfaat bagi pengguna jalan untuk mendukung mewujudkan Kota Sibolga sebagai kota tujuan wisata yang nyaman bagi pejalan kaki;
- f) Melakukan pemasangan dan penataan lampu jalan di setiap lingkungan;
- g) Melakukan perbaikan Infrastruktur pasar dan infrastruktur penunjang kegiatan perdagangan lainnya. Pembenahan pelabuhan ASP Sibolga yang menunjang kegiatan kepulauan Nias. perdagangan barang dan sarana transportasi ke daerah.

4. Misi Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas memberikan subsidi penuh terhadap kebutuhan belajar 9 tahun, dan memberikan beasiswa bagi siswa berprestasi untuk melanjutkan studi ke Perguruan tinggi, serta Meningkatkan kesejahteraan guru



Strategi yang dijanjikan selama kampanye untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi keempat adalah:

1. Menyiapkan Anggaran untuk subsidi wajib belajar 9 tahun bagi keluarga sehingga dapat memenuhi kebutuhan mereka dalam pembiayaan sekolah anak mulai dari pakaian, sepatu, alat tulis dan beban dari kewajiban-kewajiban yang lainnya dan memberikan bantuan beasiswa bagi anak yang berprestasi sampai ke tingkat perguruan tinggi;
2. Meningkatkan kesejahteraan guru honor, tenaga kependidikan dan guru berbasis agama;
3. Menertibkan lokasi-lokasi permainan yang mengganggu aktivitas pelajar dengan mengatur jam operasionalnya dan memberikan sanksi bagi yang melanggar;
4. Melakukan razia secara terus menerus kepada anak-anak, remaja, pelajar yang bermain Game Warnet;
5. Menerbitkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang aktivitas publik yang berpotensi merusak generasi bangsa.

5. Misi Membuka lapangan kerja dan peluang berusaha dengan pemberdayaan masyarakat di bidang Ekonomi dan kewirausahaan serta menjalin kerjasama dengan pelaku ekonomi lainnya di Kota Sibolga maupun di luar Kota Sibolga

Strategi yang dijanjikan selama kampanye untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi kelima adalah:

1. Membuka lapangan kerja dengan mendirikan perusahaan berbasis perikanan dan kelautan dengan melihat potensi wilayah;
2. Memberikan pelatihan-pelatihan kewirausahaan dan keterampilan kepada masyarakat agar ikan sebagai bahan baku dapat diolah menjadi produk kuliner, baik sebagai makanan basah maupun makanan kering seperti kerupuk ikan dan sebagainya;
3. Memberikan bantuan modal dalam bentuk dana bergulir kepada masyarakat yang telah mampu membuka usaha;
4. Menggalakkan usaha di bidang jasa wisata alam dan kuliner yang berimplikasi kepada terbukanya peluang pasar bagi produk- produk;
5. Membuka akses pasar dengan mendirikan BUMD Sandang untuk memudahkan pedagang memenuhi kebutuhan dagangan serta menampung penjualan produk-produk UMKM dengan membangun pasar singgah dan menjalin kerjasama dengan pengusaha ritel waralaba



seperti: Indomaret, Alfamidi, Transmart dan lain-lain.

Lebih jauh, penjabaran atas strategi pembangunan daerah Kota Sibolga dalam kurun waktu dari tahun 2021 hingga tahun 2026 adalah sebagai berikut:

**Strategi 1:** Peningkatan Pengembangan Kualitas Tata Kelola Pemerintah, Reformasi Birokrasi dan Layanan Publik.

Kompleksivitas penyelenggaraan sistem pemerintahan saat ini menjadi urgensi permasalahan yang dapat menghambat berjalannya pembangunan daerah. Pembangunan daerah yang terhambat maka secara langsung akan berdampak pada tidak tercapainya tujuan awal prioritas yang telah ditetapkan dan menjadikan daerah tertinggal dan tidak berdaya saing. Pemerintah Kota Sibolga harus terus berupaya dalam mencegah terjadinya hal tersebut dengan cara mengadopsi pemanfaatan teknologi informasi melalui manajemen digitalisasi sistem. Teknologi ini merupakan instrumen penting dalam peningkatan transparansi, efektivitas, dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Dengan adanya sistem ini akan memudahkan pengendalian dan pengawasan dalam penyediaan berbagai informasi yang *real time* sehingga dalam pelaksanaan pembangunan daerah dapat berjalan dengan lancar dan menjadikan daerah menjadi berdayasaing.

Dari sudut pandang perseptif secara nasional, tata kelola teknologi akan membantu koordinasi dan integrasi rencana nasional, memperoleh rujukan berstandar kualitas, mempermudah pemantauan dan evaluasi implementasi. Dari perspektif institusional, manfaat yang akan diperoleh adalah mendapatkan batasan dan panduan sesuai dengan praktik terbaik dalam sistem masing-masing, serta mengoptimalkan pelayanan bagi publik. Sedangkan dari perspektif publik, manfaatnya adalah masyarakat memperoleh manfaat pelayanan yang lebih baik, memperoleh transparansi penyelenggaraan pemerintah, dan mampu melakukan fungsi kontrol sosial. Berlandaskan hal tersebut, Pemerintah Kota Sibolga menetapkan dalam strateginya untuk meningkatkan pengembangan layanan yang mudah dan cepat melalui inovasi pelayanan publik dan manajemen digitalisasi sistem.

**Strategi 2:** Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Sehat dan Pintar.

Modal sosial dan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing sesuai harapan RPJPD Kota Sibolga merupakan unsur sangat penting dalam pencapaian tujuan suatu daerah dalam menghadapi era



globalisasi dan era lepas landas. Modal sosial yang besar harus diubah menjadi suatu aset yang bermanfaat bagi pembangunan daerah. Tindakan cermat dan bijaksana harus dapat diambil dalam membekali dan mempersiapkan modal sosial sehingga benar-benar menjadi aset pembangunan daerah yang produktif dan bermanfaat serta berkualitas untuk pendampingan dalam proses pengembangan kualitas dari sumber daya manusia yang dimiliki di Kota Sibolga.

Modal sosial dan sumber daya manusia merupakan satu kesatuan yang utuh dalam sistem sosialnya dan memiliki potensi yang tinggi dalam pengembangan masyarakat yang berkelanjutan. Semakin tinggi kualitas modal sosial dan kualitas sumber daya manusia suatu daerah maka semakin tinggi pula tingkat kemajuan pembangunan daerah tersebut. Demikian sebaliknya, semakin rendah kualitas modal sosial dan kualitas sumber daya manusia suatu daerah maka akan berdampak pada kemunduran pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah Kota Sibolga membuat strategi meningkatkan dan pemerataan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing yang dapat dicapai melalui pemberian akses pelayanan dasar Kesehatan dan Pendidikan serta kebutuhan dasar lainnya.

**Strategi 3:** Pengembangan Infrastruktur Kota yang berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan.

Sistem pemerintahan yang mengembangkan penataan kota melalui penyediaan infrastruktur yang terpadu ini dimaksudkan agar tercipta lingkungan yang nyaman untuk masyarakat karena dalam penciptaan inklusivitas perekonomian daerah tak lepas juga dari konektivitas adanya infrastruktur yang tersedia baik infrastruktur ekonomi maupun sosial dikarenakan infrastruktur ini sebagai penghubung dalam aksesibilitas pergerakan alur distribusi dari perekonomian yang ada. Oleh karenanya kondisi infrastruktur yang baik harus pula diimbangi oleh penciptaan kondisi lingkungan yang indah dan nyaman. Infrastruktur dan kondisi lingkungan yang indah dan nyaman ini tidak dapat dipisahkan karena keduanya menjadi faktor daya tarik untuk menarik investor dalam melakukan penanaman modal di sektor ekonomi yang menjadi fokus pembangunan daerah.

**Strategi 4:** Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Berdampak pada Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran.

Penciptaan inklusivitas perekonomian dimaksudkan agar kondisi ekonomi yang terjadi di Kota Sibolga tidak hanya akibat dari perubahan



kondisi ekonomi makro namun juga terbangun dari kapasitas ekonomi masyarakat sebagai sektor riil khususnya pada penguatan usaha mikro kecil menengah yang kemudian akan menjadi pilar untuk pengentasan kemiskinan dan pengangguran yang ada. Penguatan usaha mikro kecil menengah menjadi landasan utama sebagai penggerak perekonomian di Kota Sibolga mengingat pemerintah pusat memfokuskan pengembangan ekonomi berbasis kerakyatan dengan melakukan penguatan pada usaha mikro kecil menengah mengingat juga bahwasannya mayoritas masyarakat baik di Kota Sibolga maupun ditingkat nasional bergerak dalam lingkup skala usaha mikro kecil dan menengah sehingga para pelaku usaha mikro kecil menengah bisa lebih fokus dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas produksi. Pengintegrasian sektor usaha mikro kecil menengah ini perlu untuk dilakukan yang termasuk didalamnya penciptaan wirausaha baru, peningkatan keahlian masyarakat, standarisasi, pengembangan pemasaran produk dan peningkatan akses permodalan.



Tabel 12  
Visi, Misi, Tujuan Sasaran dan Strategi Kota Sibolga

Visi : “Mewujudkan Sibolga Sehat, Pintar dan Makmur”		
TUJUAN	Sasaran	Strategi
<b>Misi 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang <i>Good Governance</i> dengan Transparan dan Akuntabel</b>		
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik;	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel;	Penataan karir ASN sesuai dengan keahlian dan profesionalisme akuntabel yakni Aparatur Sipil Negara (ASN) harus memiliki kompetensi, inovatif, koordinatif, responsif, akan lebih mengedepankan pelayanan prima berbasis sistem informasi pemerintahan elektronik ( <i>E-governance</i> ).
	Meningkatnya kualitas SDM penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel;	Penataan karir ASN sesuai dengan keahlian dan profesionalisme serta secara bertahap akan meningkatkan tambahan bagi ASN sesuai dengan tanggungjawab dan beban kerja.
		Melakukan Pengelolaan Keuangan Daerah secara tertib, efisien, ekonomis, efektif dan transparan, bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatuhan, dengan memprioritaskan kepentingan masyarakat.
		Melakukan Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan kegiatan investasi yang bertujuan memberikan manfaat bagi peningkatan Pendapatan Daerah, peningkatan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat.



Visi : “Mewujudkan Sibolga Sehat, Pintar dan Makmur”		
Tujuan	Sasaran	Strategi
<b>Misi 2 : Mewujudkan dan Meningkatkan kesehatan masyarakat serta pelayanan sehingga dapat melahirkan masyarakat yang cerdas,menuju masyarakat yang makmur</b>		
Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat;	Memberikan / meningkatkan Subsidi/ bantuan asuransi BPJS bagi keluarga kurang mampu dan mempermudah pengurusan persyaratan administrasi untuk menjadi peserta BPJS.
		Memberikan penyuluhan kesehatan/ pola hidup masyarakat kurang mampu. Dengan sosialisasi tentang makanan dan minuman yang aman untuk dikonsumsi dan tidak berpotensi menimbulkan penyakit.
		Meningkatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum dan Puskesmas dengan menyediakan peralatan dan petugas kesehatan yang lebih baik
		Melakukan Penataan Pemukiman dan sarana prasarana. Khusus MCK dengan memberikan bantuan pembangunan toilet septic tank yang layak di masing-masing rumah penduduk secara bertahap.
		Memperbaiki bangunan drainase jalan dan membangun jalan drainase baru di pemukiman warga sehingga tidak menimbulkan penyakit akibat tidak dapat menampung aliran air dengan baik.
		Menambah petugas armada kebersihan bagian dari memelihara lingkungan yang sehat





Visi : “Mewujudkan Sibolga Sehat, Pintar dan Makmur”		
Tujuan	Sasaran	Strategi
		Memberikan penyuluhan secara kontinu untuk meningkatkan kesadaran kepada masyarakat tentang penting dan bermanfaatnya membuang sampah di tempatnya, dan pengelolaan sampah sebagai sumber ekonomi masyarakat.
<b>Misi 3 : Mewujudkan pemerataan pembangunan yang proporsional berbasis jumlah penduduk untuk menata pemukiman warga agar terciptanya lingkungan yang sehat dan infrastruktur kota yang terang dengan memanfaatkan tata ruang yang berwawasan kota pintar (<i>Smart City</i>).</b>		
Mewujudkan Pembangunan Kawasan yang Berkelanjutan;	Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung performa wilayah;	Melaksanakan program pembangunan yang proporsional dengan berbasis jumlah penduduk di suatu daerah, sehingga capaian pembangunan yang direncanakan/ diinginkan oleh masyarakat dapat terpenuhi
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;	Melaksanakan program perencanaan tata ruang dan pengawasan serta pemanfaatan ruang yang terintegrasi dengan memperhatikan daya dukung kota dalam rangka mewujudkan Kota Sibolga sebagai kota perdagangan dan jasa
		Pembangunan dan penataan Infrastruktur kota yang berkualitas dengan mengedepankan input perencanaan yang komprehensif (luas dan lengkap)
		Melakukan program pembangunan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman yang ramah lingkungan dengan sistem pemberdayaan dan swakelola masyarakat bagi kawasan padat pemukiman khususnya pembangunan jalan lingkungan, gorong-gorong drainase.



Visi : “Mewujudkan Sibolga Sehat, Pintar dan Makmur”		
Tujuan	Sasaran	Strategi
		Melakukan pembangunan dan perbaikan seluruh trotoar jalan di Kota Sibolga sehingga bermanfaat bagi pengguna jalan untuk mendukung mewujudkan Kota Sibolga sebagai kota tujuan wisata yang nyaman bagi pejalan kaki.
		Melakukan pemasangan dan penataan lampu jalan di setiap lingkungan.
		Melakukan perbaikan Infrastruktur pasar dan infrastruktur penunjang kegiatan perdagangan lainnya. Pembenahan pelabuhan ASP Sibolga yang menunjang kegiatan kepulauan Nias. Perdagangan barang dan sarana transportasi ke daerah
<b>Misi 4 : Mewujudkan Pendidikan yang berkualitas, memberikan subsidi penuh terhadap kebutuhan belajar 9 tahun, dan memberikan beasiswa bagi siswa berprestasi untuk melanjutkan studi ke Perguruan tinggi, serta Meningkatkan kesejahteraan guru</b>		
Mewujudkan Pendidikan Berkualitas	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Menyiapkan Anggaran untuk subsidi wajib belajar 9 tahun bagi keluarga sehingga dapat memenuhi kebutuhan mereka dalam pembiayaan sekolah anak mulai dari pakaian, sepatu, alat tulis dan beban dari kewajiban-kewajiban yang lainnya dan memberikan bantuan beasiswa bagi anak yang berprestasi sampai ke tingkat perguruan tinggi.
		Meningkatkan kesejahteraan guru honor, tenaga kependidikan dan guru berbasis agama.
		Menertibkan lokasi-lokasi permainan yang mengganggu aktivitas pelajar dengan mengatur jam operasionalnya dan memberikan sanksi bagi yang melanggar



Visi : “Mewujudkan Sibolga Sehat, Pintar dan Makmur”		
Tujuan	Sasaran	Strategi
		Melakukan razia secara terus menerus kepada anak-anak, remaja, pelajar yang bermain Game Warnet. Menerbitkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang aktivitas publik yang berpotensi merusak generasi bangsa.
<b>Misi 5 : Membuka lapangan kerja dan peluang berusaha dengan pemberdayaan masyarakat di bidang Ekonomi dan kewirausahaan serta menjalin kerjasama dengan pelaku ekonomi lainnya di Kota Sibolga maupun di luar Kota Sibolga.</b>		
Mewujudkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi;	Meningkatnya pendapatan masyarakat;	Membuka lapangan kerja dengan mendirikan perusahaan berbasis perikanan dan kelautan dengan melihat potensi wilayah
Mewujudkan Kesejahteraan Sosial;	Menurunkan Jumlah Penduduk Miskin;	Memberikan pelatihan-pelatihan kewirausahaan dan keterampilan kepada masyarakat agar ikan sebagai bahan baku dapat diolah menjadi produk kuliner, baik sebagai makanan basah maupun makanan kering seperti kerupuk ikan dan sebagainya. Memberikan bantuan modal dalam bentuk dana bergulir kepada masyarakat yang telah mampu membuka usaha. Menggalakkan usaha di bidang jasa wisata alam dan kuliner yang berimplikasi kepada terbukanya peluang pasar bagi produk-produk Membuka akses pasar dengan mendirikan BUMD Sandang untuk memudahkan pedagang memenuhi kebutuhan dagangan serta menampung penjualan produk-produk UMKM dengan membangun pasar singgah dan menjalin kerjasama dengan pengusaha ritel waralaba seperti: Indomaret, Alfamidi, Transmart dan lain-lain.

Sumber: Data diolah



## **6.1. Arah Kebijakan**

Arah Kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun.

Dalam rangka pencapaian Visi-Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sibolga Tahun 2021-2026 yang merupakan penjabaran visi-misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sibolga Tahun 2021-2026 dan perlu disusun rumusan arahan kebijakan pembangunan daerah Kota Sibolga 2021-2026 yang merupakan penjabaran dari strategi pembangunan berdasarkan tujuan dan sasaran pembangunan. Kebijakan umum pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintah daerah dengan rumusan indikator sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan arah kebijakan yang ditetapkan.

### **6.1.1. Arah Kebijakan dan Arah Kebijakan Umum Misi 1**

Arah Kebijakan untuk Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik:

1. Meningkatkan kinerja pemerintah daerah;
2. Meningkatkan manajemen pelayanan publik;
3. Meningkatkan kapasitas sumber daya dan partisipasi masyarakat dalam upaya memelihara ketertiban dan keamanan lingkungan.

Dengan rumusan arah kebijakan umum sebagai berikut:

1. Peningkatan sumberdaya aparatur yang berkarakter;
2. Peningkatan penggunaan teknologi informasi;
3. Peningkatan menejemen kinerja pemerintah daerah;
4. Peningkatan dan pengembangan inovasi daerah;
5. Peningkatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan;
6. Peningkatan kapasitas SDM dan sarana prasarana pelayanan publik;
7. Peningkatan upaya pengamanan dan penertiban.

### **6.1.2. Arah Kebijakan dan Arah Kebijakan Umum Misi 2**

Arah kebijakan untuk mewujudkan Sibolga Sehat dilakukan dengan cara:



1. Meningkatkan upaya promotif, preventif dan kuratif dan rehabilitatif kesehatan masyarakat;
2. Peningkatan kualitas pelayanan, Advokasi dan KIE keluarga berencana.

Arah kebijakan umum adalah:

1. Peningkatan promosi kesehatan, kesehatan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat;
2. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit;
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya kesehatan;
4. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;
5. Peningkatan pelayanan dan mengembangkan metode advokasi dan KIE keluarga berencana.

#### 6.1.3. Arah Kebijakan dan Arah Kebijakan Umum Misi 3

Arah Kebijakan Untuk Mewujudkan pembangunan berbasis kawasan dengan mengoptimalkan sumber daya alam dan didukung oleh teknologi serta infrastruktur yang berkualitas meliputi:

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah dengan mengutamakan kawasan pusat pertumbuhan;
2. Peningkatan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
3. Peningkatan perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang dan pertanahan;
4. Peningkatan mitigasi bencana dan peningkatan pelayanan tanggap darurat bencana.

Dengan rumusan arah kebijakan umum sebagai berikut:

1. Membangun infrastruktur dan sarana prasarana transportasi pada kawasan pusat pertumbuhan;
2. Peningkatan manajemen dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan;
3. Peningkatan manajemen dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan tata ruang dan pertanahan;
4. Peningkatan peran masyarakat dalam penanganan bencana.



#### 6.1.4. Arah Kebijakan dan Arah Kebijakan Umum Misi 4

Arah kebijakan untuk mewujudkan Sibolga Pintar adalah:

1. Mewujudkan wajib belajar 12 tahun dan mengimplementasikan pendidikan karakter;
2. Meningkatkan pembinaan pengelolaan perpustakaan.

Dengan rumusan arah kebijakan umum sebagai berikut:

1. Memenuhi kebutuhan sarana prasarana secara bertahap;
2. Mengintegrasikan pendidikan karakter dalam kurikulum muatan lokal dan meningkatkan peran masyarakat dalam pendidikan karakter;
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
4. Meningkatkan sarana dan kapasitas sumber daya manusia perpustakaan.

#### 6.1.5. Arah Kebijakan dan Arah Kebijakan Umum Misi 5

Arah Kebijakan untuk mewujudkan Sibolga Makmur dengan menciptakan sistem perekonomian yang berbasis kerakyatan meliputi:

1. Peningkatan pemberdayaan usaha industri, perdagangan, koperasi, dan UMKM;
2. Peningkatkan kapasitas tenaga kerja, pengembangan kesempatan kerja dan perlindungan ketenagakerjaan;
3. Peningkatan kontinuitas, kuantitas dan kualitas produk perikanan;
4. Pengembangan pariwisata berbasis kawasan dan masyarakat ;
5. Peningkatan fasilitasi dan mendorong iklim investasi yang kondusif;
6. Peningkatan partisipasi dan penguatan kelembagaan masyarakat;
7. Peningkatan upaya perlindungan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan pengarusutamaan gender.

Dengan rumusan arah kebijakan umum sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pelaku usaha dan sarana prasarana perdagangan;
2. Peningkatan kelembagaan, permodalan dan pemberdayaan industri;
3. Peningkatan kelembagaan, permodalan dan pemberdayaan UMKM;
4. Meningkatkan produktivitas perikanan dan peningkatan diversifikasi pangan;
5. Meningkatkan kapasitas pelaku dan sarana prasarana pariwisata;



6. Peningkatkan pelayanan dan promosi investasi;
7. Peningkatkan pelatihan dan penempatan tenaga kerja;
8. Peningkatkan partisipasi dan penguatan kelembagaan masyarakat;
9. Peningkatkan fasilitasi dan bantuan perlindungan sosial;
10. Peningkatan kapasitas PUG dan perlindungan perempuan dan anak.

Selanjutnya dari masing-masing strategi pembangunan dirumuskan menjadi program pembangunan. Adapun Program Pemerintah Kota Sibolga untuk mewujudkan indikator sasaran daerah adalah:



Tabel 13  
**Tujuan, Sasaran Dan Program Pembangunan Daerah**

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi awal 2020	Target					Kondisi Akhir 2026	Program prioritas	OPD
					2021	2022	2023	2024	2025			
<b>Misi 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang <i>Good Governance</i> dengan Transparan dan Akuntabel</b>												
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik;		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	C	C	B	B	B	B	A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Sekdakot
		Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai	n/a	1,80	2,00	2,20	2,50	2,60	2,80	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Kominfo
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel;		Nilai Akuntabilitas Kinerja Daerah (AKIP)	Angka	-	CC	B	B	B	B	B	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sekdakot
		Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKPAD
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks		76,61	76,65	76,80	77,20	77,50	77,55	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sekdakot





Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi awal 2020	Target					Kondisi Akhir	Program prioritas	OPD	
					2021	2022	2023	2024	2025				2026
		Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	Indeks	0,527	2,6592	2,6625	2,6700	2,6775	2,6850	2,700	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Bappeda	
<b>Misi 2 : Mewujudkan dan Meningkatkan kesehatan masyarakat serta pelayanan sehingga dapat melahirkan masyarakat yang cerdas, menuju masyarakat yang makmur</b>													
Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai	73,63	73,80	73,85	73,9	74,94	75,00	75,08	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan, RSUD FL Tobing, Dinas Pendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	Angka	69,01	69,05	69,27	69,48	69,70	69,91	70,13				
	Angka Kematian Ibu	Angka	53,7	217	205	194	183	183	183				
	Angka Kematian Bayi	Angka	3,8	19	18	17	15	13	11				
	Angka Kematian Balita	Angka	0	30	29	28	27	26	25				
	Prevalensi wasting pada Balita	Persen	2%	7%	7%	7%	6%	6%	6%				
	Prevalensi Angka Stunting	Persen	3,94%	10%	9,5%	9%	8,5%	8%	8,0%				
	Kualitas Makanandan Minuman	Persen	85%	87%	89%	91%	92%	94%	95%				Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan KB



Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi awal 2020	Target					Kondisi Akhir	Program prioritas	OPD
					2021	2022	2023	2024	2025			
		Penanganan Penyakit Tidak Menular	Persen	97,66%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
		Ketersediaan Alat Kesehatan Sesuai Standar	Persen	60%	64%	68%	72%	76%	80%	82%	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Dinas Kesehatan
		Tenaga Kesehatan Persatuan Penduduk	Rasio	10,6	10,7	10,8	10,9	11	11	11,1	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	
		Puskesmas Menjadi BLUD	Unit	0	0	0	1	3	5	5 Puskesmas		
		Kelurahan Stop BABS	Persen	0%	5,9%	17,6%	29,4%	41,2%	52,9%	64,7%	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan, RSU FL Tobing, Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
		Pola Pangan Harapan (PPH)	Angka	90%	91%	92%	93%	94%	95%	96%	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan dan Pertanian



Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi awal 2020	Target					Kondisi Akhir 2026	Program prioritas	OPD
					2021	2022	2023	2024	2025			
<b>Misi 3 : Mewujudkan pemerataan pembangunan yang proporsional berbasis jumlah penduduk untuk menata pemukiman warga agar terciptanya lingkungan yang sehat dan infrastruktur kota yang terang dengan memanfaatkan tata ruang yang berwawasan kota pintar (Smart City).</b>												
Mewujudkan Pembangunan Kawasan yang Berkelanjutan		Indeks Resiko Bencana	Indeks	167,20	167,20	151,30	147,70	137,80	137,80	129,40	Program Pencegahan dan Kesiapan siaga Bencana	BDBD
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;	Indeks Kualitas Udara	Nilai	n/a	91,63	91,73	91,83	91,93	92,03	92,13	Program Pengendalian Pencemaran Dan / Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	PKPLH
		Indeks Kualitas Air	Nilai	n/a	53,71	53,81	53,91	54,01	54,11	54,21		
		Indeks Kualitas Lingkungan	Nilai	n/a	43,96	45,68	47,41	49,14	50,87	52,59		
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	n/a	66,93	67,39	67,84	68,30	68,76	69,21		
	Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung performa wilayah;	RPPLH Kota Sibolga	Ada/Tidak	Tidak	Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	PKPLH



Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi awal 2020	Target					Kondisi Akhir 2026	Program prioritas	OPD
					2021	2022	2023	2024	2025			
		Air Minum Layak dan Berkelanjutan	Persen		67,99 %	73,41 %	78,83 %	84,25 %	89,67%	95,09%	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Rumah Tangga Bersanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Persen		65,00 %	68,00 %	75,00 %	80,00 %	85,00%	90,00%	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
<b>Misi 4 : Mewujudkan Pendidikan yang berkualitas, memberikan subsidi penuh terhadap kebutuhan belajar 9 tahun, dan memberikan beasiswa bagi siswa berprestasi untuk melanjutkan studi ke Perguruan tinggi, serta Meningkatkan kesejahteraan guru</b>												
Mewujudkan Pendidikan Ber kualitas		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai	73,63	73,80	73,85	73,9	74,94	75,00	75,08	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Rata- Rata Lama Sekolah	Angka	10,40	10,41	10,42	10,50	10,59	10,67	10,76	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Harapan Lama Sekolah	Angka	13,16	13,65	13,81	13,97	14,13	14,30	14,46		
<b>Misi 5 : Membuka lapangan kerja dan peluang berusaha dengan pemberdayaan masyarakat di bidang Ekonomi dan kewirausahaan serta menjalin kerjasama dengan pelaku ekonomi lainnya di Kota Sibolga maupun di luar Kota Sibolga.</b>												



Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi awal 2020	Target					Kondisi Akhir 2026	Program prioritas	OPD
					2021	2022	2023	2024	2025			
Mewujudkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi;		Pertumbuhan Ekonomi	Persen	-1,36	2,74	3,00	4,00	5,20	5,55	5,90		
Mewujudkan Kesejahteraan Sosial;		Gini Rasio	Rasio	0,290	0,280	0,2760	0,2740	0,270	0,265	0,260	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Bappeda, Dinsos, Kop UKM dan Ketenagakerjaan
		Angka Kemiskinan	Persen	11,95	11,90	11,00	10,00	9,80	9,50	9,14	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Bappeda dan Dinas Sosial
		Angka Pengangguran	Jiwa	5533	5300	5070	4840	4610	4380	4150	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Bappeda, Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan
	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Pendapatan Per kapita Penduduk (Juta)	Rupiah	62,57	64,32	66,12	67,92	69,72	71,52	73,32	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Bappeda, Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan



Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi awal 2020	Target					Kondisi Akhir 2026	Program prioritas	OPD
					2021	2022	2023	2024	2025			
	Menurun kan Jumlah Penduduk Miskin;	Pendapatan Daerah	Rupiah	79.539.316.412	89.181.856.201	89.504.186.535	99.921.203.656	108.106.881.827	116.984.434.387	126.802.647.344	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	BPKPAD
		Indeks Pembangunan Gender	Indeks	97,63	97,73	97,83	97,93	98,03	98,13	98,23	Program Perlindungan Perempuan	PMK PP PA
		Indeks Kesetaraan Gender	Indeks		73,53	74,03	74,53	75,03	75,53	76,03		
		Meningkatnya Jumlah Ekonomi Kreatif	Unit		5	5	5	5	5	5	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pariwisata, Koperasi dan Ketenagakerjaan, Perindag

Sumber: Data Diolah

Untuk keterkaitan Target Dana Indikatif dan Kinerja Program tersaji pada Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah dan pada Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

### Indikasi Prioritas Tema Perencanaan Tahunan Kota Sibolga 2021-2026

Dengan tema pembangunan tiap tahun tersebut pembangunan di Sibolga mengarah pada konsep pembangunan yang holistik, integratif dan spasial dengan memprioritaskan pada pembangunan kawasan pusat pertumbuhan sesuai dengan potensi unggulan di masing-masing kawasan tanpa meninggalkan pembangunan di kawasan yang lain dalam rangka tetap mengimplementasikan prinsip pemerataan pembangunan.

Dengan konsep dan prinsip tersebut dengan memperhitungkan kemampuan keuangan daerah dan dukungan keuangan dari pihak lain dalam membangun kawasan secara terintegrasi dilakukan secara bertahap sesuai tema tersebut di atas.

#### Tahun Pertama

Membangun kawasan dengan menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur dalam arti luas untuk mendorong pengembangan sektor-sektor yang lain dalam kawasan tersebut. Dan tema ini berlanjut sampai dengan kawasan mampu tumbuh secara mandiri yang diharapkan untuk beberapa kawasan selesai akhir RPJMD.

#### Tahun Kedua

**Pembangunan kawasan diarahkan** meningkatkan **manfaat potensi** yang ada dari aspek ekonomi dengan tetap mengutamakan dukungan pembangunan sumberdaya manusia.

#### Tahun ketiga

**Tahapan pembangunan diarahkan untuk** mengembangkan pembangunan kawasan yang lain dengan tetap melanjutkan tahapan

sebelumnya dengan lebih diarahkan pada pengembangan fungsi kawasan, dengan tetap mengutamakan dukungan pembangunan sumberdaya manusia.

#### Tahun Keempat

Pembangunan lebih diarahkan untuk memantapkan kawasan yang sudah terbangun dengan tetap mengutamakan dukungan pembangunan sumberdaya manusia.

Pada tahapan ini pembangunan kawasan diarahkan untuk lebih mengutamakan penataan sistem pengelolaan kawasan.

#### Tahun Kelima

Pembangunan lebih diarahkan untuk mengoptimalkan kawasan yang sudah terbangun dengan tetap mengutamakan dukungan pembangunan sumber daya manusia.

Pada tahapan ini semua potensi pada kawasan pusat pertumbuhan diharapkan sudah dimanfaatkan secara optimal dan mampu memberikan tambahan pendapatan yang signifikan bagi masyarakat dan daerah.

Tahapan pembangunan 5 tahunan selalu dilakukan secara terintegrasi dengan pembangunan Sumber Daya Manusia, dengan maksud agar pembangunan kawasan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai budaya lokal dan berorientasi pada prinsip kelestarian lingkungan hidup. Selain tema pembangunan di atas, Program Rencana Prioritas Pembangunan Kota Sibolga dalam 5 tahun mendatang difokuskan pada:

1. Peningkatan sarana dan prasarana perkotaan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan menata permukiman yang layak dan nyaman.
2. Peningkatan sarana dan prasarana perekonomian menuju Kota Sibolga Sebagai Kota Perdagangan Barang dan Jasa.
3. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan serta peningkatan kualitas tenaga kesehatan.
4. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan serta memberikan perhatian khusus kepada siswa berprestasi Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi serta meningkatkan pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi dan inovasi.



## KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Kerangka pendanaan pembangunan daerah merupakan kapasitas kemampuan riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah selama 5 (lima) tahun ke depan. Kapasitas kemampuan riil adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran yang wajib dan mengikat. Indikasi rencana program prioritas Kota Sibolga berisi program-program untuk mencapai visi dan misi jangka menengah dan pemenuhan layanan OPD dalam menjalankan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pilihan serta Fungsi Penunjang. Rincian kebutuhan pendanaan dirinci dengan pagu indikatif dana yang dibutuhkan dalam pencapaian indikator kinerja program (outcomes) yang telah ditetapkan.

Dalam menyusun perencanaan pendanaan ini berusaha menerapkan prinsip “money follow program” sebagaimana arahan Presiden Republik Indonesia pada sidang Kabinet tanggal 10 Februari 2016, bahwa penyusunan perencanaan dan penganggaran harus merubah dari paradigma “money follow function” menjadi “money follow program”. Hal ini berarti bahwa pengalokasian anggaran atau dana tidak lagi sekedar mengikuti fungsi struktur kelembagaan yang ada, tetapi anggaran harus dioptimalkan untuk mendukung pencapaian program-program prioritas yang terkait langsung dengan pencapaian visi misi dan pelayanan masyarakat. Konsep “money follow function” selama ini mengandung kelemahan, anggaran justru diorientasikan untuk membiayai fungsi atau organisasi birokrasi yang mahal untuk menjalankan kegiatannya. Akibatnya program-program strategis dan prioritas belum mendapatkan porsi anggaran yang memadai sebagai program unggulan daerah.

Ada beberapa kendala yang menyebabkan penyusunan pagu indikatif tidak bisa secara ideal dilakukan, sehingga konsep “money follow program” belum mampu diaplikasikan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain:

1. Banyaknya kewajiban dari Pemerintah Pusat yang harus dipenuhi oleh daerah dalam bentuk belanja wajib dan diarahkan, seperti: pemenuhan kewajiban alokasi dana untuk bidang pendidikan minimal 20%, bidang kesehatan minimal 10%, Dana transfer wajib digunakan untuk belanja modal publik minimal 25% dan dana bagi hasil yang peruntukannya sebagian besar sudah ditentukan. Kondisi tersebut menyebabkan sangat terbatasnya potensi dana yang bisa diarahkan secara ideal untuk mendanai program-program prioritas daerah.
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan salah satu potensi dana yang besarnya cukup signifikan untuk mendanai program-program pembangunan di daerah akan tetapi besarnya belum dapat dimasukkan dalam proyeksi pendapatan dan kerangka

pendanaan APBD sebelum ada aturan yang ditetapkan dan dipublikasikan serta dalam melaksanakan harus sesuai dengan petunjuk dari Pemerintah, sehingga dengan kondisi tersebut daerah tidak leluasa dalam penggunaannya untuk mendanai program prioritas daerah.

3. Potensi dana yang bisa cukup leluasa diarahkan untuk pendanaan program prioritas bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun jumlahnya tidak terlalu signifikan untuk mendesain pagu indikatif secara ideal. PAD Kota Sibolga hingga tahun 2020 hanya berkontribusi sebesar 12,88% dari total pendapatan daerah.

Namun demikian penyusunan pagu indikatif tersebut tetap diupayakan mengacu ketentuan yang ada, namun karena berbagai keterbatasan tersebut ada beberapa kebijakan daerah yang harus dilakukan untuk mengatasinya sehingga diperoleh solusi yang lebih realistis dan rasional. Secara umum beberapa pertimbangan yang dipergunakan sebagai penghitung pagu indikatif antara lain:

pemenuhan kewajiban belanja wajib mengikat, prioritas-prioritas daerah terkait pencapaian visi misi jangka menengah, belanja untuk membiayai urusan wajib bersifat pelayanan dasar, dan belanja- belanja prioritas yang sifatnya mendukung pencapaian kinerja daerah. Program-program telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis OPD, termasuk dalam menjabarkan kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaan.

Pencapaian kinerja kepala daerah yang bersifat dampak (impacts) merupakan agregasi program yang dilaksanakan juga didukung program/kegiatan yang bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Utara, APBN, Dana Kelurahan, Swasta, Masyarakat dan sumber dana lainnya yang tidak mengikat. Mengingat kemampuan kemampuan daerah dalam membiayai program pembangunan tersebut sangat terbatas maka dalam Bab VII ini matrik yang ditampilkan bersumber dari APBD Kota Sibolga sesuai dengan kemampuan keuangan daerah sebagaimana yang tercantum dalam Bab III dan program program yang direncanakan pembiayaannya dengan pihak lain. Adapun Sumber Pendanaan dan Program pembangunan yang direncanakan dengan pendanaan pembangunan bersumber dari dana APBD Kota Sibolga sebagai berikut.



Tabel 14

Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Sibolga Tahun 2021-2026

No	Urusan	Program	Indikator	Pagu Indikatif												OPD
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	
	Urusan Wajib Pelayanan Dasar															
1	Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Cakupan Pembinaan anak PAUD dan Pendidikan Dasar	28.874.310.000	100%	29.163.054.000	100%	29.454.685.000	100%	29.749.232.000	100%	30.046.725.000	100%	30.347.193.000	100%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Cakupan Pembinaan, Pelayanan dan Pelatihan PTK PAUD dan Pendidikan Dasar	2.253.309.520	100%	2.275.843.000	100%	2.503.427.300	100%	2.753.770.030	100%	3.029.147.033	100%	3.332.061.736	100%	
2	Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	37.978.713.529	100	38.738.287.800	100	39.513.053.556	100	40.303.314.627	100	41.109.380.919	100	41.931.568.538	100	Dinas Kesehatan
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya	74.854.500	3,5	76.351.590	0,042	77.878.622	4,9	79.436.194	5,6	81.024.918	6,3	82.645.416	7,0	
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan	Persentase Makanan dan Minuman yang memenuhi syarat	591.833.400	90	603.670.068	92	615.743.469	95	628.058.339	97	640.619.506	98	653.431.896	100	



No	Urusan	Program	Indikator	Pagu Indikatif												OPD
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	
		Makanan Minuman														
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	484.687.100	35	494.380.842	40	504.268.459	45	514.353.828	50	524.640.905	55	535.133.723	60	
	Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Cakupan dalam Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat.	7.193.000.000	100 %	67.118.851.900	100 %	89.317.606.400	100 %	61.052.351.300	100 %	18.530.150.600	100 %	60.311.356.800	100 %	RSU F L Tobing



No	Urusan	Program	Indikator	Pagu Indikatif												OPD
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan yang terpenuhi	90.000.000	100 %	120.000.000	100 %	120.000.000	100 %	120.000.000	100 %	120.000.000	100 %	120.000.000	100 %	
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Capaian pengeolaansumber daya air	-		66.110.000.000	5645	66.771.100.000	5701	67.438.811.000	5758	68.113.199.110	5816	68.794.331.101	5874	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Program Pengeloaandan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Cakupan layanan airbersih	366.647.614	67.90	370.314.090	73.41	374.017.231	78.83	377.757.403	84.25	381.534.977	89.67	385.350.327	95.09	
		Program Pengeloaandan Pengembangan Sistem Air Limbah	Capaian akses air limbah layak	2.292.661.415	65	400.000.000	68	404.000.000	75	408.040.000	80	412.120.400	85	416.241.604	90	
		Program Pengeloaandan Pengembangan Sistem Drainase	Capaian akses air limbah layak	289.990.260	4.74	48.963.315.000	5.09	49.452.948.150	5.45	49.947.477.632	5.81	50.446.952.408	6.16	50.951.421.932	6.52	
		Program Penataan Bangunan Gedung	Capaian penataan bangunan gedung	10.799.834.471	53.13	411.005.000.000	54.01	415.115.050.000	54.88	419.266.200.500	56.15	423.458.862.505	57.42	427.693.451.130	58.69	
		Program Penyelenggaraan Jalan	Capaian panjang jalan	23.079.968.707	43.23	153.074.296.784	45.39	154.605.039.751	47.63	156.151.090.149	49.88	157.712.601.050	51.00	159.289.727.061	53.24	



No	Urusan	Program	Indikator	Pagu Indikatif												OPD
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Capaian penataan ruang	750.000.000	1	757.500.000	2	765.075.000	3	772.725.750	3	780.453.008	3	788.257.538	3	
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Pengembangan Perumahan	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman di perumahan	77.199.819	100	77.972.000	100	85.769.200	100	94.346.120	100	103.780.732	100	114.158.805	100	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup
		Program Kawasan Permukiman	Cakupan ketersediaan rumah tidak layak huni	2.444.241.387	73	2.468.684.000	74	2.715.552.400	75	2.987.107.640	76	3.285.818.404	77	3.614.400.244	78	



No	Urusan	Program	Indikator	Pagu Indikatif												OPD
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (Psu)	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	3.094.019.800	80	3.124.960.000	80	3.437.456.000	80	3.781.201.600	80	4.159.321.760	80	4.575.253.936	80	
5	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kota Sibolga	874.524.000	70	883.270.000	77	892.103.000	80	901.025.000	85	910.036.000	87	919.137.000	90	Dinas Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Layanan Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	473.240.000	100	477.973.000	100	482.753.000	100	487.581.000	100	492.457.000	100	497.382.000	100	
		Program Pencegahan Kesiapsiagaan Bencana	Peningkatan pengurangan resiko bencana	507.625.000	100	512.701.250	100	517.828.263	100	523.006.545	100	528.236.611	100	533.518.977	100	BPBD
		Program Pelayanan Informasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang mendapat informasi dan pengetahuan tentang bencana	379.331.000	100	383.124.310	100	386.955.553	100	390.825.109	100	394.733.360	100	398.680.693	100	
6	Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Capaian Program Pemberdayaan Sosial	861.500.000	20	870.115.000	30	878.817.000	40	887.606.000	60	896.483.000	80	905.448.000	100	Dinas Sosial



No	Urusan	Program	Indikator	Pagu Indikatif												OPD
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	
		Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Capaian Program Rehabilitasi Sosial	383.305.350	20	387.139.000	30	391.011.000	40	394.922.000	60	398.872.000	80	402.861.000	100	
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Capaian Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	4.829.018.100	20	4.877.309.000	30	4.926.083.000	40	4.975.344.000	60	5.025.098.000	80	5.075.349.000	100	





No	Urusan	Program	Indikator	Pagu Indikatif												OPD
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	
		Program Penanganan Bencana	Persentase Capaian Program Penanganan Bencana	469.612.500	60	474.309.000	70	479.053.000	80	483.844.000	80	488.683.000	90	493.570.000	100	
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Capaian Program Pemberdayaan Sosial	44.008.284	20	44.449.000	50	44.894.000	60	45.343.000	70	45.797.000	80	46.255.000	100	
	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar															
7	Tenaga Kerja	Program Hubungan Industrial	Angka sengketa pengusaha pekerja pertahun	512.500.000	80	517.625.000	80	522.802.000	80	528.031.000	80	533.312.000	80	538.646.000	80	Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Besaran pencari kerjayang terdaftar yang ditempatkan	70.000.000	40	70.700.000	45	71.407.000	50	72.122.000	60	72.844.000	70	73.573.000	80	
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Besaran tenaga kerjayang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	330.000.000	70	333.300.000	70	336.633.000	75	340.000.000	75	343.400.000	80	346.834.000	80	
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Perlindungan Perempuan	Terpenuhinya Perlindungan Perempuan	-	1	154.435.000	1	155.979.350	1	157.539.144	1	159.114.535	1	160.705.680	1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kerluurahan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Progra Perlindungan Khusus Anak	Terlaksananya Perlindungan KhususAnak	-	1	40.000.000	1	40.400.000	1	40.804.000	1	41.212.040	1	41.624.160	1	



No	Urusan	Program	Indikator	Pagu Indikatif												OPD
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	
9	Pangan	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Capaian Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk kedaulatan dan Kemandirian Pangan	17.857.100	52	18.036.000	55	18.217.000	55	18.400.000	55	18.584.000	55	18.770.000	55	Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan Dan Pertanian
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Capaian Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	31.033.800	1	31.345.000	1	31.659.000	1	31.976.000	1	32.296.000	1	32.619.000	1	
10	Lingkungan Hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	433.398.040	Tidak	320.000.000	Ada	352.000.000	Ada	387.200.000	Ada	425.920.000	Ada	468.512.000	Ada	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		Program Pengendalian Pencemaran dan /Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air, Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara, Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan	138.020.200	1,0 ≤ IP ≤ 5,0	192.850.000	1,0 ≤ IP ≤ 5,0	212.135.000	1,0 ≤ IP ≤ 5,0	233.348.500	1,0 ≤ IP ≤ 5,0	256.683.350	1,0 ≤ IP ≤ 5,0	282.351.685	1,0 ≤ IP ≤ 5,0	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Ketersediaan keanekaragaman hayati	844.259.516	Ada	1.016.000.000	Ada	1.117.600.000	Ada	1.229.360.000	Ada	1.352.296.000	Ada	1.487.525.600	Ada	



No	Urusan	Program	Indikator	Pagu Indikatif												OPD
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	248.008.800	0	103.310.000	0	113.641.000	1	125.005.100	1	137.505.610	1	151.256.171	1	
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	44.925.000	Ada	44.925.000	Ada	49.417.500	Ada	54.359.250	Ada	59.795.175	Ada	65.774.693	Ada	



No	Urusan	Program	Indikator	Pagu Indikatif												OPD
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	
		Program Pengelolaan Persampahan	Persentase jumlah sampah yang tertangani	4.324.530.250	75	92.216.462.750	80	101.438.109.025	85	111.581.919.928	90	122.740.111.920	95	135.014.123.112	100	
11	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan pendaftaran penduduk	29.365.500	71.14	29.659.155	73.57	29.955.747	74.57	30.255.304	75.42	30.557.857	77	30.863.436	77.85	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Pencatatan Sipil	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan pencatatan sipil	37.001.400	87.64	37.371.414	88.71	37.745.128	89.55	38.122.579	90.57	38.503.805	91.48	38.888.843	92.57	
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Meningkatnya pendayagunaan data kependudukan untuk semua keperluan	879.363.250	75.7	888.156.883	80	897.038.451	87.14	906.008.836	91.4	915.068.924	95.7	924.219.613	100	
12	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Program Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga masyarakat, lembaga adat, dan masyarakat Hukum Adat	1.232.320.848	6	2.865.153.000	6	2.893.804.530	6	2.922.742.575	6	2.951.970.001	6	2.981.489.701	6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak



No	Urusan	Program	Indikator	Pagu Indikatif												OPD
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	
13	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pengendalian Penduduk	Data-data keluarga dapat disajikan	550.000.000	20	555.500.000	30	561.055.000	40	566.665.550	50	572.332.206	60	578.055.528	70	DPP KB



No	Urusan	Program	Indikator	Pagu Indikatif												OPD
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	
		Program Pembinaan Keluarga Berencana(Kb)	Pasangan Usia Subur (PUS) dapat mengetahui informasi KB agar pencapatab pemakaian alat kontrasepsi meningkat	800.000.000	20	808.000.000	30	816.080.000	40	824.240.800	50	832.483.208	60	840.808.040	70	
		Program Pembinaan Kelurga Sejahtera	Pasangan Usia Subur(PUS) yang menjadi peserta KB dapat dipantau agar angka unmed ned berkurang	600.000.000	20	606.000.000	30	612.060.000	40	618.180.600	50	624.362.406	60	630.606.030	70	
14	Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Llaj)	Persentase Cakupan Pelayanan Transportasi Yang Layak	1.095.587.556	100%	1.106.543.432	100%	1.117.608.866	100%	1.128.784.955	100%	1.140.072.804	100%	1.151.473.532	100%	Dinas Perhubungan
		Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Cakupan Pengelolaan Pelayaran	197.100.000	100%	199.071.000	100%	201.061.710	100%	203.072.327	100%	205.103.050	100%	207.154.081	100%	
15	Komunikasi dan Informatika	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Informasi Publik Pemerintah Daerah Yang dipublikasikan	314.331.900	80	317.476.000	91	349.223.600	95	384.145.960	100	422.560.556	100	464.816.612	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Pelayanan Publik berbasis Teknologi Informasi	2.311.769.700	4	2.311.769.700	5	2.311.769.700	5	2.311.769.700	6	2.311.769.700	7	2.311.769.700	7	
16	Koperasi Usaha	Program Pengawasan dan	Persentase koperasi aktif	250.000.000	72	250.000.000	72.72	250.000.000	73.45	260.000.000	74.18	265.000.000	74.92	275.000.000	75.67	Dinas Koperasi



No	Urusan	Program	Indikator	Pagu Indikatif												OPD
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	
	Kecil Menengah	Pemeriksaan Koperasi														UKM dan Ketenagakerjaan
		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase UKM NonBPR/ LKM aktif	46.000.000	72	46.460.000	72.72	51.106.000	73.45	56.216.600	74.18	61.838.260	74.92	68.022.086	75.67	



No	Urusan	Program	Indikator	Pagu Indikatif												OPD
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	
		Program Pengembangan Umkm	Persentase usaha mikro dan kecil	245.000.000	99	250.000.000	100	255.000.000	100	260.000.000	100	265.000.000	100.00	270.000.000	100.00	
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (Umkm)	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif	140.000.000	5	145.000.000	5	150.000.000	5	150.000.000	5	160.000.000	5	165.000.000	5	
17	Penanaman Modal	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Inflasi, potensi investasi, JUMLAH penduduk, kebijakan Daerah, Potensi Daerah Pendamping	300.000.000	85	300.000.000	86	250.000.000	87	250.000.000	88	300.000.000	88	500.000.000	89	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
		Program Promosi Penanaman Modal	Kebijakan daerah, Produk dan potensi daerah,	125.000.000	87	126.250.000	88	138.875.000	89	152.762.500	90	168.038.750	91	184.842.625	91	Satu Pintu
		Program Pelayanan Penanaman Modal	SOP, Indeks Kepuasan Pelayanan, Kebijakan daerah	293.000.000	87	293.000.000	88	293.000.000	89	293.000.000	90	293.000.000	91	293.000.000	91	
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	LKPM, pemantauan, Pengawasan	350.000.000	85	350.000.000	86	350.000.000	87	350.000.000	88	350.000.000	88	350.000.000	89	
		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Aplikasi, Jumlah data,	284.000.000	88	286.840.000	89	315.524.000	90	347.076.400	91	381.784.040	92	419.962.444	92	





18	Kepemudaan dan Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Presentase Organisasi Pemuda yang Aktif	1.512.085.908	65.00	1.532.885.368	65.65	1.548.214.222	66.31	1.563.696.364	66.97	1.579.333.328	67.64	1.595.126.661	68.32	Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga
		Program Pengembangan Organisasi Kapasiatas	Cakupan Organisasi Pemuda yang aktif	79.999.900	65.00	80.799.899	65.65	81.607.898	66.31	82.423.977	66.97	83.248.217	67.64	84.080.699	68.32	



No	Urusan	Program	Indikator	Pagu Indikatif												OPD
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	
		Kepramukaan														
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Jumlah atlet Berprestasi	1.128.886.150	1	1.140.176.000	5	1.254.193.600	6	1.379.612.960	8	1.517.574.256	8	1.669.331.682	8	
19	Statistik	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Data Statistik Sektoral yang Dipublikasikan	15.960.000	100	16.120.000	100	17.732.000	100	19.505.200	100	21.455.720	100	23.601.292	100	Dinas Komunikasi Dan Informatika
20	Persandian	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan Layanan Persandian	51.710.000	-	52.228.000	17	57.450.800	23	63.195.880	33	69.515.468	43	76.467.015	50	Dinas Komunikasi Dan Informatika
21	Kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan	1.342.162.998	1	1.355.585.000	1	1.369.141.000	1	1.382.833.000	1	1.396.662.000	1	1.410.629.000	1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	697.435.000	1	704.410.000	1	711.455.000	1	718.570.000	1	725.756.000	1	733.014.000	1	
		Program Pembinaan Sejarah	Program Pembinaan Sejarah	648.884.500	1	655.374.000	1	661.928.000	1	668.548.000	1	675.234.000	1	681.987.000	1	
		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	1.566.029.188	5	1.581.690.000	5	1.597.507.000	5	1.613.483.000	5	1.629.618.000	5	1.645.915.000	5	
		Program Pengelolaan Permuseuman	Program Pengelolaan Permuseuman	2.649.000.000	1	2.675.490.000	1	2.702.245.000	1	2.729.268.000	1	2.756.561.000	1	2.784.127.000	1	



No	Urusan	Program	Indikator	Pagu Indikatif												OPD
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	
22	Perpustakaan	Program Pembinaan Perpustakaan	Jumlah Pengunjung perpustakaan	1.788.500.000	20,000	1.806.385.000	22,000	1.824.448.850	24,000	1.842.693.339	26,000	1.861.120.272	27,000	1.879.731.475	28,000	Dinas Perpustakaan
		Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Jumlah naskah Kunoyang dilestarikan	180.000.000	2	181.800.000	3	183.618.000	3	185.454.180	4	187.308.722	4	189.181.809	5	
23	Kearsipan	Program Pengelolaan Arsip	Cakupan Pengelolaan Arsip	615.500.000	- 50 Arsip - 3 Orang	621.655.000	- 50 Arsip - 3 Orang	627.871.550	- 50 Arsip - 3 Orang	634.150.266	- 50 Arsip - 3 Orang	640.491.768	- 50 Arsip - 3 Orang	646.896.686	- 50 Arsip - 3 Orang	Dinas Perpustakaan
		Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	124.325.000	50 Arsip	125.568.250	50 Arsip	126.823.933	50 Arsip	128.092.172	50 Arsip	129.373.094	50 Arsip	130.666.824	50 Arsip	
Urusan Pilihan																
24	Kelautan Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase Cakupan Pengelolaan Perikanan Tangkap	3.157.711.600	933	3.189.289.000	950	3.221.182.000	950	3.253.394.000	975	3.285.928.000	975	3.318.788.000	975	Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan Dan Pertanian
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase Cakupan Pengelolaan Perikanan Budidaya	103.576.556	7 / 13.150	104.613.000	7 / 13.500	105.660.000	7 / 13.500	106.717.000	8 / 14.000	107.785.000	8 / 14.000	108.863.000	8 / 14.000	
		Prgram Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Cakupan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	49.514.140	104	50.010.000	110	50.511.000	120	51.017.000	125	51.528.000	130	52.044.000	130	



No	Urusan	Program	Indikator	Pagu Indikatif												OPD
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	
25	Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah Destinasi Wisata Yang dikembangkan	1.926.654.545	0	40.476.930.000	10	40.881.699.300	10	41.290.516.293	10	41.703.421.456	10	42.120.455.670	10	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
		Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Kenaikan Kunjungan Wisata	913.623.250	3	1.160.564.100	3	1.172.169.741	3	1.183.891.438	3	1.195.730.353	3	1.207.687.656	3	
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	340.986.600	27	696.165.000	30	703.126.650	33	710.157.917	36	717.259.496	39	724.432.091	42	



No	Urusan	Program	Indikator	Pagu Indikatif												OPD
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	
26	Pertanian	Program Pengendalian Kesehatan Hewandan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Capaian Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	127.354.532	1000	128.629.000	1000	129.916.000	1000	131.216.000	1000	132.529.000	1000	133.855.000	1000	Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan Dan Pertanian
27	Kehutanan	Tidak Ada OPD Yang Menangani	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	---
28	Energi dan Sumber Daya Mineral	Tidak Ada OPD Yang Menangani	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	---
29	Perdagangan	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase komoditi/produk yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	228.094.000	100	659.277.000	100	665.869.770	100	672.528.468	100	679.253.752	100	686.046.290	100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal	1.086.456.198	14,10	1.101.609.500	15,51	1.112.625.595	17,07	1.123.751.851	18,77	1.134.989.369	20,65	1.146.339.263	22,72	
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Pemantauan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	1.056.411.000	2	1.713.161.600	2	1.730.293.216	2	1.747.596.148	2	1.765.072.110	2	1.782.722.831	2	
		Program Pengembangan Ekspor	Jumlah Kegiatan yang dimaksudkan untuk meningkatkan cita produk ekspor	-	-	-	-	594.890.000	1	600.838.900	1	606.847.289	1	612.915.762	1	



No	Urusan	Program	Indikator	Pagu Indikatif												OPD
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	
		Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase Alat-alat Ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) yang Ditera/tera Ulang	84.738.100	100	350.000.000	100	353.500.000	100	357.035.000	100	357.035.000	100	360.605.350	100	
		Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Jumlah Promosi, Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri	-		404.038.000	2	408.078.380	2	412.159.164	2	416.280.755	2	420.443.563	2	
30	Perindustrian	Program	Cakupan Bina	4.906.827.	53	6.544.000.	55	6.609.440.	60	6.675.53	65	6.742.28	70	6.809.71	75	Dinas
		Perencanaan dan Pembangunan Industri	Kelompok IKM/Pengrajin	020		000		000		4.400		9.744		2.641		Perindustrian dan Perdagangan
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase jumlah izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Menengah yang diterbitkan	205.259.000	100	250.000.000	100	252.000.000	100	255.025.000	100	257.575.250	100	260.151.003	100	
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Pengelolaan Sistem Informasi Industri Potensial	-		-		300.000.000	20	303.000.000	20	306.030.000	20	309.090.300	20	
31	Transmigrasi	Tidak Ada OPD Yang Menangani	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	---



No	Urusan	Program	Indikator	Pagu Indikatif												OPD
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	
	Urusan Penunjang															
32	Administrasi Pemerintahan	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase pengelolaan pengadaan barang dan jasa	1.518.429.090	100	1.533.613.381	3	1.548.949.515	3	1.564.439.010	3	1.580.083.400	3	1.595.884.234	3	Sekdakot
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Kegiatan Terkait Keagamaan di Kota Sibolga	3.517.392.600	100	3.552.566.526	100	3.588.092.191	100	3.623.973.113	100	3.660.212.844	100	3.696.814.973	100	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya penataan evaluasi tentang kelembagaan dan analisis jabatan	27.820.931.331	3	28.099.140.644	100	28.380.132.051	100	28.663.933.371	100	28.950.572.705	100	29.240.078.432	100	
	Administrasi Pemerintahan	Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	25.227.202.200	100	25.479.474.222	100	25.734.268.963	100	25.991.611.652	100	26.351.527.767	100	26.514.043.044	100	Sekretariat DPRD
33	Perencanaan	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Pengendalian	756.360.000	90%	763.924.000	90%	771.564.000	90%	779.280.000	90%	787.073.000	90%	794.944.000	90%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



No	Urusan	Program	Indikator	Pagu Indikatif												OPD
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	
		Program Koordinasidan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pencapaian Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	343.463.900	90%	346.899.000	90%	350.368.000	90%	353.872.000	90%	357.411.000	90%	360.986.000	90%	
34	Keuangan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	cakupan pengelolaan keuangan yang lebih baik	10.252.987.873	100	10.355.518.000	100	10.459.074.000	100	10.563.665.000	100	10.669.302.000	100	10.775.996.000	100	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Pengelolaan barang Milik Daerah	1.269.985.000	100	1.282.685.000	100	1.295.512.000	100	1.308.468.000	100	1.321.553.000	100	1.334.769.000	100	
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah	834.255.100	100	842.598.000	100	851.024.000	100	859.535.000	100	868.131.000	100	876.813.000	100	
35	Kepegawaian	Program Kepegawaian Daerah	Persentase peningkatan kompetensi PNS	1.545.720.900	100	3.559.429.400	100	3.595.023.694	100	3.630.973.931	100	3.667.283.670	100	3.703.956.507	100	Badan Kepegawaian Daerah
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase PNS yang meningkat kualifikasinya	2.900.208.000	14,08%	2.876.000.000	14,08%	2.904.760.000	14,08%	2.933.807.600	14,08%	2.963.145.676	14,08%	2.992.777.133	14,08%	
36	Penelitian dan Pengembangan	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rencanan Induk Kelitbangan, SIDA dan Perhitungan Indeks Kelitbangan	200.000.000	100	202.000.000	100	204.020.000	100	206.061.000	100	208.122.000	100	210.204.000	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah





No	Urusan	Program	Indikator	Pagu Indikatif												OPD
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	
37	Pengawasan	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan	1.193.000.000	85	1.204.930.000	87	1.216.980.000	88	1.229.150.000	90	1.241.402.000	92	1.253.857.000	94	Inspektorat
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Cakupan perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	585.000.000	85	590.850.000	87	596.759.000	88	602.727.000	90	608.755.000	92	614.843.000	94	
38	Kewilayahan															



No	Urusan	Program	Indikator	Pagu Indikatif												OPD
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah Kecamatan dan Kelurahan yang melaksanakan kegiatan musrenbang	18.032.700	80%	18.213.027	80%	18.395.157	81%	18.579.109	82%	18.764.900	83%	18.952.549	84%	Kecamatan Sibolga Utara
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan Pelayanan Publik di Kecamatan	-	80%	396.765.500	80%	400.733.155	81%	404.740.487	82%	408.787.891	83%	412.875.770	84%	
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah Kecamatan dan Kelurahan yang melaksanakan kegiatan musrenbang	16.078.400	680	16.239.184	680	16.401.576	680	16.565.592	680	16.731.248	680	16.898.560	680	Kecamatan Sibolga Kota
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan Pelayanan Publik di Kecamatan	-	3	463.170.400	3	467.802.104	3	472.480.125	3	477.204.926	3	481.976.976	3	
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah Kecamatan dan Kelurahan yang melaksanakan kegiatan musrenbang	19.584.000	75%	19.780.000	75%	19.978.000	80%	20.178.000	85%	20.380.000	90%	20.584.000	95%	Kecamatan Sibolga Sambas
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan Pelayanan Publik di Kecamatan	455.890.000	75%	460.449.000	75%	465.054.000	80%	469.705.000	85%	474.403.000	90%	479.148.000	95%	Kecamatan Sibolga Sambas



No	Urusan	Program	Indikator	Pagu Indikatif												OPD
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Kecamatan dan Kelurahan yang melaksanakan kegiatan musrenbang	-	100	417.794.000	100	421.971.940	100	426.191.659	100	430.453.576	100	434.758.112	100	Kecamatan Sibolga Selatan
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan Pelayanan Publik di Kecamatan	13.573.800	3	13.709.538	3	13.846.633	3	13.985.100	3	14.124.951	3	14.226.200	3	
39	Pemerintahan Umum	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Capaian Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	550.000.000	100	550.000.000	100	550.000.000	100	550.000.000	100	550.000.000	100	550.000.000	100	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik



No	Urusan	Program	Indikator	Pagu Indikatif												OPD
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K			
		Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Capaian Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik			500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	
		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Capaian Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			1.700.000.000	100	1.700.000.000	100	1.700.000.000	100	1.700.000.000	100	1.700.000.000	100	
		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase Capaian Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase Capaian Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	

Sumber: OPD se-Kota Sibolga (data diolah).



#### **1.2.4 KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa setiap daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah. Salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah adalah Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD), yang merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 12 (3) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.

##### **Hubungan Antar Dokumen**

Penyusunan dokumen RKPD tahun 2022 tidak dapat berdiri sendiri tanpa memperhatikan program kegiatan yang terdapat di dalam dokumen- dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya. Dokumen RKPD Kota Sibolga Tahun 2022 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Sibolga Tahun 2005-2025 dengan tetap memperhatikan faktor-faktor seperti: (i) hasil penjangkauan aspirasi masyarakat melalui forum Musrenbang; (ii) evaluasi pembangunan pada Tahun sebelumnya; serta (iii) memperhatikan juga kebijakan Kepala Daerah; dan (iv) pokok-pokok pikiran DPRD yang akan direncanakan di Tahun 2021.

Sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, penyusunan RKPD Kota Sibolga Tahun 2022 juga memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 dan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 yang terkait dengan sumber pendanaan program dan kegiatan yang berasal dari Pemerintah



Pusat maupun Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. RKPD Kota Sibolga Tahun 2022 dipergunakan sebagai pedoman oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Sibolga dalam menyusun Rencana Kerja OPD (Renja OPD) Tahun 2022, serta sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS Kota Sibolga Tahun 2022.

Penyusunan RKPD Kota Sibolga Tahun 2022 memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut: (i) Tujuan yang dikehendaki; (ii) Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya; (iii) Masalah- masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya; (iv) Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya; dan (v) OPD pelaksananya.

Penyusunan RKPD ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan nasional, dan provinsi serta dengan kabupaten/kota yang berbatasan. Oleh karenanya, substansi RKPD Tahun 2022 harus selaras dengan dokumen perencanaan tingkat pusat dan dokumen perencanaan tingkat provinsi serta memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan di kabupaten/kota tetangga sehingga terjadi sinergitas perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

Rencana kerja dan pendanaan RKPD Kota Sibolga Tahun 2021 disusun berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan daerah beserta program dan kegiatan yang menyertainya dengan mengacu, menyesuaikan dan mendasarkan diri pada Visi dan Misi, Gambaran Kondisi Umum Daerah, maka dengan ini Pemerintah Kota Sibolga melaksanakan kegiatan berdasarkan Program dan Kegiatan yang merujuk kepada Sistem Informasi Perangkat Daerah (SIPD) Kota Sibolga sebagai berikut :

No	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	INSTANSI
1	2	3	4	5
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>91.242.447.192</b>	<b>68.397.714.012</b>	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sibolga
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	87.359.885.781	64.830.467.521	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	48.868.000		
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	25.465.300		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.899.600	9.629.600	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	52.014.000	47.883.200	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	23.998.200	23.998.200	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	34.986.000	34.986.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	38.578.000	34.851.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	19.962.000		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	186.142.000	122.090.620	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan			



No	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	INSTANSI
1	2	3	4	5
	Pemerintah Daerah			
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	263.833.200	263.386.800	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.810.000	7.810.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	207.881.746	164.470.185	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.678.600.000	2.676.200.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	125.588.700	56.489.486	
	Pemeliharaan Mebel	15.000.000	15.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.380.000	12.450.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	125.554.665	98.001.400	
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>46.316.071.345</b>	<b>26.667.690.456</b>	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			
	Pembangunan ruang guru/kepala sekolah/TU			
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	3.160.963.171	3.009.184.100	
	Pengadaan Mebel Sekolah	645.300.000	643.916.400	
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	4.141.751.986	4.104.653.749	
	Pengadaan Perlengkapan Siswa	3.818.083.800	3.748.898.000	
	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	265.996.000	265.596.000	
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	963.566.000	845.126.000	
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	31.722.800	27.484.909	
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	9.050.551.450		
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			
	Penambahan Ruang Kelas Baru	324.489.050	324.489.050	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	1.754.155.602	977.632.750	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	206.062.010	115.672.900	
	Pengadaan Mebel Sekolah	614.700.000	596.358.800	
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	931.405.026	427.153.648	
	Pengadaan Perlengkapan Siswa	2.561.188.000	2.507.390.000	
	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	3.855.866.200	3.616.523.850	
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.339.863.500	1.294.091.100	
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	6.100.146.850		
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	1.465.431.400	1.464.196.200	
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	1.480.000.000	1.118.800.000	
	Pengelolaan Dana BOP PAUD	1.670.700.000		
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			
	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	1.707.928.500	1.580.523.000	
	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	226.200.000		
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	<b>7.158.081.434</b>	<b>6.735.280.850</b>	
	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satua Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			
	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satua Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	7.158.081.434	6.735.280.850	
<b>4</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>	<b>400.000.000</b>	<b>400.000.000</b>	Dinas



No	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	INSTANSI
1	2	3	4	5
	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sibolga
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	400.000.000	400.000.000	
5	<b>PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH</b>	<b>226.280.800</b>	<b>84.457.600</b>	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sibolga
	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota			
	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	226.280.800	84.457.600	
6	<b>Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya</b>	<b>264.620.400</b>	<b>229.225.900</b>	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sibolga
	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota			
	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	264.620.400	229.225.900	
1	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>31.941.089.950</b>	<b>30.572.379.146</b>	Dinas Kesehatan Kota Sibolga
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>25.178.455.514</b>	<b>24.537.059.917</b>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	25.178.455.514	24.537.059.917	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1.004.299.000</b>	<b>585.869.600</b>	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	24.900.600	24.624.500	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	249.410.400	236.865.800	
	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	204.396.000	159.350.700	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.942.000	3.600.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	521.650.000	161.428.600	
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>179.023.700</b>	<b>168.251.000</b>	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	179.023.700	168.251.000	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>5.027.268.311</b>	<b>4.838.301.429</b>	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.300.000	2.900.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	712.057.711	690.161.601	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.308.910.600	4.145.239.828	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>552.043.425</b>	<b>442.897.200</b>	
	Penediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	36.377.000	34.740.100	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	245.249.900	192.555.600	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	191.616.500	143.275.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	78.800.025	72.326.500	
2	<b>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</b>	<b>46.094.839.458</b>	<b>32.546.256.657</b>	Dinas Kesehatan Kota Sibolga
	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>5.165.371.374</b>	<b>4.776.381.954</b>	
	Pengembangan Puskesmas	110.004.809	109.318.300	
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	400.059.054	369.870.500	





No	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	INSTANSI
1	2	3	4	5
	Pengadaan Obat, Vaksin	2.293.308.088	2.044.880.613	Dinas Kesehatan Kota Sibolga
	Pengadaan Bahan Habis Pakai	2.070.924.122	1.992.649.041	
	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	223.105.301	192.888.200	
	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas Serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	67.970.000	66.775.300	
	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>40.613.002.484</b>	<b>27.500.599.003</b>	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1.115.151.600	1.062.325.150	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	504.649.874	383.414.100	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	35.880.000	31.770.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	1.876.453.700	1.635.637.100	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	1.233.081.400	1.034.034.150	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	570.398.000	553.944.500	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	1.018.050.300	488.329.800	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.838.248.300	1.518.423.050	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1.187.943.800	942.932.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	394.408.000	284.681.900	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1.341.799.900	992.458.300	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	152.675.600	82.605.400	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	95.980.000	43.120.000	
	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	128.554.400	50.734.200	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	3.870.376.100	2.983.698.850	
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	13.214.443.200	12.915.561.100	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	9.192.606.610	396.437.200	
	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2.548.804.100	1.982.817.603	
	Pelayanan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	85.602.400	-	
	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	151.907.200	68.966.600	
	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wadah	17.260.000	10.880.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	38.728.000	37.828.000	
	<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi</b>	<b>133.901.000</b>	<b>133.255.500</b>	
	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	133.901.000	133.255.500	
	<b>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah kabupaten/Kota</b>	<b>182.564.600</b>	<b>136.020.200</b>	
	Peningkatan Mutu Pelayanan fasilitas Kesehatan	182.564.600	136.020.200	
3	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	<b>32.142.800</b>	<b>32.142.800</b>	Dinas Kesehatan Kota Sibolga
	<b>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	<b>32.142.800</b>	<b>32.142.800</b>	
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	32.142.800	32.142.800	
	<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>	<b>216.528.000</b>	<b>205.505.800</b>	
	<b>Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga</b>	<b>107.814.600</b>	<b>102.066.000</b>	
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindakan Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri	107.814.600	102.066.000	



No	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	INSTANSI
1	2	3	4	5
	Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga			
	<b>Pemeriksaan dan Tindakan Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga</b>	<b>108.713.400</b>	<b>103.439.800</b>	
	Pemeriksaan Post Market pada Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	108.713.400	103.439.800	
4	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	<b>266.330.000</b>	<b>197.100.800</b>	
	<b>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>190.348.000</b>	<b>155.783.000</b>	
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, ADVOKASI, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	190.348.000	155.783.000	Dinas Kesehatan Kota Sibolga
	<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)</b>	<b>75.982.000</b>	<b>41.317.800</b>	
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	75.982.000	41.317.800	
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	4.045.501.310	3.474.077.803	
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	4.045.501.310	3.474.077.803	Dinas PKPLH Kota Sibolga
	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>			
2	<b>PROGRAM ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH</b>	199.500.000	147.840.000	
	<i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>	37.500.000	31.440.000	Dinas PKPLH Kota Sibolga
	<i>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>			
3	<b>PROGRAM ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH</b>	5.450.400	5.419.200	
	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	69.879.600	58.778.000	Dinas PKPLH Kota Sibolga
	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	436.153.200	426.886.200	
	<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	78.679.200	62.381.700	
	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	51.763.332	30.376.000	
	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	19.800.000	10.635.000	
	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	398.954.000	398.719.263	
4	<b>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</b>			Dinas PKPLH Kota Sibolga
	<i>Penyediaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	206.915.788	203.973.459	
5	<b>Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</b>			Dinas PKPLH Kota Sibolga
	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	15.000.000	7.950.000	
	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	181.156.986	151.520.437	
	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	6.640.977.500	6.386.860.000	
6	<b>Penyediaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			Dinas PKPLH Kota Sibolga
	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	236.956.450	135.993.877	



No	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	INSTANSI
1	2	3	4	5
	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	.565.439.193	3.116.872.718	Dinas PKPLH Kota Sibolga
	<i>Pemeliharaan Mebel</i>	9.999.600	9.999.600	
	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	209.642.800	158.627.900	
	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	455.405.535	253.021.000	
	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	4.880.000	4.690.000	
7	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>			Dinas PKPLH Kota Sibolga
	<i>Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus</i>	82.236.576	71.933.215	
	<i>Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun</i>	82.236.576	71.933.215	
8	<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>			Dinas PKPLH Kota Sibolga
	<i>Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</i>	75.577.600	66.889.200	
	<i>Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP</i>	75.577.600	66.889.200	
	<i>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</i>	1.317.979.861	1.314.071.500	
	<i>Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh</i>	1.309.812.261	1.305.985.500	
	<i>Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh</i>	8.167.600	8.086.000	
9	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>			Dinas PKPLH Kota Sibolga
	<i>Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</i>	3.496.870.666	3.242.200.160	
	<i>Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian</i>	3.496.870.666	3.242.200.160	
10	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>			Dinas PKPLH Kota Sibolga
	<i>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</i>	112.267.380	55.477.948	
	<i>Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut</i>	104.639.080	53.477.948	
	<i>Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim</i>	7.628.300	2.000.000	
11	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>			Dinas PKPLH Kota Sibolga
	<i>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</i>	2.173.406.621	2.023.040.050	
	<i>Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)</i>	974.350.143	964.400.500	
	<i>Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati</i>	1.199.056.478	1.058.639.550	
12	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>			Dinas PKPLH Kota Sibolga
	<i>Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	76.200.741	75.788.341	
	<i>Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup</i>	67.451.541	67.451.541	
	<i>Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin</i>	8.749.200	8.336.800	



No	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	INSTANSI
1	2	3	4	5
	<i>Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>			
13	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>			Dinas PKPLH Kota Sibolga
	<i>Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	217.552.979	197.582.779	
	<i>Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup</i>	217.552.979	197.582.779	
14	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>			Dinas PKPLH Kota Sibolga
	<i>Pengelolaan Sampah</i>	3.432.483.214	1.593.310.100	
	<i>Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota</i>	85.511.400	82.044.400	
	<i>Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota</i>	3.346.971.814	1.511.265.700	
1	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			BPBD Kota Sibolga
	<i>Penyediaan gaji dan tunjangan ASN</i>	2.334.553.120	2.003.583.706	
2	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			BPBD Kota Sibolga
	<i>Penyediaan komponen instalasi listrik</i>	2.944.200	2.866.200	
	<i>Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</i>	42.278.400	41.832.000	
	<i>Penyediaan peralatan rumah tangga</i>	3.999.000	3.999.000	
	<i>Penyediaan bahan logistik kantor</i>	426.210.000	425.694.000	
	<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>	10.997.400	10.184.100	
	<i>Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD</i>	84.448.000	64.159.340	
3	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			BPBD Kota Sibolga
	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	2.000.000	2.000.000	
	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	78.091.730	66.092.688	
	<i>Penyediaan jasa pelayanan umum kantor</i>	2.069.200.000	2.046.770.000	
4	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			BPBD Kota Sibolga
	<i>Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	202.576.550	140.252.850	
	<i>Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya</i>	10.110.000	2.905.000	
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>7.741.757.574</b>	<b>7.504.753.258</b>	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>4.323.347.295</b>	<b>4.188.214.245</b>	
	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	4.323.347.295	4.188.214.245	
	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	3.499.800	3.009.000	
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>128.342.000</b>	<b>104.400.000</b>	
	<i>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>	<b>128.342.000</b>	<b>104.400.000</b>	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>734.398.700</b>	<b>730.851.918</b>	
	<i>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</i>	2.367.000	2.277.400	
	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	72.000.000	71.736.100	
	<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	34.782.100	34.781.900	
	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	28.872.000	28.869.300	
	<i>Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan</i>	25.440.600	25.425.400	
	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	5.599.200	5.599.200	



No	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	INSTANSI
1	2	3	4	5
	Penyediaan Bahan/Material	57.895.800	56.311.500	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	507.442.000	505.851.118	
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>428.751.000</b>	<b>428.075.600</b>	
	Pengadaan Mebel	28.057.000	28.000.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	400.694.000	400.075.600	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.572.626.704</b>	<b>1.507.161.580</b>	
	Penyediaan jasa surat menyurat	9.848.200	9.140.000	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	169.818.504	135.176.580	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.392.960.000	1.362.845.000	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>554.291.875</b>	<b>546.049.915</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabata	58.325.750	57.439.865	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	71.350.000	65.657.100	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	132.477.900	132.380.950	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	82.240.000	81.546.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	209.898.225	209.026.000	
2	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>	<b>1.510.662.479</b>	<b>1.455.324.250</b>	
	<b>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.510.662.479</b>	<b>1.455.324.250</b>	
	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	1.167.565.316	1.114.228.700	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Sibolga
	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	147.097.150	147.097.150	
	Rahabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	196.000.013	193.998.400	
3	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	<b>796.696.096</b>	<b>793.253.377</b>	
	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah Kabupaten / Kota</b>	<b>796.696.096</b>	<b>793.253.377</b>	
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	245.456.000	242.798.827	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Sibolga
	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	551.240.096	550.454.550	
4	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>	<b>1.207.942.748</b>	<b>1.176.125.200</b>	
	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten / Kota</b>	<b>1.207.942.748</b>	<b>1.176.125.200</b>	
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	30.380.000	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Sibolga
	Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	1.177.562.748	1.176.125.200	
5	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>	<b>2.766.393.094</b>	<b>2.712.301.750</b>	Dinas Pekerjaan



No	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	INSTANSI
1	2	3	4	5
	<b>Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>2.766.393.094</b>	<b>2.712.301.750</b>	Umum dan Perumahan Rakyat Kota Sibolga
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	38.500.128	36.632.000	
	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	1.517.892.758	1.471.544.500	
	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	210.000.000	207.119.200	
	Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan	1.000.000.208	997.006.050	
6	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</b>	<b>5.234.969.760</b>	<b>5.116.339.750</b>	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Sibolga
	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	170.000.000	159.935.000	
	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	1.610.723.900	1.585.454.850	
	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	3.454.245.860	3.370.949.900	
7	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>74.547.504.735</b>	<b>62.581.349.363</b>	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Sibolga
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengembangan Jalan	1.669.137.678	1.492.866.700	
	Pembangunan Jalan	1.670.489.999	1.659.069.476	
	Rehabilitasi Jalan	40.283.463.313	38.165.664.800	
	Pemeliharaan Berkala Jalan	30.686.567.867	21.039.490.687	
	Pemeliharaan Rutin Jalan	237.845.878	224.257.700	
8	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>920.775.360</b>	<b>913.283.916</b>	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Sibolga
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	-	-	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	825.070.060	818.868.016	
	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>95.705.300</b>	<b>94.415.900</b>	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	95.705.300	94.415.900	
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>10.791.339.394</b>	<b>10.549.667.242</b>	Satpol PP Kota Sibolga
	<b>Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.065.653.337</b>	<b>2.930.279.288</b>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.065.653.337	2.930.279.288	
	<b>Administarsi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1.535.190.300</b>	<b>1.476.797.600</b>	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	20.466.800	20.033.600	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	82.558.800	82.029.600	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	22.241.700	22.068.900	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.218.840.000	1.217.880.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	31.269.000	31.269.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	159.814.000	103.516.500	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>5.581.015.857</b>	<b>5.551.644.554</b>	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.950.000	9.210.000		



No	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	INSTANSI
1	2	3	4	5
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	66.465.857	40.739.554	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.503.600.000	5.501.695.000	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>609.479.900</b>	<b>590.945.800</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	581.239.900	565.496.800	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.240.000	25.449.000	
2	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>450.564.200</b>	<b>448.953.850</b>	
	<b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>405.864.200</b>	<b>404.253.850</b>	
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	267.391.200	266.590.200	Satpol PP Kota Sibolga
	Penindakan atas gangguan keentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusakan massa	8.335.000	8.110.000	
	Pengadaan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana ketenteraman dan ketertiban umum	130.138.000	129.553.650	
	<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota</b>	<b>44.700.000</b>	<b>44.700.000</b>	
	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan Bupati/Walikota	44.700.000	44.700.000	
3	<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>	<b>135.691.400</b>	<b>96.179.550</b>	
	<b>Pencegahan, Pengendalian, Peadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>123.370.000</b>	<b>83.890.000</b>	
	Pencegahan kebakaran dalam daerah Kabupaten/kota	13.930.000	3.680.000	Satpol PP Kota Sibolga
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	109.440.000	80.210.000	
	<b>Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran</b>	<b>12.321.400</b>	<b>12.289.550</b>	
	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	12.321.400	12.289.550	
1	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			BPBD Kota Sibolga
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	2.334.553.120	2.003.583.706	
2	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			BPBD Kota Sibolga
	Penyediaan komponen instalasi listrik	2.944.200	2.866.200	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	42.278.400	41.832.000	
	Penyediaan peralatan rumah tangga	3.999.000	3.999.000	
	Penyediaan bahan logistik kantor	426.210.000	425.694.000	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	10.997.400	10.184.100	
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	84.448.000	64.159.340	
3	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			BPBD Kota Sibolga
	Penyediaan jasa surat menyurat	2.000.000	2.000.000	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	78.091.730	66.092.688	
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	2.069.200.000	2.046.770.000	
4	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			BPBD Kota Sibolga



No	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	INSTANSI
1	2	3	4	5
	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	202.576.550	140.252.850	
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	10.110.000	2.905.000	
1	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>4.111.618.352</b>	<b>3.801.390.872</b>	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.629.094.942</b>	<b>2.479.289.107</b>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.629.094.942	2.479.289.107	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>367.671.300</b>	<b>291.241.672</b>	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4.758.600	4.711.800	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.434.000	35.364.100	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.033.600	3.988.800	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.793.900	16.384.500	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	18.000.000	17.582.000	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	9.600.000	9.600.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	279.056.000	203.610.472	
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>130.392.000</b>	<b>119.707.125</b>	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	72.000.000	61.315.125	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	58.392.000	58.392.000	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>870.246.590</b>	<b>830.990.918</b>	
	Penyediaan Surat menyurat Daerah	4.790.000	4.790.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	96.156.790	67.701.118	
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	0	0	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	769.299.800	758.499.800	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>114.213.520</b>	<b>80.162.050</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	49.197.200	32.661.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	32.916.200	18.525.050	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.725.000	16.340.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan lainnya	15.000.120	12.636.000	
2	<b>Program Pemberdayaan Sosial</b>	<b>1.271.100.000</b>	<b>1.181.200.000</b>	
	<b>Pengembangan Pengebangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.271.100.000</b>	<b>1.181.200.000</b>	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	700.000.000	700.000.000	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	571.100.000	481.200.000	
3	<b>Program Rehabilitasi Sosial</b>	<b>514.589.500</b>	<b>418.412.710</b>	
	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar Panti Sosial</b>	<b>345.000.400</b>	<b>279.086.400</b>	
	Penyediaan Permakanan	30.000.400		
	Penyediaan Alat Bantu	15.000.000	12.086.000	
	Pemberian Bimbingan fisik, mental spritual dan sosial	300.000.000	237.000.000	
	<b>Rehabilitasi Sosial masalah kesejahteraan sosial</b>	<b>169.589.100</b>	<b>139.326.310</b>	

Dinas Sosial Kota Sibolga

Dinas Sosial Kota Sibolga

Dinas Sosial Kota Sibolga





No	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	INSTANSI
1	2	3	4	5
	<b>(PMKS) lainya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar Panti sosial</b>			
	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	100.000.000	92.012.360	
	Pemberian Layanan Rujukan	38.970.700	20.856.400	
	Kerjasama antara lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten / Kota	30.618.400	26.457.550	
4	<b>Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>	<b>6.322.637.803</b>	<b>6.139.312.920</b>	
	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>6.322.637.803</b>	<b>6.139.312.920</b>	
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	123.441.700	77.741.700	Dinas Sosial Kota Sibolga
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	279.743.800	229.286.740	
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	5.919.452.303	5.832.284.480	
5	<b>Program Penangaan Bencana</b>	<b>385.885.000</b>	<b>268.547.200</b>	
	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>	<b>385.885.000</b>	<b>268.547.200</b>	
	Penyediaan Makan	185.885.000	153.047.200	Dinas Sosial Kota Sibolga
	Penyediaan Sandang	200.000.000	115.500.000	
6	<b>Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan</b>	<b>49.997.248</b>	<b>47.390.448</b>	
	<b>Pemeliharaan Taman Makan Pahlawan Nasioanal Kabupaten/Kota</b>	<b>49.997.248</b>	<b>47.390.448</b>	
	Pemeliharaan Taman Makan Pahlawan Nasioanal Kabupaten/Kota	49.997.248	47.390.448	Dinas Sosial Kota Sibolga
1	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>3,198,274,448</b>	<b>2,934,982,648</b>	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2,304,932,300</b>	<b>2,102,192,696</b>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,304,932,300	2,102,192,696	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>346,808,500</b>	<b>346,329,318</b>	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15,994,000	15,972,800	Dinas PMK, PP dan PA Kota Sibolga
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	79,545,300	79,475,900	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15,841,200	15,834,300	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29,871,700	29,871,700	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	37,020,300	36,977,850	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	168,536,000	168,196,768	
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>41,760,000</b>	<b>40,880,000</b>	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	41,760,000	40,880,000	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>414,738,048</b>	<b>357,994,934</b>	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,000,000	4,000,000	Dinas PMK, PP dan PA Kota Sibolga
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	62,038,048	45,994,934	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	348,700,000	308,000,000	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Milik Daerah</b>	<b>90,035,600</b>	<b>87,585,700</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	34,709,600	32,259,700	
	Pemeliharaan Mebel	0	0	



No	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	INSTANSI
1	2	3	4	5
	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	15,408,000	15,408,000	
	Pemeliharaan /Rehabilitasi gedung kantor dan Bangunan lainnya	39,918,000	39,918,000	
2	<b>Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat</b>	<b>1,755,199,700</b>	<b>1,430,059,463</b>	Dinas PMK, PP dan PA Kota Sibolga
	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya, Hukum Adat yang sama dalam Daerah/kota</b>	<b>1,755,199,700</b>	<b>1,430,059,463</b>	
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu,LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1,755,199,700	1,430,059,463	
3	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Dinas PMK, PP dan PA Kota Sibolga
	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	0	0	
4	<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	<b>74,717,000</b>	<b>67,520,800</b>	Dinas PMK, PP dan PA Kota Sibolga
	<b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial,Politik dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kab/Kota</b>	<b>74,717,000</b>	<b>67,520,800</b>	
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik,Hukum,Sosial,Politik dan Ekonomi	74,717,000	67,520,800	
5	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	<b>212,574,400</b>	<b>76,593,400</b>	Dinas PMK, PP dan PA Kota Sibolga
	<b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kab/Kota</b>	<b>76,665,400</b>	<b>76,593,400</b>	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kab/Kota	76,665,400	76,593,400	
	<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kab/Kota</b>	<b>135,909,000</b>	-	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/ Kota	135,909,000	-	
6	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	<b>88,847,520</b>	<b>82,562,300</b>	Dinas PMK, PP dan PA Kota Sibolga
	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Yang Wilayah Kerjanya Dalam Daerah Kab/ Kota</b>	<b>88,847,520</b>	<b>82,562,300</b>	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kab/ Kota <b>Judul Kegiatan:</b> Peringatan Hari Ibu	88,847,520	82,562,300	
7	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	<b>239,224,900</b>	<b>193,516,355</b>	Dinas PMK, PP dan PA Kota Sibolga
	<b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kab/ Kota</b>	<b>36,284,000</b>	<b>36,284,000</b>	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kab/ Kota	36,284,000	36,284,000	
	<b>Penyediaan Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kab/ Kota</b>	<b>126,134,900</b>	<b>82,794,555</b>	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan kab/ Kota	126,134,900	82,794,555	



No	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	INSTANSI
1	2	3	4	5
	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kab/ Kota</b>	<b>76,806,000</b>	<b>74,437,800</b>	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kab/ Kota	76,806,000	74,437,800	
1	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	<b>363.445.202</b>	<b>342.253.400</b>	
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit kompetensi	330.906.602	320.827.200	Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan Kota Sibolga
	Proses pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	330.906.602	320.827.200	
	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	32.538.600	21.426.200	
	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	32.538.600	21.426.200	
2	<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	<b>325.766.600</b>	<b>281.870.300</b>	
	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/ Kota	207.868.100	189.760.700	Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan Kota Sibolga
	Pelayanan antar kerja	207.868.100	189.760.700	
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	29.842.800	20.546.200	
	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	29.842.800	20.546.200	
	Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/ Kota	62.507.100	48.698.700	
	Peningkatan perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Pekerja Migran Indonesia (PMI)	62.507.100	48.698.700	
	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	25.548.600	22.864.700	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	25.548.600	22.864.700	
3	<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	<b>811.526.775</b>	<b>460.984.100</b>	
	Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota	489.759.600	416.071.600	Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan Kota Sibolga
	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	33.869.600	32.367.800	
	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	37.367.100	28.556.400	
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	418.522.900	355.147.400	
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	321.767.175	44.912.500	
	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/Berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	76.971.600	30.386.100	
	Penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh serta Non Afiliasi	14.795.800	14.526.400	
	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	229.999.775	-	
4	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.684.214.241</b>	<b>3.214.516.110</b>	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.421.405.115	2.215.032.101	Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan Kota Sibolga
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.421.405.115	2.215.032.101	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	153.868.000	107.935.700	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	58.500.000	44.255.700	



No	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	INSTANSI
1	2	3	4	5
	Kelengkapannya			
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	95.368.000	63.680.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	622.557.800,	431.952.200	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.960.000,	6.831.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.651.200,	99.565.800	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.993.200	10.379.200	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.409.200	29.437.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.757.000	18.342.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.657.200	7.085.900	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	447.130.000	260.311.300	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	94.380.000	91.660.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	94.380.000	91.660.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	300.550.326	288.942.778	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.485.600	8.393.800	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	59.864.726	55.548.978	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	232.200.000	225.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	91.453.000	78.993.331	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	57.548.000	47.838.331	
	Pemeliharaan Mebel	9.000.000	8.860.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	300.000	-	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.660.000	3.300.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.945.000	18.995.000	
5	<b>PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM</b>	<b>141.843.000</b>	<b>100.993.000</b>	
	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	141.843.000	100.993.000	Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan Kota Sibolga
	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	141.843.000	100.993.000	Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan Kota Sibolga
6	<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>	<b>37.253.000</b>	<b>31.221.500</b>	
	Pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/ kota	37.253.000	31.221.500	Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan Kota Sibolga
	Pemeriksaan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan kewenangan kabupaten/ kota	37.253.000	31.221.500	Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan Kota Sibolga
7	<b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/ USP KOPERASI</b>	<b>83.314.200</b>	<b>82.289.000</b>	
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	83.314.200	82.289.000	Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan Kota Sibolga
	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi	36.864.500	36.455.500	Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan Kota Sibolga



No	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	INSTANSI
1	2	3	4	5
	Kewenangan Kabupaten/Kota			
	Penghargaan Kesehatan KSP/ USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	46.449.700	45.833.500	
8	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>	<b>266.796.100</b>	<b>256.771.300</b>	Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan Kota Sibolga
	Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota	266.796.100	256.771.300	
	Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi	266.796.100	256.771.300	
9	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>	<b>69.638.000</b>	<b>68.762.000</b>	
	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	69.638.000	68.762.000	Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan Kota Sibolga
	Pendataan potensi dan pengembangan usaha mikro	49.814.000	49.502.000	
	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	19.824.000	19.260.000	
9	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>	<b>1.722.847.800</b>	<b>1.555.090.820</b>	Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan Kota Sibolga
	Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil	1.722.847.800	1.555.090.820	
	Fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi	1.722.847.800	1.555.090.820	
1	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>3.409.955.982</b>	<b>3.212.677.856</b>	Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Sibolga
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.191.958.800</b>	<b>2.057.107.276</b>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.191.958.800	2.057.107.276	
	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>143.750.000</b>	<b>142.480.000</b>	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	143.750.000	142.480.000	
	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>286.141.000</b>	<b>283.647.910</b>	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	7.182.000	7.128.250	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	82.856.400	82.074.300	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	38.079.600	37.783.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.140.000	9.766.750	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	45.000.000	44.723.625	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	17.799.000	17.703.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85.084.000	84.468.985	
	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>530.556.667</b>	<b>477.545.170</b>	
	Penyediaan Jasa Surat menyurat	3.608.000	3.606.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber, Daya Air dan Listrik	119.348.667	66.634.170	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	407.600.000	407.305.000	
	<b>kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>106.200.000</b>	<b>103.435.750</b>	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	66.720.000	64.923.250	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	39.480.000	38.512.500	
	<b>kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>151.349.515</b>	<b>148.461.750</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	38.755.500	37.777.300	



No	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	INSTANSI
1	2	3	4	5
	atau Lapangan			
	Pemeliharaan Mebel	9.080.000	8.963.450	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.735.000	17.263.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	85.779.015	84.458.000	
2	<b>Program Pembinaan Perpustakaan</b>	<b>82.306.075</b>	<b>81.883.275</b>	Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Sibolga
	<b>kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>61.799.975</b>	<b>61.799.975</b>	
	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	61.799.975	61.799.975	
	<b>kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>20.506.100</b>	<b>20.083.300</b>	
	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	20.506.100	20.083.300	
3	<b>Program Pengelolaan Arsip</b>	<b>55.475.700</b>	<b>53.933.200</b>	Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Sibolga
	<b>kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>51.251.700</b>	<b>49.879.600</b>	
	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	51.251.700	49.879.600	
	<b>kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>4.224.000</b>	<b>4.053.600</b>	
	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	4.224.000	4.053.600	
1	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN</b>	<b>1,249,878,916</b>	<b>48,469,200</b>	Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan dan Pertanian
	<b>Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1,249,878,916</b>	<b>48,469,200</b>	
	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	1,249,878,916	48,469,200	
2	<b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>	<b>237,755,700</b>	<b>223,649,550</b>	Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan dan Pertanian
	<b>Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</b>	<b>185,847,500</b>	<b>178,039,350</b>	
	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	162,948,700	155,260,350	
	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	22,898,800	22,779,000	
	<b>Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</b>	<b>51,908,200</b>	<b>45,610,200</b>	
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	24,328,000	23,608,300	
	Koordinasi dan Sinkronisasi emantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	27,580,200	22,001,900	
3	<b>PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>	<b>59,869,400</b>	<b>58,299,600</b>	Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan dan Pertanian
	<b>Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>59,869,400</b>	<b>58,299,600</b>	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	59,869,400	58,299,600	
4	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>1,546,286,440</b>	<b>1,377,542,994</b>	Dinas Perikanan, Ketahanan



No	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	INSTANSI
1	2	3	4	5
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>454,074,600</b>	<b>356,290,975</b>	Pangan dan Pertanian
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3,451,200	3,442,800	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	89,978,800	89,902,700	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9,316,800	9,310,200	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8,991,000	8,987,500	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20,514,000	20,503,000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	12,832,800	12,830,200	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	308,990,000	211,314,575	
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>37,096,100</b>	<b>34,000,000</b>	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	37,096,100	34,000,000	Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan dan Pertanian
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>937,466,140</b>	<b>877,636,607</b>	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6,000,000	5,406,500	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	183,866,140	127,750,107	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	747,600,000	744,480,000	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>117,649,600</b>	<b>109,615,412</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	89,999,600	82,240,912	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	27,650,000	27,374,500	
5	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>	<b>445,982,641</b>	<b>421,144,350</b>	Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan dan Pertanian
	<b>Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>445,982,641</b>	<b>421,144,350</b>	
	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	33,709,300	24,761,300	
	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	412,273,341	396,383,050	
6	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	<b>398,958,600</b>	<b>380,090,256</b>	Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan dan Pertanian
	<b>Pemberdayaan Pembudi Dayakan Kecil</b>	<b>398,958,600</b>	<b>380,090,256</b>	
	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	366,850,100	349,348,856	
	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	32,108,500	30,741,400	
7	<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>	<b>24,396,139,900</b>	<b>6,403,810,487</b>	Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan dan Pertanian
	<b>Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil</b>	<b>15,302,400</b>	<b>12,748,300</b>	
	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	15,302,400	12,748,300	
	<b>Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>24,380,837,500</b>	<b>6,391,062,187</b>	
	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha	24,380,837,500	6,391,062,187	



No	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	INSTANSI
1	2	3	4	5
	Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	0		
8	<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>	<b>212,015,900</b>	<b>185,789,749</b>	Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan dan Pertanian
	<i>Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<b>172,015,900</b>	<b>149,482,549</b>	
	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	172,015,900	149,482,549	
	<b>Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>40,000,000</b>	<b>36,307,200</b>	
	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	40,000,000	36,307,200	
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>5.173.679.750</b>	<b>4.902.775.539</b>	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.886.217.340</b>	<b>2.782.342.244</b>	
	<b>Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN</b>	<b>2.886.217.340</b>	<b>2.782.342.244</b>	
	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>2.886.217.340</b>	<b>2.782.342.244</b>	
	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>2.886.217.340</b>	<b>2.782.342.244</b>	
	<b>Belanja Gaji dan Tunjangan ASN</b>	<b>1.842.906.686</b>	<b>1.756.002.083</b>	
	<b>Belanja Gaji Pokok ASN</b>	<b>1.442.369.627</b>	<b>1.372.083.980</b>	
	Belanja Gaji Pokok PNS	1.442.369.627	1.372.083.980	
	<b>Belanja Tunjangan Keluarga ASN</b>	<b>112.723.979</b>	<b>109.119.058</b>	
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	112.723.979	109.119.058	
	<b>Belanja Tunjangan Jabatan ASN</b>	<b>166.977.625</b>	<b>160.745.000</b>	
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	166.977.625	160.745.000	
	<b>Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN</b>	<b>39.534.250</b>	<b>36.565.000</b>	
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	39.534.250	36.565.000	
	<b>Belanja Tunjangan Beras ASN</b>	<b>78.387.408</b>	<b>75.534.060</b>	
	Belanja Tunjangan Beras PNS	78.387.408	75.534.060	
	<b>Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN</b>	<b>2.883.493</b>	<b>1.932.912</b>	
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	2.883.493	1.932.912	
	<b>Belanja Pembulatan Gaji ASN</b>	<b>30.304</b>	<b>22.073</b>	
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	30.304	22.073	
	<b>Belanja Tambahan Penghasilan ASN</b>	<b>1.043.310.654</b>	<b>1.026.340.161</b>	
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN	1.043.310.654	1.026.340.161	
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS	1.043.310.654	1.026.340.161	
2	<b>ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH</b>	<b>942.417.000</b>	<b>833.907.212</b>	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga
	<b>Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor</b>	<b>605.138.200</b>	<b>596.843.900</b>	
	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>605.138.200</b>	<b>596.843.900</b>	
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>605.138.200</b>	<b>596.843.900</b>	
	<b>Belanja Barang</b>	<b>605.138.200</b>	<b>596.843.900</b>	
	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>605.138.200</b>	<b>596.843.900</b>	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	521.480.200	516.727.700	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	37.692.000	34.270.000	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	44.226.000	44.226.000	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.740.000	1.620.200	
3	<b>PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR</b>	<b>21.700.800</b>	<b>21.643.200</b>	Dinas Kependudukan
	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>21.700.800</b>	<b>21.643.200</b>	





No	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	INSTANSI
1	2	3	4	5
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>21.700.800</b>	<b>21.643.200</b>	kan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga
	<b>Belanja Barang</b>	<b>21.700.800</b>	<b>21.643.200</b>	
	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>21.700.800</b>	<b>21.643.200</b>	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.244.800	18.187.200	
	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.456.000	3.456.000	
4	<b>PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN</b>	<b>4.320.000</b>	<b>4.320.000</b>	Dinas Kependudu kan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga
	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>4.320.000</b>	<b>4.320.000</b>	
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>4.320.000</b>	<b>4.320.000</b>	
	<b>Belanja Barang</b>	<b>4.320.000</b>	<b>4.320.000</b>	
	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>4.320.000</b>	<b>4.320.000</b>	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	4.320.000	4.320.000	
5	<b>PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD</b>	<b>311.258.000</b>	<b>211.100.112</b>	Dinas Kependudu kan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga
	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>311.258.000</b>	<b>211.100.112</b>	
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>311.258.000</b>	<b>211.100.112</b>	
	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>311.258.000</b>	<b>211.100.112</b>	
	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>	<b>311.258.000</b>	<b>211.100.112</b>	
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	311.258.000	211.100.112	
6	<b>PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>333.608.550</b>	<b>317.000.200</b>	Dinas Kependudu kan dan Pencatatan Sipil Kota
	<b>Pengadaan peralatan dan mesin lainnya</b>	<b>333.608.550</b>	<b>317.000.200</b>	
	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>8.220.000</b>	<b>7.780.000</b>	
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>8.220.000</b>	<b>7.780.000</b>	
	<b>Belanja Barang</b>	<b>8.220.000</b>	<b>7.780.000</b>	
	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>8.220.000</b>	<b>7.780.000</b>	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	7.570.000	7.220.000	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	650.000	560.000	
	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>325.388.550</b>	<b>309.220.200</b>	
	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	<b>325.388.550</b>	<b>309.220.200</b>	
	<b>Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga</b>	<b>6.617.600</b>	<b>6.460.200</b>	
	<b>Belanja Modal Alat Rumah Tangga</b>	<b>6.617.600</b>	<b>6.460.200</b>	
	Belanja Modal Mebel	6.617.600	6.460.200	
	<b>Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar</b>	<b>18.908.000</b>	<b>16.745.000</b>	
	<b>Belanja Modal Alat Studio</b>	<b>18.908.000</b>	<b>16.745.000</b>	
	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	18.908.000	16.745.000	
	<b>Belanja Modal Komputer</b>	<b>299.862.950</b>	<b>286.015.000</b>	
	<b>Belanja Modal Komputer Unit</b>	<b>94.494.000</b>	<b>91.494.000</b>	
	Belanja Modal Personal Computer	94.494.000	91.494.000	
	<b>Belanja Modal Peralatan Komputer</b>	<b>205.368.950</b>	<b>194.521.000</b>	
Belanja Modal Peralatan Personal Computer	205.368.950	194.521.000		
7	<b>PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>871.237.210</b>	<b>846.297.608</b>	Dinas Kependudu kan dan Pencatatan Sipil Kota
	<b>Penyediaan jasa surat menyurat</b>	<b>3.180.000</b>	<b>2.264.500</b>	
	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>3.180.000</b>	<b>2.264.500</b>	
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>3.180.000</b>	<b>2.264.500</b>	
	<b>Belanja Barang</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>	
	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.800.000	1.800.000	
	<b>Belanja Jasa</b>	<b>1.380.000</b>	<b>464.500</b>	
	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1.380.000</b>	<b>464.500</b>	
Belanja Paket/Pengiriman	1.380.000	464.500		
8	<b>PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK</b>	<b>205.173.810</b>	<b>185.904.908</b>	Dinas Kependudu kan dan Pencatatan
	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>205.173.810</b>	<b>185.904.908</b>	
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>205.173.810</b>	<b>185.904.908</b>	



No	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	INSTANSI
1	2	3	4	5
	<b>Belanja Jasa</b>	<b>205.173.810</b>	<b>185.904.908</b>	Sipil Kota
	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>205.173.810</b>	<b>185.904.908</b>	
	Belanja Tagihan Air	6.064.800	4.972.150	
	Belanja Tagihan Listrik	96.840.000	81.655.741	
	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	102.269.010	99.277.017	
9	<b>PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR</b>	<b>662.883.400</b>	<b>658.128.200</b>	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>662.883.400</b>	<b>658.128.200</b>	
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>662.883.400</b>	<b>658.128.200</b>	
	<b>Belanja Barang</b>	<b>11.283.400</b>	<b>10.128.200</b>	
	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>11.283.400</b>	<b>10.128.200</b>	
	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	2.090.000	2.080.000	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	7.934.400	7.568.200	
	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	1.259.000	480.000	
	<b>Belanja Jasa</b>	<b>651.600.000</b>	<b>648.000.000</b>	
	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>651.600.000</b>	<b>648.000.000</b>	
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	569.800.000	566.200.000	
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	13.000.000	13.000.000	
	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	30.800.000	30.800.000	
	Belanja Jasa Tenaga Supir	38.000.000	38.000.000	
10	<b>PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>140.199.650</b>	<b>123.228.275</b>	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
	<b>PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN</b>	<b>116.466.050</b>	<b>103.629.675</b>	
	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>116.466.050</b>	<b>103.629.675</b>	
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>116.466.050</b>	<b>103.629.675</b>	
	<b>Belanja Barang</b>	<b>61.576.050</b>	<b>61.149.250</b>	
	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>61.576.050</b>	<b>61.149.250</b>	
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	53.584.050	53.169.250	
	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	7.992.000	7.980.000	
	<b>Belanja Jasa</b>	<b>9.700.000</b>	<b>3.457.425</b>	
	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>9.700.000</b>	<b>3.457.425</b>	
	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	9.700.000	3.457.425	
	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>45.190.000</b>	<b>39.023.000</b>	
	<b>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</b>	<b>45.190.000</b>	<b>39.023.000</b>	
	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	7.190.000	7.176.000	
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	30.000.000	23.860.000		
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	8.000.000	7.987.000		
11	<b>PEMELIHARAAN MEBEL</b>	<b>14.973.600</b>	<b>14.973.600</b>	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>14.973.600</b>	<b>14.973.600</b>	
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>14.973.600</b>	<b>14.973.600</b>	
	<b>Belanja Barang</b>	<b>14.973.600</b>	<b>14.973.600</b>	
	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>14.973.600</b>	<b>14.973.600</b>	
	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	14.973.600	14.973.600	
12	<b>PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA</b>	<b>8.760.000</b>	<b>4.625.000</b>	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>8.760.000</b>	<b>4.625.000</b>	
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>8.760.000</b>	<b>4.625.000</b>	
	<b>Belanja Barang</b>	<b>3.000.000</b>	<b>2.950.000</b>	
	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>3.000.000</b>	<b>2.950.000</b>	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	3.000.000	2.950.000	
<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>5.760.000</b>	<b>1.675.000</b>		



No	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	INSTANSI
1	2	3	4	5
	<b>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</b>	<b>5.760.000</b>	<b>1.675.000</b>	
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	2.760.000	690.000	
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	3.000.000	985.000	
13	<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	<b>97.402.800</b>	<b>89.595.600</b>	
	<b>PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	<b>97.402.800</b>	<b>89.595.600</b>	
	<b>PENDATAAN PENDUDUK NON PERMANEN DAN RENTAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	<b>97.402.800</b>	<b>89.595.600</b>	
	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>97.402.800</b>	<b>89.595.600</b>	
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>97.402.800</b>	<b>89.595.600</b>	
	<b>Belanja Barang</b>	<b>38.212.800</b>	<b>35.840.600</b>	
	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>38.212.800</b>	<b>35.840.600</b>	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	23.019.200	21.704.200	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
14	<b>EVALUASI KINERJA APARATUR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KOTA SIBOLGA TAHUN 2022</b>	<b>4.120.200</b>	<b>3.932.900</b>	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.181.000	2.064.100	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	556.800	486.400	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.382.400	1.382.400	
	<b>Operasi bina kependudukan (binduk) tahun 2022</b>	<b>11.073.400</b>	<b>10.203.500</b>	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.483.000	4.259.500	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	888.000	796.000	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.702.400	5.148.000	
	<b>Belanja Jasa</b>	<b>29.910.000</b>	<b>24.510.000</b>	
	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>29.910.000</b>	<b>24.510.000</b>	
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	19.110.000	19.110.000	
	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	10.800.000	5.400.000	
	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>29.280.000</b>	<b>29.245.000</b>	
	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>	<b>29.280.000</b>	<b>29.245.000</b>	
	<b>Evaluasi kinerja aparatur administrasi kependudukan di kota sibolga tahun 2022</b>	<b>18.300.000</b>	<b>18.300.000</b>	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	18.300.000	18.300.000	
	<b>Operasi bina kependudukan (binduk) tahun 2022</b>	<b>10.980.000</b>	<b>10.945.000</b>	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.980.000	10.945.000	
15	<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>	<b>71.406.200</b>	<b>68.588.300</b>	
	<b>PELAYANAN PENCATATAN SIPIL</b>	<b>71.406.200</b>	<b>68.588.300</b>	
	<b>Pencatatan, Penatausahaan Dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting</b>	<b>71.406.200</b>	<b>68.588.300</b>	
	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>71.406.200</b>	<b>68.588.300</b>	
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>71.406.200</b>	<b>68.588.300</b>	
	<b>Belanja Barang</b>	<b>26.506.200</b>	<b>23.688.300</b>	
	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>26.506.200</b>	<b>23.688.300</b>	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	11.655.000	11.437.500	
	<b>Kegiatan pelayanan akte kelahiran mobile</b>	<b>4.960.800</b>	<b>3.856.900</b>	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.301.200	3.190.900	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	993.600	0	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	450.000	450.000	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot	216.000	216.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota



No	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	INSTANSI
1	2	3	4	5
	Kantor			
	<b>Pencatatan langsung akta perkawinan ke rumah-rumah ibadah non muslim</b>	<b>9.890.400</b>	<b>8.393.900</b>	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	9.890.400	8.393.900	
	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>44.900.000</b>	<b>44.900.000</b>	
	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>	<b>44.900.000</b>	<b>44.900.000</b>	
16	<b>KEGIATAN PELAYANAN AKTE KELAHIRAN MOBILE</b>	<b>27.300.000</b>	<b>27.300.000</b>	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	27.300.000	27.300.000	
	<b>Pencatatan Langsung Akta Perkawinan Ke Rumah-Rumah Ibadah Non Muslim</b>	<b>17.600.000</b>	<b>17.600.000</b>	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	17.600.000	17.600.000	
17	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	<b>308.959.800</b>	<b>283.492.723</b>	
	<b>Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>308.959.800</b>	<b>283.492.723</b>	
	<b>Koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non-pemerintah di kabupaten/kota dalam penerbitan pengelolaan informasi administrasi kependudukan</b>	<b>43.658.500</b>	<b>42.249.300</b>	
	<b>Belanja operasi</b>	<b>43.658.500</b>	<b>42.249.300</b>	
	<b>Belanja barang dan jasa</b>	<b>43.658.500</b>	<b>42.249.300</b>	
	<b>Belanja barang</b>	<b>13.358.500</b>	<b>12.254.300</b>	
	<b>Belanja barang pakai habis</b>	<b>13.358.500</b>	<b>12.254.300</b>	
	<b>Pelayanan kartu identitas anak (kia) keliling (kialink)</b>	<b>7.057.200</b>	<b>6.427.800</b>	
	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	125.400	120.000	
	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	256.000	256.000	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.392.800	2.236.400	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	312.000	280.800	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.610.000	1.390.800	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	468.000	460.800	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	228.000	208.000	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.665.000	1.475.000	
	<b>PELAYANAN KTP-el KELILING (KTPLink)</b>	<b>6.301.300</b>	<b>5.826.500</b>	
	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	125.400	120.000	
	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	256.000	256.000	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.396.400	2.258.500	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	444.000	397.700	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	345.000	325.800	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	666.000	648.000	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	228.000	208.000	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.840.500	1.612.500	
	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>30.300.000</b>	<b>29.995.000</b>	
	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>	<b>30.300.000</b>	<b>29.995.000</b>	
	<b>PELAYANAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) KELILING (KIALink)</b>	<b>15.150.000</b>	<b>14.845.000</b>	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	15.150.000	14.845.000	
	<b>PELAYANAN KTP-el KELILING (KTPLink)</b>	<b>15.150.000</b>	<b>15.150.000</b>	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	15.150.000	15.150.000	
	<b>FASILITASI TERKAIT PENGELOLAAN INFORMASI</b>	<b>193.765.000</b>	<b>183.244.700</b>	



No	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	INSTANSI
1	2	3	4	5
	<b>ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>			
	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>193.765.000</b>	<b>183.244.700</b>	
	Belanja Barang dan Jasa	193.765.000	183.244.700	
	Belanja Barang	42.849.000	40.808.700	
	Belanja Barang Pakai Habis	42.849.000	40.808.700	
	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	224.000	224.000	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	15.093.000	14.168.200	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	904.800	844.500	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	6.338.600	5.735.500	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	888.000	732.000	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	435.600	432.000	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	164.000	160.000	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	753.000	750.000	
	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	18.048.000	17.762.500	
	<b>Belanja Jasa</b>	<b>18.000.000</b>	<b>18.000.000</b>	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>8.000.000</b>	<b>8.000.000</b>	
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	8.000.000	8.000.000	
	<b>Belanja Sewa Gedung dan Bangunan</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	
	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	10.000.000	10.000.000	
	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>20.416.000</b>	<b>13.858.000</b>	
	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>	<b>20.416.000</b>	<b>13.858.000</b>	
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	20.416.000	13.858.000	
18	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>112.500.000</b>	<b>110.578.000</b>	
	<b>BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA</b>	<b>112.500.000</b>	<b>110.578.000</b>	
	<b>BELANJA MODAL ASET TIDAK BERWUJUD</b>	<b>112.500.000</b>	<b>110.578.000</b>	
	<b>BELANJA MODAL ASET TIDAK BERWUJUD</b>	<b>112.500.000</b>	<b>110.578.000</b>	
	Belanja Modal Software	112.500.000	110.578.000	
	<b>SOSIALISASI TERKAIT PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	<b>71.536.300</b>	<b>57.998.723</b>	
	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>71.536.300</b>	<b>57.998.723</b>	
	Belanja Barang dan Jasa	71.536.300	57.998.723	
	Belanja Barang	28.674.300	28.657.900	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
	Belanja Barang Pakai Habis	28.674.300	28.657.900	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	414.000	409.600	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	19.288.800	19.288.800	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	4.500.000	4.500.000	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.471.500	4.459.500	
	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>42.862.000</b>	<b>29.340.823</b>	
	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>	<b>42.862.000</b>	<b>29.340.823</b>	
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	37.762.000	24.240.823	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.100.000	5.100.000	
19	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>	<b>11.700.000</b>	<b>11.700.000</b>	
	Penyusunan profil kependudukan	11.700.000	11.700.000	
	Penyediaan data kependudukan kabupaten/kota	3.000.000	3.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
	<b>PENYUSUNAN PROFIL DATA PERKEMBANGAN DAN PROYEKSI KEPENDUDUKAN SERTA KEBUTUHAN YANG LAIN</b>	<b>8.700.000</b>	<b>8.700.000</b>	
	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>8.700.000</b>	<b>8.700.000</b>	
	Belanja Barang dan Jasa	8.700.000	8.700.000	
	Belanja Barang	8.700.000	8.700.000	



No	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	INSTANSI
1	2	3	4	5
	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>8.700.000</b>	<b>8.700.000</b>	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	8.700.000	8.700.000	
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>6.948.340.006</b>	<b>5.654.709.470</b>	Dinas Perhubungan Kot Sibolga
	<b>ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>3.618.926.144</b>	<b>3.261.904.583</b>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.618.926.144	3.335.629.333	
	<b>ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH</b>	<b>609.524.500</b>	<b>486.039.242</b>	
	Penyediaan Komponen Intalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.999.800	19.155.600	
	Penyediaan Peralatan dan Pelengkapan Kantor	138.027.200	132.195.900	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.999.700	15.344.000	Dinas Perhubungan Kot Sibolga
	Penyediaan Logistik Kantor	97.200.000	90.700.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	79.999.800	75.166.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	19.740.000	15.300.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	238.558.000	138.177.742	
	<b>PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>2.309.237.812</b>	<b>2.239.338.910</b>	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.000.000	12.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	171.037.812	139.158.910	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.126.200.000	2.088.180.000	
	<b>PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>410.651.550</b>	<b>375.500.670</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	343.550.750	321.774.670	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	46.360.800	36.251.000	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung atau Bangunan Lainnya	20.740.000	17.475.000	
2	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN(LLAJ)</b>	<b>1.441.326.024</b>	<b>677.324.900</b>	Dinas Perhubungan Kot Sibolga
	<b>Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C</b>	<b>199.793.224</b>	<b>199.406.000</b>	
	Rehabilitas dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	199.793.224	199.406.000	
	<b>PELAKSANAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS UNTUK JARINGAN JALAN KABUPATEN /KOTA</b>	<b>1.112.875.000</b>	<b>382.450.000</b>	
	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	384.875.000	382.450.000	
	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/ Kota	728.000.000	0	
	<b>Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</b>	<b>32.435.000</b>	<b>0</b>	
	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ	32.435.000	0	
	<b>PENETAPAN TARIF KELAS EKONOMI UNTUK ANGKUTAN ORANG YANG MELAYANI TRAYEK SERTA ANGKUTAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>96.222.800</b>	<b>95.468.900</b>	
	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	96.222.800	95.468.900	
3	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN</b>	<b>1.193.588.831</b>	<b>1.002.476.526</b>	Dinas Perhubungan Kot Sibolga
	<b>PEMBANGUNAN DAN PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN</b>	<b>1.193.588.831</b>	<b>1.131.446.726</b>	



No	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	INSTANSI
1	2	3	4	5
	<b>PELABUHAN SUNGAI DAN DANAU</b>			
	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	996.488.831	956.246.726	
	Pengawasan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	197,100,000	175.200.000	
1	<b>PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN</b>	<b>226.073.600</b>	<b>192.542.100</b>	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sibolga
	<b>Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>226.073.600</b>	<b>192.542.100</b>	
	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) Maupun Produsen B2 (P-B2)	226.073.600	192.542.100	
2	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>	<b>5.205.787.503</b>	<b>4.426.722.250</b>	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sibolga
	<b>Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</b>	<b>3.742.077.303</b>	<b>3.219.641.130</b>	
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	3.742.077.303	3.219.641.130	
	<b>Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya</b>	<b>1.463.710.200</b>	<b>1.207.081.120</b>	
	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1.463.710.200	1.207.081.120	
3	<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>	<b>1.344.056.022</b>	<b>650.408.300</b>	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sibolga
	<b>Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</b>	<b>1.344.056.022</b>	<b>650.408.300</b>	
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/kota	10.119.200	9.744.600	
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	92.248.200	65.492.100	
	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1.241.688.622	575.171.600	
4	<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	<b>46.784.800</b>	<b>38.885.300</b>	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sibolga
	<b>Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</b>	<b>46.784.800</b>	<b>38.885.300</b>	
	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa, Tera, Tera Ulang	46.784.800	38.885.300	
5	<b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>	<b>274.838.000</b>	<b>212.428.500</b>	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sibolga
	<b>Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</b>	<b>274.838.000</b>	<b>212.428.500</b>	
	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	274.838.000	212.428.500	
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>	<b>14.369.381.149</b>	<b>13.521.382.170</b>	
6	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>10.535.531.655</b>	<b>9.947.743.393</b>	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sibolga
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>4.690.772.163</b>	<b>4.557.050.037</b>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.690.772.163	4.557.050.037	
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>79.750.000</b>	<b>70.730.000</b>	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	79.750.000	70.730.000	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>784.175.000</b>	<b>624.020.999</b>	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	25.535.400	22.755.500	



No	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	INSTANSI
1	2	3	4	5
	Bangunan Kantor			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	133.828.400	122.072.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	135.408.800	126.567.300	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40.185.600	38.812.500	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	120.340.800	88.495.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.552.000	13.420.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	313.324.000	211.898.699	
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>79.160.000</b>	<b>79.080.000</b>	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	79.160.000	79.080.000	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>4.343.135.260</b>	<b>4.073.488.241</b>	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.800.000	5.800.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.032.135.260	2.777.128.241	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.305.200.000	1.290.560.000	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>558.539.232</b>	<b>543.374.116</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	131.995.550	124.972.400	
	Pemeliharaan Mebel	10.000.000	9.030.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	331.517.851	329.088.300	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	85.025.831	80.283.416	
7	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	<b>3.637.313.994</b>	<b>3.388.698.327</b>	
	<b>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</b>	<b>3.637.313.994</b>	<b>3.388.698.327</b>	
	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	102.085.900	95.339.700	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	829.817.900	800.098.700	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	380.493.877	378.142.600	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	2.324.916.317	2.115.117.327	
8	<b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA</b>	<b>196.535.500</b>	<b>184.940.450</b>	
	<b>Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>196.535.500</b>	<b>184.940.450</b>	
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	146.685.700	136.633.250	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	49.849.800	48.307.200	
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>1.782.741.320</b>	<b>1.596.195.883</b>	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.230.000	3.892.200	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	73.285.700	68.891.536	





No	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	INSTANSI
1	2	3	4	5
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	21.786.900	19.894.400	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.346.000	13.316.800	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	254.052.000	160.935.838	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.800.000	22.750.000	
2	<b>PROGRAM PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	1.077.202.120	1.005.955.295	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	2.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	179.838.120	120.836.959	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	895.364.000	883.118.300	
3	<b>PROGRAM PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	315.038.600	300.559.850	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	292.468.600	278.844.850	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.570.000	21.715.000	
4	<b>PROGRAM PEMADUAN DAN SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DENGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK</b>	1.240.449.900	1.043.032.416	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Advokasi dan Sosialisasi dan Fasilitasi pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur formal dan satuan pendidikan jenjang S/MI/ dan SLTP/MTS, jalur nonformal dan informal	10.677.800	0	
5	<b>PROGRAM PEMETAAN PERKIRAAN PENGENDALIAN PENDUDUK CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	31.499.700	31.449.700	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	31.499.700	31.499.700	
6	<b>PROGRAM PELAKSANAAN ADVOKASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB SESUAI KEARIFAN BUDAYA LOKAL</b>	0	0	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK susai Kearifan Budaya Lokal	0	0	
7	<b>PROGRAM PELAKSANAAN ADVOKASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB SESUAI KEARIFAN BUDAYA LOKAL</b>	1.290.404.971	1.013.197.819	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	1.290.409.971	1.013.197.819	
8	<b>PROGRAM PENDAYAGUNAAN TENAGA PENYULUH KB/PETUGAS LAPANGAN KB (PKB/PLKB)</b>	16.083.000	16.083.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	16.083.000	16.083.000	
9	<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN KEBUTUHAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI SERTA PELAKSANAAN PELAYANAN KB DI DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	692.749.250	375.480.568	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	31.613.468	31.613.468	
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	0	0	
	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	0	0	



No	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	INSTANSI
1	2	3	4	5
	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	661.135.782	343.867.100	
10	<b>PROGRAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KELUARGA MELALUI PEMBINAAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA</b>	6.372.397.391	4.814.833.686	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	8.517.350	8.513.850	
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	0	0	
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	6.363.880.041	4.806.319.836	
1	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>	<b>898.691.845</b>	<b>860.901.125</b>	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
	<i>Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota</i>	<b>878.480.845</b>	<b>840.802.725</b>	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	344.365.925	341.123.175	
	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	403.590.120	373.264.850	
	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	130.524.800	126.414.700	
	<i>Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<b>20.211.000</b>	<b>20.098.400</b>	
	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	20.211.000	20.098.400	
2	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>	<b>1.131.240.710</b>	<b>1.037.200.111</b>	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
	<i>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<b>868.351.710</b>	<b>792.724.711</b>	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	868.351.710	792.724.711	
	<i>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi</i>	<b>98.880.800</b>	<b>86.747.900</b>	
	Seleksi Atlet Daerah	98.880.800	86.747.900	
	<i>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi</i>	<b>164.008.200</b>	<b>157.727.500</b>	
	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	104.103.400	97.884.600	
	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	59.904.800	59.842.900	
3	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>4.667.418.690</b>	<b>4.354.143.239</b>	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<b>2.861.189.974</b>	<b>2.673.407.904</b>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.861.189.974	2.673.407.904	
	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<b>75.000.000</b>	<b>63.440.000</b>	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	75.000.000	63.440.000	
	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<b>549.947.600</b>	<b>526.151.268</b>	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.182.000	3.942.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.309.500	39.815.950	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.871.000	20.120.400	



No	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	INSTANSI
1	2	3	4	5
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	21.496.500	21.496.500	
	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	57.619.800	54.937.050	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.200.800	8.184.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	392.268.000	377.655.368	
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>91.564.300</b>	<b>89.406.100</b>	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	91.564.300	89.406.100	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>929.161.916</b>	<b>859.093.467</b>	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.750.000	15.750.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	187.811.916	117.743.467	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	725.600.000	725.600.000	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>160.554.900</b>	<b>142.644.500</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100.177.600	85.637.200	
	Pemeliharaan Mebel	2.460.400	1.800.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.490.000	39.905.600	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	17.426.900	15.301.700	
4	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>	<b>35.385.615.735</b>	<b>34.036.319.887</b>	
	<b>Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota</b>	<b>335.486.510</b>	<b>333.749.000</b>	
	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	335.486.510	333.749.000	
	<b>Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</b>	<b>34.787.271.425</b>	<b>33.445.856.187</b>	
	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	151.454.800	86.208.650	
	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	32.758.560.000	32.304.718.700	
	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1.877.256.625	1.054.928.837	
	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			
	<b>Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</b>	<b>235.917.200</b>	<b>229.925.800</b>	
	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	235.917.200	229.925.800	
	<b>Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>26.940.600</b>	<b>26.788.900</b>	
	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	26.940.600	26.788.900	
5	<b>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>	<b>598.557.400</b>	<b>597.372.700</b>	
	<b>Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</b>	<b>598.557.400</b>	<b>597.372.700</b>	
	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	69.996.000	69.996.000	
	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	430.061.400	428.980.100	
	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata	98.500.000	98.396.600	



No	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	INSTANSI
1	2	3	4	5
	Dalam dan Luar Negeri			
6	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>	<b>1.136.929.750</b>	<b>869.033.140</b>	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
	<i>Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar</i>	<b>613.316.350</b>	<b>361.851.900</b>	
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	235.205.150	0	
	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	355.314.000	339.162.300	
	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	22.797.200	22.689.600	
	<b>Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif</b>	<b>523.613.400</b>	<b>507.181.240</b>	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	125.726.900	117.652.540	
	Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	192.049.300	191.540.900	
	Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	205.837.200	197.987.800	
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.663.822.497</b>	<b>3.487.319.648</b>	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Sibolga
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.172.299.654</b>	<b>2.084.563.608</b>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.172.299.654	2.084.563.608	
	<b>Administrasi Kepagawaian Perangkat Daerah</b>	<b>50.000.000</b>	42.080.000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50.000.000	42.080.000	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>479.218.900</b>	<b>460.627.119</b>	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.494.100	4.481.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	152.470.200	143.772.600	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	25.397.400	25.286.600	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	34.487.200	29.432.100	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.000.000,-	3.157.079	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.200.000	7.200.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250.170.000	247.297.740	
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>143.620.000</b>	<b>143.410.000</b>	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	143.620.000	143.410.000	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	502.248.793	452.694.471	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.000.000	9.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60.420.793	49.915.871	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	432.828.000	393.778.600	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>316.435.150</b>	<b>303.944.450</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	70.472.850	66.737.200	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.540.000	9.440.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	236.422.300	227.767.250	
2	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	<b>132.002.800</b>	<b>118.748.500</b>	Dinas Penanaman Modal dan
	Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang	70.754.800	70.444.500	



No	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	INSTANSI
1	2	3	4	5
	penanaman modal			Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Sibolga
	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	70.754.800	70.444.500	
	<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>	61.248.000	48.304.000	
	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal daerah Kabupaten/Kota	61.248.000	48.304.000	
3	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	<b>354.244.000</b>	<b>274.380.350</b>	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	354.244.000	274.380.350	
	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	234.313.100	212.916.900	
	Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal Daerah Kabupaten/Kota	119.930.900	91.463.450	
4	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	495.463.345	409.623.634	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Sibolga
	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	495.463.345	409.623.634	
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	308.311.345	247.408.994	
	Penyediaan Layanan Konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	98.400.200	86.459.500	
	Koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian Fasilitas/insentif Daerah	88.751.800	75.755.140	
5	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	345.997.000	211.852.750	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Sibolga
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	345.997.000	211.852.750	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	251.172.700	177.162.500	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal	94.824.300	34.690.250	
6	<b>PROGRAM PENGOLAHAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	217.568.200	214.838.800	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Sibolga
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	217.568.200	214.838.800	
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	217.568.200	214.838.800	
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>4.334.770.307</b>	<b>4.003.528.539</b>	Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Sibolga
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.506.236.407	2.308.643.797	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	553.854.950	468.332.786	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	160.909.000	156.735.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	955.303.100	940.691.406	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	158.466.850	129.125.550	
2	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFOMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>1.390.510.745</b>	<b>1.281.909.680</b>	Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Sibolga
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	1.390.510.745	1.281.909.680	
3	<b>PROGRAM PENGELOLAN APLIKASI INFOMATIKA</b>	<b>2.632.471.700</b>	<b>2.613.737.927</b>	



No	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	INSTANSI
1	2	3	4	5
	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	282.587.500	270.608.500	Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Sibolga
	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.349.884.200	2.343.129.427	
4	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	<b>201.687.400</b>	<b>185.606.910</b>	
	Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	201.687.400	185.606.910	
5	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	<b>77.450.900</b>	<b>65.353.200</b>	
	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	77.450.900	65.353.200	
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>13.438.120.781</b>	<b>12.621.863.815</b>	Bagian Administrasi Pembangunan Setdakot Sibolga
	<b>Pencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>58.103.000</b>	<b>50.935.450</b>	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	58.103.000	50.935.450	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>10.128.203.257</b>	<b>9.442.053.288</b>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.084.795.257	9.400.271.860	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	43.408.000	41.781.428	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0	0	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0	0	
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>74.642.033</b>	<b>50.855.095</b>	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	74.642.033	50.855.095	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>2.571.100.000</b>	<b>2.522.765.000</b>	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.571.100.000	2.522.765.000	
	<b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	<b>606.072.491</b>	<b>555.254.982</b>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	206.072.491	159.254.982	
	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	400.000.000	396.000.000	
2	<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	<b>1.843.842.284</b>	<b>1.690.524.893</b>	Bagian Administrasi Pembangunan Setdakot Sibolga
	<b>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>	<b>116.959.800</b>	<b>63.362.612</b>	
	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	59.382.600	50.863.100	
	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	57.577.200	12.499.512	
	<b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>	<b>1.726.882.484</b>	<b>1.627.162.281</b>	
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.460.695.500	1.406.819.800	
	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	266.186.984	220.342.481	
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>23.153.091.915</b>	<b>22.596.991.951</b>	Bagian Umum Setdakot Sibolga
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0	0	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>5.605.571.525</b>	<b>5.600.896.976</b>	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	198.583.125	198.176.600	



No	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	INSTANSI
1	2	3	4	5
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	340.848.800	340.705.200	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	144.654.000	144.621.800	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.492.757.600	1.490.654.100	
	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	1.105.536.000	1.103.725.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.323.192.000	2.323.014.276	
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>7.235.072.515</b>	<b>6.908.960.090</b>	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3.464.400.000	3.161.190.000	
	Pengadaan Mebel	0	0	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.770.672.515	3.747.770.090	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>2.057.010.208</b>	<b>1.954.396.688</b>	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50.000.000	49.980.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.407.558.478	1.309.329.288	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	599.451.730	595.087.400	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>5.578.095.767</b>	<b>5.552.664.950</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	2.856.104.766	2.846.339.050	
	Pemeliharaan Mebel	60.000.000	59.945.400	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	787.039.500	781.647.500	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.874.951.501	1.864.733.000	
	<b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	<b>213.807.900</b>	<b>210.387.000</b>	
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	213.807.900	210.387.000	
	<b>Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>	<b>1.020.891.000</b>	<b>1.020.426.500</b>	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	612.166.400	611.961.500	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	318.521.200	318.261.800	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	90.203.400	90.203.200	
	<b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	<b>1.442.643.000</b>	<b>1.349.259.747</b>	
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1.442.643.000	1.349.259.747	
1	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	<b>878.246.400</b>	<b>755.978.331</b>	
	<b>Administrasi Tata Pemerintahan</b>	<b>796.368.600</b>	<b>679.996.393</b>	
	Penataan Administrasi Pemerintahan	265.005.400	254.221.100	Bagian Pemerintahan Setdakot Sibolga
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	259.238.350	198.310.393	
	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	272.124.850	227.464.900	
	<b>Fasilitasi Kerja Sama Daerah</b>	<b>81.877.800</b>	<b>75.981.938</b>	
	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	81.877.800	75.981.938	
1	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	<b>6.769.178.600</b>	<b>6.485.425.068</b>	
	<b>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>6.769.178.600</b>	<b>6.485.425.068</b>	Bagian Perekonomian dan Kesra



No	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	INSTANSI
1	2	3	4	5
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	3.482.896.100	3.220.710.868	Setdakot Sibolga
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	2.706.282.500	2.684.714.200	
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	580.000.000	580.000.000	
2	<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	<b>662.534.600</b>	<b>524.893.194</b>	
	<b>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>	<b>662.534.600</b>	<b>524.893.194</b>	
	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	662.534.600	524.893.194	
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>1.043.255.000</b>	<b>967.528.298</b>	Bagian Organisasi Setdakot Sibolga
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>287.185.000</b>	<b>269.439.000</b>	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	287.185.000	269.439.000	
	<b>Penataan Organisasi</b>	<b>756.070.000</b>	<b>698.089.298</b>	
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	241.348.400	221.734.918	
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	194.680.400	169.281.100	
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	320.041.200	307.073.280	
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>287.185.000</b>	<b>269.439.000</b>	Bagian Hukum Setdakot Sibolga
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>287.185.000</b>	<b>269.439.000</b>	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	287.185.000	269.439.000	
	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	<b>756.070.000</b>	<b>698.089.298</b>	
	<b>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>	<b>756.070.000</b>	<b>698.089.298</b>	
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	241.348.400	221.734.918	
	Fasilitasi Bantuan Hukum	194.680.400	169.281.100	
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	320.041.200	307.073.280	
1	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>20.089.021.061</b>	<b>18.943.086.424</b>	Sekretariat DPRD Kota Sibolga
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.467.423.328	3.292.349.180	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	364.788.000	299.631.160	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	74.092.800	73.043.800	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	260.324.400	260.324.400	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	29.020.300	28.126.900	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	596.772.000	563.655.100	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	310.803.200	306.800.700	
	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	113.060.000	99.345.600	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	422.254.000	175.621.850	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.052.446.400	1.048.153.300	





No	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	INSTANSI
1	2	3	4	5
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.865.000	9.865.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	450.440.784	371.610.122	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.206.800.000	1.205.575.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.058.713.150	1.038.511.959	
	Pemeliharaan Mebel	10.000.000	9.695.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.016.656.193	994.967.640	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	189.984.500	181.230.300	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	42.600.000	42.231.000	
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	7.853.834.553	7.515.934.138	
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	308.680.300	308.070.200	
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	57.710.000	-	
	Fasilitasi Fraksi DPRD	130.031.200	130.024.800	
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	539.531.400	472.967.687	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	523.189.553	515.351.588	
2	<b>Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD</b>	<b>26.123.129.000</b>	<b>15.123.530.404</b>	
	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	324.607.800	261.743.000	
	Pembahasan Rancangan Perda	200.541.800	113.083.400	
	Pembahasan KUA dan PPAS	10.090.100	10.090.100	
	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	10.765.300	10.765.300	
	Pembahasan APBD	330.506.100	211.142.700	
	Pembahasan APBD Perubahan	291.255.600	187.279.400	
	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	270.824.100	144.916.279	
	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	252.024.000	154.743.800	
	Pendalaman Tugas DPRD	683.300.000	389.852.106	
	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	420.000.000	138.500.000	
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	168.000.000	144.000.000	
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	88.518.400	88.259.200	
	Kunjungan Kerja dalam Daerah	20.485.000	2.980.000	
	Pelaksanaan Reses	3.358.152.000	3.117.617.000	
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	19.694.058.800	10.148.558.119	
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA</b>	<b>76.876.191.165</b>	<b>74.247.025.388,84</b>	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>23.077.134.165</b>	<b>21.683.926.318</b>	
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	23.077.134.165	21.683.926.318	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1.456.725.600</b>	<b>1.400.795.178</b>	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.236.875.600	1.190.585.500	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	219.850.000	210.209.678	
				Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sibolga



No	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	INSTANSI
1	2	3	4	5
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>342.331.400</b>	<b>288.346.069</b>	
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	90.445.400	61.053.984	
	Pemeliharaan Mebel	25.000.000	24.806.840	
	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	87.956.000	83.667.500	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	138.930.000	118.817.745	
	<b>Peningkatan pelayanan BLUD</b>	<b>52.000.000.000</b>	<b>50.873.957.823,84</b>	
	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	52.000.000.000	50.873.957.823,84	
2	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>1.477.496.943</b>	<b>1.372.515.551</b>	
	<b>Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah Kabupaten / Kota</b>	<b>1.408.296.943</b>	<b>1.344.634.551</b>	
	Rehabilitasi dan pemeliharaan rumah sakit	892.857.593	877.603.795	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sibolga
	Pemeliharaan sarana fasilitas pelayanan kesehatan	297.739.350	278.148.363	
	Pemeliharaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan	217.700.000	188.884.393	
	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>69.200.000</b>	<b>27.881.000</b>	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	49.700.000	9.731.000	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	19.500.000	18.150.000	
3	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	<b>500.000.000</b>	<b>331.964.345</b>	
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber daya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM manusia di wilayah kabupaten/kota	500.000.000	331.964.345	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sibolga
	Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar	500.000.000	331.964.345	
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>39.924.688.264</b>	<b>32.519.391.155</b>	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>23.402.903.327</b>	<b>18.530.569.540</b>	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	23.387.293.127	18.514.959.340	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.610.200	15.610.200	
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>15.151.200</b>	<b>15.151.200</b>	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	15.151.200	15.151.200	
	<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	<b>597.072.600</b>	<b>584.786.400</b>	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	74.999.800	74.597.100	
	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	68.649.800	68.022.500	
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	44.227.800	43.601.900	
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	269.421.900	259.279.800	
	Pengolahan Data Retribusi Daerah	139.773.300	139.285.100	
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>282.504.000</b>	<b>211.390.000</b>	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	15.150.000	14.970.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	267.354.000	196.420.000	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1.178.340.530</b>	<b>692.316.676</b>	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24.197.000	16.914.300	



No	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	INSTANSI
1	2	3	4	5
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	160.568.400	147.953.100	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	167.479.130	119.017.800	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	54.336.000	37.835.250	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	27.450.000	22.032.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	744.310.000	348.564.226	
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	456.762.600	446.672.989	
	Pengadaan Mebel	38.900.600	38.570.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	348.262.000	338.902.989	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	69.600.000	69.200.000	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	12.666.356.146	10.829.695.350	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.070.000	9.070.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.595.112.746	9.778.296.950	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.062.173.400	1.042.328.400	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	1.325.597.861	1.208.809.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	240.373.625	152.428.500	
	Pemeliharaan Mebel	34.000.000	33.859.500	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	108.185.000	88.010.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	893.693.105	885.404.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	49.346.131	49.107.000	
	2	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>25.943.655.498</b>	
	<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>	5.067.212.600	3.822.029.417	
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	210.180.000	174.171.500	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	190.010.000	156.556.667	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	283.014.000	246.196.250	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	183.327.000	123.404.000	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	170.482.500	160.119.000	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	414.087.900	343.084.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	890.201.200	592.993.600	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	911.594.500	734.194.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1.222.807.500	813.390.100	
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	591.508.000	477.920.300	
	<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	1.675.453.805	1.450.834.649	
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	769.871.800	686.726.242	
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	96.636.800	89.882.800	
	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	33.063.800	25.310.700	
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi,	119.492.200	82.196.502	



No	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	INSTANSI
1	2	3	4	5
	Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	45.013.000	38.523.900	
	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	32.425.200	25.616.800	
	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	150.609.100	140.629.000	
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	428.341.905	361.948.705	
	<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	1.125.448.105	923.406.705	
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	133.831.000	107.697.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	236.406.400	190.972.900	
	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	149.085.500	134.806.700	
	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	226.035.900	172.138.100	
	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	147.576.300	133.905.900	
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	232.513.005	183.886.105	
	<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	18.075.540.988	14.614.373.185	
	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	1.482.178.588	995.246.214	
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	16.593.362.400	13.619.126.971	
3	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.751.483.200</b>	<b>1.435.314.450</b>	
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.751.483.200	1.435.314.450	
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	70.504.000	69.173.400	
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	237.427.400	162.726.000	
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	256.765.600	167.123.200	
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	67.346.000	64.509.800	
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	988.735.200	852.692.850	
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	130.705.000	119.089.200	
4	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>2.432.676.000</b>	<b>1.850.252.150</b>	
	<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	2.432.676.000	1.850.252.150	
	Penyusunan Standar Harga	198.500.000	164.711.200	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah



No	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	INSTANSI
1	2	3	4	5
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	132.817.000	106.911.550	dan Aset Daerah
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	87.146.000	64.620.650	
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	196.781.300	156.657.700	
	Pengamanan Barang Milik Daerah	120.090.000	90.904.350	
	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	530.954.800	432.271.500	
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	541.283.400	355.152.900	
	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	46.213.600	41.632.300	
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	157.674.000	124.807.200	
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	421.215.900	312.582.800	
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	7.554.109.171	7.062.642.743	Inspektorat Kota Sibolga
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	5.606.195.799	5.417.593.565	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.606.195.799	5.417.593.565	
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>176.052.000</b>	<b>158.659.845</b>	
	Pendidikan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	176.052.000	158.659.845	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	834.178.200	603.993.220	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.274.400	7.016.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.098.400	27.688.700	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.760.400	8.765.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.636.000	17.200.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.677.000	12.212.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	744.732.000	531.111.520	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang</b>	653.294.500	622.888.228	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.810.000	1.583.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	78.484.500	63.505.228	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	571.000.000	557.800.000	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	284.388.672	259.507.885	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	80.530.000	56.590.935	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.060.000	3.791.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	199.798.672	199.125.950	
2	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	379.170.000	348.975.000	Inspektorat Kota Sibolga
	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	177.870.000	148.170.000	
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	33.000.000	29.700.000	
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	66.000.000	62.590.000	
	Reviu Laporan Kinerja	15.730.000	15.730.000	
	Reviu Laporan Keuangan	35.090.000	32.230.000	
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	28.050.000	7.920.000	
	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</b>	201.300.000	200.805.000	
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	153.120.000	152.625.000	
	Pengawasan Dengan Tujuan tertentu	48.180.000	48.180.000	



No	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	INSTANSI	
1	2	3	4	5	
3	<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	257.010.000	247.004.800	Inspektorat Kota Sibolga	
	<b>Pendampingan dan Asistensi</b>	257.010.000	247.004.800		
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	257.010.000	247.004.800		
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA</b>	<b>5.302.689.835</b>	<b>4.713.331.938</b>	Badan Kepegawaian Daerah Kota Sibolga	
	<b>ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>3.137.772.645</b>	<b>2.998.802.939</b>		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.137.772.645	2.998.802.939		
	<b>PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>1.249.800</b>	<b>1.190.950</b>		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.249.800	1.190.950		
	<b>ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>156.967.400</b>	<b>121.448.000</b>		
	sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	75.717.400	53.263.000		
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	81.250.000	68.185.000		
	<b>ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH</b>	<b>974.566.800</b>	<b>588.678.055</b>		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.218.400	4.847.800		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	144.460.000	131.876.200		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.206.400	20.841.500		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	28.380.000	26.030.000		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6.684.000	4.550.000		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	765.618.000	400.532.555		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	169.020.000	168.224.000		
	<b>PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>614.984.940</b>	<b>600.423.364</b>		Badan Kepegawaian Daerah Kota Sibolga
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.194.000	9.406.250		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	116.231.640	103.230.514		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	488.559.300	487.786.600		
<b>PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>248.128.250</b>	<b>234.564.630</b>			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	81.480.150	73.889.630			
Pemeliharaan Mebel	6.242.100	5.457.000			
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	51.984.000	47.626.000			
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	108.422.000	107.592.000			
2	<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	<b>1.243.712.200</b>	<b>835.880.512</b>	Badan Kepegawaian Daerah Kota Sibolga	
	<b>PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN ASN</b>	<b>478.868.900</b>	<b>365.974.312</b>		
	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	47.397.400	47.082.600		
	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	211.102.400	116.222.112		
	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	35.369.900	18.092.300		
	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	184.999.200	184.577.300		
	<b>MUTASI DAN PROMOSI ASN</b>	<b>546.827.500</b>	<b>298.582.400</b>		
	Pengelolaan Mutasi ASN	82.527.600	60.757.600		
	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	251.551.400	154.305.400		
	Pengelolaan Promosi ASN	212.748.500	83.519.400		
<b>PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN</b>	<b>165.873.800</b>	<b>129.025.600</b>			



No	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	INSTANSI
1	2	3	4	5
	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	74.000.000	54.700.000	
	Fasilitasi Pengembangan Karir Dalam Jabatan Fungsional	91.873.800	74.325.600	
	<b>PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR</b>	<b>52.142.000</b>	<b>42.298.200</b>	
	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	52.142.000	42.298.200	
1	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>795.373.270</b>	<b>585.704.578</b>	
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>18.657.000</b>	<b>15.968.450</b>	
	Sosialisasi Peraturan Perundangan-undangan	18.657.000	15.968.450	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>466.634.420</b>	<b>299.124.480</b>	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	9.338.400	9.299.400	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	71.286.000	66.839.800	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	22.311.600	20.918.500	
	Penyediaan Bahan Logistik	26.580.000	24.600.000	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	42.936.420	41.791.270	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	294.182.000	135.675.510	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>202.811.600</b>	<b>180.989.648</b>	Bappeda Kota Sibolga
	Penyediaan jasa surat menyurat	10.000.000	10.000.000	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	52.512.000	31.084.648	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	140.299.600	139.905.000	
	<b>Pemereliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>107.270.250</b>	<b>89.622.000</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	60.880.250	50.402.000	
	Pemeliharaan Mebel	6.000.000	6.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.390.000	33.220.000	
2	<b>Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah</b>	<b>340.345.400</b>	<b>272.280.800</b>	
	<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	<b>153.143.400</b>	<b>108.903.500</b>	
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	153.143.400	108.903.500	
	<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>187.202.000</b>	<b>163.377.300</b>	Bappeda Kota Sibolga
	Koordinasi Pengendalian, Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	157.717.600	140.263.600	
	Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	29.484.400	23.113.700	
	<b>Program Koordinasi Dan Sikronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>485.382.200</b>	<b>340.489.300</b>	Bappeda Kota Sibolga
	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<b>255.494.800</b>	<b>179.806.800</b>	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	255.494.800	179.806.800	
	Percepatan Pencapaian SDGs			
	Pelaporan Rencana Aksi Hak Azasi Manusia (HAM)			
	Laporan dan Evaluasi Rencana Aksi Gizi dan Ketahanan Pangan Kota Sibolga			
	Penguatan Pengarus Utamaan Gender (PUG)			
	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan			
	Kota Layak Anak, Kota Sehat dan Germas			
	Pencegahan dan Penanggulangan Stunting			
	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	<b>171.753.200</b>	<b>123.555.200</b>	



No	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	INSTANSI
1	2	3	4	5
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian ( RPJPD, RPJMD dan RKPD )	171.753.200	123.555.200	
	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>58.134.200</b>	<b>37.127.300</b>	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	58.134.200	37.127.300	
	<b>Penelitian dan Pengembangan</b>	<b>436.148.800</b>	<b>296.618.649</b>	
3	<b>Program Penelitian dan Pengembangan Daerah</b>	<b>436.148.800</b>	<b>296.618.649</b>	
	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>	<b>205.710.200</b>	<b>115.225.971</b>	
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	205.710.200	115.225.971	Bappeda Kota Sibolga
	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>	<b>186.219.000</b>	<b>156.741.078</b>	
	Penelitian dan Pengembangan kelautan dan Perikanan	186.219.000	156.741.078	
	<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>	<b>44.219.600</b>	<b>24.651.600</b>	
	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	44.219.600	24.651.600	
1	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>4.737.245.212,-</b>	<b>4.247.864.475,-</b>	
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>3.502.322.332,-</i>	<i>3.074.701.735,-</i>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.502.322.332,-	3.074.701.735,-	
	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>131.229.500,-</i>	<i>118.860.900,-</i>	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	8.461.600,-	8.048.000,-	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	63.812.400,-	58.349.300,-	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.137.200,-	12.617.600,-	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	23.376.000,-	20.488.000,-	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.642.300,-	8.558.000,-	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	10.800.000,-	10.800.000,-	
	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>994.419.180,-</i>	<i>947.478.890,-</i>	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,-	3.000.000,-	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	153.819.180,-	130.878.890,-	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	837.600.000,-	813.600.000,-	
	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>109.274.200,-</i>	<i>106.822.950,-</i>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35.404.200,-	33.409.350,-	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.870.000,-	17.535.000,-	
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	56.000.000,-	55.878.600,-	
2	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	<b>134.580.600,-</b>	<b>128.840.800,-</b>	
	<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat</i>	<i>134.580.600,-</i>	<i>128.840.800,-</i>	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	134.580.600,-	128.840.800,-	
	<b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>14.492.600,-</b>	<b>14.102.400,-</b>	
	<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan</i>	<i>14.492.600,-</i>	<i>14.102.400,-</i>	





No	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	INSTANSI
1	2	3	4	5
	<i>Ketertiban Umum</i>			
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	14.492.600,-	14.102.400,-	
1	<b>PROGRAM PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>5.330.914.219</b>	<b>4.826.500.604</b>	Kecamatan Sibolga Selatan
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	3.315.420.189	3.037.399.456	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.315.420.189	3.037.399.456	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	422.889.050	379.654.700	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	16.337.000	15.897.800	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	190.112.550	160.700.100	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	24.513.600	22.443.000	
	Penyediaan Bahan Logistik	158.175.950	156.766.800	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	11.250.000	11.250.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	22.500.000	12.597.000	
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	138.101.000	136.976.540	
	Pengadaan Mebel	47.400.000	46.940.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	90.701.000	90.036.540	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	1.356.853.180	1.318.565.218	Kecamatan Sibolga Selatan
	Penyediaan jasa surat menyurat	8.250.000	8.250.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	86.403.100	69.555.218	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.262.200.000	1.240.760.000	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	97.650.800	90.881.230	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	59.470.800	53.731.230	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38.180.000	37.150.000	
2	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>157.188.500</b>	<b>150.675.400</b>	Kecamatan Sibolga Selatan
3	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat</b>	157.188.500	150.675.400	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	157.188.500	150.675.400	
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>16.221.500</b>	<b>16.210.500</b>	
	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	16.221.500	16.210.500	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	16.221.500	16.210.500	
4	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>23.991.300</b>	<b>23.834.800</b>	Kecamatan Sibolga Selatan
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	23.991.300	23.834.800	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	23.991.300	23.834.800	
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>5.670.038.736</b>	<b>5.363.057.618</b>	Kecamatan Sibolga Utara
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.906.938.886</b>	<b>3.715.860.535</b>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.906.938.886	3.715.860.535	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>351.119.000</b>	<b>327.252.100</b>	



No	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	INSTANSI
1	2	3	4	5
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor	31.540.900	31.230.300	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	165.568.100	155.747.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	75.204.000	71.064.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	35.766.000	33.616.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11.520.000	11.314.800	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	31.520.000	24.280.000	
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>120.807.200</b>	<b>114.233.500</b>	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	120.807.200	114.233.500	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.177.191.400</b>	<b>1.101.979.483</b>	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.000.000	9.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	110.791.400	76.539.483	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.057.400.000	1.016.440.000	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>113.982.250</b>	<b>103.732.000</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	88.592.250	78.352.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.390.000	25.380.000	
2	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>134.972.000</b>	<b>131.152.700</b>	
	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>34.971.600</b>	<b>31.488.200</b>	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	34.971.600	31.488.200	
	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>100.000.400</b>	<b>99.664.500</b>	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	100.000.400	99.664.500	
3	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>23.578.800</b>	<b>23.037.600</b>	
	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>23.578.800</b>	<b>23.037.600</b>	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	23.578.800	23.037.600	
4	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>61.506.700</b>	<b>60.802.100</b>	
	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>61.506.700</b>	<b>60.802.100</b>	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	61.506.700	60.802.100	
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>4.725.663.780</b>	<b>4.522.613.253</b>	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.210.567.334</b>	<b>3.071.572.398</b>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.210.567.334	3.071.572.398	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>388.568.500</b>	<b>364.791.850</b>	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	21.385.200	20.837.100	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	212.148.400	197.163.400	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	30.586.800	28.872.800	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	95.120.000	94.824.300	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	18.078.100	17.568.250	
	Rapat koordinasi antar OPD dan daerah bawahan	11.250.000	5.526.000	
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>52.731.600</b>	<b>51.550.000</b>	



No	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	INSTANSI
1	2	3	4	5
	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	41.181.600	40.150.000	
	Pengadaan Peralatan Mebel	11.550.000	11.400.000	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>920.974.320</b>	<b>884.823.913</b>	
	Penyediaan jasa surat menyurat	8.250.000	8.250.000	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	90.524.320	73.573.913	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	822.200.000	803.000.000	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>152.822.026</b>	<b>149.875.092</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	63.036.800	60.503.800	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	79.635.226	79.489.292	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	10.150.000	9.882.000	
2	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>153.348.600</b>	<b>143.792.900</b>	Kecamatan Sibolga Sambas
	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>153.348.600</b>	<b>143.792.900</b>	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait kewenangan lain yang dilimpahkan	153.348.600	143.792.900	
3	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>12.111.800</b>	<b>11.948.200</b>	Kecamatan Sibolga Sambas
	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>12.111.800</b>	<b>11.948.200</b>	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12.111.800	11.948.200	
4	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>24.203.600</b>	<b>24.174.400</b>	Kecamatan Sibolga Sambas
	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>24.203.600</b>	<b>24.174.400</b>	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	24.203.600	24.174.400	
1	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.716.592.874</b>	<b>1.576.819.879</b>	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sibolga
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.716.592.874	1.576.819.879	
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>50.000.000</b>	<b>47.060.000</b>	
	Bimbingan Teknis	50.000.000	47.060.000	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>223.962.600</b>	<b>223.642.446</b>	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.494.400	3.494.400	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.190.000	26.910.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.499.200	3.489.600	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.000.000	12.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.541.000	8.541.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.188.000	4.188.000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sibolga
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	165.050.000	165.019.446	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>260.118.085</b>	<b>240.657.027</b>	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	3.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Air dan Listrik	40.318.085	20.857.027	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	216.800.000	216.800.000	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>106.728.932</b>	<b>98.486.195</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	45.453.600	37.517.160	



No	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	INSTANSI
1	2	3	4	5
	Kendaraan Dinas Jabatan			
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.280.000	21.090.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	39.995.332	39.879.035	
	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>312.000.000</b>	<b>305.334.500</b>	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	290.000.000	283.334.500	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	22.000.000	22.000.000	
	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</b>	<b>363.163.850</b>	<b>350.555.760</b>	
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	5.000.000	5.000.000	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	342.002.850	329.394.760	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	16.161.000	16.161.000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sibolga
	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	<b>6.959.549.900</b>	<b>6.148.721.500</b>	
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	6.915.000.000	6.114.821.600	
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	34.549.900	25.549.900	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	10.000.000	8.350.000	
	<b>Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>	<b>54.854.500</b>	<b>45.853.900</b>	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	42.355.900	33.355.900	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sibolga
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat	12.498.600	12.498.000	



No	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	INSTANSI
1	2	3	4	5
	Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			
	<b>Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial</b>	<b>327.786.400</b>	<b>322.304.400</b>	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	322.786.400	317.304.400	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	5.000.000	5.000.000	

### 1.3 PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pemenuhan layanan dasar (Standar Pelayanan Minimal) Penerapan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara meliputi 6 (enam) bidang layanan dasar SPM:

1. Pendidikan,
2. Kesehatan,
3. Pekerjaan umum dan Penataan Ruang,
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman,
5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dan Sosial.

Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dan hal ini sesuai dengan pasal 18 ayat (6) amandemen UUD 1945 yang menyatakan bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas - luasnya. Peraturan terakhir yang mengatur tentang pembagian urusan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang merupakan pengganti Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004. Pada Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu dari enam urusan concurrent (bersama) yang bersifat wajib dan terkait dengan pelayanan dasar adalah Urusan Pendidikan, Urusan Kesehatan, Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Urusan Sosial.



### 1.3.1 DASAR HUKUM STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); dan Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan, bahwa Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pendidikan daerah kabupaten/kota
- b. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2016 menjadi Peraturan Menteri Kesehatan No. 4 Tahun 2019. Perubahan aturan menimbulkan perubahan konsep. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2016 memiliki konsep mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal,
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
- d. Peraturan Menteri Kesehatan No. 4 Tahun 2019 memiliki konsep bahwa SPM merupakan target indikator kinerja Pemerintahan daerah (Kepala daerah) bukan lagi kesehatan atau Kementerian.
- e. Peraturan Menteri Kesehatan No. 4 Tahun 2019 di Pemerintah Kota Sibolga telah diterapkan pada Tahun 2020.
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
- g. Permendagri nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota
- h. Peraturan Menteri Sosial Nomor 09 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang diundangkan pada tanggal 24 Desember 2021 ditetapkan dengan pertimbangan bahwa peraturan menteri dalam negeri nomor 100 tahun 2018 tentang penerapan standar pelayanan minimal sudah tidak sesuai dengan dinamika kebutuhan penerapan standar pelayanan minimal sehingga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

### 1.3.2 ARAH KEBIJAKAN STRATEGIS

Kebijakan Umum Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kota Sibolga melakukan upaya untuk mencapai



visi, misi, tujuan dan sasaran serta target kinerja RPJMD dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun kedepan. Arsitektur perencanaan pembangunan daerah dipisahkan menjadi dua yakni Perencanaan Strategis yaitu perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada pencapaian visi dan misi pembangunan daerah, dan Perencanaan Operasional yaitu perencanaan yang menekankan pada pencapaian kinerja layanan pada tiap urusan. Perencanaan Strategis dimaksudkan untuk menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam rencana kerja Kota Sibolga, untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD maka dianggap strategis. Sedangkan perencanaan operasional dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan RPJMD yang dituangkan secara lebih rinci kedalam masing – masing misi berdasarkan pendekatan urusan wajib maupun urusan pilihan. tujuan dan sasaran pembangunan RPJMD yang dituangkan secara lebih rinci kedalam masing – masing Urusan Pelayanan Dasar. Rumusan strategi dan Arah Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Kota Sibolga adalah sebagai berikut :

#### **URUSAN PENDIDIKAN**

- a. Pendidikan Anak Usia Dini :  
Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan anak usia dini merupakan Peserta Didik yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
- b. Pendidikan Dasar;  
Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan dasar merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun.
- c. Pendidikan Kesetaraan.  
Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan kesetaraan merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.

#### **URUSAN KESEHATAN**

- a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
- b. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
- c. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
- d. Pelayanan Kesehatan Balita
- e. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar
- f. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif
- g. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut
- h. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
- i. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
- j. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat



- k. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
- l. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus = HIV)

**URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

- a. Penyediaan jalan untuk melayani kebutuhan masyarakat
- b. Penyediaan air minum
- c. Penyediaan sanitasi

**URUSAN PERUMAHAN**

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota
- b. Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota

**URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN SOSIAL KEMASYARAKATAN**

- a. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- b. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
- c. layanan informasi rawan bencana
- d. layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
- e. layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

**URUSAN SOSIAL**

- a. Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luar Panti Sosial;
- b. Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar Panti Sosial;
- c. Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial;
- d. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial;
- e. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota.





## BAB II

### CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Berdasarkan urusan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Sibolga, maka Sibolga memiliki 26 Organisasi Perangkat Daerah, 4 kecamatan dan 17 kelurahan. Organisasi perangkat daerah, kecamatan dan kelurahan yang menjadi pelaksana teknis dilapangan untuk merealisasikan pelaksanaan program dan kegiatan yang disusun dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.

Tahun 2022 masih merupakan Tahun dengan tantangan terberat, bahkan mungkin secara nasional karena pandemi covid-19. Sehingga jelas menimbulkan “gap expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan rencana kinerja yang disusun, serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil yang ada saat perencanaan disusun.

Kondisi ini kemudian ditetapkan sebagai kondisi darurat dan bencana nasional melalui Keputusan Presiden No. 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.

Sebagai tindak lanjut atas Keputusan Presiden tersebut, telah dikeluarkan pula Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan No. 119/2813/SJ dan No. 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional. Dalam Keputusan Bersama ini pun telah diinstruksikan kepada Kepala Daerah untuk melakukan penyesuaian belanja daerah dan melakukan rasionalisasi belanja dari belanja pegawai, belanja barang/jasa dan belanja modal.

Pemerintah Kota Sibolga, dengan mengacu pada Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan telah mengambil langkah kebijakan anggaran dalam rangka penanganan covid-19. Adanya kebijakan anggaran tahun 2022 untuk penanganan covid-19, berdampak pada **penyesuaian beberapa program/kegiatan**. Selain permasalahan yang dihadapi terkait pandemic covid-19, maka secara umum permasalahan lainnya adalah terkait keterbatasan anggaran yang menyebabkan terbatasnya fasilitas sarana dan prasarana seperti gedung kantor dan peralatan/perengkapan kerja lainnya.

Untuk beberapa gedung kantor dan sekolah sudah diadakan pembenahan seperti rehab total maupun rehabilitas rutin. Namun tidak dapat dilakukan secara merata ke seluruh



gedung kantor/sekolah yang memang sudah layak mendapatkan perbaikan. Contohnya seperti gedung kantor Dinas PMKPPPA, Kantor Kesbangpol, Satpol PP, Inspektorat dan lain-lain.

## 2.1 Capaian Kinerja Makro

Kondisi perekonomian Kota Sibolga tidak terlepas dari pengaruh dan kondisi perekonomian nasional yang tengah berkembang, walaupun secara riil kondisi tersebut tidak secara spesifik memiliki dimensi dan menggambarkan aktifitas yang sama mempengaruhi, akan tetapi persoalan-persoalan krusial pada tingkat nasional sangat berpengaruh terhadap kondisi di daerah.

### Capaian Kinerja Makro Menggunakan Indikator Kinerja Makro Sebagai Berikut:

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2019	Capaian Kinerja Tahun 2020	Capaian Kinerja Tahun 2021	Capaian Kinerja Tahun 2022	Perubahan (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Indeks Pembangunan Manusia	73,41	73,63	73,94	74,74	1,082
2	Angka Kemiskinan	10,82	10,49	10,80	10,05	-6,944
3	Angka Pengangguran	7,40	8,0	8,72	7,05	-19.151
4	Pertumbuhan Ekonomi	5,20	-1,36	2,10	4,15	97,619
5	Pendapatan Per Kapita	63.13	62.57	64,45	70,17	8.875
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,27	0,29	0,28	0,346	23.571

Sumber data dari BPS Sibolga

1. Produk Domestik Bruto pada tingkat nasional serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (provinsi) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDB maupun PDRB digunakan 2 pendekatan, yaitu lapangan usaha dan pengeluaran. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. PDB maupun PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektorsektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.
2. PDB menurut lapangan usaha mengalami perubahan klasifikasi dari 9 lapangan usaha menjadi 17 lapangan usaha. PDB menurut lapangan usaha dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh sektor ekonomi yang mencakup lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan;



Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa lainnya.

3. PDB menurut pengeluaran mengalami perubahan klasifikasi dimana pengeluaran konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) yang sebelumnya termasuk bagian dari pengeluaran konsumsi rumah tangga menjadi komponen terpisah. Sehingga klasifikasi PDB menurut pengeluaran dirinci menjadi 7 komponen yaitu komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi LNPRT, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan inventori, ekspor barang dan jasa, dan impor barang dan jasa.
4. Pengeluaran konsumsi rumah tangga mencakup berbagai pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga atas barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan individu ataupun kelompok secara langsung. Pengeluaran rumah tangga di sini mencakup makanan dan minuman selain restoran; pakaian, alas kaki dan jasa perawatannya; perumahan dan perlengkapan rumah tangga; kesehatan dan pendidikan; transportasi dan komunikasi; restoran dan hotel serta lainnya.
5. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah terdiri dari Pengeluaran Konsumsi Individu dan Pengeluaran Konsumsi Kolektif. Barang dan jasa individu merupakan barang dan jasa privat, dimana ciri-ciri barang privat adalah a) Scarcity, yaitu ada kelangkaan/keterbatasan dalam jumlah; b) Excludable consumption, yaitu konsumsi suatu barang dapat dibatasi hanya pada mereka yang memenuhi persyaratan tertentu (biasanya harga); c) Rivalrous competition, yaitu konsumsi oleh satu konsumen akan mengurangi atau menghilangkan kesempatan pihak lain untuk melakukan hal serupa. Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa individu adalah jasa pelayanan kesehatan pemerintah di rumah sakit/puskesmas dan jasa pendidikan di sekolah/universitas negeri. Sedangkan barang dan jasa kolektif ekuivalen dengan barang publik yang memiliki ciri a) Non rivalry, yaitu penggunaan satu konsumen terhadap suatu barang tidak mengurangi kesempatan konsumen lain untuk juga mengkonsumsi barang tersebut; b) Non excludable, yaitu apabila suatu barang publik tersedia, maka tidak ada yang dapat menghalangi siapapun untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut atau dengan kata lain setiap orang memiliki akses ke barang tersebut. Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa kolektif adalah jasa pertahanan yang dilakukan TNI dan keamanan yang dilakukan kepolisian.
6. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mencakup pengadaan, pembuatan, dan pembelian barang modal. Barang modal dimaksud adalah barang-barang yang digunakan untuk proses produksi, tahan lama atau yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun seperti bangunan, mesin dan alat angkutan. Termasuk pula di sini perbaikan besar (berat) yang sifatnya memperpanjang umur atau mengubah bentuk atau kapasitas barang modal tersebut. Pengeluaran barang modal untuk keperluan militer juga dicakup sebagai PMTB. Klasifikasi komponen PMTB dibagi menjadi 6 sub komponen yaitu Konstruksi; Mesin dan Peralatan; Kendaraan; Peralatan Lainnya; Cultivated Biological Resources (CBR) dan Produk Kekayaan Intelektual.
7. Ekspor barang dan jasa merupakan transaksi perdagangan barang dan jasa dari penduduk (residen) ke bukan penduduk (nonresiden). Impor barang dan jasa adalah transaksi perdagangan

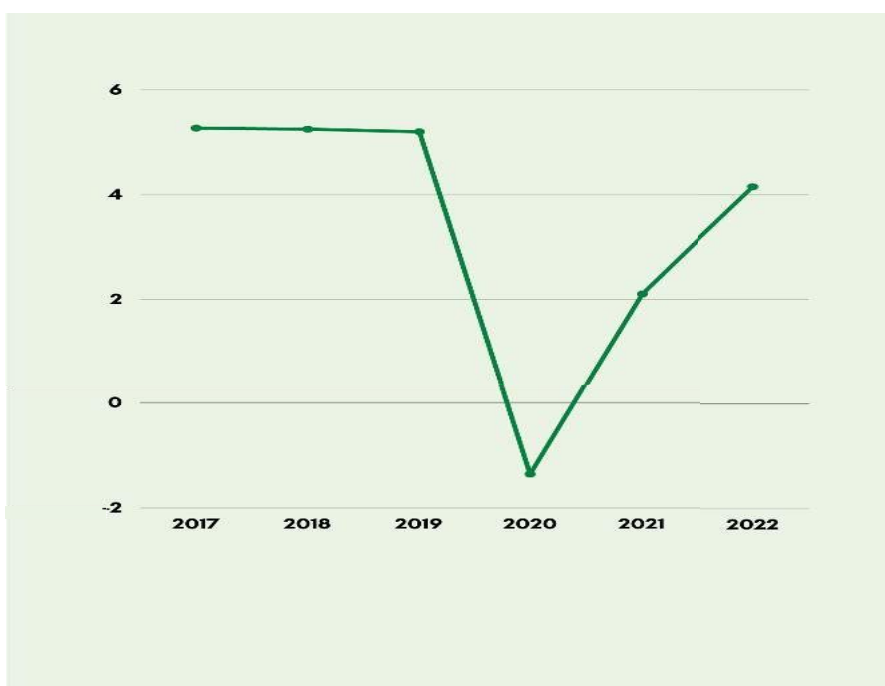


dari bukan penduduk ke penduduk. Ekspor atau impor barang terjadi pada saat terjadi perubahan hak kepemilikan barang antara penduduk dengan bukan penduduk (dengan atau tanpa perpindahan fisik barang tersebut). Pada PDB dengan tahun dasar 2010, ekspor dan impor barang dirinci menjadi nonmigas dan migas.

8. Produk Domestik Bruto maupun agregat turunannya disajikan dalam 2 (dua) versi penilaian, yaitu atas dasar “harga berlaku” dan atas dasar “harga konstan”. Disebut sebagai harga berlaku karena seluruh agregat dinilai dengan menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan harga konstan penilaiannya didasarkan kepada harga satu tahun dasar tertentu, dalam publikasi ini digunakan harga tahun 2010.
9. Laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto diperoleh dari perhitungan PDB atas dasar harga konstan. Diperoleh dengan cara mengurangi nilai PDB pada tahun ke-n terhadap nilai pada tahun ke n-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada tahun ke n-1, dikalikan dengan 100 persen. Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya.

Pertumbuhan Ekonomi Kota Sibolga, 2017-2022\*\*

Sibolga Municipality Economic Growth, 2016-2022\*\*



Catatan/Note: \* ) Angka Sementara/Preliminary Figures

\*\* ) Angka Sangat Sementara/Very Preliminary Figures

Sumber/Source: Diolah dari Hasil Sensus, Survei, dan Berbagai Sumber Lainnya, BPS Kota Sibolga/  
Based on Census, Surveys, and Other Sources, Statistics of Sibolga Municipality



**TABEL 21**  
**PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA**  
**Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku**  
**Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah), 2017-2022**

No.	Lapangan Usaha/Industry	2017	2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fishing	989,21	1 067,80	1 119,82	1 130,47	1 096,49	1 179,67
B	Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13	0,14
C	Industri Pengolahan/Manufacturing	213,82	232,71	252,78	260,46	288,55	321,18
D	Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	4,41	4,79	5,23	5,47	5,71	6,07
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities	13,80	14,85	16,07	16,54	16,61	17,46
F	Konstruksi/Construction	585,56	643,55	699,85	676,48	713,60	772,00
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	1 115,37	1235,61	1 410,57	1 452,13	1 539,08	1 727,09
H	Transportasi dan Pergudangan/ Transportation and Storage	416,65	454,68	498,89	488,46	519,42	589,45
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ Accommodation and Food Service Activities	234,06	256,88	279,14	278,37	280,22	310,19
J	Informasi dan Komunikasi/ Information and Communication	53,12	57,29	63,85	69,22	75,39	81,70
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities	120,92	128,18	134,58	136,70	150,26	168,62
L	Real Estat/Real Estate Activities	221,33	240,34	264,23	278,76	288,18	306,42
M,N	Jasa Perusahaan/Business Activities	25,01	26,86	30,38	31,16	31,73	36,67
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	385,50	410,16	438,32	453,54	452,07	457,65
P	Jasa Pendidikan/Education	189,50	207,63	228,17	235,98	246,62	265,24
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	59,50	64,66	70,86	72,96	72,81	79,12
R,S,T,U	Jasa Lainnya/Other Services Activities	16,80	17,82	18,67	18,62	19,24	21,70
	<b>Produk Domestik Regional Bruto/Gross Domestic Regional Product</b>	<b>4 644,67</b>	<b>5 063,94</b>	<b>5 531,54</b>	<b>5 531,54</b>	<b>5 796,11</b>	<b>6 340,37</b>

Sumber Data dari Kantor BPS Kota Sibolga



**TABEL 22**  
**Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010**  
**Menurut Lapangan Usaha (milyar Rupiah), 2017-2022**

No.	Lapangan Usaha/Industry	2017	2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fishing	675,09	698,68	703,88	701,55	677,60	690,93
B	Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10	0,10
C	Industri Pengolahan/Manufacturing	148,63	154,03	159,54	156,02	166,99	173,82
D	Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	4,03	4,22	4,44	4,66	4,84	5,03
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities	10,20	10,66	11,34	11,59	11,50	11,98
F	Konstruksi/Construction	376,50	398,68	422,80	395,76	406,92	414,97
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	823,20	878,89	945,69	937,21	983,13	1 038,77
H	Transportasi dan Pergudangan/ Transportation and Storage	285,50	304,48	325,76	307,58	318,66	341,79
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ Accommodation and Food Service Activities	157,20	167,65	180,46	179,16	180,15	196,12
J	Informasi dan Komunikasi/ Information and Communication	50,10	52,20	54,36	58,09	62,63	65,94
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities	80,80	82,35	85,42	87,14	92,27	96,65
L	Real Estat/Real Estate Activities	145,82	153,76	163,59	167,57	169,16	174,40
M,N	Jasa Perusahaan/Business Activities	17,80	18,77	19,76	19,42	19,41	21,13
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	245,11	253,46	264,80	264,16	263,54	263,20
P	Jasa Pendidikan/Education	150,50	159,50	168,77	172,94	180,33	188,55
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	41,70	43,86	46,56	46,23	45,58	47,77
R,S,T,U	Jasa Lainnya/Other Services Activities	12,31	12,63	13,04	12,53	12,89	13,94
	<b>Produk Domestik Bruto/Gross Domestic Product</b>	<b>3 224,58</b>	<b>3 393,91</b>	<b>3 570,33</b>	<b>3 521,72</b>	<b>3 595,70</b>	<b>3 745,07</b>

Sumber Data dari Kantor BPS Kota Sibolga



**TABEL 23**  
**Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto**  
**Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2017-2022**

No.	Lapangan Usaha/Industry	2017	2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fishing	21,30	21,09	20,24	20,17	18,92	18,61
B	Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Industri Pengolahan/Manufacturing	4,60	4,60	4,57	4,65	4,98	5,07
D	Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities	0,30	0,29	0,29	0,30	0,29	0,28
F	Konstruksi/Construction	12,61	12,71	12,65	12,07	12,31	12,18
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	24,01	24,40	25,50	25,91	26,55	27,24
H	Transportasi dan Pergudangan/ Transportation and Storage	8,97	8,98	9,02	8,71	8,96	9,30
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ Accommodation and Food Service Activities	5,04	5,07	5,05	4,97	4,83	4,89
J	Informasi dan Komunikasi/ Information and Communication	1,14	1,13	1,15	1,23	1,30	1,29
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities	2,60	2,53	2,43	2,44	2,59	2,66
L	Real Estat/Real Estate Activities	4,77	4,75	4,78	4,97	4,97	4,83
M,N	Jasa Perusahaan/Business Activities	0,54	0,53	0,55	0,56	0,55	0,58
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	8,30	8,10	7,92	8,09	7,80	7,22
P	Jasa Pendidikan/Education	4,08	4,10	4,12	4,21	4,25	4,18
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	1,28	1,28	1,28	1,30	1,26	1,25
R,S,T,U	Jasa Lainnya/Other Services Activities	0,36	0,35	0,34	0,33	0,33	0,34
	<b>Produk Domestik Bruto/Gross Domestic Product</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber Data dari Kantor BPS Kota Sibolga



**TABEL 24**  
**Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto**  
**Atas Dasar Harga Konstan 2011 Menurut Lapangan Usaha (persen), 2017-2022**

No.	Lapangan Usaha/Industry	2017	2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fishing	3,67	3,49	0,74	-0,33	-3,41	1,97
B	Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	3,06	3,02	3,96	-0,93	1,32	1,46
C	Industri Pengolahan/Manufacturing	3,56	3,64	3,57	-2,21	7,03	4,09
D	Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	6,27	4,71	5,32	4,95	3,68	3,94
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities	5,71	4,54	6,30	2,26	-0,76	4,17
F	Konstruksi/Construction	5,79	5,89	6,05	-6,40	2,82	1,98
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	7,04	6,76	7,60	-0,90	4,90	5,66
H	Transportasi dan Pergudangan/ Transportation and Storage	7,40	6,65	6,99	-5,58	3,60	7,26
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ Accommodation and Food Service Activities	6,60	6,64	7,65	-0,72	0,55	8,86
J	Informasi dan Komunikasi/ Information and Communication	4,08	4,19	4,13	6,87	7,82	5,28
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities	1,36	1,91	3,73	2,02	5,89	4,74
L	Real Estat/Real Estate Activities	5,72	5,45	6,39	2,43	0,95	3,10
M,N	Jasa Perusahaan/Business Activities	5,04	5,44	5,29	-1,73	-0,03	8,86
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	2,22	3,41	4,47	-0,24	-0,23	-0,13
P	Jasa Pendidikan/Education	5,88	5,98	5,81	2,47	4,27	4,56
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	4,46	5,18	6,17	-0,72	-1,40	4,81
R,S,T,U	Jasa Lainnya/Other Services Activities	2,52	2,63	3,24	-3,92	2,89	8,09
	<b>Produk Domestik Bruto/Gross Domestic Product</b>	<b>5,27</b>	<b>5,25</b>	<b>5,20</b>	<b>-1,36</b>	<b>2,10</b>	<b>4,15</b>

Sumber Data dari Kantor BPS Kota Sibolga





## 2.2 CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH

Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Pemerintah Kota Sibolga menetapkan program sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dikelompokkan ke dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Pilihan dan Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Sibolga. Sesuai dengan sistem perencanaan pembangunan nasional, RKPD Kota Sibolga merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan pada tingkat daerah/kota. Pada tingkat daerah acuan utama perencanaan pembangunan tertuang dalam RPJPD Kota Sibolga yang merupakan program pembangunan secara makro untuk rentang waktu 20 tahun. Selanjutnya RPJPD Kota Sibolga dijabarkan dalam RPJMD Kota Sibolga untuk rentang waktu 5 tahunan. Baik RPJPD dan RPJMD Kota Sibolga mengacu dan mempedomani RPJPD Provinsi, RPJM Provinsi dan RPJP dan RPJM Nasional.

### 2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran

	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	<b>Pendidikan</b>				
	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)	49	BAN PAUD Online/ tanggal 7 Pebruari 2022	
		Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar pesertadidik dari Pemerintah Daerah	2709	Bidang PNFI	
		Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	0	Bidang PNFI	
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri dan Swasta)	260	Data Diolah	
		Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)	255	Dapo PAUD DIKDASMEN	
		Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	166	Dapo PAUD DIKDASMEN	
		Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon	2	Dapo PAUD DIKDASMEN	



	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non- formal dari lembaga pemerintah			
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah SD Negeri Terakreditasi	47	Ban SM	
		Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	8338	Dapo PAUD DIKDASMEN	
		Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	8338	Data Diolah	
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	434	Data Diolah	
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	642	Dapo PAUD DIKDASMEN	
		Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	35	Dapo PAUD DIKDASMEN	
		Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	54	Dapo PAUD DIKDASMEN	
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	209	Bidang PTK	
		Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	27	Bidang PTK	
		Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	0	Bidang PTK	
	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	47	Ban SM	
		Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	4450	Dapo PAUD DIKDASMEN	
		Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	4450	Data Diolah	
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	289	Data Diolah	
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	370	Dapo PAUD DIKDASMEN	
		Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	64	Bidang PTK	



	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	69	Dapo PAUD DIKDASMEN	
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	148	Bidang PTK	
		Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	8	Bidang PTK	
		Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	0	Bidang PTK	
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi	1	Dapodik Paud dikdasmen	
		Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	0	Dapodik Paud dikdasmen	
		Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima pembebasan biaya pendidikan	223	Dapodik Paud dikdasmen	
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	27	Dapodik Paud dikdasmen	
		Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	37	Dapodik Paud dikdasmen	
		Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	35	Dapodik Paud dikdasmen	
		Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	0	Dapodik Paud dikdasmen	
		Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah D-IV atau S1	3	Dapodik Paud dikdasmen	
<b>2</b>		<b>KESEHATAN</b>			
	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	Jumlah RS Rujukan Kabupaten/Kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	3	- RSU Dr. FL. Tobing Sibolga - RS Metta Medica - RS Metta Medica Baru	
	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	3	- RSU Dr. FL. Tobing Sibolga - RS Metta	



	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Medica - RS Metta Medica Baru	
	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1503	Pengadaan Makanan Tambahan Makanan Tambahan berupa Biskuit Untuk Ibu Hamil	
		Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan antenatal	97	SDM 55 Orang ASN dan 42 Orang THL	
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1673 kapsul	Pengadaan Vitamin A Kapsul Merah 200.000 SI dan Obat - obatan	
		Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	61	SDM 46 Orang ASN dan 15 Orang THL	
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1587 Ampul	imunisasi Hb 0 serta Injeksi Vitamin K,	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	24	SDM 13 Orang ASN dan 11 Orang THL	
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	9450 sachet  5411 Kapsul	Pengadaan Makanan Tambahan Balita berupa biskuit untuk balita umur 6-59 bulan. Vitamin A Kapsul Merah 200.000 SI untuk Anak Balita 12 - 59 Bulan dengan jumlah 5569 Balita x 2 Kapsul .	
		Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	245	SDM 170 Orang ASN dan 75 Orang THL	



	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	5522	Pengadaan Formulir Pelayanan Kesehatan Usia Dasar	
		Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	155	SDM 122 Orang ASN dan 33 Orang THL	
	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	20 Rim	Pengadaan Cetak KMS deteksi Dini Faktor Resiko PTM	
		Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	164	SDM 147 Orang ASN dan 17 Orang THL	
	Persentasewarga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Obat - obatan/Vitamin, Bahan Habis Pakai berupa Stik Gula darah, asam urat dan Kolesterol		
		Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	64	SDM 32 Orang ASN dan 32 Orang THL	
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	5 Rim	Pengadaan Cetak KMS deteksi Dini Faktor Resiko PTM	
		Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	14	SDM 9 Orang ASN, THL 5 orang	
	Persentase penderita Dm yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	20 Rim	Pengadaan Cetak KMS deteksi Dini Faktor Resiko PTM	
		Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	15	SDM 7 Orang ASN, THL 8 orang	
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	100 lembar	Pengadaan formulir SRQ dan SDQ	
		Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	29	SDM 20 Orang ASN, THL 9 orang	
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	2000 lembar 1.450	- Pengadaan Cetak screening TB - Xpert MTB / RIF	



	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
				Assay Kit		
		Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	37	SDM 24 Orang ASN ,13 Orang THL		
	Persentase orang dengan resiko Terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	2000 lembar	Pengadaan Leaflet Program HIV/AIDS		
		Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	30	SDM 28 Orang ASN , 2 Orang THL		
<b>3</b>	<b>PEKERJAAN UMUM</b>					
	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS KewenanganKab/ Kota	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan Kabupaten/Kota(ha)	99,537	Dinas PU dan PR		
		Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kota (m)	2870	Dinas PU dan PR		
		Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kota (ha)	8,23	Dinas PU dan PR		
		Panjang pantai,dikawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kota (ha)	0,78	Dinas PU dan PR		
		Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kota	Tidak ada	Memakai Surat Keterangan dari Dinas PUPR Kota Sibolga		
		Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kota	Tidak ada	Memakai Surat Keterangan dari Dinas PUPR Kota Sibolga		
		Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kota				
		- Bangunan perkuatan tebing (m)	417,77	Sumber data dari Dinas PU PR Kota Sibolga, Untuk Tahun 2022		
		- Tanggul sungai (m)	0			
		- Kanal bajir (m)	Tidak ada			
	- Pintu air / bendung pengendalian banjir (Unit)	Tidak ada				
	- Pompa banjir (Unit dan Kapasitas)	Tidak ada				
	- Polder/Kolam Retensi (Unit)	Tidak ada				
	- Breakwater (m)	Tidak ada				
					Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing 152 m	
				Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing 80 m		



	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	
		- Seawall dan Bangunan pengaman pantai lainnya (m)		200	Dinas PU dan PR		
	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten/kota	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kota (ha)		99,537	Dinas PU dan PR		
		Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kota (m)		2870 (m)	Dinas PU dan PR		
		Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)		8,23	Dinas PU dan PR		
		Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kota (ha)		0,78	Dinas PU dan PR		
		Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kota		Tidak ada	Memakai Surat Keterangan dari Dinas PUPR Kota Sibolga		
		Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kota		Tidak ada	Memakai Surat Keterangan dari Dinas PUPR Kota Sibolga		
		Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik Pemerintah kota yang diminta adalah :					
			- Bangunan perkuatan tebing (m)		417,77	Sumber data dari Dinas PU PR Kota Sibolga, Untuk Tahun 2022 - Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing 152 m - Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing 80 m	
			- Tanggul sungai (m)		0		
			- Kanal bajir (m)		Tidak ada		
		- Pintu air/bendung pengendali banjir (Unit)		Tidak ada			
		- Pompa banjir (Unit dan Kapasitas)		Tidak ada			
		- Polder/Kolam Retensi (Unit)		Tidak ada			
		- Breakwater (m)		Tidak ada			
		- Seawall dan Bangunan pengaman pantai lainnya (m)		200	Dinas PU dan PR		
	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang	Persentase panjang jaringan irigasi primer	Panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik (m)	0 %	Memakai surat keterangan		



	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
	dilayani oleh jaringan irigasi	dalam kondisi baik	Panjang jaringan irigasi primer (m)		dari dinas PU dan PR menerangkan bahwa Tidak adanya daerah irigasi dikota Sibolga	
		Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	Panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik (m) Panjang jaringan irigasi sekunder (m)	0 %	sda	
		Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	Panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik (m) Panjang jaringan irigasi tersier (m)	0 %	sda	
		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/ kota	Pemenuhan dokumen RISPAM kota	ada	memenuhi RISPAM di Kota Sibolga	
	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kota		Tidak	Memakai Surat Keterangan dari Dinas Pu dan PR	
		Jumlah BUMD dan atau UPTD Kota penyelenggaraan SPAM		ada	UPT (unit Pelaksana Teknis) Pengelolaan Air Limbah Domestik. Peraturan Kabupaten/ Wali Kota Nomor 45 Tahun 2019	
		Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM		1	Peraturan Wali Kota Nomor 45 Tahun 2019	
		Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain.		0	Memakai Surat Keterangan dari Dinas Pu dan PR	
	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S		5439	Pembilang dan Penyebut dari Dinas PU dan PR Kota Sibolga	
		Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T		0	Pembilang dan Penyebut dari Dinas PU dan PR Kota	





	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Sibolga	
		Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	5439	Pembilang dan Penyebut dari Dinas PU dan PR Kota Sibolga	
		Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	159	Pembilang dan Penyebut dari Dinas PU dan PR Kota Sibolga	
		Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	159	Pembilang dan Penyebut dari Dinas PU dan PR Kota Sibolga	
		Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	159	Pembilang dan Penyebut dari Dinas PU dan PR Kota Sibolga	
		Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	26,01 %	Pembilang dan Penyebut dari Dinas PU dan PR Kota Sibolga	
		$\Sigma$ rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk atau tangki septik Rumah diwilayah pengembangan SPALD $\Sigma$ dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun <25 jiwa/ha			
		Kinerja penyediaan pelayanan SPALDS akses aman	0.98 %	Pembilang dan Penyebut dari Dinas PU dan PR Kota Sibolga	
		$\Sigma$ rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT Rumah diwilayah pengembangan SPLADS $\Sigma$ dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun > 25 jiwa/ha			
		Kinerja penyediaan pelayanan SPALDT akses aman	0%	Pembilang dan Penyebut dari Dinas PU dan PR Kota Sibolga	
		$\Sigma$ rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD $\Sigma$ rumah diwilayah pengembangan SPALDT			



	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	$\sum$ rumah yang memiliki akses unit pengolahan setempat Jumlah rumah yang termasuk $\sum$ dalam wilayah pengembangan SPALD-S 33.58 %	Pembilang dan Penyebut dari Dinas PU dan PR Kota Sibolga	
		Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	$\sum$ jumlah sarana pengangkutan yang tersedia $\sum$ jumlah sarana pengangkutan yang dibutuhkan kab/kota 100 %	Pembilang dan Penyebut dari Dinas PU dan PR Kota Sibolga	
		Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	$\sum$ jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang tersedia $\sum$ jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang dibutuhkan Kota 2.18%	Pembilang dan Penyebut dari Dinas PU dan PR Kota Sibolga	
		Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	$\sum$ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah yang tersambung dengan IPALD $\sum$ jumlah rumah yang dilayani dengan SPALD-T pada kab/kota 0 %	Pembilang dan Penyebut dari Dinas PU dan PR Kota Sibolga	
		Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	$\sum$ jumlah rumah yang tangki septiknya sudah disedot $\sum$ jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD-S 0.98%	Pembilang dan Penyebut dari Dinas PU dan PR Kota Sibolga	
	Rasio kepatuhan IMBkab/ kota	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	Jumlah bangunan gedung $\sum$ (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi yang berlaku Jumlah bangunan gedung $\sum$ (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) 0	Pembilang dan Penyebut dari Dinas PU dan PR Kota Sibolga	



	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kota dalam tahun eksisting	446	Dinas PU dan PR	
		Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung	ada		
		Penetapan Keputusan Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung	Tidak ada		
		Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	0		
		Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi	0		
		Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kota	106		
		Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kota yang dipelihara/dirawat	106		
	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan Kota	56,04 km		
		Panjang jalan yang dibangun	2 km		
		Panjang jembatan yg dibangun	0 km		
		Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	0 km		
		Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	0 unit		
		Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi	11.97 km		
		Panjang jembatan yang direhabilitasi	0 km		
		Panjang jalan yang dipelihara	0 km		
		Panjang jembatan yang dipelihara	64 m2		
	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah Pelatihan Tenaga operator/ teknisi/ analisis di wilayah kabupaten/kota	0	Memakai surat keterangan dari Dinas PU dan PR Kota Sibolga, bahwa tidak jumlah tenaga operator/teknisi/ analisis yang bersertifikat kompetensi s.d.a	
		Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/analisis yang terlatih di wilayah kota	0		
		Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/ analisis diwilayah kota	0		
		Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kota yang aktif dengan data termutakhir	0		
		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kota	0		s.d.a



	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	0	s.d.a	
		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	0	s.d.a	
		Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	0	s.d.a	
		Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kota	0	s.d.a	
		Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.	0	Memakai surat keterangan dari Dinas PU dan PR Kota Sibolga, bahwa tidak jumlah tenaga operator/teknisi/ analisis yang bersertifikat kompetensi	
		Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis	0	s.d.a	
		Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kota	0	s.d.a	
		Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kota	0	s.d.a	
		Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	0	s.d.a	
		Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	s.d.a	
		Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	s.d.a	
		Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk	0	s.d.a	



	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya			
		Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kota	0	s.d.a	
		Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kota	0	s.d.a	
		Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kota	0	s.d.a	
		Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kota	0	s.d.a	
		Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	0	s.d.a	
		Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	s.d.a	
		Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	s.d.a	
		Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	s.d.a	
<b>4</b>	<b>Perumahan</b>				
	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	0	Memakai Surat Keterangan dari Dinas PKPLH	
		Jumlah rumah yang terkena bencana alam	0	sda	
		Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	0	sda	
		Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	0	sda	
		Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	0	sda	
		Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	0	sda	
		Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	0	sda	
		Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	0	sda	
		Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	0	sda	



	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/ kota	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	Memakai Surat Keterangan dari Dinas PKPLH		
		Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	Memakai Surat Keterangan dari Dinas PKPLH		
		Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	sda		
		Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	sda		
		Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	sda		
		Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	0	sda		
		Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	0	Memakai Surat Keterangan dari Dinas PKPLH	
		Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	0	Sumber data dari Dinas PKPLH Kota Sibolga	
			Jumlah luasan (Ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	0	Sda	
			Jumlah rumah di kota	16198	Sumber data dari Dinas PU dan PR Kota Sibolga	
		Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Jumlah unit Peningkatan Kualitas RTLH	0	Sda	
			Jumlah rumah tidak layak huni	4059	Sda	
			Jumlah rumah yang tidak dihuni	0	Sda	
			Jumlah rumah yang tidak dihuni	Jumlah KK Jumlah total unit rumah	1,599	Penyebut dari Dinas Dukcapil dan pembilang berasal dari Dinas PUPR
Jumlah rumah pembangunan baru			0	Sda		
	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	1	Sumber data dari Dinas PKPLH Kota Sibolga		
		Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	35	Sda		



	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	35	Sda	
		Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)	35	Sda	
		Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	1	Sda	
		Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	0	Sda	
		Jumlah pengembang yang tersertifikasi	0	Sda	
		Jumlah pengembang yang teregistrasi	1	Sda	
		Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	0	Sda	
<b>5</b>	<b>Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>				
	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	17	Sumber data dari SATPOI PP	
		Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	0	BPBD/Laporan Bencana, Daftar Tas	
		Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	10	Sumber data dari Satpol PP Kota Sibolga	
		Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	2	Sumber data dari Satpol PP Kota Sibolga	
		Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	1	PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG STANDART OPERASIONAL PROSEDUR PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH	
		Tersedianya sarana prasarana minimal	3		
	Jumlah warganegara yang memperoleh layanan informasi Rawan bencana	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun	0	Sumber data dari BPBD Kota Sibolga
			Jumlah satu dokumen KRB yang lengkap dan sudah disahkan		



	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
		Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana Seluruh penduduk di kawasan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	28,145	Sumber data dari BPBD Kota Sibolga	
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun Jumlah satu dokumen RPB yang lengkap dan sudah disahkan	0	Memakai Surat Keterangan	
		Persentase penyelesaian dokumen Rekon sampai dinyatakan sah/legal	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun Jumlah satu dokumen Rekon yang lengkap dan sudah disahkan	0	Memakai Surat Keterangan	
		Persentase jumlah aparatur dan warga yang ikut pelatihan	Jumlah aparatur dan warga yang ikut pelatihan Jumlah aparatur dan warga kawasan rawan bencana	11,26	Memakai Surat Keterangan	
		Persentase warga yang ikut pelatihan	Jumlah warga yang ikut pelatihan Jumlah warga kawasan rawan bencana	11,26	Tidak dilaksanakan	
		Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	Jumlah warga yang mendapat layanan pusdalops Jumlah warga yang berada dikawasan rawan bencana	3.30	Pembilang dan Penyebut dari BPBD Kota Sibolga	
		Persentase warga negara yang mendapatkan layanan perlindungan masyarakat	Jumlah warga yang mendapat layanan peralatan perlindungan Jumlah warga yang berada dikawasan rawan bencana	0	Pusat Pengendalian Operasi PB	





	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	
	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan KLB	0 %	Tidak pernah dilaksanakan		
			Jumlah seluruh penetapan status KLB				
		Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan darurat bencana	100 %			Tidak pernah dilaksanakan
			Jumlah seluruh penetapan darurat bencana				
	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	Jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	63.03 %	Absensi			
		Jumlah keseluruhan petugas dalam penanganan darurat bencana					
	Persentase jumlah korban hasil dicari, ditolong dan evakuasi terhadap kejadian bencana	Jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan evakuasi	100 %	Laporan tahunan			
		Perkiraan Jumlah korban Keseluruhan dari bencana					
Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota			11	Data dari Satpol PP Memakai Surat Keterangan dari Satpol PP		
	Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan			0	Memakai Surat Keterangan dari Satpol PP		
	Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan			0	Memakai Surat Keterangan dari Satpol PP		
	Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa			0	Data dari Satpol PP		
	Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi			211	Data dari Satpol PP		
	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor			9	Data dari Satpol PP		



	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran			
		Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dimas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	0	Data dari Satpol PP	
		Jumlah peningkatan kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran	0	Data dari Satpol PP	
<b>6</b>	<b>Sosial</b>				
	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indicator SPM)	Jumlah Layanan Data dan Pengaduan yang dimiliki	1	Data dari Dinas Sosial	
		Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM	0	Memakai Surat Keterangan dari Dinas Sosial	
		Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	0	Sda	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	0	sda	
		Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	1	Data dari Dinas Sosial	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	14	Data dari Dinas Sosial	
		Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	0	Memakai Surat Keterangan dari Dinas Sosial	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	0	sda	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	7	Data dari Dinas Sosial	
		Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/ shelter	0	Memakai Surat Keterangan dari Dinas Sosial	
		Jumlah paket perbekalan Kesehatan yang tersedia	0	Sda	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usiaterlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	0	Sda	
		Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di rumah singgah	0	Sda	
		Jumlah pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	45	Data dari Dinas Sosial	



	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial		0	Memakai Surat Keterangan dari Dinas Sosial	
		Jumlah bimbingan social yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat		0	Sda	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan		0	Sda	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan Kesehatan dasar		0	Sda	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga		0	Sda	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga		0	Sda	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk		14	Data dari Dinas Sosial	
	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/ kota	Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan		656	Data dari Dinas Sosial	
		Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang		0	Memakai Surat Keterangan dari Dinas Sosial	
		Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki		10	Data dari Dinas Sosial	
		Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan		0	Memakai Surat Keterangan dari Dinas Sosial	
		Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial		0	Memakai Surat Keterangan dari Dinas Sosial	
		Jumlah pekerja sosial professional/ tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia		45	Data dari Dinas Sosial	
<b>7</b>		<b>Ketenagakerjaan</b>				
	Persentase kegiatan yang dilaksanakan	Dokumen perencanaan	Mengidentifikasi/ membandingkan	1	Sumber data dari Dinas	



	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	
	yang mengacu ke rencana tenaga kerja	tenaga kerja kabupaten/kota.	kesesuaian dokumen RTK yang telah tersusun dengan peraturan perundangan yang berlaku		Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan		
		Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	Menghitung selisih 6 (enam) indikator ketenagakerjaan dengan cara angka realisasi dikurangi dengan angka target dibagi dengan angka realisasi dikali 100%  Realisasi indikator – target indikator Realisasi	0 %	Memakai Surat Keterangan dari Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan		
		Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota	Jumlah seluruh perusahaan yang melaporkan penyusunan RTK pada tahun pelaporan	0	sda		
	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persentase penerapan program PBK dengan kualifikasi KKNI/okupasi	Jumlah penerapan program PBK kualifikasi KKNI atau okupasi pada tahun n	Keseluruhan program pelatihan baik kualifikasi kompetensi maupun klaster pada tahun n	3 %	Sumber data dari Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan Kota Sibolga	
			Jumlah infrastruktur bersertifikat kompetensi pada tahun n				
		Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	Jumlah infrastruktur pada tahun n	Jumlah peserta pelatihan pada tahun n	5	Sumber data dari Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan	
			Persentase LPK yang terakreditasi				



	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
		Persentase LPK yang memiliki perizinan	Jumlah LPK yang memiliki perizinan pada tahun n Jumlah LPK yang terdata pada tahun n	0 %	sda	
		Jumlah penganggur yang dilatih	Jumlah peserta pelatihan pada tahun n Jumlah penganggur pada tahun n	60	Data dari Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan	
		Persentase lulusan bersertifikat kompetensi	Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat kompetensi pada tahun n Jumlah lulusan bersertifikat pelatihan pada tahun n	100 %	Data dari Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan	
		Persentase penyerapan lulusan	Jumlah lulusan yang bekerja pada tahun n Jumlah lulusan pada tahun n	0 %	Memakai Surat Keterangan dari Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan	
		Persentase LPK yang terakreditasi	Jumlah LPK yang terakreditasi pada tahun n Jumlah seluruh LPK pada tahun n	0 %	Sda	
		Jumlah calon pekerja migran Indonesia/ calon tenaga kerja indonesia (CPMI/CTKI) yang diberikan pelatihan		0	Sda	
		Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CPMI/CTKI)		0	Memakai Surat Keterangan dari Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan	
	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	Jumlah perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas pada tahun n Jumlah perusahaan pada tahun n	14.93 %	Sumber data dari Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan	
		Data tingkat produktivitas total	Pertumbuhan ekonomi dikurangi (pertumbuhan modal+pertumbuhan tenaga kerja).	0	Memakai Surat Keterangan dari Dinas Koperasi,	



	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
					UKM dan Ketenagakerjaan	
	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	Jumlah perusahaan yang telah memiliki PP pada tahun n	58.93 %	Pembilang dan penyebut berasal dari Dinas Koperas dan Ketenagakerjaan	
Jumlah perusahaan yang memiliki tenaga kerja 10 orang atau lebih						
Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)		Jumlah perusahaan yang telah memiliki PKB pada tahun n	14.93 %			
		Jumlah perusahaan yang memiliki serikat pekerja/serikat buruh				
Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB diperusahaan			4			
Persentase perusahaan yang sudah Menyusun struktur skala upah		Jumlah perusahaan yang sudah menyusun struktur dan skala upah	100 %	Sumber data dari Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan		
		Jumlah perusahaan yang telah mengatur syarat kerja (dalam PP atau PKB)				
Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	Jumlah perusahaan yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	100 %	Sda			
	Jumlah perusahaan berdasarkan perusahaan wajib lapor					
Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	Jumlah perusahaan yang berselisih	0,90 %	sda			
	Jumlah perusahaan pada tahun n					
Jumlah mogok kerja				0	Memakai surat keterangan	
Jumlah penutupan perusahaan				0	dari Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan	



	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah perselisihan kepentingan	2	Sumber data dari Dinas Koperasi UKM dan Ketenaga kerjaan	
		Jumlah perselisihan antar SP/SB di perusahaan	0	Memakai surat keterangan dari Dinas Koperasi UKM dan Ketenaga kerjaan	
		Jumlah perselisihan PHK	2	Sumber data dari Dinas Koperasi UKM dan Ketenaga kerjaan	
		Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	3		
		Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartit	2		
		Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit yang diberdayakan	0	Memakai surat keterangan dari Dinas Koperasi UKM dan Ketenaga kerjaan	
		Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Internasional	0	Memakai surat keterangan dari Dinas Koperasi UKM dan Ketenaga kerjaan	
	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	3	Sumber data dari Dinas Koperasi UKM dan Ketenaga kerjaan	
		Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	133		
		Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota	0	Memakai surat keterangan dari Dinas Koperasi UKM dan Ketenaga kerjaan	
		Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota	0		
		Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	1	Sumber data dari Dinas Koperasi UKM dan	



	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Ketenaga kerjaan	
		Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota	0	Memakai surat keterangan	
		Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota	0	dari Dinas Koperasi UKM dan Ketenaga kerjaan	
		Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	103	Sumber data dari Dinas Koperasi	
		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	103	UKM dan Ketenaga kerjaan	
		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	103		
		Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan fasilitasi keputungan	0	Memakai surat keterangan dari Dinas Koperasi UKM dan Ketenaga kerjaan	
		Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	0		
		Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	0		
		Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk	0		
<b>8</b>	<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>				
	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah Kabupaten/Kota yang telah dilatih PUG	30 OPD	Sumber data dari Dinas PMK, PP dan PA	
		Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat Kabupaten/Kota	10 Program / Kegiatan		
	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemprov (Dinas PPPA) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	Tidak ada	Memakai Surat Keterangan dari Dinas PMK, PP dan PA	
		Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	Tidak ada		
	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	Jumlah korban kekerasan anak yang terlayani	100 %	Pembilang dan Penyebut dari Dinas PMK, PP dan PA	
		Jumlah korban kekerasan anak ditingkat Kabupaten/ Kota			





	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
		Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	1	SK Wali Kota Sibolga No. 410/445/2021 tentang Pembentukan Forum Anak		
		Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (APBD Kabupaten/Kota)	1	SK Wali Kota Sibolga No. 410/445/2021 tentang Pembentukan Forum Anak		
	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kota yang mendapatkan pelatihan	3	SK GOW SK PKK SK DWP		
		Jumlah kader perempuan tingkat kota yang sudah dilatih	0	Memakai Surat		
		Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	0	Keterangan dari Dinas PMK, PP dan PA		
		Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kota	0	Memakai Surat		
		Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	0	Keterangan dari Dinas PMK, PP dan PA		
		Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandarisasi	0			
		Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	Jumlah korban kekerasan perempuan yang mendapat layanan Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan	100 %	Data Simfoni Kementerian PPA Tahun 2022, dari Dinas PMK, PP dan PA	
<b>9</b>		<b>Pangan</b>				
	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	Tersedianya infrastruktur perudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	1	Gudang Kansilog Sibolga		
		Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	0	Memakai Surat		
		Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	0	Keterangan dari Dinas PKPP		
		Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	0			
		Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	1	Sumber data dari Dinas PKPP		
		Tertanganinya kerawanan pangan	1			



	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
		Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan		0	Memakai Surat Keterangan dari Dinas PKPP	
		Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar		0		
<b>10</b>	<b>Pertanahan</b>					
	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota	Jumlah izin lokasi yang diterbitkan + Jumlah Surat Penolakan Permohonan izin lokasi setelah melalui proses (ditolak seluruhnya)	0	Memakai Surat Keterangan dari Dinas PU dan PR Kota Sibolga	
			Jumlah Permohonan izin lokasi dalam 1 tahun			
		SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek	Jumlah penerbitan SK Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari tanah kelebihan maksimum absentee	0	Memakai Surat Keterangan dari Dinas PU dan PR Kota Sibolga	
			Jumlah permohonan yang diusulkan Panitia Pertimbangan Landreform			
		SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee	Jumlah luas tanah yang telah dibayarkan ganti rugi kepada bekas pemilik tanah kelebihan maksimum/ absentee	0	Memakai Surat Keterangan dari Dinas PU dan PR Kota Sibolga	
		Jumlah luas tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah obyek landreform yang berasal dari tanah kelebihan maksimum absentee dan daftar subyek				
	Dokumen Izin membuka tanah	Jumlah dokumen izin membuka tanah yang disetujui + jumlah izin membuka tanah yang ditolak	0	Memakai Surat Keterangan dari Dinas PU dan PR Kota Sibolga		
		Jumlah dokumen izin membuka tanah yang dimohonkan dalam 1 tahun				
	Dokumen Perencanaan Penggunaan	Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik	0	Memakai Surat Keterangan dari Dinas PU		



	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
		Tanah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik yang direncanakan dalam 1 tahun		dan PR Kota Sibolga	
11	<b>Lingkungan Hidup</b>					
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	Hasil perhitungan provinsi terhadap: Indeks Kualitas Air (IKA) Indeks Kualitas Udara (IKU) Indeks tutupan Hutan (ITH)	Indeks Kualitas Air (IKA) Rumus Metode IP: $\text{Nilai relatif} = \frac{C_i}{L_{ij}}$ $IP = \frac{\sqrt{(C_i/L_{ij})^2 \text{ rata-rata} + (C_i/L_{ij})^2 \text{ maksimum}}}{2}$ Rumus Metode IP: $0 \leq PI_j \leq 1,0 \rightarrow \text{baik (memenuhi baku mutu)}$ $1,0 < PI_j \leq 5,0 \rightarrow \text{cemar ringan}$ $5,0 < PI_j \leq 10,0 \rightarrow \text{cemar sedang}$ $PI_j \leq 10,0 \rightarrow \text{cemar berat}$ $IKLT = 100 - ((84,3 - (TH \times 100)) \times \frac{50}{54,3})$ $IKU = 100 - [50/0,9 \times (Ieu - 0,1)]$ Dimana: IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan TH = Tutupan Hutan	IKA 59.09  IKU 87.27  ITH 41.42	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	
	Terlaksananya pengelolaan sampah di Wilayah Kab/Kota	Tersedianya data dan informasi penangan sampah di Wilayah Kabupaten/ Kota	Tersedianya informasi terkait rasio angkutan pengelolaan sampah terhadap volume timbulan sampah Tersedianya informasi terkait kapasitas TPA terhadap volume timbulan sampah Tersedianya informasi terkait jumlah TPST dibagi jumlah sampah pada masing-masing lingkungan	1	Sumber data dari Dinas PKPLH Kota Sibolga	
	Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH	Data Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	1	Sumber data dari Dinas PKPLH Kota Sibolga	



	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
	dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota		Jumlah usulan permohonan yang teregestrasi			
		Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kabupaten/ Kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah PPLHD yang ada	1	Sumber data dari Dinas PKPLH Kota Sibolga	
			Jumlah Kegiatan dan/atau usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota			
		Penetapan hak MHA terhai dengan PPLH yang berada di Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah MHA yang diakui	0	Memakai Surat Keterangan dari Dinas PKPLH	
			Jumlah usulah MHA Masyarakat Hukum A data dalam WNI yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal-usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, terhadap hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup serta adanya system nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hokum dan memanfaatkan satu wilayah secara turun-menurun			
		Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	Jumlah MHA yang mendapatkan pelatihan	0	Memakai Surat Keterangan dari Dinas PKPLH	
	Jumlah MHA yang ada					
	Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	Pengaduan masyarakat yang ditangani	0	Memakai Surat Keterangan dari Dinas PKPLH		
		Total jumlah pengaduan masyarakat yang				



	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	
		oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah Kabupaten/Kota yang ditangani	terregistrasi				
<b>12</b>	<b>. Kependudukan dan Catatan Sipil</b>						
	Tingkat perekaman KTP elektronik di Kabupaten/Kota	Penerbitan akta perkawinan	Jumlah akta perkawinan yang diterbitkan Peristiwa perkawinan yang dilaporkan	100 %	Dinas Kependudukan dan Capil		
		Penerbitan akta perceraian	Jumlah akta perceraian yang diterbitkan Peristiwa perceraian yang dilaporkan	100 %	Dinas Kependudukan dan Capil		
		Penerbitan akta kematian	Jumlah akta kematian yang diterbitkan Peristiwa kematian yang dilaporkan	100 %	Dinas Kependudukan dan Capil		
		Penyajian data kependudukan	Jumlah penyajian data kependudukan skala kota dalam satu tahun 2 Tahun	100 %	Kegiatan dalam penyusunan Data Agregat dan Data Buku Profil kependudukan untuk tahun 2022 dihapuskan dan akan dilaksanakan atau dianggarkan pada awal tahun 2023 dalam penyusunan data agregat dan data buku profil 2022.		
<b>13</b>		<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan</b>					
		Persentase pengembangan desa tertinggal	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerjasama antar desa		0	Memakai Surat Keterangan dari Dinas PMK, PP dan PA	
			Jumlah desa yang melakukan kerjasama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerjasama antar desa tahun sebelumnya		0		



	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
		Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	0	Memakai Surat Keterangan dari Dinas PMK, PP dan PA		
		Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	0			
	Persentase peningkatan status desa mandiri	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	0			
		Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	0			
		Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	0			
		Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	0			
<b>14</b>	<b>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>					
	TFR (Angka Kelahiran Total)	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di Perda kan	1		Sumber data dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	23,9			
		Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	$ASFR_i = \frac{b_i}{p_i} \times k$ ASFR adalah angka kelahiran di kelompok usia 15-19 tahun	15,9	Sumber data dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	Jumlah masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (advokasi dan KIE)	99,73 %	Sumber data dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
			Jumlah sasaran masyarakat program KKBPK (advokasi dan KIE)			
	Jumlah stakeholder/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan Program KKBPK		12	Sumber data dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		



	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persentase fasilitas kesehatan (faskes) yang siap melayani KB MKJP	Jumlah Faskes yang siap melayani KB MKJP	100 %	Sumber data dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
			Jumlah Faskes			
		Persentase peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah peserta KB Aktif	59.08 %		
			Jumlah PUS			
		Pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kelompok kerja KKBPK yang efektif	Jumlah kelompok kerja KKBPK yang efektif	285		
	Persentase pelayanan KB pasca persalinan	Jumlah peserta KB pasca persalinan menurut metode kontrasepsi cara modern	50,23 %			
		Jumlah sasaran peserta KB pasca persalinan.  KB Pasca Persalinan adalah pelayanan KB yang diberikan setelah persalinan sampai dengan kurun waktu 42 hari				
	Persentase kebutuhan ber- KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah		73,15 %	Sumber data dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	Jumlah peserta KB pada keluarga penerima PBI	73,15 %		
	Jumlah keluarga PBI					
<b>15 Perhubungan</b>						
Rasio konektivitas Provinsi	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C	Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan tipe C yang tersedia	83,33 %	Sumber data dari Dinas Perhubungan		
		Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan sesuai dengan standar pelayanan penyelenggaraan angkutan jalan				
	Terlaksananya pelayanan uji berkala	Jumlah kendaraan yang diuji per tahun	0 %		Memakai Surat Keterangan	
		Jumlah kendaraan				



	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
			wajib uji		dari Dinas Perhubungan	
		Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam Kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelasekonomi	Jumlah penetapan tarif lintas penyebrangan	50 %	Sumber data dari Dinas Perhubungan	
			Jumlah lintas penyebrangan dalam kabupaten/kota			
		Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	Jumlah pemasangan perlengkapan jalan kabupaten/kota	70 %	Sumber data dari Dinas Perhubungan	
			Target kebutuhan perlengkapan jalan kabupaten/kota			
	V/C Ratio di Jalan Kabupaten/ Kota	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah pemasangan perlengkapan jalan Kabupaten/ Kota	70 %	Sumber data dari Dinas Perhubungan	
			Target kebutuhan perlengkapan jalan Kabupaten/ Kota			
<b>16</b>	<b>Komunikasi dan Informatika</b>					
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah perangkat daerah yang saling terkoneksi di jaringan intra pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	50 %	Sumber data dari Dinas Kominfo	
			Jumlah Perangkat Daerah			
		Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan internet yang berkualitas yang disediakan oleh Dinas Kominfo	6.667 %		Sumber data dari Dinas Kominfo
			Jumlah Perangkat Daerah			
		Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah		1	Sumber data dari Dinas Kominfo	
	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada	Jlh kegiatan (event) perangkat daerah dan pelayanan publik pada pemda yang diselenggarakan	0 %	Memakai Surat Keterangan dari Dinas Kominfo	





	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara	secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No. 5/2015 Jlh kegiatan (event) perangkat daerah dan pelayanan publik pada pemerintah daerah		
		Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	Jumlah perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar Jumlah perangkat daerah	26.67 %	Pembilang dan Penyebut dari Dinas Kominfo
		Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Jumlah perangkat daerah	0 %	Memakai Surat Keterangan dari Dinas Kominfo
		Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	Layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik Jumlah layanan	0 %	Memakai Surat Keterangan dari Dinas Kominfo
		Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang	Jumlah layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	13.33 %	Sumber data dari Dinas Kominfo



	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
		memanfaatkan sertifikat elektronik	Jumlah layanan			
		Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	0 %	Memakai Surat Keterangan dari Dinas Kominfo	
			Jumlah sistem elektronik			
		Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasikan dengan sistem penghubung layanan pemerintah	Jumlah layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasikan dengan sistem penghubung layanan pemerintah	0 %	Memakai Surat Keterangan dari Dinas Kominfo	
			Jumlah layanan publik dan layanan administrasi			
		Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	Jumlah OPD yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	0 %	Memakai Surat Keterangan dari Dinas Kominfo	
			Jumlah perangkat daerah			
		Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	Jumlah PD yang menyimpan data di pusat data pemerintah	0 %	Memakai Surat Keterangan dari Dinas Kominfo	
			Jumlah perangkat daerah			
		Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	Jumlah PD yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis datanya	0 %	Memakai Surat Keterangan dari Dinas Kominfo	
			Jumlah perangkat daerah			
		Persentase data yang dapat berbagi pakai	Jumlah data yang dapat berbagi pakai	0 %	Memakai Surat Keterangan dari Dinas Kominfo	
			Jumlah data yang dimiliki pemerintah daerah			
		Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan inovasi yang mendukung smart city	Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan inovasi yang mendukung smart city	23.33 %	Sumber data dari Dinas Kominfo	
			Jumlah perangkat daerah			
		Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi	Jumlah ASN pengelola TIK yang tersertifikasi	0 %	Memakai Surat Keterangan	



	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
		kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo Jumlah ASN pengelola TIK		dari Dinas Kominfo	
		Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government		1	Sumber data dari Dinas Kominfo	
	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Persentase komunitas masyarakat/ mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi	Komunitas masyarakat atau mitra strategis Pemda Provinsi yang telah menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah Komunitas masyarakat atau mitra komunikasi Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	Dinas Kominfo	
		Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	Jumlah konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (Strakom) Konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah provinsi	100 %	Dinas Kominfo	
		Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategikomunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	Diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (Strakom) dan SOP Diseminasi dan layanan informasi publik	79 %	Dinas Kominfo	
<b>17</b>	<b>Koperasi dan Usaha Kecil Menengah</b>					
	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah	Jumlah penerbitan izin usaha simpan pinjam koperasi pada tahun yang dilaporkan	3,28 %	Pembilang dan Penyebut dari Dinas Koperasi, UKM dan Naker	



	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah usaha simpan pinjam koperasi yang belum mempunyai izin usaha simpan pinjam		
		Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan Jumlah permohonan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan	0 %	Memakai Surat Keterangan dari Dinas Koperasi, UKM dan Naker
		Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi Jumlah koperasi yang ada	3,06 %	Pembilang dan Penyebut dari Dinas Koperasi, UKM dan Naker
		Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang ada	2,62 %	Pembilang dan Penyebut dari Dinas Koperasi, UKM dan Naker
		Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Jumlah koperasi yang ada	13,54 %	Pembilang dan Penyebut dari Dinas Koperasi, UKM dan Naker
		Persentase jumlah anggota koperasi yang telah	Jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan	39,30 %	Pembilang dan Penyebut dari Dinas



	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		mengikuti pelatihan perkeoprasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 daerah Kabupaten/ Kota	perkoperasian Jumlah anggota koperasi yang ada	Koperasi, UKM dan Naker	
		Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkeoprasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi yang telah menyelenggaraakn pendidikan dan pelatihan Jumlah koperasi yang ada	1,75 %	Pembilang dan Penyebut dari Dinas Koperasi, UKM dan Naker
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	0	Memakai surat keterangan	
		Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untukkoperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi yang telah diterbitkan sertifikat nomor induk koperasinya Jumlah koperasi yang ada	1,75 %	Pembilang dan Penyebut dari Dinas Koperasi, UKM dan Naker
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pembiayaan Jumlah koperasi yang ada	0 %	Pembilang dan Penyebut dari Dinas Koperasi, UKM dan Naker
		Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pemasaran Jumlah koperasi yang ada	0,87 %	Pembilang dan Penyebut dari Dinas Koperasi, UKM dan Naker



	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pemdampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha	2,18 %	Pembilang dan Penyebut dari Dinas Koperasi, UKM dan Naker	
			Jumlah koperasi yang ada			
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan	0 %	Pembilang dan Penyebut dari Dinas Koperasi, UKM dan Naker	
			Jumlah koperasi yang ada			
	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala kecil	Jumlah pertumbuhan wirausaha baru	0,35	Pembilang dan Penyebut dari Dinas Koperasi, UKM dan Naker	
			Jumlah wirausaha yang ada			
		Persentase jumlah usaha kecil yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	Jumlah usaha kecil yang diinput ke dalam sistem data online (ODS)	0 %	Pembilang dan penyebut berasal dari Dinas Koperasi dan Naker	
			Jumlah usaha kecil yang ada			
		Persentase jumlah usaha kecil yang bermitra	Jumlah usaha kecil yang bermitra	1,03 %	Pembilang dan penyebut berasal dari Dinas Koperasi dan Naker	
			Jumlah usaha kecil yang ada			
		Persentase jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	Jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi	0,06 %	Pembilang dan penyebut berasal dari Dinas Koperasi dan Naker	
	Jumlah usaha kecil yang belum memiliki standar dan sertifikasi produk					
	Persentase jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi	Jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	0,70 %	Pembilang dan penyebut berasal dari Dinas		



	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
		pemasaran	Jumlah usaha kecil yang belum mendapatkan dukungan pemasaran		Koperasi dan Naker	
		Rasio usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	Jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	1,79 %	Pembilang dan penyebut berasal dari Dinas Koperasi dan Naker	
			Jumlah usaha kecil yang ada			
		Persentase usaha kecil yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha	Jumlah usaha kecil yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha	0, %	Pembilang dan penyebut berasal dari Dinas Koperasi dan Naker	
			Jumlah usaha kecil yang ada			
<b>18</b>	<b>Penanaman Modal</b>					
	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/ Kota yang bisa diberikan kepada investor	0	Memakai surat keterangan dari Dinas PM dan PTSP	
		Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Tersedianya dokumen SOP pelaksanaan Pemberian fasilitas/Insentif penanaman modal (ada/tidak)	0	Sda	
		Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan Pemberian fasilitas/Insentif penanaman modal pertahun	0	Sda	
		Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	Jumlah kegiatan seminar bisnis/business forum, one on one meeting	0	Sda	
		Kegiatan pameran penanaman modal	Jumlah kegiatan pameran penanaman modal	0	Sda	
		Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	Jumlah Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	0	Sda	



	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
		Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	Jumlah konsultasi perizinan dan nonperizinan penanaman modal	1	Sumber data dari Dinas PM dan PTSP, melakukan koordinasi ke Dinas terkait ke luar kota	
		Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	Jumlah penerbitan perizinan dan nonperizinan	712 izin	Sumber data dari Dinas PM dan PTSP	
		Laporan realisasi penanaman modal	Jumlah nilai realisasi penanaman modal yang terpantau di tingkat Kabupaten/ Kota	396.356.647.815	Sda	
		Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat Kabupaten/ Kota serta Kabupaten/Kota	Jumlah aparatur dan penanam modal yang memahami ketentuan pelaksanaan kegiatan penanaman modal	0	Memakai surat keterangan dari Dinas PM dan PTSP	
		Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	Jumlah perusahaan yang mendapatkan pengawasan dan pelaksanaan penanaman modal	0	Memakai surat keterangan dari Dinas PM dan PTSP	
		Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan kabupaten/ kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah permintaan data dan informasi yang terpenuhi/ jumlah permintaan data dan informasi yang diterima	0	Memakai surat keterangan dari Dinas PM dan PTSP	
<b>19</b>	<b>Kepemudaan dan Olahraga</b>					
	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan		26	Sumber data dari Dinas Parpora	
		Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan		0	Memakai surat keterangan dari DISPARPORA	
	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan	Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda		57	Sumber data dari Dinas Parpora	





	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
	organisasi social kemasyarakatan	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan		0	Surat Keterangan dari Dinas Parpora Kota Sibolga	
	Peningkatan prestasi olahraga	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan		28	Sumber data dari Dinas Parpora	
		Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah		13	Sumber data dari Dinas Parpora	
<b>20</b>	<b>Statistik</b>					
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun Perencanaan pembangunan daerah	Tersedianya buku profil daerah		0	Memakai surat Keterangan dari Dinas Kominfo	
		Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan		0	Sda	
		Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan		0	Sda	
		Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS		0	Sda	
		Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS		0	Sda	
		Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral	0 %	Sda	
			Jumlah kegiatan statistik sektoral			
		Persentase kelengkapan metadata indikator sektoral	Jumlah metadata indikator statistik sektoral	0 %	Sda	
	Jumlah indikator statistik sektoral					
<b>21</b>	<b>Persandian</b>					
	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	Jumlah kegiatan strategis teramankan	0 %	Memakai surat Keterangan dari Dinas Kominfo	
			Jumlah kegiatan strategis yang ada			
	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip	Jumlah SE yang menerapkan SMK 1 dan diamankan sertifikat elektronik atau aplikasi penyandian	Jumlah SE yang ada	0 %	Memakai surat Keterangan dari Dinas Kominfo	



	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
		manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah				
		Persentase sistem elektronik/aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	Jumlah SE atau aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah Jumlah SE yang ada	0 %	Memakai surat Keterangan dari Dinas Kominfo	
		Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang diterapkan pemerintah daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi	Jumlah titik teramankan Jumlah titik pada PHKS	0 %	Memakai surat Keterangan dari Dinas Kominfo	
<b>22</b>	<b>Kebudayaan</b>					
	Terlestarikannya Cagar Budaya	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	Jumlah objek PK yang (diinventaris + diamankan + dipelihara + diselamatkan + dipublikasikan)	0	Memakai surat Keterangan dari Dinas Pendidikan	
		Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebar luasan, pengkajian, penayaan keberagaman	Jumlah objek PK (disebarluaskan + dikaji + dikayakan keberagaman nya)	0	Sda	
		Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan	Jumlah objek dimanfaatkan	0	Sda	



	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
		kesejahteraan masyarakat)				
		Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	Jumlah SDM ditingkatkan kompetensi + Jumlah SDM disertifikasi + Jumlah lembaga distandarisasi + Jumlah lembaga ditingkatkan kapasitas tata kelola + Jumlah pranata ditingkatkan kapasitas tata kelola	0	Sda	
		Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	Jumlah CB ditetapkan - Jumlah CB dihapuskan	0	Sda	
		Perlindungan cagar budaya Kabupaten/Kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	Jumlah CB (diselamatkan + diamankan + dizonasi + dipelihara + dipugar	0	Sda	
		Layanan perijinan membawa cagar budaya Kabupaten/Kota ke luar Kabupaten/ Kota dengan dukungan data	Jumlah CB diberikan izin ke luar Kabupaten/Kota	0	Sda	
		Pengembangan cagar budaya Kabupaten/Kota (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	Jumlah CB (diteliti + direvitalisasi + diadaptasi)	0	Sda	
		Pemanfaatan cagar budaya Kabupaten/Kota (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	Jumlah CB dimanfaatkan	0	Memakai surat Keterangan dari Dinas Pendidikan	
		Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan	Jumlah koleksi museum (dikelola + diamankan + dikembangkan +	0	Sda	



	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
		koleksi museum	dimanfaatkan)			
		Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum	Jumlah pengunjung museum	0	Sda	
		Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pengelolaan museum	0	Sda	
		Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	Jumlah tim pendaftaran CB yang dibentuk	0	Sda	
		Pembentukan tim ahli cagar budaya Kabupaten/Kota	Jumlah pembentukan tim ahli CB	0	Sda	
		Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	Jumlah ahli CB yang disertifikasi	0	Sda	
		Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	Jumlah sdm CB + Jumlah sdm Museum	0	Sda	
		Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman	Jumlah sdm yang ditingkatkan kompetensinya (CB + Museum)	0	Sda	
		Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	Jumlah sarana dan prasarana (CB + Museum)	0	Sda	
		Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	Jumlah kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	0	Sda	
<b>23</b>	<b>Perpustakaan</b>					
	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	Koleksi perpustakaan yang tersedia di berbagai perpustakaan di wilayahnya (dalam eksemplar)	8,32	Pembilang dari Dinas Perpustakaan dan penyebut dari Dinas Capil	
			Jumlah penduduk di wilayahnya			
		Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat	Jumlah kunjungan pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan baik secara onlone maupun onsite	38,48 %	Pembilang dari Dinas Perpustakaan dan penyebut dari Dinas Capil	
			Jumlah penduduk di wilayahnya			



	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
		Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	Ketersediaan tenaga perpustakaan di berbagai perpustakaan di wilayahnya Jumlah penduduk di wilayahnya	0,003	Pembilang dari Dinas Perpustakaan dan penyebut dari Dinas Capil	
		Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Jumlah perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan Jumlah perpustakaan dari berbagai jenis yang terdapat di wilayahnya	3,16 %	Pembilang dari Dinas Perpustakaan dan penyebut dari Dinas Capil	
		Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat		1545	Sumber data dari Dinas Perpustakaan dan Arsip	
	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya		0	Memakai Surat Keterangan dari Dinas Perpustakaan dan Arsip	
		Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa		0	Memakai Surat Keterangan dari Dinas Perpustakaan dan Arsip	
		Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)		0	Memakai Surat Keterangan dari Dinas Perpustakaan dan Arsip	
<b>24</b>	<b>Kearsipan</b>					
	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	Jumlah arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	100 %	Pembilang dan Penyebut dari Dinas Perpustakaan	
			Jumlah seluruh arsip aktif			
		Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	Jumlah arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip	100 %	Pembilang dan Penyebut dari Dinas Perpustakaan	
			Jumlah seluruh arsip inaktif			
		Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	Jumlah arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	100 %	Pembilang dan Penyebut dari Dinas Perpustakaan	
			Jumlah seluruh arsip			



	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
			statis			
		Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	Jumlah arsip yang telah dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	34,79 %	Pembilang dan Penyebut dari Dinas Perpustakaan	
			Jumlah seluruh arsip dinamis dan arsip statis pemerintahan Kabupaten/ Kota			
	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan Pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK		0	Memakai surat Keterangan dari Dinas Perpustakaan	
		Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK		0	sda	
		Penyelamatan arsip perangkat daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah Kabupaten/Kota yang sesuai NSPK di Kabupaten/Kota		0	sda	
		Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan Kabupaten/Kota yang sesuai NSPK		0	sda	
		Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK		0	sda	
		Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah Kabupaten/Kota yang sesuai NSPK		0	sda	
	<b>Urusan Pilihan</b>					
<b>25</b>	<b>Kelautan dan Perikanan</b>					
	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	0	Memakai surat keterangan dari Dinas PKP dan P	
		Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	Jumlah TPI yang Operasional	100 %	Sumber data dari Dinas PKP dan P	
			Jumlah seluruh TPI yang ada di wilayah Kabupaten/Kota			
	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/		0	Memakai surat keterangan dari Dinas PKP dan P	



	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
		kabupaten/kota yang diterbitkan	kota yang diterbitkan			
		Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/kemitraan usaha/kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatankelembagaan)	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan per tahun	45	Sumber data dari Dinas PKP dan P	
		Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang diproduksi	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang diproduksi per tahun	718.700 ekor	Sumber data dari Dinas PKP dan P	
<b>26</b>	<b>Pariwisata</b>					
	Persentase Pertumbuhan jumlah wisatawan manca negara per kebangsaan	Jumlah entitas pengelolaan destinasi		35	Sumber data dari Dinas PARPORA	
		Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata		60	Sda	
		Jumlah nilai realisasi investasi di bidang pariwisata di tingkat Kabupaten/Kota		148	Sda	
		Jumlah investasi per sektor usaha di bidang pariwisata		n/a	Memakai surat keterangan dari Dinas PARPORA	
		Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di Kabupaten/Kota		148	Sumber data dari Dinas PARPORA	
		Rata-rata lama tinggal wisatawan manca negara		n/a	Memakai surat keterangan dari Dinas PARPORA	
		Rata-rata tinggal wisatawan nusantara tingkat hunian akomodasi		7	Sumber data dari Dinas PARPORA	
		Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan		196	Sda	
		Jumlah perjalanan wisatawan nusantara		65146	Sda	
		Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri		3	Sda	
		Jumlah event luar negeri yang diikuti Kabupaten/Kota		0	Memakai surat keterangan dari Dinas	



	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
					PARPORA	
		Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada event promosi pariwisata di dalam negeri		7	Sumber data dari Dinas PARPORA	
		Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	Jumlah tenaga kerja pariwisata tersertifikasi	5,11 %	Sumber data dari Dinas PARPORA	
			Jumlah tenaga kerja pariwisata			
		Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	Jumlah peserta pembekalan sektor kepariwisataan	98,75%	Sumber data dari Dinas PARPORA	
			Jumlah sasaran pembekalan sektor kepariwisataan			
		Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat		17	Seluruh Kelurahan di Kota Sibolga	
<b>27</b>	<b>Pertanian</b>					
	Produktivitas pertanian perhektar per tahun	Sarana dan prasana pertanian yang diberikan	Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan	0	Memakai Surat Keterangan dari Dinas PKP dan P	
		Prasaran pertanian yang digunakan	Jumlah prasarana pertanian yang digunakan	0	Sda	
		Penerbitan izin usaha pertanian	Jumlah fasilitasi penerbitan izin usaha pertanian	0	Sda	
		Persentase prasarana yang digunakan	Jumlah prasarana yang aktif digunakan	0 %	Memakai Surat Keterangan dari Dinas PKP dan P	
			Jumlah prasarana yang dibangun			
	Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian kab/kota	Jumlah usulan yang difasilitasi	0 %	Memakai Surat Keterangan dari Dinas PKP dan P		
		Jumlah usulan usaha pertanian				
	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	Jumlah area yang dapat ditanggulangi	100 %	Sumber data dari Dinas PKP dan P	
			Luas area terkena bencana			
<b>28</b>	<b>Kehutanan</b>					
		Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura	Dokumen Rencana Pengelolaan Tahura yang disahkan	Tidak perlu diisi	Bukan kewenangan Pemerintah Kota Sibolga	





	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	
		Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	Jumlah kelompok masyarakat desabinaan yang terbentuk dan didampingi	Tidak perlu diisi	Bukan kewenangan Pemerintah Kota Sibolga		
		Pemulihan ekosistem pada Tahura	Luas areal yang telah dipulihkan baik dengan mekanisme alam, rehabilitasi maupun restorasi	Tidak perlu diisi	Bukan kewenangan Pemerintah Kota Sibolga		
		Menurunnya gangguan kawasan TAHURA	Rekapitulasi kejadian TIPIHUT secara periodik per tahun	Tidak perlu diisi	Bukan kewenangan Pemerintah Kota Sibolga		
<b>29</b>	<b>Energi dan Sumber Daya Mineral</b>						
	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota	Jumlah penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota	Tidak perlu diisi	Bukan kewenangan Pemerintah Kota Sibolga		
<b>30</b>	<b>Perdagangan</b>						
	Persentase pelakuusaha yang memperoleh izin sesuai dengan Ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin : Pusat perbelanjaan	Jumlah izin pusat perbelanjaan yang diterbitkan ≤5hari kerja	100%	Sumber data dari Dinas Perindag		
			Jumlah permohonan izin pusat perbelanjaan yang dokumennya sudah lengkap dan benar				
		Toko swalayan		Jumlah izin toko swalayan yang diterbitkan ≤ 5 hari kerja	100%	Sumber data dari Dinas Dinas PMPTSP	
				Jumlah permohonan izin toko swalayan yang dokumennya sudah lengkap dan benar			
		Persentase penerbitan TDG		Jumlah penerbitan TDG ≤5 hari kerja	100%	Sumber data dari Dinas Dinas PMPTSP	
				Jumlah permohonan penerbitan TDG dagang			
	Persentase Gudang Yang tidak mempunyai TDG		Jumlah penerbitan TDG	70 %	Sumber data dari Dinas Dinas PMPTSP		
			Jumlah gudang yang ada di Kab/Kota				
	Persentase STPW penerbitan yang		Penerima waralaba dari waralaba dalam	0 %	Memakai Surat		



	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		tepat waktu untuk : negeri :		Keterangan dari Disperindag Kota Siboga	
		Jumlah pelaku usaha yang memperoleh pelatihan atau fasilitas peningkatan kapasitas terkait ekspor			
		a. Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri	Jumlah STPW untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri yang terbit ≤ 2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar	0%	Sda
			Jumlah Permohonan STPW untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri		
		b. Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri	Jumlah STPM untuk penerima lanjutan waralaba dari waralaba dalam negeri yang terbit ≤ 2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar	0 %	Sda
			Jumlah Permohonan STPW untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri		
		c. Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri	Jumlah STPM untuk penerima lanjutan waralaba dari waralaba luar negeri yang terbit ≤ 2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar	0 %	Sda
			Jumlah Permohonan STPW untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri		
		Persentase pemeriksaan fasilitas	Jumlah Pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan	0 %	Memakai srat keterangan dari



	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
		penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota	berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Daerah Kab/Kota Jumlah Permohonan SIUP Bahan Berbahaya Bagi Pengecer		Dinas Perindag	
		Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	Jumlah SKA yang terbit ≤ 1 hari kerja (1 x 24 jam) Jumlah Permohonan penertiban SKA yang dokumennya yang telah diterima dengan lengkap dan benar	0 %	Memakai srat keterangan dari Dinas Perindag	
		Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	$K = (a+b) \times 100\%$ K = Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya a = Pembangunan sarana distribusi perdagangan telah dilakukan sesuai target waktunya (nilai 0.5) b = Sarana ditribusi perdagangan telah dimanfaatkan sesuai peruntukannya (0.5)	100 %	Sumber data dari Dinas Perdagangan Tahun 2020 1-19 orang ada 465 IKM	
		Persentase koefisien variasi harga antar waktu	presentase koefisien variasi harga antar waktu per komoditi bahan pokok	100 %	Sumber data dari Dinas Perindag	
	Persentase kinerja pupuk	Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	$X = \frac{a}{b \times c} \times 100$ Jumlah Pupuk yang disalurkan Target komisi pengawasan pupuk dan pestisida (KP3) di tingkat Provinsi sebesar (90% dari RDKK) x RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan	0 %	Tidak ada Pupuk Subsidi (Memakai Surat Keterangan )	



	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Kelompok)		
	Persentase alat –alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	Jumlah total UTTP yang di tera dan di tera ulang pada tahun berjalan	100 %	Data Terlampir berupa Data UUTP Pompa Ukur, TUM dan Timbangan
			Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang wilayah kab/kota		
		Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	Jumlah sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan sesuai ketentuan berlaku	0 %	Memakai Surat Keterangan bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut belum dijalankan di Kota Sibolga
			Total sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan		
<b>31</b>	<b>Perindustrian</b>				
	Pertambahan jumlah industry kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya didaerah kabupaten/kota	Jumlah realisasi izin yang ditertitkan	0 %	Memakai Surat Keterangan Belum memiliki IUKI dan IPKI yang ada hanya IUI (Izin Usaha Industri)
			Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk		
	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	Persentase terselesaikan nya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkan menjadi PERDA	Capaian target tahapan penyelesaian RPIK Tahapan :	75 %	Sumber data dari Dinas Perindustrian
			a) Tersusunnya naskah akademik (30%)	30 %	
			b) Tersusunnya Draft Raperda RPIK (20%)	20 %	
			c) Draft Raperda RPIK yang disetujui DPRD dan mendapat Rekomendasi dinas yang membidangi perindustrian di Provinsi (25%)	25 %	
			d) Persetujuan Draft Raperda RPIK oleh Gubernur Provinsi (15%)	Tidak ada	
		e) Penetapan Perda	Tidak	(Memakai Surat Keterangan)	



	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
			RPIK (10%) Keterangan : penilaian bersifat akumulatif terhadap tahapan penyelesaian RPIK	ada		
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industry (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	Jumlah realisasi yang diterbitkan Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk	0 %	Pembilang dan penyebut dari Dinas Perindag	
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persentase jumlah izin perluasan industri (IPIU) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan	Jumlah realisasi izin yang diterbitkan Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk	0 %	Tidak ada Izin Perluasan Industri yang ada hanya IUI (Memakai Surat Keterangan)	
	Tersedia nya informasi industri secara lengkap dan terkini	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten /Kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten /Kota	Jumlah data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab kota di SIINas Total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/ kota	0 %	Memakai Surat Keterangan Dari Dinas Perindag	
<b>32</b>	<b>Transmigrasi</b>	<b>Urusan Pilihan</b>				
		Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penempatannya		Tidak Perlu Diisi	Bukan Kewenangan Pemerintah Kota Sibolga	
		Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya		Tidak Perlu Diisi	Bukan Kewenangan Pemerintah Kota Sibolga	
		Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi pembinaannya		Tidak Perlu Diisi	Bukan Kewenangan Pemerintah Kota Sibolga	



## 2.2.2 INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>1</b>	<b>Pendidikan</b>				
	1. Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD Jumlah anak usia 5-6 tahun pada kota yang bersangkutan	83.098%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pendidikan	
	2. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar Jumlah anak usia 7-12 tahun pada kabupaten/kota yang bersangkutan	94.975%	Data Diolah	
	3. Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama Jumlah anak usia 13-15 tahun pada kabupaten/kota yang bersangkutan	87.119%	Data Diolah	
	4. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar Jumlah anak usia 7-18 tahun pada Kabupaten /Kota	100%	Dinas Pendidikan	
<b>2</b>	<b>Kesehatan</b>				
	5. Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	Jumlah daya tampung rumah sakit seluruh Kabupaten/ Kota Jumlah penduduk Kabupaten/ Kota	0,419 %	Pembilang dari Dinas Kesehatan dan RSUD FL Tobing, penyebut dari Disdukcapil	
	6. Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Jumlah rumah sakit yang terakreditasi Jumlah rumah sakit Kabupaten/ Kota	100 %	Dinas Kesehatan	
	7. Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan Jumlah ibu hamil di Kabupaten/ Kota	98.43 %	Pembilang dan penyebut dari Dinas Kesehatan	
	8. Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan Jumlah ibu bersalin	98.30 %	Pembilang dan penyebut dari Dinas Kesehatan	



		Kabupaten/ Kota			
9	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Jumlah bayi baru lahir di Kabupaten/ Kota	94,86 %	Pembilang dan penyebut dari Dinas Kesehatan	
10	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Jumlah balita di Kabupaten/ Kota	81,81 %	Pembilang dari Dinas Kesehatan dan penyebut dari Disdukcapil	
11	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Jumlah anak usia pendidikan dasar di Kabupaten/ Kota	43.09 %	Pembilang dari Dinas Kesehatan dan penyebut dari Disdukcapil	
12	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Jumlah orang usia 15-59 tahun di Kabupaten/ Kota	97.97 %	Pembilang dari Dinas Kesehatan dan penyebut dari Disdukcapil	
13	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas Kabupaten/ Kota	84.588%	Pembilang dari Dinas Kesehatan dan penyebut dari Disdukcapil	
14	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Jumlah penderita hipertensi di Kabupaten/ Kota	97.358 %	Dinas Kesehatan	
15	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Jumlah penderita DM di Kabupaten/ Kota	96.836 %	Dinas Kesehatan	
16	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Jumlah ODGJ di Kabupaten/ Kota	63.415 %	Dinas Kesehatan	
17	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Jumlah penderita TBC mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Jumlah penderita TBC di Kabupaten/ Kota	52,665 %	Pembilang dan penyebut dari Dinas Kesehatan	
18	Persentase orang dengan resiko Terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai	59.822%	Pembilang dan penyebut dari Dinas Kesehatan	



	standar	standar			
		Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di Kabupaten/ Kota			
<b>3</b>	<b>Pekerjaan Umum</b>				
19	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir WS Kewenangan Kabupaten/ Kota (ha) Luas Kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan Kabupaten/ Kota (ha)	52.362	Memakai Surat Keterangan dari Dinas PUPR menerangkanTi dak adanya kawasan permukiman rawan banjir	
20	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten/ kota	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengamanan pantai di WS kewenangan Kota (m) Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan Kota	0	Memakai Surat Keterangan dari Dinas PUPR menerangkanTi dak adanya kawasan permukiman rawan banjir	
21	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Luas irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), di tingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasi dan dipelihara (ha) Luas daerah irigasi kewenangan kota	Tidak Perlu Diisi	Memakai Surat Keterangan dari Dinas PUPR	
22	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapat akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kota Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kota	100 %	Sumber data dari Dinas PU dan PR	
23	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + Jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD Jumlah rumah dikota	33.58 %	Sumber data dari Dinas PU dan PR	
24	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya Jumlah IMB yang berlaku	100 %	Sumber data dari Dinas PU dan PR	
25	Tingkat Kemantapan Jalan	Panjang jalan kewenangan	86.902	Sumber data	





		kabupaten/kota	Kota yang mantap (km)	%	dari Dinas PU dan PR	
			Panjang jalan keseluruhan diwilayah Kabupaten/ Kota (km)			
26		Rasio tenaga operator/ teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih diwilayah kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis	0	Memakai surat keterangan dari Dinas PU dan PR	
			Jumlah kebutuhan tenaga kebutuha tenaga operator dan teknis/analisis diwilayah kota			
27		Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pegawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100	Sumber data dari Dinas PU dan PR	
			Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya			
<b>4</b>	<b>Perumahan</b>					
28		Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n	0	Memakai Surat Keterangan dari Dinas PKPLH	
			Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n			
29		Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Rumah tangga penerima fasilitasi penggantian hak atau penguasaan tanah dan bangunan + rumah tangga penerima subsidi uang sewa + rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni	0	Memakai Surat Keterangan dari Dinas PKPLH	
			Jumlah rumah tangga terkena relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan			
30		Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha)	0	Memakai Surat Keterangan, tidak adanya kawasan kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	
			Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha			
31		Berkurangnya jumlah unit RTLH(Rumah Tidak Layak Huni)	Jumlah unit rumah tidak layak huni	0.250	Penyebut dari Dinas PKPLH dan pembilang berasal dari Dinas PUPR	
			Jumlah total unit rumah di kota			
32		Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU	0	Sumber data dari Dinas PKPLH	
			Jumlah unit rumah kota			



<b>5</b>	<b>Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>				
	33	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah Pengaduan yang ditangani Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk	100 %	Sumber data dari Dinas Satpol PP
	34	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi	32,258 %	Sumber data dari Dinas Satpol PP
	35	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi Rawan bencana		1000 jiwa	Sumber data dari BPBD Kota Sibolga
	36	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Jumlah warga Kabupaten/ Kota yang berada dilokasi rawan bencana	28,145 %	Pembilang dan Penyebut dari BPBD Kota Sibolga
	37	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Jumlah warga yang terkena korban bencana	100 %	Sumber data dari Satpol PP Kota Sibolga
	38	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di Kabupaten/ Kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran + Jumlah layanan pemadaman di Kabupaten/ Kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau dibawah pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Jumlah Kejadian kebakaran di Kabupaten/ Kota	100 %	Pembilang dan Penyebut dari Satpol PP
	39	Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran		9,19 menit	Data diolah oleh Satpol PP, berada dibawah SOP dari Permendagri No. 114 Tahun 2018
<b>6</b>	<b>Sosial</b>				
	40	Persentase penyandang disabilitas terlantar ,anak	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak	47.312 %	Sumber data dari Dinas



		terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indicator SPM)	terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis		Sosial	
	41	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu anggaran Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota	100 %	Pembilang dan Penyebut dari Dinas Sosial	
<b>Urusan Wajib</b>						
<b>7</b>	<b>Ketenagakerjaan</b>					
	42	Persentase kegiatan yang dilaksanaka yang mengacu kerencana tenaga kerja	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu RTKD Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kota	91,667 %	Pembilang dan Penyebut dari Dina Koperasi, UKM dan Ketenaga kerjaan	
	43	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi Jumlah tenaga kerja keseluruhan	0 %	Pembilang Memakai Surat Keterangan dari Dinas Koperasi dan Ketenagakerjaa n penyebut berasal dari BPS	
	44	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan) Jumlah tenaga kerja	12,922 %	Pembilang dan penyebut berasal dari Dinas Koperas dan Ketenaga kerjaan	
	45	Persentase Perusahaan yang menerapkan tatakelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenaga kerjaan)	Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak Jumlah perusahaan	14.932%	Pembilang dan penyebut berasal dari Dinas Koperasi dan Ketenaga kerjaan	
	46	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme pelayanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	Jumlah pencari kerja (penceker) yang ditempatkan Jumlah pencari kerja (penceker) yang terdaftar	43.644 %	Pembilang dan penyebut berasal dari Dinas Koperasi dan Ketenaga kerjaan	
<b>8</b>	<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>					



47	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Jumlah ARG pada belanja langsung APBD	3,414 %	Sumber data Dinas	
		Jumlah seluruh anggaran belanja langsung di Kabupaten/ Kota			
48	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat Kabupaten/ Kota yang didampingi	0,051 %	Pembilang dari Dinas PMK, PP dan PA, penyebut dari Disdukcapil	
		Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun)			
49	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan	6,25 %	Pembilang dari Dinas PMK, PP dan PA, penyebut dari Disdukcapil	
		Jumlah penduduk perempuan di Kabupaten/ Kota			
<b>9</b>	<b>Pangan</b>				
50	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	Jumlah cadangan pangan Kabupaten/ Kota	2,16 %	Sumber data dari Dinas PKPP	
		Jumlah kebutuhan pangan Kabupaten/ Kota			
<b>10</b>	<b>Pertanahan</b>				
51	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Luas tanah sesuai peruntukan izin lokasi	0 %	Memakai Surat Keterangan Dinas PUPR	
		Seluruh luas tanah yang diberikan izin lokasi			
52	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	0 %	Memakai Surat Keterangan Dinas PUPR	
		Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum			
53	Persentase lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya diatas izin lokasi	0 %	Memakai Surat Keterangan Dinas PUPR	
		Luas izin lokasi yang diterbitkan			
54	Persentase Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Jumlah penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0,5 ha	0 %	Memakai Surat Keterangan Dinas PUPR	
		Jumlah tanah penerima tanah obyek landreform			
55	Persentase ketersediaan tanah untuk masyarakat	Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan izin membuka tanah	0 %	Memakai Surat Keterangan Dinas PUPR	
		Luas izin membukan tanah yang diterbitkan			
56	Persentase penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani	0 %	Memakai Surat Keterangan Dinas PUPR	
		Jumlah pengaduan			



			sengketa tanah garapan			
<b>11</b>	<b>Lingkungan Hidup</b>					
	57	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/ Kota	IKLH Kab/Kota = IKA (30%) + (IKD 30%) + (ITH 40%) IKA = Indeks Kualitas Air IKU = Indeks Kualitas Udara ITH = Indeks Tutupan Hutan	66.63	Sumber data dari Dinas PKPLH	
	58	Terlaksananya pengelolaan sampah di Wilayah Kab/Kota	Total volume sampah yang dapat ditangani total volume timbunan sampah kabupaten/kota	93.587%	Sumber data dari Dinas PKPLH Dokumen terlampir	
	59	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan pemerintah kab/kota usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan	0 %	Memakai surat keterangan dari Dinas PKPLH	
<b>12</b>	<b>Adm. Kependudukan dan Catatan Sipil</b>					
	60	Tingkat perekaman KTP elektronik di Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk berumur 17 tahun keatas yang memiliki KTP Jumlah Penduduk 17 tahun ke atas	98,60 %	Dinas Kependudukan dan Capil	
	61	Persentase anak usia 0-17 tahun yang memiliki KIA	Jumlah anaak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari	70,02 %	Dinas Kependudukan dan Capil	
	62	Tingkat kepemilikan akta kelahiran	Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta kahir Jumlah anak usia 0-18 tahun	99,55 %	Dinas Kependudukan dan Capil	
	63	Persentase perangkat daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Jumlah OPDang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama Jumlah OPD	30 %	2 Instansi yaitu PMK,PP dan PA dan Dinas Perizinan masih dalam proses pengajuan perjanjian kerjasama (pks) pemanfaatan data.	
<b>13</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan</b>					
	64	Persentase pengentasan desa tertinggal	Jumlah kelurahan tertinggal yang memiliki kriteria kelurahan berkembang per tahun berdasarkan Indeks kelurahan Membangun per tahun	0 %	Berdasarkan Perpres No. 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah	



			Jumlah kelurahan tertinggal (per awal tahun – n)		Tertinggal Tahun 2020-2024 serta Memakai Surat Keterangan dari Dinas PMK, PP dan PA	
	65	Persentase peningkatan status Kelurahan mandiri	Jumlah kelurahan berkembang yang memenuhi kriteria kelurahan mandiri per tahun berdasarkan Indeks Kelurahan Membangun per tahun	0 %	Berdasarkan Perpres No. 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024 serta Memakai Surat Keterangan dari Dinas PMK, PP dan PA	
			Jumlah kelurahan berkembang (per awal tahun – n)			
<b>14</b>	<b>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>					
	66	TFR (Angka Kelahiran Total)	$= 5 \sum_{i=1}^7 ASFR_i$ $ASFR_i = \frac{b_i}{p_i} \times k$ <p>TFR = Angka Kelahiran Total                      ASFR = Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur                      Bi = Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur i pada tahun tertentu                      Pi = Jumlah penduduk perempuan kelompok umur i pada pertengahan tahun yang sama                      I = kelompok umur (i=1 untuk kelompok umur 15-19, i=2 untuk kelompok umur 20-24,....., i=7 untuk kelompok Umur 45-49                      K =Bilangan Konstanta biasanya 1000</p>	2,62 %	Sumber data dari Dinas PP dan KB	
	67	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah peserta KB aktif modern	59,08 %	DPPKB	
			Jumlah pasangan usia subur			
	68	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani	21,36 %	Susenas	
			Jumlah Pasangan Usia Subur			



<b>15</b>	<b>Perhubungan</b>					
	69	Rasio konektivitas Provinsi	Rasio Konektivitas Kabupaten/ Kota = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)	85	Sumber data dari Dinas Perhubungan	
	70	V/C Ratio diJalan Kabupaten/ Kota	V/C Rasio konektivitas kabupaten/ kota	0,21	Sumber data dari Dinas Perhubungan	
<b>16</b>	<b>Komunikasi dan Informatika</b>					
	71	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	50 %	Sumber data dari Dinas Kominfo	
	72	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	28,57 %	Dinas Kominfo	
	73	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah lainnya	75.423 %	Data dari Dinas Kominfo yang mengasumsi data dari 15 tahun keatas dari Disdukcapil	
<b>17</b>	<b>Koperasi dan Usaha Kecil Menengah</b>					
	74	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset	13.1 %	Sumber data dari Dinas Koperasi, UKM dan Naker	
	75	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	Jumlah usaha kecil yang menjadi wirausaha	0.349 %	Sumber data dari Dinas Koperasi dan Naker	
<b>18</b>	<b>Penanaman Modal</b>					
	76	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	(Jumlah investasi tahun n – jumlah investasi tahun n-1) di Kabupaten/ Kota	4590.61 1 %	Sumber data dari Dinas Penanaman Modal dan PPTSP	
<b>19</b>	<b>Kepemudaan dan Olahraga</b>					
	77	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di Kabupaten/ Kota	0,87 %	Sumber data dari Dinas Parpora	
	78	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi social kemasyarakatan	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di Kabupaten/ Kota	0,124 %	Sumber data dari Dinas Parpora	



			Jumlah pemuda (16-30 tahun) di Kabupaten/ Kota			
	79	Peningkatan prestasi olahraga	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	2		
<b>20</b>	<b>Statistik</b>					
	80	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun Perencanaan pembangunan daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah Jumlah OPD	100 %		Memakai Surat Keterangan dari Dinas Kominfo
	81	Persentase OPD yang Menggunakan Data Statistik Dalam Melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah Jumlah OPD	100 %		Memakai Surat Keterangan dari Dinas Kominfo
<b>21</b>	<b>Persandian</b>					
	82	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah nilai area per keamanan informasi Jumlah area penilaian	0 %		Memakai Surat Keterangan dari Dinas Kominfo
<b>22</b>	<b>Kebudayaan</b>					
	83	Terlestarikannya Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan Jumlah cagar budaya yang ditetapkan	100 %		
<b>23</b>	<b>Perpustakaan</b>					
	84	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat	0		Memakai Surat Keterangan dari Dinas Perpustakaan
	85	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM)  UPLM 1 = Pemerataan layanan perpustakaan UPLM 2 = Ketercukupan koleksi UPLM 3 = Ketercukupan tenaga perpustakaan UPLM 4 = Tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan UPLM 5 = Perpustakaan ber-SNP UPLM 6 = Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan UPLM 7 = Anggota perpustakaan	0		Memakai Surat Keterangan dari Dinas Perpustakaan, bahwa tidak melakukan Metode Sensus untuk mengukur Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat





			<p>Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat = <math>\sum \frac{UPLM}{ALM}</math> x 100</p>			
24	<b>Kearsipan</b>					
	<b>86</b>	<p>Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</p>	<p><math>T = (a + i + s + j) / 4</math></p> <p>T = Tingkat ketersediaan arsip                      a = Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip                      i = Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip                      s = Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik                      j = Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN</p>	83,70 %	Sumber data dari Dinas Perpustakaan dan Arsip	



87	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan Pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepinginan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	$T = (m + b + g + a + c + i) / 6$ T = Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban m = Tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK b = Tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK g = Tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah Kabupaten/Kota dengan NSPK a = Tingkat kesesuaian kegiatan autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK c = Tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK i = Tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK	0	Memakai Surat Keterangan dari Dinas Perpustakaan, bahwa belum pernah melaksanakan NSPKnya atau belum melaksanakan Penyusunan
<b>Urusan Pilihan</b>				
25	<b>Kelautan dan Perikanan</b>			
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data:one data KKP)		32865.4 7 Ton	Sumber data dari Dinas PKP dan P
26	<b>Pariwisata</b>			
2	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	$\frac{\text{Jumlah wisatawan tahun } n - \text{jumlah wisatawan tahun } n-1}{\text{jumlah wisatawan tahun } n-1}$	9700 %	Pembilang dan penyebut dari Disparpora
3	Pertumbuhan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	$\frac{\text{Jumlah wisatawan tahun } n - \text{Jumlah wisatawan tahun } n-1}{\text{Jumlah wisatawan tahun } n-1}$	19.33%	Pembilang dan penyebut dari Disparpora
4	Tingkat Hunian Akomodasi	$\frac{\text{Jumlah kamar yang terjual}}{\text{Jumlah kamar yang tersedia}}$	5274.44 %	Pembilang dan penyebut dari Disparpora
5	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Harga Berlaku (harga berlaku)		4.419 %	Pembilang dari Disparpora, penyebut BPS
6	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD		3.037%	Pembilang dari Disparpora, penyebut BPKPAD
27	<b>Pertanian</b>			



	7	Produktivitas pertanian perhektar per tahun	Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun Luas panen	0 %	Tidak ada Wilayah Pertanian Sumber data dari Dinas PKP dan P	
	8	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Jumlah kejadian penyakit kasus tahun berjalan (t) – jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)	-22.828 %	Sumber data dari Dinas PKP dan P	
<b>28</b>	<b>Kehutanan</b>					
	9	Tidak ada OutCome nya		"tidak perlu diisi"	Bukan kewenangan Pemerintah Kota Sibolga, sesuai dengan Permendagri No 90 Tahun 2019	
<b>29</b>	<b>Energi dan Sumber Daya Mineral</b>					
	10	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi	"tidak perlu diisi"	Bukan kewenangan Pemerintah Kota Sibolga, sesuai dengan Permendagri No 90 Tahun 2019	
<b>30</b>	<b>Perdagangan</b>					
	11	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan Ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan Jumlah pelaku usaha di wilayah Kabupaten/ Kota	100%	Sumber data dari Dinas Perizinan Kota Sibolga, Pendaftaran Perizinan dilakukan melalui sistem Perizinan Berusaha Terintegritas secara elektronik (OSS)	
	12	Persentase kinerja realisasi pupuk	Realisasi RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok)	0 %	Sumber data dari Dinas Perdagangan Memakai Surat Keterangan	
	13	Persentase alat –alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang	100 %	Sumber data dari Dinas Perdagangan	



		di wilayah kota			
<b>31</b>	<b>Perindustrian</b>				
	14	Pertambahan jumlah industry kecil dan menengah diKabupaten/ Kota	Jumlah industri kecil dan menengah tahun n –jumlah industri kecil dan menengah per tahun n - 1 jumlah industri kecil dan menengah per tahun n – 1	-27.137%	Sumber data dari Dinas Perindag
	15	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	Jika terdapat N indikator pembangunan industri dalam RPIK maka nilai masing-masing bobot indikator adalah (100/N)% Untuk masing-masing penilaian indikator adalah persentase capaian indikator dibagi target dikali (100/N)% Nilai akhir adalah akumulasi dari N indikator tersebut	75,00 % 0 % 75,00	Sumber data dari Dinas Perindustrian (Memakai Surat Keterangan)
	16	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan Jumlah izin yang dikeluarkan	0 %	Memakai Surat Keterangan, bahwa Dinas Perindag tidak menerbitkan IUI, karena Pendaftaran Perizinan dilakukan melalui Sistem Perizinan Berusaha terintegritas secara Elektronik (OSS)
	17	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan Jumlah izin yang dikeluarkan	0 %	Memakai Surat Keterangan, bahwa Dinas Perindag tidak menerbitkan Izin Perluasan Industri (IPUI)
	18	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah IzinPerluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan Jumlah izin yang dikeluarkan	0 %	Memakai Surat Keterangan, bahwa Dinas Perindag tidak menerbitkan IUKI dan IPKI, karena Kawasan Industri di Kota Sibolga belum terbentuk



	19	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	<p>Nilai akhir adalah akumulasi dari kelengkapan dan keterkinian informasi industri (1 + 2)</p> <p>Keterkinian informasi industri :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (50%)</li> <li>- Tersedianya informasi dengan batas waktu 7-12 bulan (25%)</li> <li>- Tidak tersampainya informasi industri (0%)</li> </ul> <p>Kelengkapan informasi industri meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- informasi produksi dan kapasitas produksi (10%)</li> <li>- informasi bahan baku dan bahan penolong (10%)</li> </ul>	0	Memakai Surat Keterangan dari Dinas Perindag, bahwa belum ada data IKM yang masuk dalam SIINAS pada tahun 2022	
				0	Tidak ada Penerbitan Buku Profil T.A 2022	
				0	Tidak ada Penerbitan Buku Profil T.A 2022	
				0	Tidak ada Penerbitan Buku Profil T.A 2022	
<b>32</b>	<b>Transmigrasi</b>					
	20	Tidak Perlu diisi			Memakai Surat Keterangan dari Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan bahwa tidak ada daerah transmigrasi	

### 2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>33</b>	<b>Fungsi Penunjang Pemerintahan (Perencanaan dan Keuangan)</b>				
	1	Rasio Belanja Pegawai di luar Guru dan Tenaga Kesehatan	Jumlah belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	22.483 %	Sumber data dari BPKPAD dan LRA Unaudit
			Jumlah APBD		
	2	Rasio PAD	Jumlah PAD	13.213 %	Sumber data dari BPKPAD dan LRA Unaudit
			Jumlah Pendapatan pada APBD		
	3	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer)	Jumlah belanja urusan - transfer expenditures	73.272 %	
			Jumlah belanja APBD		



		expenditures)			
	4	Opini Laporan Keuangan	WTP LKPD 2011	LHP atas Laporan Keuangan No. 24.A/LHP/XVIII.MD N/05/2012 Tanggal : 28 Mei 2012	Sumber data dari Inspektorat Kota Sibolga
			WDP LKPD 2012	LHP atas Laporan Keuangan No. 82.A/LHP/XVIII.MD N/05/2013 Tanggal : 04 Mei 2013	Sumber data dari Inspektorat Kota Sibolga
			WDP LKPD 2013	LHP atas Laporan Keuangan No. 52.A/LHP/XVIII.MD N/07/2014 Tanggal : 11 Juli 2014	Sumber data dari Inspektorat Kota Sibolga
			WDP LKPD 2014	LHP atas Laporan Keuangan No. 54.A/LHP/XVIII.MD N/06/2015 Tanggal :04 Juni 2015	Sumber data dari Inspektorat Kota Sibolga
			TMP LKPD 2015	LHP atas Laporan Keuangan No. 68.A/LHP/XVIII.MD N/09/2016 Tanggal : 22 September 2016	Sumber data dari Inspektorat Kota Sibolga
			TMP LKPD 2016	LHP atas Laporan Keuangan No. 69.A/LHP/XVIII.MD N/08/2017 Tanggal : 9 Agustus 2017	Sumber data dari Inspektorat Kota Sibolga
			WDP LKPD 2017	LHP atas Laporan Keuangan No. 59.A/LHP/XVIII.MD N/06/2018 Tanggal : 4 Juni 2018	Sumber data dari Inspektorat Kota Sibolga
			WTP LKPD 2018	LHP atas Laporan Keuangan No. 47.A/LHP/XVIII.MD N/05/2019 Tanggal : 3 Mei 2019	Sumber data dari Inspektorat Kota Sibolga
			WTP	LHP atas	Sumber data



			LKPD 2019	Laporan Keuangan No. 40.A/LHP/XVIII.MD N/04/2020 Tanggal : 10 April 2020	dari Inspektorat Kota Sibolga	
			WTP LKPD 2020	LHP atas Laporan Keuangan No. 42.B/LHP/XVIII.MD N/05/2021 tanggal 03 Mei 2021	Sumber data dari Inspektorat Kota Sibolga	
			WTP LKPD 2021	LHP atas Laporan Keuangan No. 43.A/LHP/XVIII.MD N/04/2022 Tanggal : 27 April 2022	Sumber data dari Inspektorat Kota Sibolga	-
				Masih Proses	Sumber data dari Inspektorat Kota Sibolga	
	5	Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Level 2	Laporan Hasil Bimbingan Teknis Peningkatan Level Maturitas SPIP Nomor : LBA-794/PW02/3.2/2019. Tanggal : 23 Desember 2019	Sumber data dari Inspektorat Kota Sibolga	
	6	Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Level 2	Laporan hasil penjaminan kualitas atas penilaian mandiri Kapabilitas APIP. Nomor : LQAPIP-405/PW02/6/2018 Tanggal : 5 September 2018	Sumber data dari Inspektorat Kota Sibolga	
<b>34</b>	<b>Pemerintahan (Pengadaan)</b>					
	7	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	Jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n Jumlah kontrak keseluruhan tahun n	0 %	Memakai Surat Keterangan dari Dinas PU dan PR, bahwa tidak memiliki proyek konstruksi yang dibawa ketahun berikutnya	
	8	Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif	30.282 %	Sumber data dari Aplikasi LPSE	
	9	Rasio Nilai Belanja yang	Jumlah nilai belanja	1.94 %		



		Dilakukan Melalui Pengadaan	langsung yang melalui pengadaan			
			Total belanja langsung			
<b>35</b>	<b>Pemerintahan (Kepegawaian)</b>					
	10	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/ Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai menurut pendidikan PT keatas Seluruh jumlah pegawai pemerintah (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	80,893 %	Sumber data dari BKD	
	11	Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai PNS Fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan) Seluruh jumlah pegawai pemerintah (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	19,272 %	Sumber data dari BKD	
	12	Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi Seluruh jumlah fungsional (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	16.73 %	Sumber data dari BKD	
<b>36</b>	<b>Pemerintahan (Manajemen Keuangan)</b>					
	13	Budget Execution : Deviasi Realisasi Belanja Terhadap Belanja Total Dalam APBD	Nilai absolut dari total belanja dalam realisasi Total belanja APBD dikurangi satu	7.1871 %	Sumber data dari BPKPAD dan LRA Unaudit	
	14	Revenue Mobilization : Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD dalam APBD	Nilai absolut dari total PAD dalam realisasi Total PAD dalam APBD dikurangi satu	45.125 7%	Sumber data dari BPKPAD dan LRA Unaudit	
	15	Assets Management	Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak)	Ya	Sumber data dar BPKPAD	
			Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak)	Ya		
			Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak)	Ya		
			Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)	Ya		
	16	Cash Management : Rasio Anggaran	Nilai realisasi SiLPA	12.222	Sumber data	





		Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	Total belanja anggaran tahun sebelumnya	%	dari BPKPAD dan LRA Unaudit	
<b>37</b>	<b>Pemerintahan (Transparansi dan Partisipasi Publik)</b>					
	17	Informasi Ketersediaan Informasi tentang Sumber Daya yang Tersedia Untuk Pelayanan (Information on Resources Available to Frontline Service Delivery Units)	Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses website Pemda Realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses website Pemda	100 %	Sumber data dari Bappeda	
	18	Akses Publik Terhadap Informasi Keuangan Daerah (Public Access to Fiscal Information)	Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website Pemda Total jumlah dokumen yang telah dirinci	100 %	Sumber data dari Bappeda	
<b>38</b>	<b>Pemerintahan Umum</b>					
	19	Kegiatan pembinaan politik di daerah	Menunjukkan jumlah kegiatan pembinaan politik	16	Sumber data dari Kantor Kesbang	
	20	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, ORMAS dan OKP	Menunjukkan jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, ORMAS dan OKP	50	Sumber data dari Kantor Kesbang	



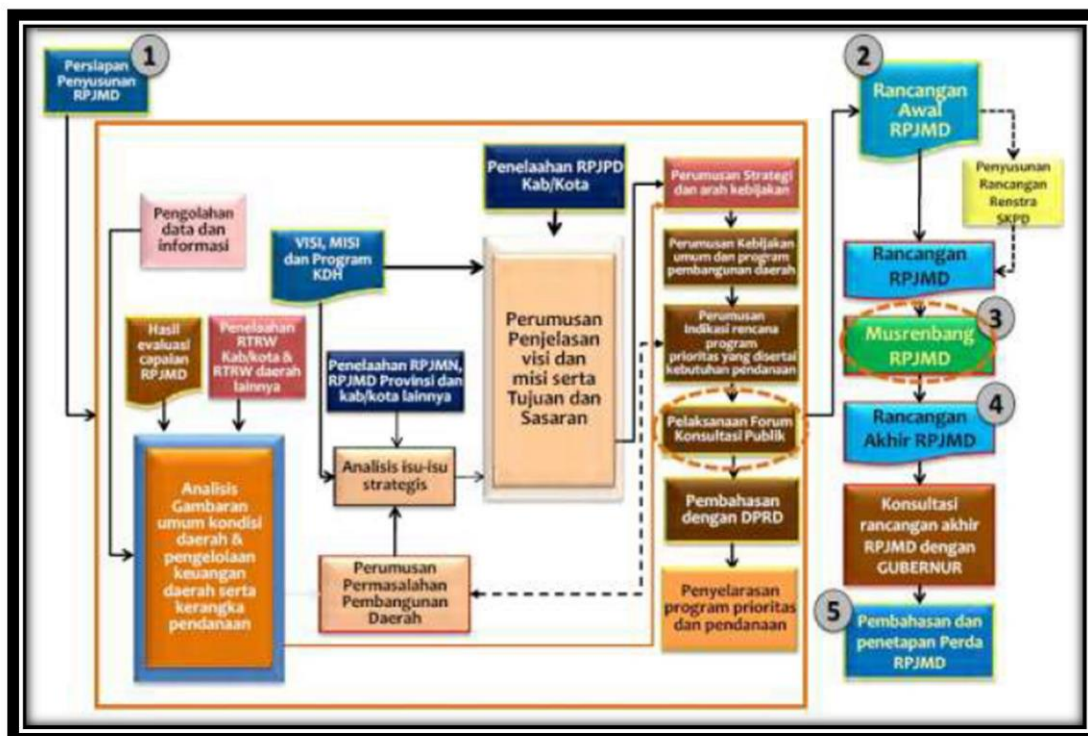
## 2.3 AKUNTABILITAS KINERJA

### 2.3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

#### RPJMD KOTA SIBOLGA

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan - tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu yang meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Sebagai perwujudan amanat tersebut, Pemerintah Kota Sibolga telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Sibolga 2005-2025 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010. Salah satu substansi strategis dalam RPJ PD tersebut adalah menetapkan Visi Daerah “Kota Jasa yang Nyaman, Aman, Unggul, Lestari dan Indah (NAULI)” di Kawasan Pantai Barat Sumatera Utara, yang terdiri dari 6 (enam) Misi yang di dalamnya memuat mengenai indikator dan target capaian. Sebagaimana diketahui pula pada setiap tahap 5 (lima) tahunan RPJMD tersebut kemudian diuraikan menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yaitu: Tahap I (2006-2010), Tahap II (2011-2015), Tahap III (2016-2020), dan Tahap IV (2021-2025). Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 5 Ayat (2), bahwa yang dimaksud dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Organisasi Perangkat Daerah, lintas organisasi Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana - rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Proses penting lainnya dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sibolga ini adalah pemahaman awal posisi Kota Sibolga yang unik atau berbeda dengan daerah lain pada umumnya. Keunikan ini muncul dari faktor karakteristik geografis serta sejarahnya. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sibolga Tahun 2021-2026 melalui berbagai tahapan analisis sektoral, penjaringan aspirasi masyarakat, serta dialog yang melibatkan stakeholders dan pemangku kepentingan. Adapun proses penyusunan secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 3.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Pendekatan pembangunan berbasis kinerja akan sejalan dengan upaya untuk mewujudkan prinsip *good governance* dengan mendepankan akuntabilitas sejauh mana instansi pemerintah telah memenuhi tugas pokok dan fungsinya dalam pelayanan publik. Oleh

karena itu pentingnya memastikan bahwa kinerja yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan pembangunan dan mencapai target yang telah ditetapkan. Salah satu dasar rujukan yang diacu adalah peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



## VISI DAN MISI PEMERINTAH KOTA SIBOLGA

- MISI 1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang *Good Governance* dengan Transparan dan Akuntabel.**
- Tujuan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik;
- Sasaran Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel;
- Strategi :
1. Penataan karir ASN sesuai dengan keahlian dan profesionalisme akuntabel yakni Aparatur Sipil Negara (ASN) harus memiliki kompetensi, inovatif, koordinatif, responsif, akan lebih mengedepankan pelayanan prima berbasis sistem informasi pemerintahan elektronik (*E-governance*).
- Meningkatnya kualitas SDM penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel;
- Strategi :
1. Penataan karir ASN sesuai dengan keahlian dan profesionalisme serta secara bertahap akan meningkatkan tambahan bagi ASN sesuai dengan tanggungjawab dan beban kerja.
  2. Melakukan Pengelolaan Keuangan Daerah secara tertib, efisien, ekonomis, efektif dan transparan, bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatuhan, dengan memprioritaskan kepentingan masyarakat.
  3. Melakukan Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan kegiatan investasi yang bertujuan memberikan manfaat bagi peningkatan Pendapatan Daerah, peningkatan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat.
- MISI 2 Mewujudkan dan Meningkatkan kesehatan masyarakat serta pelayanan sehingga dapat melahirkan masyarakat yang cerdas, menuju masyarakat yang makmur.**
- Tujuan Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat;
- Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat;
- Strategi :
1. Memberikan / meningkatkan Subsidi/ bantuan iuran BPJS bagi keluarga kurang mampu dan mempermudah pengurusan persyaratan administrasi untuk menjadi peserta BPJS.
  2. Memberikan penyuluhan kesehatan/ pola hidup masyarakat kurang mampu.



Dengan sosialisasi tentang makanan dan minuman yang aman untuk dikonsumsi dan tidak berpotensi menimbulkan penyakit.

3. Meningkatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum dan Puskesmas dengan menyediakan peralatan dan petugas kesehatan yang lebih baik.
4. Melakukan Penataan Pemukiman dan sarana prasarana. Khusus MCK dengan memberikan bantuan pembangunan toilet septic tank yang layak di masing-masing rumah penduduk secara bertahap.
5. Memperbaiki bangunan drainase jalan dan membangun jalan drainase baru di pemukiman warga sehingga tidak menimbulkan penyakit akibat tidak dapat menampung aliran air dengan baik.
6. Memberikan penyuluhan secara kontinu untuk meningkatkan kesadaran kepada masyarakat tentang penting dan bermanfaatnya membuang sampah di tempatnya, dan pengolahan sampah sebagai sumber ekonomi masyarakat.

**MISI 3 Mewujudkan pemerataan pembangunan yang proporsional berbasis jumlah penduduk untuk menata pemukiman warga agar terciptanya lingkungan yang sehat dan infrastruktur kota yang terang dengan memanfaatkan tata ruang yang berwawasan kota pintar (Smart City).**

Tujuan Mewujudkan Pembangunan Kawasan yang Berkelanjutan;

Sasaran Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung performa wilayah;

Strategi :

1. Melaksanakan program pembangunan yang proporsional dengan berbasis jumlah penduduk di suatu daerah, sehingga capaian pembangunan yang direncanakan/ diinginkan oleh masyarakat dapat terpenuhi.

Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;

Strategi :

1. Melaksanakan program perencanaan tata ruang dan pengawasan serta pemanfaatan ruang yang terintegrasi dengan memperhatikan daya dukung kota dalam rangka mewujudkan Kota Sibolga sebagai kota perdagangan dan jasa.
2. Pembangunan dan penataan Infrastruktur kota yang berkualitas dengan mengedepankan input perencanaan yang komprehensif (luas dan lengkap).
3. Melakukan program pembangunan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman yang ramah lingkungan dengan sistem pemberdayaan dan swakelola masyarakat bagi kawasan padat pemukiman khususnya



pembangunan jalan lingkungan, gorong-gorong drainase.

4. Melakukan pembangunan dan perbaikan seluruh trotoar jalan di Kota Sibolga sehingga bermanfaat bagi pengguna jalan untuk mendukung mewujudkan Kota Sibolga sebagai kota tujuan wisata yang nyaman bagi pejalan kaki.
5. Melakukan pemasangan dan penataan lampu jalan disetiap lingkungan.
6. Melakukan perbaikan Infrastruktur pasar dan infrastruktur penunjang kegiatan perdagangan lainnya. Pembenhahan pelabuhan ASP Sibolga yang menunjang kegiatan kepulauan Nias. Perdagangan barang dan sarana transportasi ke daerah.

**MISI 4 Mewujudkan Pendidikan yang berkualitas, memberikan subsidi penuh terhadap kebutuhan belajar 9 tahun, dan memberikan beasiswa bagi siswa berprestasi untuk melanjutkan studi ke Perguruan tinggi, serta Meningkatkan kesejahteraan guru.**

Tujuan Mewujudkan Pendidikan Berkualitas

Sasaran Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat

Strategi :

1. Menyiapkan Anggaran untuk subsidi wajib belajar 9 tahun bagi keluarga sehingga dapat memenuhi kebutuhan mereka dalam pembiayaan sekolah anak mulai dari pakaian, sepatu, alat tulis dan beban dari kewajiban-kewajiban yang lainnya dan memberikan bantuan beasiswa bagi anak yang berprestasi sampai ke tingkat perguruan tinggi.
2. Meningkatkan kesejahteraan guru honor, tenaga kependidikan dan guru berbasis agama.
3. Menertibkan lokasi - lokasi permainan yang mengganggu aktivitas pelajar dengan mengatur jam operasionalnya dan memberikan sanksi bagi yang melanggar.
4. Melakukan razia secara terus menerus kepada anak-anak, remaja, pelajar yang bermain Game Warnet.
5. Menerbitkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang aktivitas publik yang berpotensi merusak generasi bangsa.



**MISI 5** Membuka lapangan kerja dan peluang berusaha dengan pemberdayaan masyarakat di bidang Ekonomi dan kewirausahaan serta menjalin kerjasama dengan pelaku ekonomi lainnya di Kota Sibolga maupun di luar Kota Sibolga.

Tujuan Mewujudkan Kesejahteraan Sosial

Sasaran Menurunkan Jumlah Penduduk Miskin

Strategi :

1. Memberikan pelatihan - pelatihan kewirausahaan dan keterampilan kepada masyarakat agar ikan sebagai bahan baku dapat diolah menjadi produk kuliner, baik sebagai makanan basah maupun makanan kering seperti kerupuk ikan dan sebagainya.
2. Memberikan bantuan modal dalam bentuk dana bergulir kepada masyarakat yang telah mampu membuka usaha.
3. Menggalakkan usaha di bidang jasa wisata alam dan kuliner yang berimplikasi kepada terbukanya peluang pasar bagi produk – produk.
4. Membuka akses pasar dengan mendirikan BUMD Sandang untuk memudahkan pedagang memenuhi kebutuhan dagangan serta menampung penjualan produk-produk UMKM dengan membangun pasar singgah dan menjalin kerjasama dengan pengusaha ritel waralaba seperti: Indomaret, Alfamidi, Transmart dan lain-lain.



Tabel 3.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

VISI : MEWUJUDKAN SIBOLGA SEHAT, PINTAR DAN MAKMUR				
MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1	2	3	4	5
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Good Governance Dengan Transparan Dan Akuntabel.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indeks Reformasi Birokrasi.</li> <li>2. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel.</li> <li>2. Meningkatnya kualitas SDM penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Daerah (AKIP).</li> <li>2. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.</li> <li>3. Indeks Kepuasan Masyarakat.</li> <li>4. Indeks Daya Saing Daerah.</li> </ol>
Mewujudkan Dan Meningkatkan Kesehatan Masyarakat Serta Pelayanan Sehingga Dapat Melahirkan Masyarakat Yang Cerdas, Menuju Masyarakat Yang Makmur.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Sehat.	Indeks Pembangunan Manusia.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indeks Kesehatan.</li> <li>2. Pola Pangan Harapan (PPH).</li> </ol>





VISI : MEWUJUDKAN SIBOLGA SEHAT, PINTAR DAN MAKMUR				
MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1	2	3	4	5
Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Yang Proporsional Berbasis Jumlah Penduduk Untuk Menata Pemukiman Warga Agar Terciptanya Lingkungan Yang Sehat Dan Infrastruktur Kota Yang Terang Dengan Memanfaatkan Tata Ruang Yang Berwawasan Kota Pintar (Smart City).	Terwujudnya Pembangunan Kawasan yang Berkelanjutan.	Indeks Resiko Bencana.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung performa wilayah.</li> <li>Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).</li> <li>RPPLH Kota Sibolga.</li> <li>Air Minum Layak dan Berkelanjutan.</li> <li>Rumah Tangga Bersanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).</li> <li>Pengurangan Luasan Kumuh.</li> </ol>
Mewujudkan Pendidikan Yang Berkualitas, Memberikan Subsidi Penuh Terhadap Kebutuhan Belajar 9 Tahun, Dan Memberikan	Terwujudnya Pendidikan Berkualitas.	Indeks Pembangunan Manusia.	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat.	1. Indeks Pendidikan.

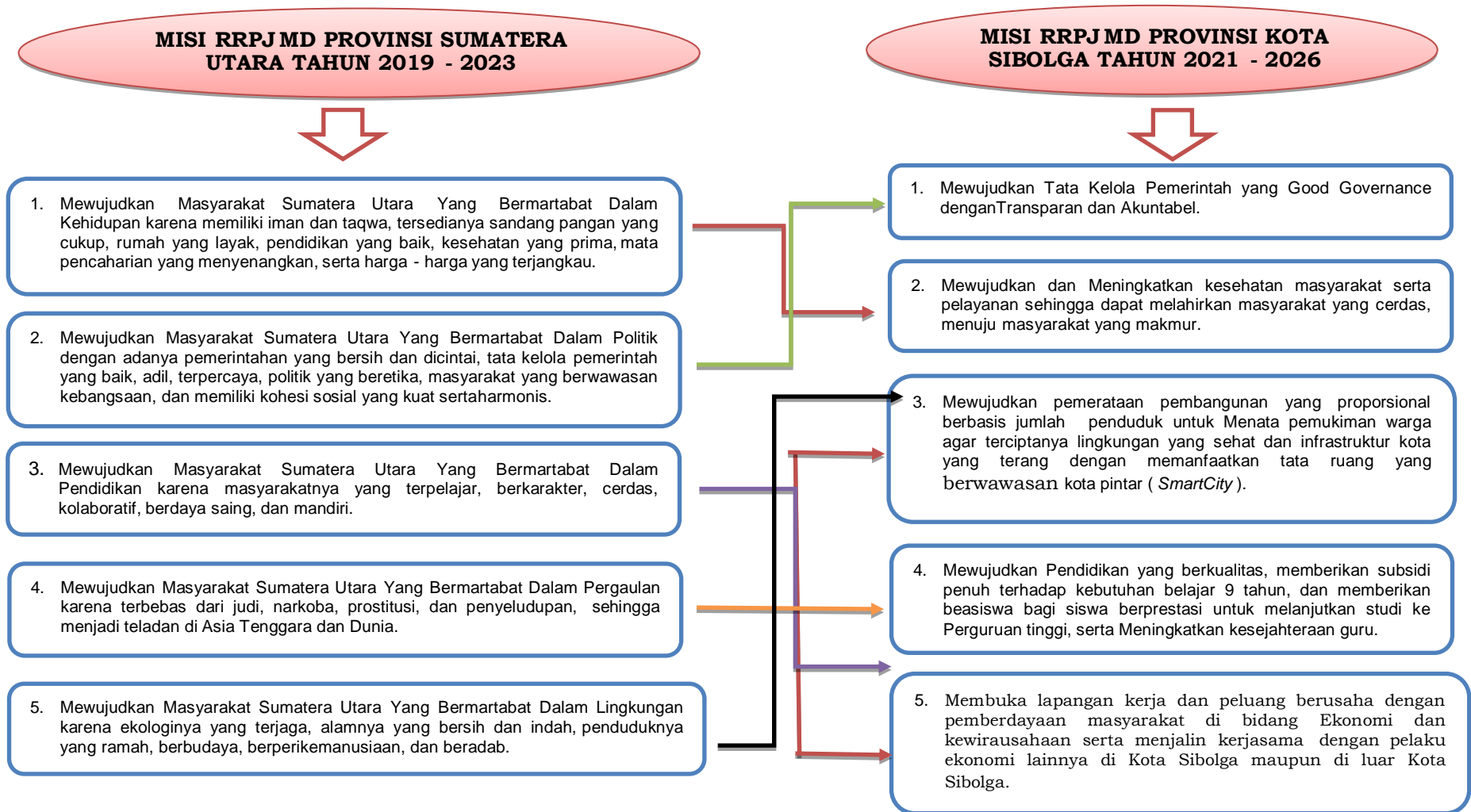


VISI : MEWUJUDKAN SIBOLGA SEHAT, PINTAR DAN MAKMUR				
MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1	2	3	4	5
Beasiswa Bagi Siswa Berprestasi Untuk Melanjutkan Studi Ke Perguruan Tinggi, Serta Meningkatkan Kesejahteraan Guru.				
Membuka Lapangan Kerja Dan Peluang Berusaha Dengan Pemberdayaan Masyarakat Dibidang Ekonomi Dan Kewirausahaan Serta Menjalani Kerjasama Dengan Pelaku Ekonomi Lainnya Di Kota Sibolga Maupun Di Luar Kota Sibolga.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terwujudnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi.</li> <li>2. Terwujudnya Kesejahteraan Sosial.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pertumbuhan Ekonomi.</li> <li>2. Gini Rasio.</li> <li>3. Angka Kemiskinan.</li> <li>4. Angka Pengangguran.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya pendapatan masyarakat.</li> <li>2. Menurunkan Jumlah Penduduk Miskin.</li> <li>3. Mempermudah pelayanan Perizinan dan Investasi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendapatan Perkapita Penduduk (Juta).</li> <li>2. Pendapatan Daerah.</li> <li>3. Indeks Pembangunan Gender.</li> <li>4. Indeks Kesetaraan Gender.</li> <li>5. Meningkatnya Jumlah Ekonomi Kreatif.</li> <li>6. Izin yang diterbitkan</li> </ol>

Sumber : Data diolah



Gambar 3.2 Keselarasan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 dengan RPJMD Kota Sibolga Tahun 2021-2026





### 2.3.2 KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Penyusunan Pelaporan Kinerja Pemerintah Kota Sibolga Tahun 2022 ini mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 terutama terkait dengan peraturan skala nilai peringkat Kinerja sebagai bahan penilaian dari masing-masing sasaran strategis.

Dalam penyusunan LKIP ini, evaluasi kinerja sasaran adalah merupakan hasil dari setiap nilai capaian kinerja sasaran kemudian diberikan pembobotan untuk memperoleh nilai capaian sasaran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang diukur dengan mempergunakan skala ukuran ordinal sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas kinerja Pemerintah, dengan penilaian sebagai berikut:

Tabel 3.2 Kriteria Penilaian Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Kinerja
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat tinggi
2	$76\% \leq 90$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat rendah

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

Evaluasi Kinerja Program Pemerintah Kota Sibolga Tahun 2022 yang dilakukan menunjukkan penilaian atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sibolga Tahun 2021 - 2026.

#### Pengukuran Indikator Kinerja

Pengukuran Indikator Kinerja dalam rangka mengetahui tingkat keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan. Rumus untuk menghitung capaian kinerja setiap indikator atas makna indikator ada dua jenis:



- Indikator bermakna positif, artinya: Jika semakin besar realisasi berarti semakin baik kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin buruk kinerjanya, maka digunakan rumus pendek:

$$\frac{\text{REALISASI}}{\text{TARGET}} \times 100 \%$$

- Indikator bermakna negatif, artinya: Jika semakin besar realisasi berarti semakin buruk kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin baik kinerjanya, gunakan rumus panjang.

$$\frac{\text{Realisai} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Nilai capaian kinerja masing-masing sasaran dianggap mempunyai bobot yang sama, sehingga digunakan rumus rata-rata. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, maka capaian kinerja dikategorikan dengan menggunakan skala ordinal, merujuk pada skala penilaian kinerja sebagai berikut:

- Nilai dibawah 55 : Kurang
- Nilai > 55 s/d 80 : Cukup
- Nilai > 80 s/d 95 : Baik
- Nilai > 95 s/d 100 : Sangat baik

### 2.3.3 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Kota Sibolga 2021-2026 yang di tetapkan pada tanggal 26 Oktober 2021 menetapkan Tahun 2021 sebagai tahun dasar pelaksanaan Pembangunan Jangka Menengah sebagai tolak ukur pelaksanaan Visi dan Misi Wali Kota. RPJMD tersebut memuat target kinerja Wali Kota Sibolga untuk 5 tahun kedepan. Target tersebut di uraikan dari misi pertama sampai dengan misi kelima.

#### A. Misi Satu **MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) DAN BERSIH (CLEAN GOVERNANCE).**

##### 1. Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi sendiri adalah skor pengukuran capaian reformasi birokrasi dengan sekitar 132 komponen, mulai dari manajemen perubahan di lingkungan organisasi, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan



publik, hingga nilai persepsi korupsi yang melibatkan survei eksternal. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Sibolga tidak berjalan dengan baik dengan berbagai kendala dan hambatan. Perbandingan antara target, realisasi dan capaian pada indikator sasaran utama strategis meningkatnya efektifitas dan efisiensi birokrasi mulai tahun-tahun 2020-2022, dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3 Target Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kota Sibolga  
Tahun 2020 – 2022

Tahun	Target	Realisasi		Capaian
2020	-	C	-	-
2021	C	C	-	Tercapai
2022	B	C	n/a	Tidak Tercapai

Sumber : Sekretariat Daerah Kota Sibolga

Dalam pencapaian target indikator kinerja ini terdapat hambatan/kendala sebagai berikut:

- Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan pemerintah Kota Sibolga dimulai tahun 2022.
- Terlambatnya fasilitasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kota Sibolga sehingga tidak ada sinkronisasi pihak-pihak yang seharusnya terlibat untuk pelaksanaan reformasi birokrasi.
- Pemerintah Kota Sibolga kurang fokus dengan pengembangan dan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan pencapaian target indikator Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Sibolga adalah program/kegiatan sebagai berikut:

- Menyusun Tim Reformasi Birokrasi Kota Sibolga tiap tahun dan Tim Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dan melibatkan semua pihak.
- Melakukan fasilitasi berupa pembinaan kepada pegawai yang menangani penilaian Reformasi Birokrasi pada 10 Perangkat daerah yang menjadi penilaian Reformasi Birokrasi.
- Memasukkan Reformasi Birokrasi menjadi salah satu indikator utama pada RPJMD Pemerintah Kota Sibolga.
- Penyusunan rencana kerja tahunan Tim Refomasi Birokrasi Kota Sibolga dan Perangkat



Daerah

Program yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas LKJIP Kota Sibolga adalah sebagai berikut:

- a. Program peningkatan pengembangan Kualitas Aparatur dengan melaksanakan Bimbingan Teknis yang dilaksanakan oleh bagian Organisasi Setdakot Sibolga dan difasilitasi oleh Pemerintah Kota Tebing Tinggi.
- b. Untuk pelaporan, sejak tahun 2020 telah dimulai dengan kerja sama Bappeda dan Inspektorat serta dengan bagian Hukum dan Organisasi dan kedepannya perlu dibuat dalam satu Program Kerjasama Lintas OPD.

## 2. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

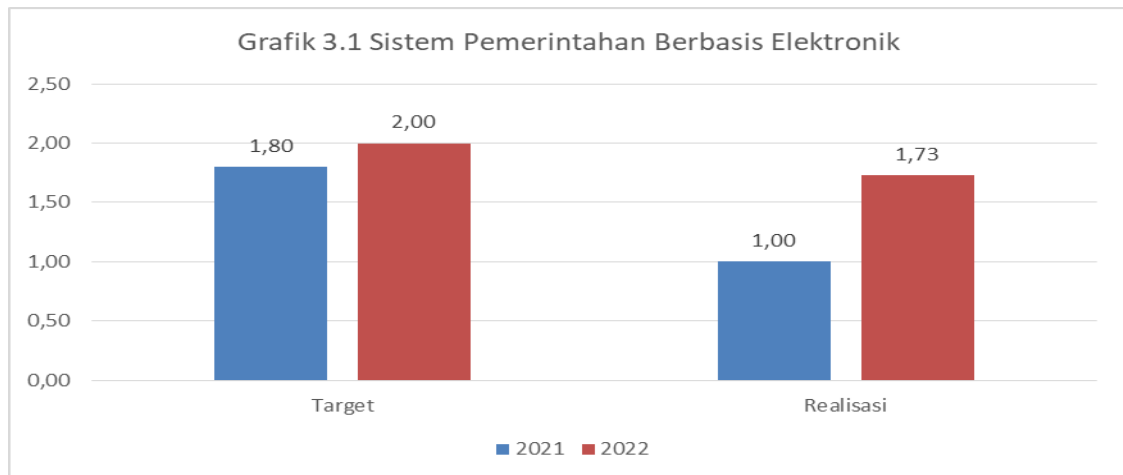
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau yang biasa disebut dengan e-government adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat, dan pihak-pihak lainnya.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan indikator kinerja utama yang menjadi salah satu target utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Perbandingan target dan realisasi indikator jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menerapkan Tata Kelola Pemerintah Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi mulai tahun 2021 sampai tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4 Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Sibolga Tahun 2021-2022

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2021	1,80	1	Tidak tercapai
2022	2,00	1,73	Tidak tercapai

Sumber : Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Sibolga



Pada tahun 2019 Kota Sibolga mendapatkan penilaian kurang (1.40) untuk pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Untuk tahun 2020 dikarenakan Covid-19 tidak dapat penilaian dan Tahun 2021 mendapatkan nilai 1 dan tahun 2022 mendapatkan nilai 1.73.

Perkembangan pelaksanaan SPBE di Kota Sibolga kurang berkembang dikarenakan kurangnya peran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sibolga dalam mesosialisasikan program Sistem Berbasis Elektronik. Belum ada peraturan yang memadai yang mengatur pelaksanaan pemerintahan berbasis elektronik dan belum ada program-program yang terarah dalam menjalankan Sistem Pemerintahan dimaksud.

Dalam mencapai target indikator tersebut, komitmen dari Pimpinan Daerah dan Pimpinan OPD dalam penerapan SPBE adalah faktor pendukung dalam penerapan Perangkat Daerah yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Namun dalam pelaksanaan masih terdapat masalah/kendala sebagai berikut:

1. Kurangnya peran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sibolga dalam mensosialisasikan dan memfasilitasi program Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
2. Belum maksimalnya koordinasi antara Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sibolga dalam membangun sistem dan perencanaan pelaksanaan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kota Sibolga.
3. Belum maksimalnya dukungan anggaran dan perhatian Pemerintah Kota Sibolga dalam aplikasi yang dapat mendukung dan menunjang pelaksanaan pelayanan publik.

Belum ada program yang nyata yang dilaksanakan terutama Dinas Komunikasi dan Informatika dalam upaya peningkatan pencapaian indikator tersebut.





### 3. Nilai Akuntabilitas Kinerja Daerah

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan suatu kesatuan yaitu perencanaan strategik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) mendorong Instansi fokus pada Pencapaian Sasaran. Dalam upaya Pencapaian Sasaran perlu sebuah Alat Ukur yang dinamakan Indikator Kinerja. Indikator kinerja berupa:

- Hasil (Outcome): Bagaimana Tingkat pencapaian Kinerja yang diharapkan Terwujud, berdasarkan Output (Keluaran) atas Kebijakan atau Program yang sudah dilaksanakan.
- Keluaran (Output): Bagaimana Produk yang Dihasilkan secara Langsung oleh adanya Kebijakan atau Program, berdasarkan Input (Masukan) yang digunakan.

Penilaian indikator pelaporan AKIP menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaan yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.

Pelaksanaan Penilaian AKIP dilingkungan Pemerintah didasarkan oleh indikator yang telah ditetapkan di RPJMD Kota Sibolga dan memuat target-target yang harus di capai perangkat daerah yang menjadi sebagai target capaian Pemerintah Kota Sibolga. Perbandingan target dan realisasi indikator jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan indikator AKIP mulai tahun 2017 sampai tahun 2022 adalah sebagai berikut:



Tabel 3.5 Nilai Akuntabilitas Kinerja Daerah Kota Sibolga  
Tahun 2017-2022

Tahun	Target	Realisasi		Capaian
2017	C	CC	50,01	100%
2018	CC	Tak Dinilai*	-	-
2019	B	C	49,6	Tidak Tercapai
2020	B	C	n/a	Tidak Tercapai
2021	B	CC	52,01	Tidak Tercapai
2022	B	CC	n/a	Tidak Tercapai

Sumber : Sekretariat Daerah Kota Sibolga

Pada tahun 2017 Kota Sibolga mendapatkan penilaian 50.01 untuk pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Daerah. Untuk tahun 2018 tidak mendapat penilaian dikarenakan tidak melaporkan laporan AKIP. Pada Tahun 2019 mendapatkan nilai 49.6 sedangkan pada tahun 2020 mendapatkan nilai C. Tahun 2021 mendapatkan nilai 52.01 dan Tahun 2022 mendapatkan nilai CC.

Penyampaian laporan AKIP Kota Sibolga dan Perangkat Daerah tiap tahun rutin dilaksanakan, termasuk penyampaian hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Tim Evaluator Laporan AKIP, perjanjian kinerja perangkat daerah dan hal-hal yang menjadi dokumen pelaporan.

Dalam mencapai target indikator tersebut, komitmen dari Pimpinan Daerah dan Pimpinan OPD dalam penyampaian laporan AKIP adalah faktor pendukung agar target. Namun dalam pelaksanaan masih terdapat masalah/kendala sebagai berikut:

1. Kurangnya komitmen dan dukungan pimpinan daerah dan pimpinan perangkat daerah dalam upaya pengembangan dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja.
2. Keterbatasan kemampuan pegawai mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan serta evaluasi AKIP yang mengakibatkan nilai AKIP Pemerintah Kota Sibolga selalu rendah.
3. Keterbatasan jumlah pegawai dan sering terjadi pergantian pegawai yang menangani pelaporan AKIP yang mengakibatkan sering keterlambatan pelaporan dan rendahnya kualitas laporan AKIP.



Berbagai upaya yang dilaksanakan oleh Bagian Organisasi dalam meningkatkan nilai dan kualitas laporan AKIP salah satunya dengan cara melaksanakan sosialisasi penyusunan laporan AKIP kepada seluruh pegawai yang menangani AKIP dan mengembangkan aplikasi mandiri E-SAKIP Pemerintah Kota Sibolga dengan alamat <https://esakip.sibolgakota.go.id/>.

#### 4. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Akutabilitas pengelolaan keuangan adalah “kewajiban pengelola keuangan daerah oleh Walikota untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan kegiatan dan hasil akhir dari setiap tahap APBD.

Untuk mengukur capaian indikator ini berupa capaian hasil penilaian laporan keuangan Pemerintah Kota Sibolga untuk Tahun 2022. Hasil penilaian laporan keuangan pemerintah Kota Sibolga tahun 2021 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sama dengan hasil penilaian Tahun 2020. Berikut data perbandingan laporan pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Sibolga mulai tahun 2017-2022.

Tabel 3.6 Laporan Pengelolaan Keuangan Kota Sibolga  
Tahun 2017-2022

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2017	WTP	TMP	25%
2018	WTP	WDP	75%
2019	WTP	WTP	100%
2020	WTP	WTP	100%
2021	WTP	WTP	100%
2022	WTP	n/a	-

Sumber : Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Sibolga

Untuk laporan pengelolaan keuangan pada tahun 2019, 2020 dan 2021 Kota Sibolga mendapatkan nilai Wajar Tanpa Pengecualian, tahun 2018 mendapatkan nilai wajar dengan pengecualian. Laporan pengelolaan keuangan ini merupakan kerja keras pelaporan keuangan dan asset.

Dalam mencapai target indikator terdapat permasalahan/kendala sebagai berikut:

1. Pendataan dan pengelolaan aset daerah dan perangkat daerah belum optimal karena tidak didukung dengan pelatihan dan pendidikan terhadap pemegang aset sehingga mengakibatkan buruknya administrasi di bidang aset;
2. Kemampuan dari pengurus aset pada masing-masing perangkat daerah yang rendah baik



secara kuantitas (perbandingan jumlah pengurus aset dengan jumlah aset yang dikelola) maupun kualitas (kemampuan pengelola aset secara administrasi);

3. Kurangnya koordinasi dalam pelaksanaan program dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Upaya yang telah dilakukan untuk pencapaian target pada indikator Nilai Indeks Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sibolga adalah sebagai berikut:

1. Pengoptimalan kualitas laporan pertanggungjawaban yang disusun Oleh Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah serta ketepatan waktu sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
2. Meningkatkan Koordinasi pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan semua perangkat daerah (OPD) dan pemangku kepentingan (*Stakeholder*).
3. Mengoptimalkan teknologi informasi dalam sistem informasi keuangan dan aset sehingga dapat menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Laporan Keuangan aset yang akurat dan transparan.

#### 5. Indeks/Survei Kepuasan Masyarakat

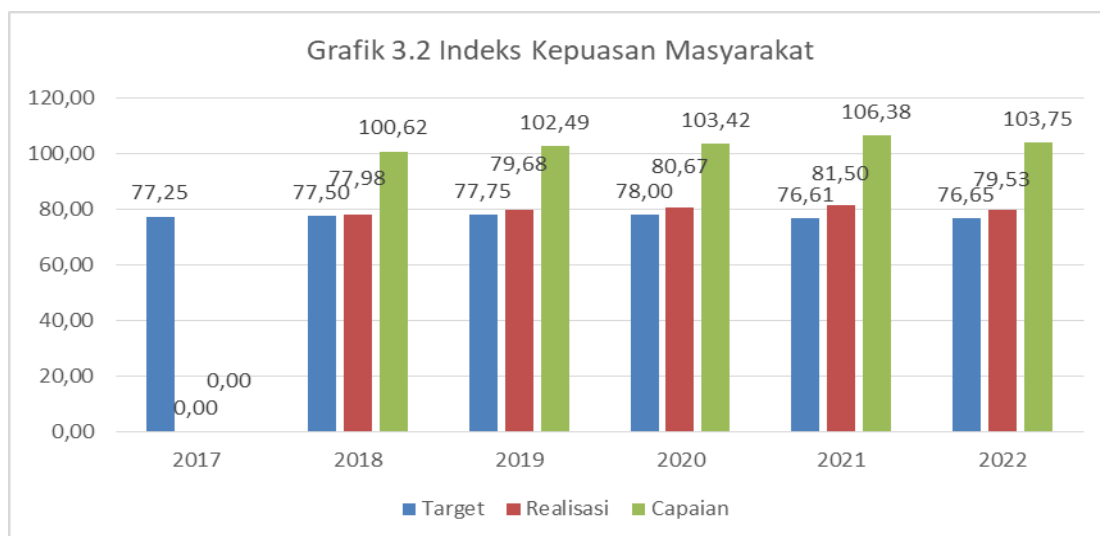
Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka.

Untuk mengukur indikator ini menggunakan nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kota Sibolga Tahun 2022 yang merupakan nilai rata-rata nilai Survei Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan sekali setahun. Hasil Survei SKM 2022 menunjukkan pelayanan dari 79,53. Berikut data perbandingan nilai SKM Kota Sibolga mulai tahun 2017-2022.

Tabel 3.7 Target, Realisasi dan Capaian IKM Kota Sibolga 2017-2022

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2017	77,25	Tidak Dilaksanakan	-
2018	77,50	77,98	100,62%
2019	77,75	79,68	102,49%
2020	78,00	80,67	103,42%
2021	76,61	81,50	106,38%
2022	76,65	79,53	103,75%

Sumber : SKM Kota Sibolga Tahun 2022 Bagian Organisasi Setdakot



Untuk laporan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun 2017 tidak mendapatkan penilaian karena tidak melaporkan. Ditahun 2018 mendapatkan nilai 77.98 dan di tahun 2019 mendapatkan nilai 79.68. Pada tahun berikutnya, di tahun 2020 memperoleh nilai 80,67 dan mengalami peningkatan penilaian di tahun 2021 dengan nilai 81.50. Tahun 2022 nilai IKM Kota Sibolga mengalami penurunan nilai dengan memperoleh nilai 79.53. Untuk Tahun 2021 terjadi perubahan nilai target pada RPJMD Kota Sibolga Tahun 2016 dan RPJMD Kota Sibolga Tahun 2021-2026.

Untuk sektor pelayanan publik hasil penilaian kepatuhan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Ombudsman adalah 51,15 (D/kualitas rendah). Hasil nilai kepatuhan ini berbanding terbalik dengan pelaksanaan pelayanan publik di Lingkungan Pemerintah Kota Sibolga yang dirasa sangat baik dan jarang mendapatkan keluhan dari masyarakat. Penilaian kepatuhan ini dilakukan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Puskesmas Sambas dan Puskesmas Pelabuhan Sambas.

## 6. Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/ kota yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Untuk mengukur indikator ini menggunakan 4 faktor penilaian dengan 12 pilar turunan penilaian yaitu lingkungan pendukung, Sumber Daya Manusia, Pasar dan Ekosistem Inovasi. Perbandingan target dan realisasi indikator jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan indikator Indeks Daya Saing Daerah Kota Sibolga mulai tahun 2021 sampai tahun 2022 adalah sebagai berikut:



Tabel 3.8 Target, Realisasi dan Capaian IDSD Kota Sibolga 2021-2022

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2021	2,6592	2,28973	86,10%
2022	2,6625	-	-

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sibolga

Pada tahun 2021 dari target 2,6592 Kota Sibolga mendapatkan nilai 2,28975. Untuk tahun 2022 Pemerintah Kota Sibolga tidak mendapatkan nilai dikarenakan salah satu faktor penilaian yaitu pilar kelembagaan tidak ada atau Pemerintah Kota Sibolga tidak memberikan data. Dari 12 pilar penilaian yang mendapat nilai yaitu infrastruktur : 2,02, adopsi TIK : 3,74, stabilitas ekonomi makro 2,01, kesehatan : 3,77, keterampilan : 3,66, pasar produk : 4,20, pasar tenaga kerja : 3,23, sistem keuangan : 3,12, ukuran pasar : 0,24, dinamika bisnis : 5, kapabilitas inovasi : 1,04.

- B. Misi Kedua MEWUJUDKAN DAN MENINGKATKAN KESEHATAN MASYARAKAT SERTA PELAYANAN SEHINGGA DAPAT MELAHIRKAN MASYARAKAT YANG CERDAS MENUJU MASYARAKAT YANG MAKMUR.**

## 7. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Melalui pendekatan tiga dimensi dasar yang mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan layak. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir.

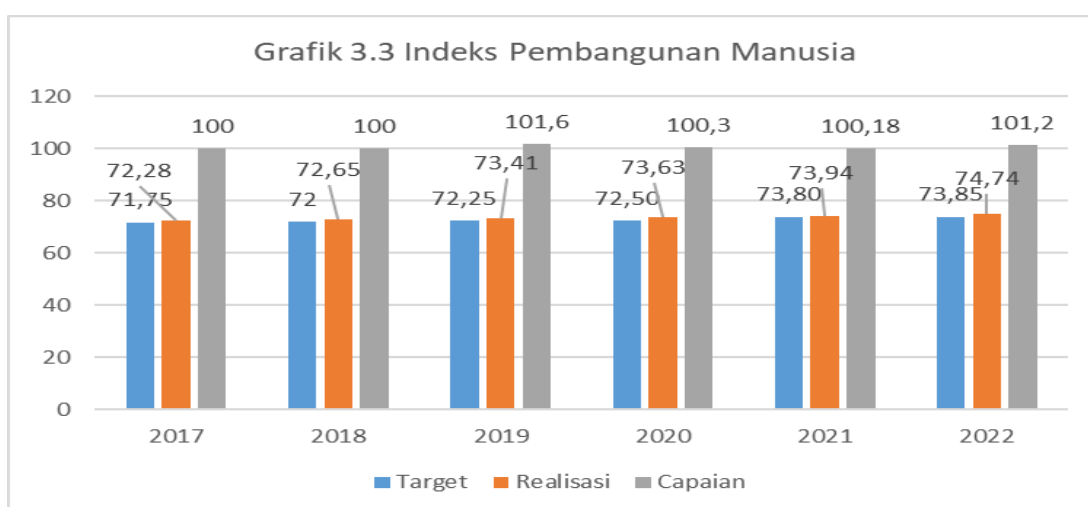
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Sibolga dari tahun 2017 ke tahun 2022 menunjukkan angka yang semakin baik. Pada tahun 2021 IPM Kota Sibolga tercatat sebesar 73,94 meningkat menjadi 73,94 pada tahun 2022. IPM untuk tahun 2017 - 2022. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 3.9 Target dan Realisasi IPM Kota Sibolga tahun 2017-2022

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2017	71,75	72,28	100%
2018	72	72,65	100%
2019	72,25	73,41	101,6%
2020	72,50	73,63	100,30%
2021	73,80	73,94	100,18%
2022	73,85	74,74	101,2%

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Sibolga



Dalam mencapai target indikator terdapat masalah / kendala sebagai berikut:

1. Pendapatan perkapita yang masih rendah.
2. Indeks kesehatan yang masih rendah.

Upaya yang telah dilakukan untuk pencapaian target pada indikator nilai IPM Kota Sibolga adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan daya beli masyarakat.
2. Memberikan keringanan biaya pendidikan dan kesehatan kepada masyarakat yang kurang mampu.

Untuk mencapai indikator sasaran strategis ini dilakukan dengan program:

1. Program pengembangan industri kecil dan menengah.
2. Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun.
3. Program upaya kesehatan masyarakat.



### 8. Angka Harapan Hidup

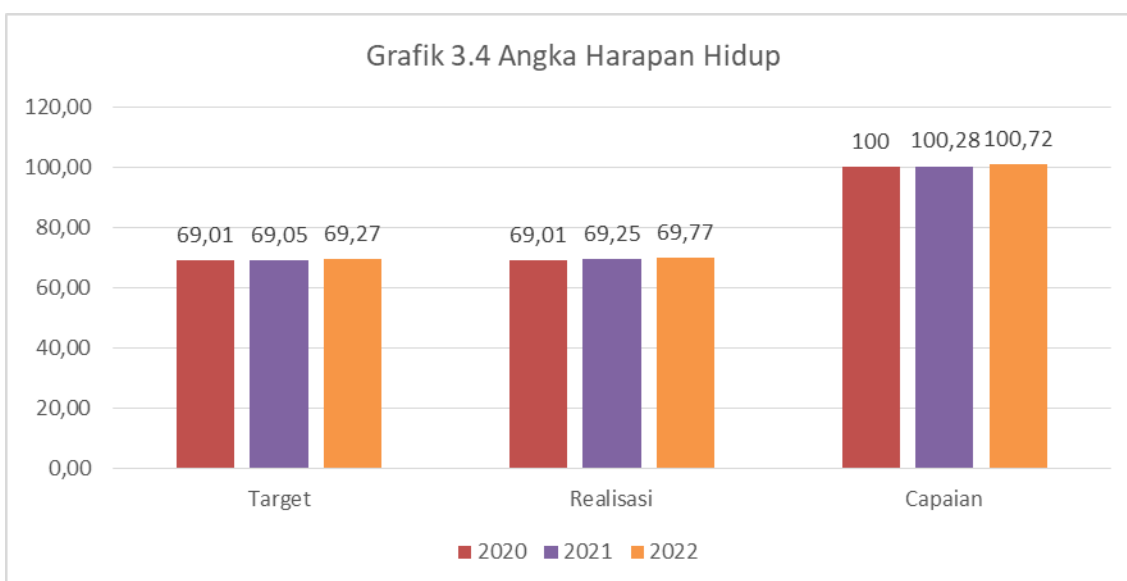
Angka Harapan Hidup (AHH) adalah perkiraan rata-rata tambahan umur seseorang yang diharapkan dapat terus hidup. Ukuran yang umum digunakan adalah angka harapan hidup saat lahir yang mencerminkan kondisi kesehatan pada saat itu. Sehingga pada umumnya ketika membicarakan AHH, yang dimaksud adalah rata-rata jumlah tahun yang akan dijalani oleh seseorang sejak orang tersebut lahir.

Angka harapan hidup merupakan salah satu indikator utama dalam menilai kinerja kesehatan Pemerintah Kota Sibolga. Pada RPJMD Kota Sibolga indikator tersebut dipergunakan sebagai alat pencapaian misi Pemerintah Kota Sibolga. Kota Sibolga menetapkan target angka harapan hidup untuk tahun 2022 dengan angka 69,27 tahun yang berarti usia rata – rata penduduk Kota Sibolga adalah 69,27 Tahun. Berikut data perbandingan angka harapan hidup Pemerintah Kota Sibolga mulai tahun 2020-2022.

Tabel 3.10 Target dan Realisasi Angka Harapan Hidup Kota Sibolga Tahun 2020-2022

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	69,01	69,01	100%
2021	69,05	69,25	100,28%
2022	69,27	69,77	100,72%

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Sibolga







Terdapat peningkatan capaian angka harapan hidup mulai dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Pada tahun 2020 angka harapan hidup Kota Sibolga pada angka 69,01 dengan capaian 100%, tahun 2021 pada angka 69,25 dengan capaian 100,28% dan pada tahun 2022 pada angka 69,77 dengan capaian 100,72%.

Angka harapan hidup dapat dipengaruhi oleh keadaan lingkungan, ketersediaan pangan, pendidikan, kebijakan pemerintah maupun perekonomian masyarakat dan sebagainya. Berbagai permasalahan.

### 9. Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya dan bukan karena sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup. Perbandingan antara target dan realisasi pada indikator kinerja utama mulai tahun 2017-2022, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.11 Target, Realisasi dan Capaian Angka Kematian Ibu  
Tahun 2017-2022

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2017	<115	112,00	100%
2018	<115	0	100%
2019	<115	53,45	100%
2020	53,7	54,00	100%
2021	217	59,63	100%
2022	205	n/a	n/a

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Sibolga

Pada tahun 2022 tidak ada ditemukannya kasus kematian Ibu, maka dari itu perlu diadakannya pengkajian audit maternal prinal (AMP) 4 kali dalam setahun (1 kali/TW).

### 10. Angka Kematian Bayi

Berdasarkan data Bank Dunia, angka kematian bayi neonatal (usia 0-28 hari) di Indonesia sebanyak 11,7 jiwa/1.000 kelahiran hidup pada 2020. Artinya, setiap kelahiran 1.000 bayi, ada 11 hingga 12 bayi yang meninggal di usia 0-28 hari. Perbandingan antara target dan realisasi pada indikator kinerja utama angka kematian bayi mulai tahun 2017-2022, dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 3.12 Target, Realisasi dan Capaian Angka Kematian Bayi  
Tahun 2017-2022

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2017	<5	4,2	100%
2018	<5	3,7	100%
2019	<5	2,7	100%
2020	<5	3,8	100%
2021	19	4,77	100%
2022	18	n/a	n/a

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Sibolga

Masalah pada angka kematian bayi, adanya ditemukan kematian bayi sebanyak 10 bayi diakibatkan karena kebanyakan Asfiksia, KJKD dan Penyakit Jantung. Rata-rata bayi yang meninggal ini di tolong pada saat persalinan secara SC.

Adapun solusi atas masalah tersebut dengan cara petugas kesehatan (Dokter/Bidan Koordinator/Bidan Kelurahan) agar lebih optimal lagi dalam melakukan pelayanan bayi baru lahir dan para dokter SpOG dan SpA kiranya lebih cepat mengambil tindakan apabila si ibu sudah dilihat keadaannya tidak memungkinkan untuk melahirkan secara normal. Untuk meningkatkan kesadaran ibu hamil dapat melakukan pemeriksaan kandungan (ANC Terpadu) 6 kali selama kehamilan di Fasyankes.

#### 11. Angka Kematian Balita

Angka Kematian Balita adalah Jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun selama satu tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu (termasuk kematian bayi). Perbandingan antara target dan realisasi pada indikator kinerja utama angka kematian balita mulai tahun 2021-2022, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.13 Target, Realisasi dan Capaian Angka Kematian Balita  
Tahun 2021-2022

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2021	30	0	Tercapai
2022	29	1	Tercapai

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Sibolga



Pada tahun 2022, terdapat satu kematian balita dengan diagnosa Gagal Jantung dikarenakan kurangnya kesadaran Ibu untuk memeriksa bayinya ke fanyankes yang terdekat.

Solusi pada angka kematian balita yang terjadi adalah meningkatkan kerjasama antara Lintas Sektor dan Lintas Program dalam penanganan kematian balita.

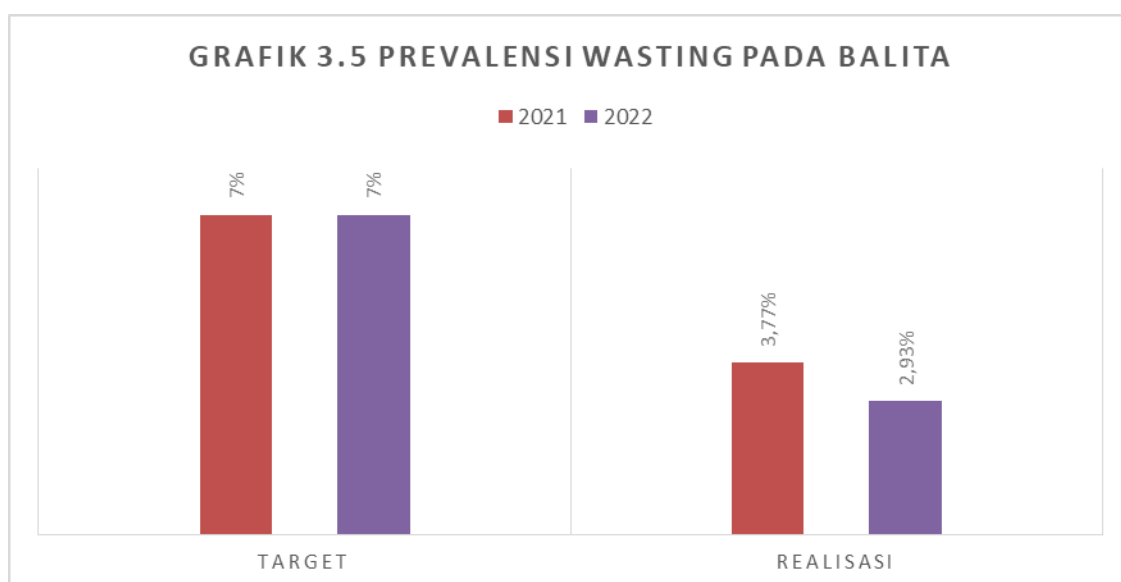
## 12. Prevalensi Wasting Pada Balita

Prevalensi adalah mengacu pada jumlah total kasus penyakit dalam periode waktu tertentu. Prevalensi dalam istilah medis mengacu pada jumlah kasus penyakit dalam suatu populasi selama periode waktu tertentu. Hal ini digunakan dalam referensi seberapa luas penyakit telah menjadi dan rasio antara mereka yang sudah terinfeksi dan mereka yang berisiko. Untuk mengukur indikator ini mengacu pada jumlah total kasus penyakit pada balita pada tahun 2022. Perbandingan antara target dan realisasi pada indikator kinerja utama angka prevalensi wasting pada balita mulai tahun 2021-2022, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.14 Target, Realisasi dan Capaian Angka Prevalensi Wasting Pada Balita Tahun 2021-2022

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2021	7%	3,77%	Tercapai
2022	7%	2,93%	Tercapai

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Sibolga





Adapun kendala yang terjadi tahun 2022 pada angka prevalensi wasting pada balita adalah kurangnya pelayanan pada balita wasting khususnya pengadaan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk Balita Wasting di Kota Sibolga.

Adanya solusi prevalensi wasting pada balita ialah merancang dan menganggarkan pengadaan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk balita wasting di Kota Sibolga.

### 13. Prevalensi Angka Stunting

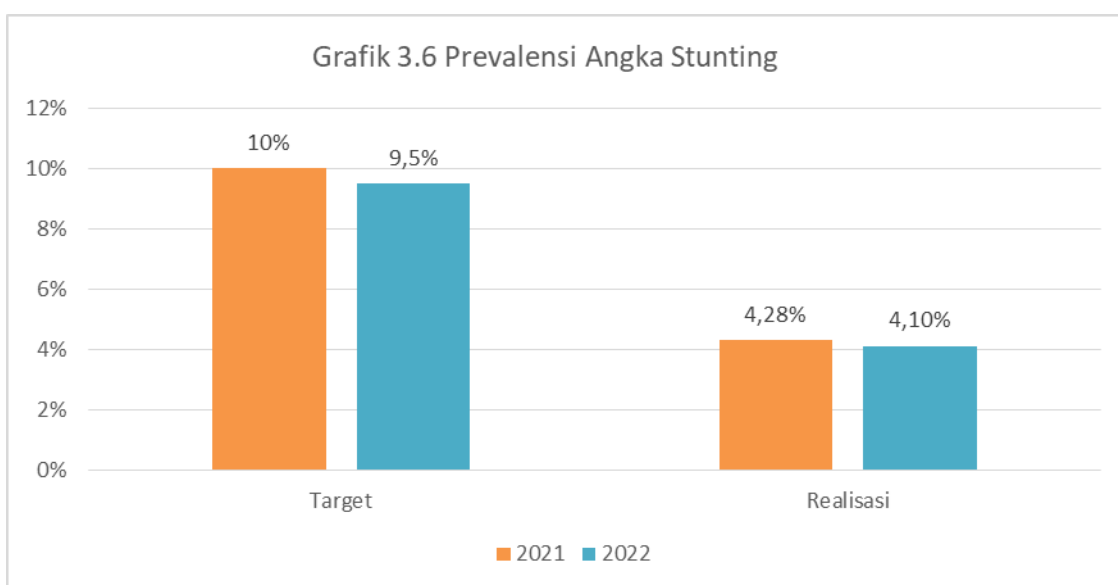
Stunting adalah kondisi ketika tinggi badan anak lebih pendek daripada standar usianya akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Kondisi ini bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada masa pertumbuhannya. Untuk mengukur indikator prevalensi angka stunting ini menggunakan jumlah penurunan angka stunting di Kota Sibolga pada tahun 2022.

Perbandingan antara target dan realisasi pada indikator kinerja utama angka prevalensi angka stunting mulai tahun 2021-2022, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.15 Target, Realisasi dan Capaian Prevalensi Angka Stunting Tahun 2021-2022

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2021	10%	4,28%	Tercapai
2022	9,5%	4,10%	Tercapai

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Sibolga





Ditahun 2022, masalah pada prevalensi angka stunting adalah kurangnya pelayanan/program dengan sasaran yang tertuju langsung pada Balita Stunting di Kota Sibolga.

Solusi dalam prevalensi angka stunting adalah merancang dan melaksanakan kegiatan dengan sasaran langsung yang tertuju pada balita stunting di Kota Sibolga.

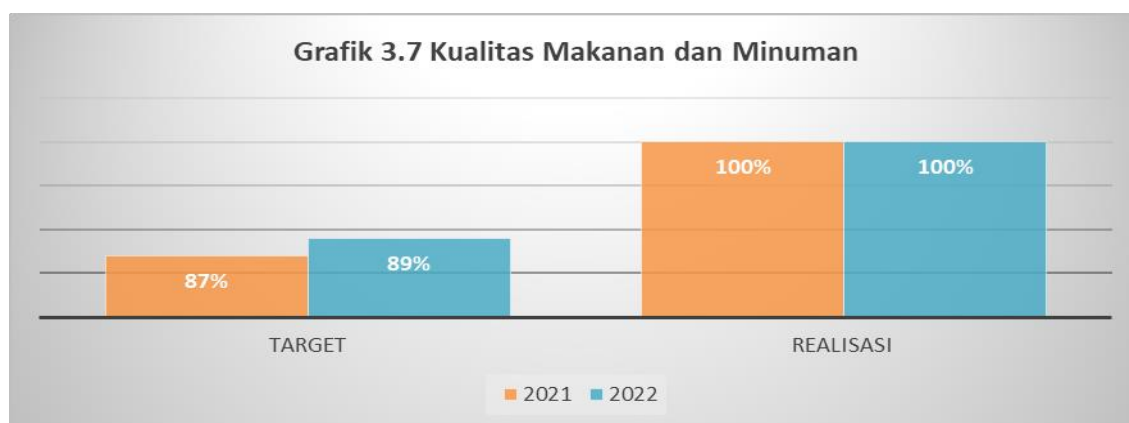
#### 14. Kualitas Makanan dan Minuman

Menurut Potter dan Hotchkiss (2012), kualitas makanan atau food quality adalah karakteristik kualitas dari makanan yang dapat diterima oleh konsumen, seperti ukuran, Page 7 7 bentuk, warna, konsistensi, tekstur, dan rasa. Untuk mengukur indikator ini menggunakan kualitas makanan dan minuman yang disajikan dan dikonsumsi oleh masyarakat Kota Sibolga berdasarkan hasil penelitian dan penilaian oleh Dinas Kesehatan pada tahun 2022. Perbandingan antara target dan realisasi pada indikator kinerja utama kualitas makanan dan minuman mulai tahun 2021-2022, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.16 Target, Realisasi dan Capaian Kualitas Makanan dan Minuman Tahun 2021-2022

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2021	87%	100%	Tercapai
2022	89%	100%	Tercapai

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Sibolga



Kendala dan Permasalahan pada kualitas makanan dan minuman yaitu:

- a. Kurangnya pemahaman dan pengetahuan penjual makanan dan minuman di pasaran tentang cara pengolahan pangan yang baik dan penggunaan Bahan Tambahan Pangan sesuai Permenkes Nomor 033 Tahun 2012.



- b. Kurangnya penerapan penjual makanan dan minuman terkait hygienes dan sanitasi.

Solusi untuk menyelesaikan Permasalahan pada kualitas makanan dan minuman:

- a. Melakukan sosialisasi kepada para penjual makanan dan minuman di Kota Sibolga terkait cara pengolahan pangan yang baik, penggunaan Bahan Tambah Pangan sesuai Permenkes Nomor 033 Tahun 2012, serta hygienes dan sanitasi.
- b. Melakukan monitoring terhadap penjual makanan dan minuman di pasaran.
- c. Melakukan pengujian sampel makanan dan minuman di Laboratorium yang Terakreditasi (BBPOM di Medan dan Labkesda di Medan).
- d. Melaksanakan rapat dan koordinasi dengan lintas sektor terkait pengawasan makanan dan minuman yang memenuhi syarat kesehatan.

#### 15. Penanganan Penyakit Tidak Menular

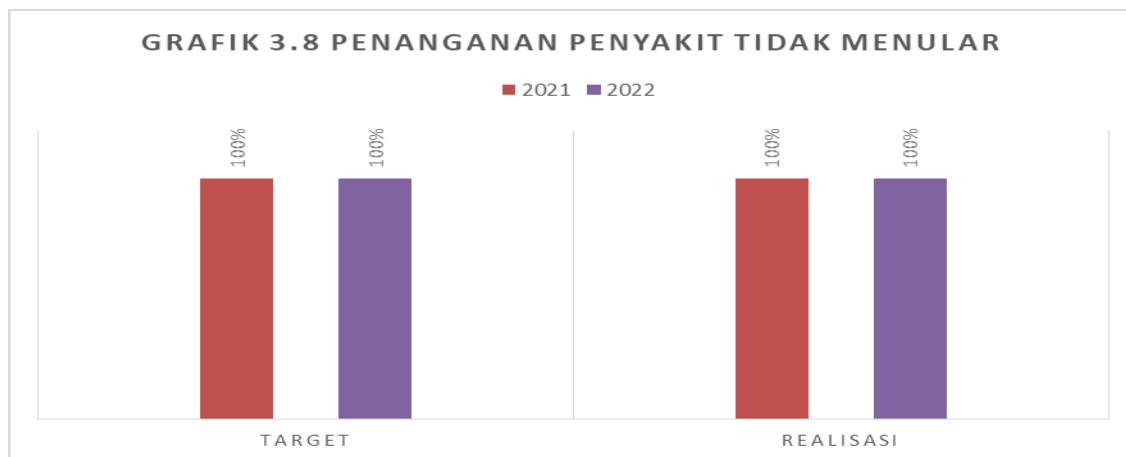
Penyakit Tidak Menular (PTM) adalah penyakit yang tidak menular dan bukan disebabkan oleh penularan vektor, virus atau bakteri, namun lebih banyak disebabkan oleh perilaku dan gaya hidup.

WHO (World Health Organozation) menyebutnya "Non Communicable Disease (NCD) is a disease that is not transmissible directly from one person to another"; adalah penyakit yang tidak menular langsung dari satu orang ke orang lain. Dominasi masalah kesehatan di masyarakat saat ini mulai bergeser dari penyakit menular menjadi ke arah penyakit tidak menular. Penyebab kematian utama penduduk semua golongan umur pada saat ini disebabkan oleh PTM secara berurutan yaitu stroke, hipertensi, diabetes mellitus, tumor ganas/kanker, penyakit jantung dan pernafasan kronik. Adapun perbandingan antara target dan realisasi pada indikator kinerja utama penanganan penyakit tidak menular mulai tahun 2021-2022, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.17 Target, Realisasi dan Capaian Penanganan Penyakit Tidak Menular Tahun 2021-2022

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2021	100%	100%	100%
2022	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Sibolga



Salah satu masalah yang dihadapi dalam pembangunan kesehatan saat ini adalah terjadinya pergeseran pola penyakit dari penyakit menular ke penyakit tidak menular. Tingginya prevalensi penyakit tidak menular membawa dampak terhadap menurunnya produktivitas dan gangguan pada pemenuhan aktivitas sehari-hari. Dalam Penanganan Penyakit Tidak Menular di Kota Sibolga khususnya dalam pelayanan deteksi dini dalam pencegahan penyakit tidak menular di Kota Sibolga sudah dilakukan kegiatan skrining deteksi Dini Penyakit Tidak menular yang dilakukan Dinas Kesehatan dan Puskesmas untuk menurunkan angka penyakit tidak menular. Tujuan dari skrining Penyakit Tidak Menular ini adalah untuk mencegah meningkatnya kasus penyakit tidak menular dan terdeteksinya secara dini Penyakit Tidak Menular. Kegiatan Sosialisasi Bahaya Penyakit Tidak Menular kepada anak sekolah SMA dan melaksanakan pelatihan kader Posbindu untuk kegiatan posbindu di sekolah.

Tidak ada terdapat masalah dan kendala dalam penanganan kegiatan penyakit tidak menular. Masyarakat yang sudah sadar akan kesehatan sehingga kegiatan skrining deteksi dini penyakit tidak menular, masyarakat datang untuk memeriksakan kesehatannya.

**16. Ketersediaan Alat Kesehatan Sesuai Standar**

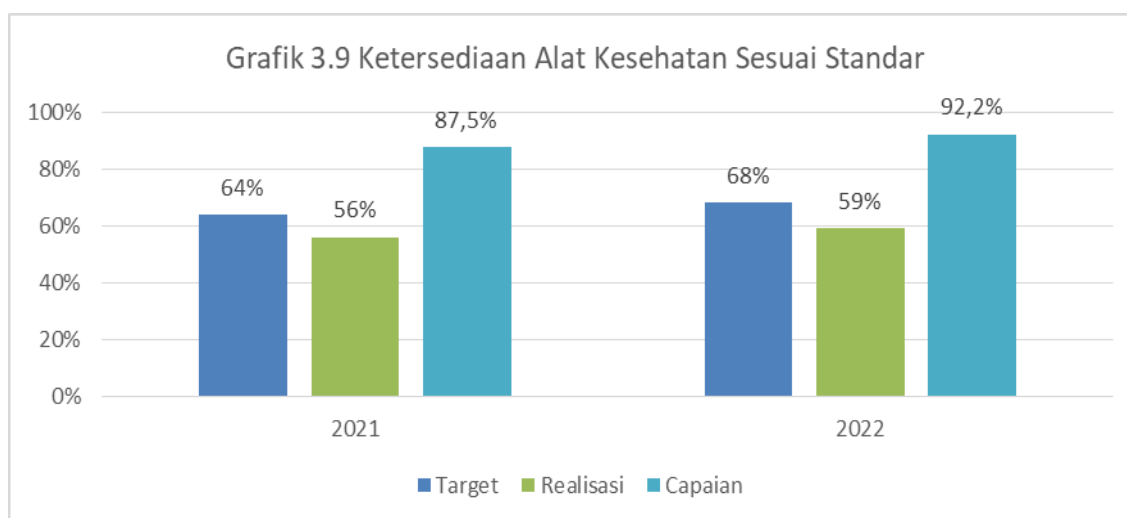
Untuk mencapai target indikator ini menggunakan jumlah alat kesehatan yang dipergunakan di Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit berdasarkan standarisasi yang telah ditetapkan dan berdasarkan jumlah alat yang tersedia dari seluruh peralatan kesehatan yang dipakai. Perbandingan antara target dan realisasi pada indikator kinerja ketersediaan alat kesehatan sesuai standar mulai tahun 2021-2022, dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 3.18 Target, Realisasi dan Capaian Ketersediaan Alat Kesehatan Sesuai Standar Tahun 2021-2022

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2021	64%	56%	87,5%
2022	68%	59%	92,2%

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Sibolga



Dalam mencapai target ini di temukan kendala/permasalahan dalam mencapai target indikator diantaranya sebagai berikut:

- Kurangnya pengetahuan dan pemahaman petugas kesehatan dalam menggunakan Alat Kesehatan dengan baik dan benar di fasilitas pelayanan kesehatan.
- Keterbatasan dana dalam pemeliharaan dan pengadaan alat kesehatan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan.

Untuk mengatasi kendala/permasalahan diatas dilaksanakan berbagai solusi diantaranya sebagai berikut:

- Melakukan pelatihan kepada petugas kesehatan yang menggunakan alat kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan.
- Melakukan pengajuan Dana Alokasi Khusus dalam pemeliharaan dan pengadaan alat kesehatan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan.





### 17. Tenaga Kesehatan Persatuan Penduduk

Tenaga kesehatan memiliki peranan penting terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat. Tenaga kesehatan juga berperan dalam meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat sehingga terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif (UU No. 36, 2014).

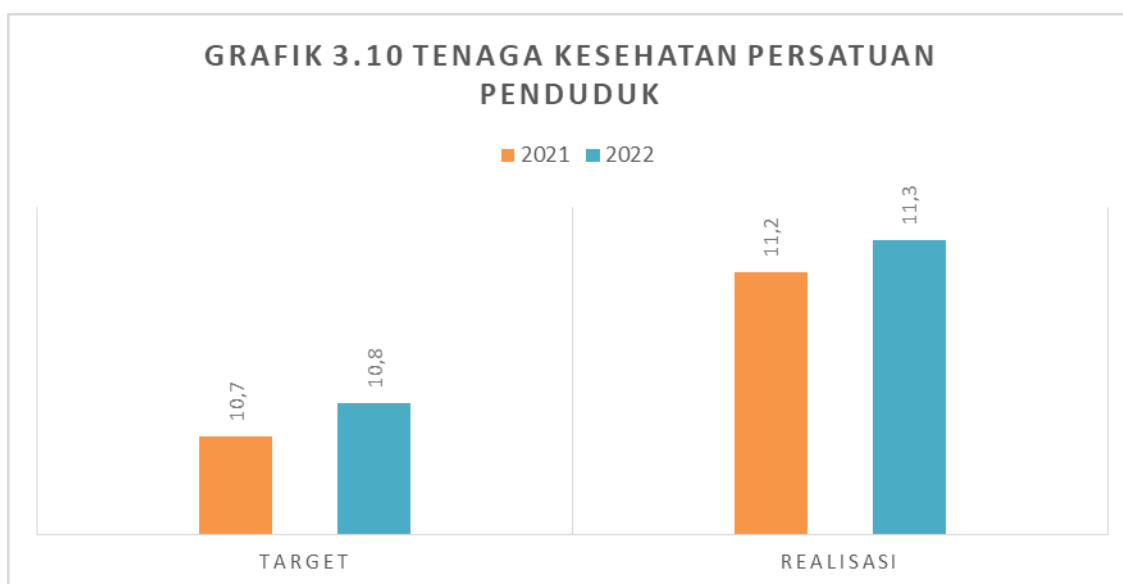
Rasio tenaga kesehatan terhadap populasi adalah salah satu perhitungan yang paling umum digunakan dalam penilaian dan perencanaan layanan kesehatan karena memungkinkan perbandingan antar wilayah dan subregional dengan ukuran populasi yang berbeda dan mudah dalam perhitungan, tetapi masih menawarkan ketidaksetaraan relatif yang cukup baik (Anand and WHO, 2010). Rasio Tenaga Kesehatan per jumlah penduduk menunjukkan seberapa besar ketersediaan tenaga kesehatan dan cakupan pelayanan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada penduduk.

Perbandingan antara target dan realisasi pada indikator kinerja utama angka tenaga kesehatan persatuan penduduk mulai tahun 2021-2022, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.19 Target, Realisasi dan Capaian Tenaga Kesehatan Persatuan Penduduk Tahun 2021-2022

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2021	10,7	11,2%	104,7%
2022	10,8	11,3%	104,6%

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Sibolga





Tenaga Kesehatan persatuan penduduk sudah memenuhi target, faktor tercapainya indikator tenaga kesehatan persatuan penduduk terealisasinya program-program pemenuhan sumber daya manusia kesehatan di tingkat fasilitas kesehatan baik melalui program pemerintah pusat maupun daerah. Contohnya program pendayagunaan dokter spesialis untuk memenuhi kebutuhan dokter spesialis di Rumah Sakit, program internship dokter gigi, pemenuhan tenaga kesehatan oleh pemerintah daerah melalui tenaga Kontrak Daerah serta pemenuhan melalui PPPK tenaga kesehatan.

#### 18. Puskesmas Menjadi BLUD

Penerapan Puskesmas Menjadi BLUD memiliki agenda untuk menjadikan PUSKESMAS, terutama yang memiliki fasilitas rawat inap untuk menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Tujuan utama dari menjadikan PUSKESMAS sebagai BLUD adalah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan pada masyarakat, berupa penyediaan pelayanan kesehatan yang didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas tanpa mengutamakan mencari keuntungan.

Target indikator Puskesmas menjadi BLUD untuk 2022 adalah 0 artinya pada tahun 2022 pengalihan Puskesmas menjadi sistem BLUD masih belum diterapkan. Belum ada upaya yang jelas dan langkah-langkah yang diambil untuk peralihan kelembagaannya.

Tabel 3.20 Target, Realisasi dan Capaian Puskesmas Menjadi BLUD  
Tahun 2021-2022

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2021	0	0	-
2022	0	0	-

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Sibolga

Terdapat 5 Puskesmas yang ada di Lingkungan Pemerintah Kota Sibolga yaitu Puskesmas Pintu Angin, Puskesmas Sambas, Puskesmas Pelabuhan Sambas, Puskesmas Parombunan dan Puskesmas Aek Habil. Dari Dinas Kesehatan disebutkan bahwa belum ada pengajuan yang resmi dalam peralihan Puskesmas menjadi BLUD.

Kendala dan Permasalahan yang terjadi pada Puskesmas menjadi BLUD yaitu:

- a. Belum adanya sosialisasi tentang BLUD Puskesmas.
- b. Masih kurangnya pemahaman mengenai pelaksanaan BLUD Puskesmas.
- c. Belum adanya pelatihan/ workshop mengenai BLUD Puskesmas.
- d. Belum adanya tenaga teknis dibidang akuntan, teknis komputer di masing-masing puskesmas.



Dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul pada Puskesmas menjadi BLUD maka ditemukannya solusi untuk menyelesaikan permasalahan, diantaranya sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pemahaman BLUD puskesmas kepada SDM di puskesmas mengikuti workshop pendidikan dan latihan terkait BLUD.
- b. Melaksanakan koordinasi dan monitoring terkait dengan BLUD Puskesmas, dimana diharapkan sangat bermanfaat untuk meningkatkan pelayanan di puskesmas dan meningkatkan SDM di puskesmas.

Adapun progress yang telah dicapai dalam pencapaian Puskesmas menjadi BLUD sebagai berikut:

- a. Di tahun 2022 sudah terlaksananya persiapan pelaksanaan BLUD Puskesmas melalui sosialisasi sebagai tahap awal pelaksanaan BLUD serta telah terlaksananya kaji banding ke Puskesmas Deli Serdang yang merupakan Puskesmas BLUD.
- b. Di tahun 2023 ini akan dilaksanakan BLUD Puskesmas di 5 Puskesmas se-kota sibolga agar pelayanan puskesmas akan lebih baik untuk ke depannya.

#### 19. Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS)

Kelurahan adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem perundangan nasional dan berada di daerah kabupaten/kota. Stop BABS adalah kondisi ketika setiap individu dalam suatu komunitas tidak BABS. Jamban sehat adalah fasilitas pembuangan tinja yang efektif untuk memutus mata rantai penularan penyakit (Kementerian Kesehatan RI, 2009).

Dalam menilai indikator ini adalah jumlah kelurahan dimana setiap rumah telah dilengkapi fasilitas kamar mandi/septic tank dengan pembuangan limbah yang layak. Perilaku buang air besar sembarangan diikuti dengan pemanfaatan sanitasi yang saniter berupa jamban sehat.

Tabel 3.21 Target, Realisasi dan Capaian Kelurahan Stop BABS  
Tahun 2017-2022

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2021	5,9%	0	Tidak tercapai
2022	17,6%	0	Tidak Tercapai

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Sibolga



Permasalahan/kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pencapaian target Stop BABS adalah sebagai berikut :

- a. Lahan yang sempit dan rumah penduduk yang rapat (Kondisi Geografis Kota Sibolga).
- b. Masih banyak rumah penduduk yang berada diatas laut dan pegunungan.
- c. Adanya kemudahan untuk membuang tinja / kotoran ke sungai, parit dan laut.
- d. Rumah tua dan lama yang tidak memperhitungkan pembuatan septik tank.
- e. Banyaknya rumah di Kota Sibolga dengan status kepemilikan sebagai rumah kontrakan.
- f. Lorong dan gang sempit yang tidak memungkinkan mobil penyedot masuk.
- g. Septik tank komunal yang sudah ada tidak berfungsi dan tidak terawat.
- h. Belum adanya aturan yang jelas terkait kewajiban bangunan rumah baru harus menyiapkan septik tank.
- i. Musrembang kelurahan tidak mengarahkan penggunaan anggaran untuk STOP BABS.

Adapun solusi dalam mengatasi masalah / kendala tersebut sebagai berikut:

- a. Adanya gerakan bersama dari pemerintah, OPD terkait, Lurah dan Kepling untuk membuat program STOP BABS ini baik dalam bentuk peraturan, himbauan ataupun kegiatan nyata pembuatan septik tank baik berupa dana pribadi, spontanitas dari pihak ketiga, dan APBD sehingga pengerjaannya dapat dilaksanakan bersama-sama untuk menyelesaikan satu hamparan pemukiman.
- b. Penguatan kembali pemicuan STOP BABS dan tinjauan lapangan sehingga masyarakat tergerak dan mau bergerak.
- c. Anggaran pembuatan septik tank yang ada di fokuskan di satu wilayah atau hamparan sehingga pemetaan wilayah yang sudah STOP BABS dapat tergambar dengan baik.
- d. Seluruh kantor instansi pemerintah, BUMD, BUMN, dan perkantoran lainnya membangun septik tank kedap sebagai pilot projek.
- e. Untuk rumah warga di atas laut perlu dibuatkan instalasi perpipaan dari rumah ke rumah yang di tamping pantai. Berupa septik tank komunal di ujung perpipaan dibuatkan lobang kontrol dan dilengkapi dengan alkon mesin penyedot dan pemompa air bilamana terjadi kemacetan.
- f. Perlu gotong royong atau arisan jembatan yang pengerjaannya bersifat swadaya masyarakat dan di kerjakan secara bersama guna menekan biaya pembuatan septik tank.

## 20. Pola Pangan Harapan (PPH)

Pola Pangan Harapan adalah susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama pada tingkat ketersediaan maupun konsumsi pangan. Indikator kualitas konsumsi pangan ditunjukkan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang dipengaruhi oleh keragaman dan keseimbangan konsumsi antar kelompok pangan. PPH

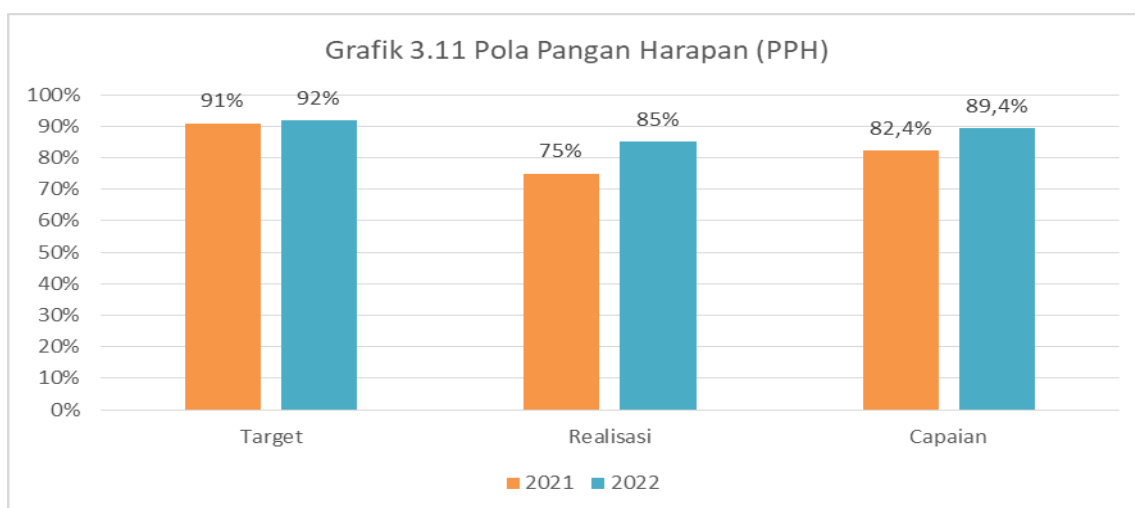


biasanya digunakan untuk perencanaan konsumsi, kebutuhan dan penyediaan pangan yang ideal di suatu wilayah. Berikut capaian realisasi capaian pola pangan harapan Kota Sibolga untuk tahun 2021-2022. Perbandingan antara target dan realisasi pada indikator kinerja utama angka pola pangan harapan mulai tahun 2021-2022, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.22 Target, Realisasi dan Capaian Pola Pangan Harapan (PPH)  
Tahun 2021-2022

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2021	91%	75%	82,4%
2022	92%	85%	89,4%

Sumber : Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Sibolga



Kendala/permasalahan dalam pencapaian pencapaian indikator Pola Pangan Harapan adalah sebagai berikut:

- a. Sangat dipengaruhi oleh pola konsumsi pangan, yang mana besarnya pendapatan atau tingkat harga pangan yang sangat tinggi di pasar. Sehingga sebagian masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan yang beragam.
- b. Tingkat pola konsumsi antara satu individu dengan individu yang lain berbeda, dikarenakan kebutuhan yang berbeda dan hal ini dipengaruhi oleh faktor jumlah pengeluaran rumah tangga, jumlah besaran anggota keluarga dan tingkat ekonomi.

Adapun solusi dari permasalahan yang terjadi pada Pola Pangan Harapan yaitu:

- a. Sosialisasi penggunaan dan pemanfaatan serta konsumsi pangan local selain beras seperti jagung, umbi-umbian, sagu dan lain-lain yang komoditasnya dapat ditemukan di



wilayah Kota Sibolga.

- b. Mengekspos program atau sosialisasi manfaat difersifikasi konsumsi pangan lokal bagi kesehatan maupun ketahanan pangan melalui kegiatan B2SA (beragam, bergizi, seimbang dan aman).

**C. Misi Ketiga MEWUJUDKAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN YANG PROPORSIONAL BERBASIS JUMLAH PENDUDUK UNTUK MENATA PEMUKIMAN WARGA AGAR TERCIPTANYA LINGKUNGAN YANG SEHAT DAN INFRASTRUKTUR KOTA YANG TERANG DENGAN MEMANFAATKAN TATA RUANG YANG BERWAWASAN KOTA PINTAR (SMART CITY).**

### 21. Indeks Resiko Bencana

Indeks Risiko Bencana Indonesia adalah suatu perangkat analisis kebencanaan yang menunjukkan riwayat nyata kebencanaan yang telah terjadi dan menimbulkan kerugian di wilayah Indonesia. Indeks Risiko Bencana ini bertujuan untuk memberikan informasi tingkat risiko bencana tiap kabupaten/kota di Indonesia.

Indeks Risiko Bencana (IRB) ini dapat dihitung berdasarkan rumus berikut:

$$R \approx H * \frac{V}{C}$$

Dimana :

<b>R</b>	=	Tingkat Resiko Bencana
<b>H</b>	=	Indeks Bahaya
<b>V</b>	=	Indeks Kerentanan
<b>C</b>	=	Indeks Kapasitas

Di mana hazard (bahaya) dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (magnitude) dari suatu fenomena alam seperti gempa bumi, banjir, letusan gunung api, dan lainnya. Vulnerability (kerentanan) dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. Capacity (kapasitas) dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh indikator/prioritas yaitu: (1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; (2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; (3) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; (4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana; (5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; (6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan (7) Pengembangan sistem pemulihan bencana.

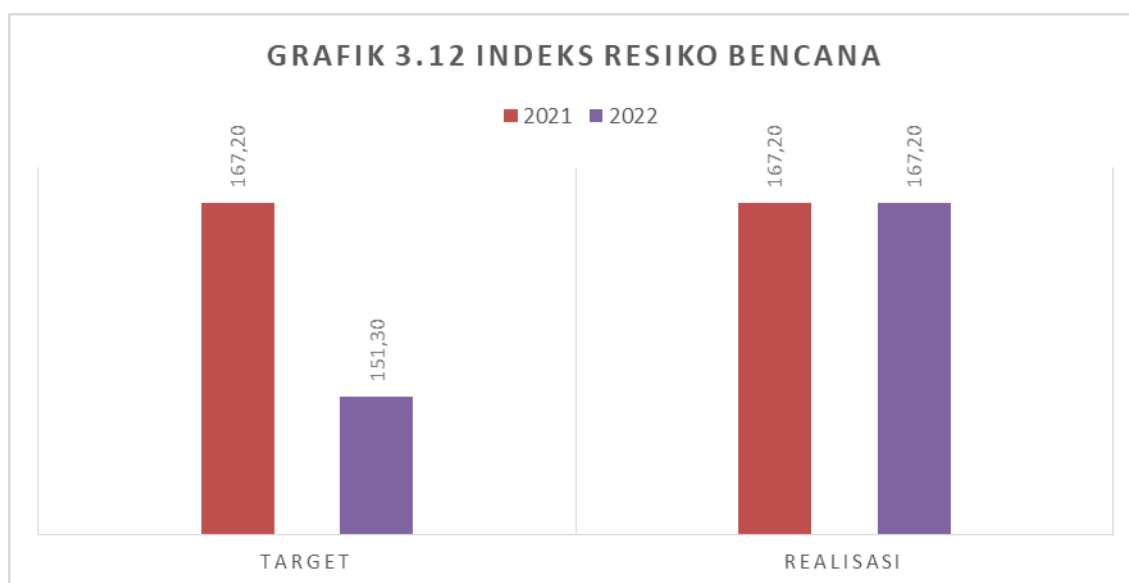
Perbandingan antara target dan realisasi pada indikator kinerja utama angka indeks resiko bencana mulai tahun 2021-2022, dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 3.23 Target, Realisasi dan Capaian Indeks Resiko Bencana Tahun 2021-2022

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2021	167,20	167,20	Tercapai
2022	151,30	167,20	Tidak Tercapai

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sibolga



Hasil realisasi indeks resiko bencana Kota Sibolga pada tahun 2022 tidak tercapai dari target yang ditentukan. Pada tahun 2021 realisasi pada angka 167,20 dari target 167,20 dan mengalami penurunan pada tahun 2022 pada angka 167,20 dari target 151,30. Meskipun target tidak tercapai akan tetapi tidak ada perubahan hasil realisasi antara 2021 dan 2022.

Pengusulan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan guna mendukung tercapainya target IRB sejak tahun 2021 telah diusulkan s.d 2023, namun dikarenakan Masa Pandemi maka kegiatan ini terkena Refocussing Anggaran di BPBD Kota Sibolga.

Kendala dan Permasalahan dalam menurunkan nilai Indeks Risiko Bencana (IRB) Kota Sibolga yaitu:

- a. Tidak terlaksananya pemenuhan Standard Pelayanan Minimal (SPM) yang sekaligus berpengaruh kepada peningkatan Kapasitas Kota Sibolga dari 7 indikator yang ditentukan dan 228 pertanyaan atau sub kegiatan.
- b. Diperlukan anggaran untuk pemenuhan SPM sub urusan bencana sesuai lampiran permendagri 101 tahun 2018 dan amanat UU no 1 tahun 2021 tentang Hubungan



Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah pada pasal 130 (DAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) dan Pasal 729 ayat (1) digunakan untuk memenuhi pencapaian standar pelayanan minimal berdasarkan tingkat capaian kinerja layanan Daerah).

- c. Nilai Indeks Kapasitas Daerah Kota Sibolga Tahun 2022 yaitu 0.26 dan turun dari tahun 2021 yang bernilai 0.28.

Solusi yang diharapkan untuk menyelesaikan permasalahan dalam peningkatan atau pencapaian nilai Indeks Risiko Bencana (IRB) adalah dengan meningkatkan nilai kapasitas Kota Sibolga terlebih dahulu, antara lain yaitu:

- a. Membuat dokumen-dokumen kebencanaan berupa dokumen Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana, Kajian Resiko Bencana (KRB), Rencana Kontijensi, Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), dan Peta Rawan Bencana Kota Sibolga.
- b. Meningkatkan kualitas SDM aparatur BPBD dikarenakan dengan kualitas yang baik akan meningkatkan kesiapsiagaan dan kemampuan BPBD dalam melakukan penanggulangan bencana.
- c. Membentuk Kelurahan Tangguh Bencana (KELTANA), Sekolah Madrasah Aman Bencana (SMAB) sebagai langkah awal penguatan kawasan dalam menghadapi bencana.
- d. Peningkatan kuantitas sosialisasi dan pelatihan kepada warga masyarakat, terutama yang berada di kawasan rawan bencana.
- e. Memperbaiki atau menambah sarana peringatan dini yang belum menjangkau seluruh Kota Sibolga.

## 22. Indeks Kualitas Udara

Indeks Kualitas Udara adalah ukuran yang digunakan untuk menilai pencemaran udara. Indeks ini biasa digunakan oleh badan pemerintah untuk memperlihatkan seberapa buruk kualitas udara di suatu daerah. Negara-negara memiliki indeks berbeda, bergantung pada standar kualitas udara di negara masing-masing. Perbandingan antara target dan realisasi pada indikator kinerja utama angka indeks kualitas udara mulai tahun 2021-2022, dapat dilihat pada tabel berikut:

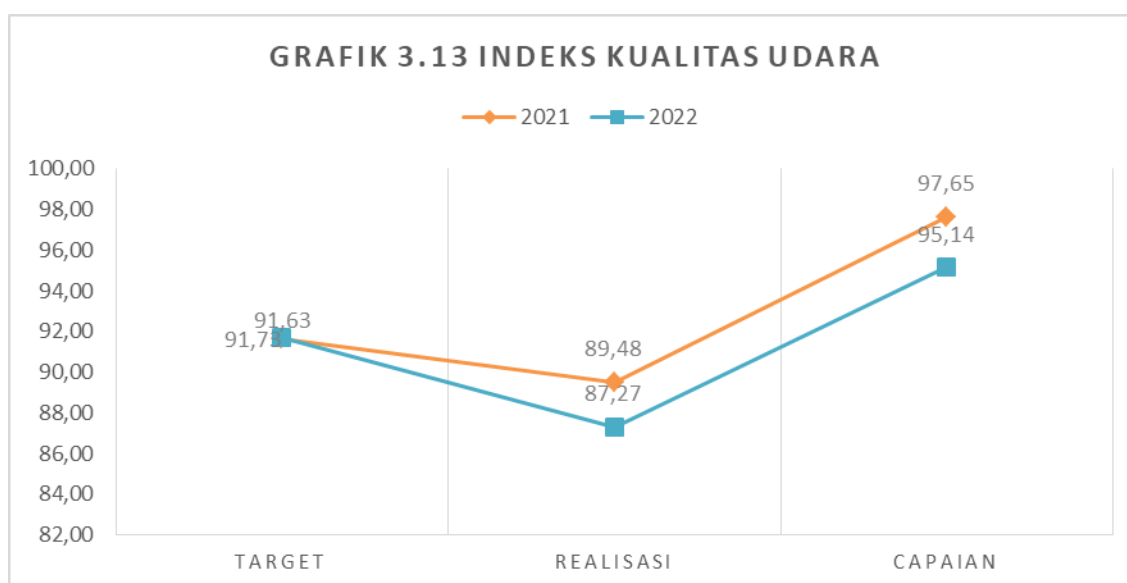




Tabel 3.24 Target, Realisasi dan Capaian Indeks Kualitas Udara  
Tahun 2021-2022

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2021	91,63	89,48	97,65
2022	91,73	87,27	95,14

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan, Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Sibolga



Nilai indeks kualitas udara di Kota Sibolga mengalami penurunan yaitu pada angka 89,48 dari target 91,63 pada tahun 2021 dan angka 87,27 dari target 91,73 pada tahun 2022.

### 23. Indeks Kualitas Air

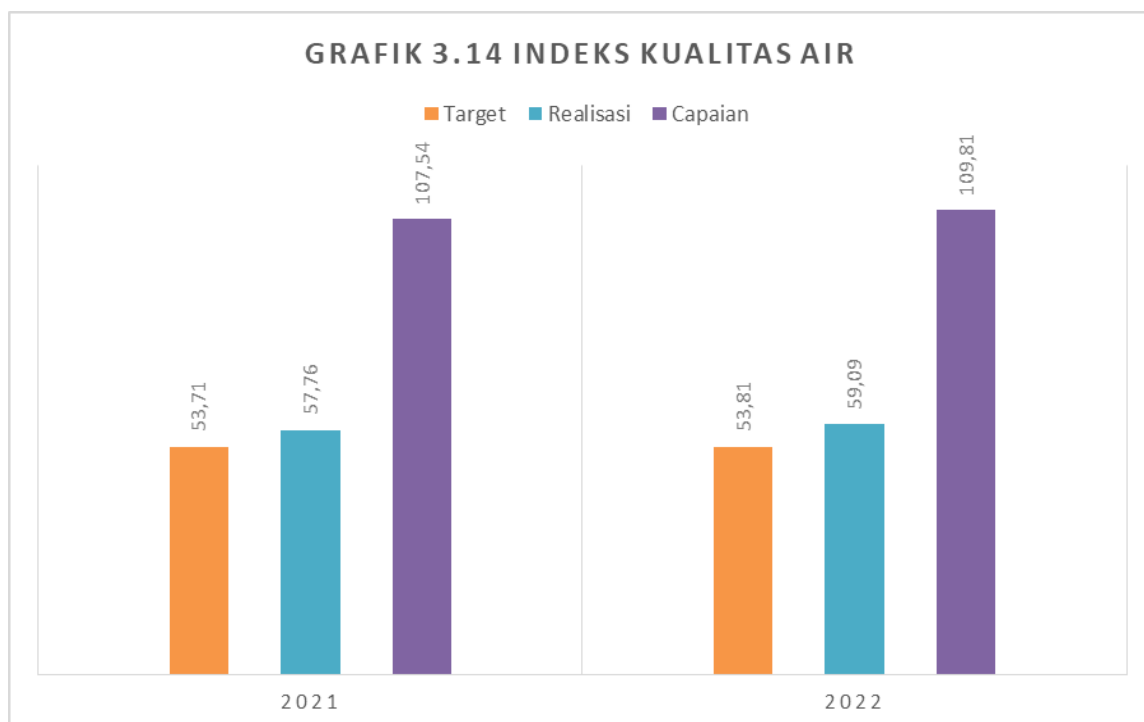
Indeks Kualitas Air (Water Quality Index / WQI) adalah metode sederhana yang digunakan sebagai bagian dari survei kualitas air secara umum dengan menggunakan sekelompok parameter yang mengurangi sejumlah besar informasi ke nomor tunggal, biasanya berdimensi, dengan cara yang mudah direproduksi (Abbasi dan Abbasi, 2012). Perbandingan antara target dan realisasi pada indikator kinerja utama angka indeks kualitas air mulai tahun 2021-2022, dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 3.25 Target, Realisasi dan Capaian Indeks Kualitas Air  
Tahun 2021-2022

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2021	53,71	57,76	107,54
2022	53,81	59,09	109,81

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan, Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Sibolga



#### 24. Indeks Kualitas Lingkungan

Indeks Kualitas Lingkungan (IKL) merupakan ukuran umum kualitas lingkungan hidup suatu wilayah berdasarkan kondisi beberapa matra lingkungan hidup termasuk udara, air, dan tanah.

IKL 2008 disusun berdasarkan kombinasi indeks kualitas udara, air, tanah pemukiman dan kepadatan penduduk dengan mengikuti sistem pembobotan Virginia Environmental Quality Index (VEQI). Indeks masing-masing matra terletak antara 0 untuk menggambarkan kondisi lingkungan terburuk dan 100 untuk terbaik atau ideal. Nilai suatu indeks matra suatu lingkungan hidup suatu wilayah dihitung sebagai selisih antara 100 dengan tingkat pencemaran di wilayah itu. Dengan perkataan lain, tingkat pencemaran suatu matra lingkungan hidup dapat dilihat sebagai komplemen dari indeksnya. Perbandingan antara target

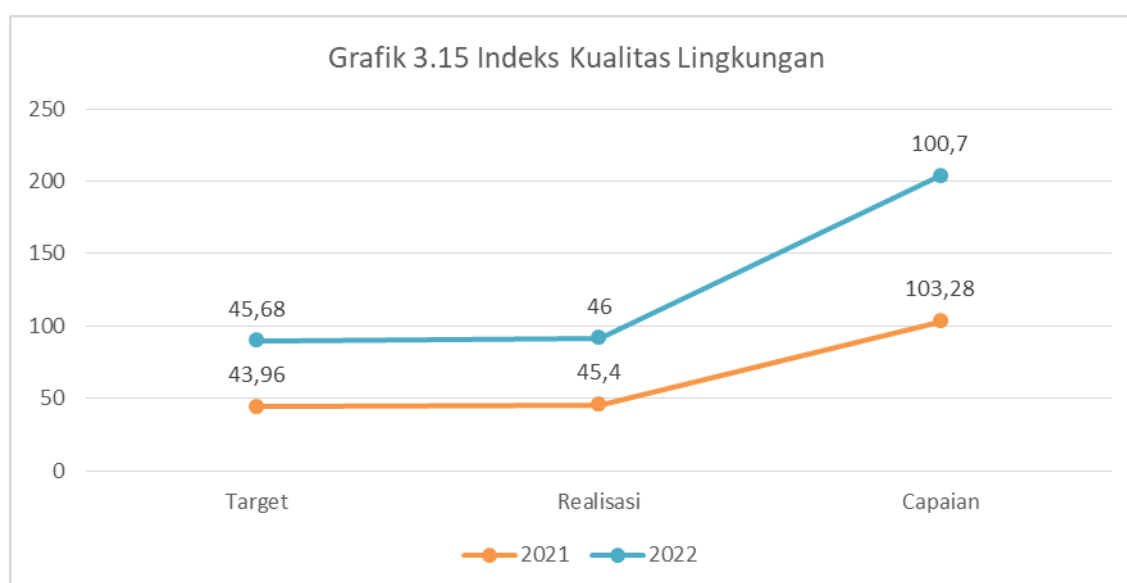


dan realisasi pada indikator kinerja utama angka indeks kualitas lingkungan mulai tahun 2021-2022, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.26 Target, Realisasi dan Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Tahun 2021-2022

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2021	43,96	45,40	103,28%
2022	45,68	46	100,7%

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan, Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Sibolga



Hasil indeks kualitas lingkungan Kota Sibolga mengalami peningkatan baik dari realisasi maupun capaian. Pada tahun 2021 pada angka 45,40 dengan capaian 103,28% dari target 43,96 dan mengalami peningkatan tahun 2022 pada angka 46 dengan capaian 45,68 dari target 45,68.

## 25. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

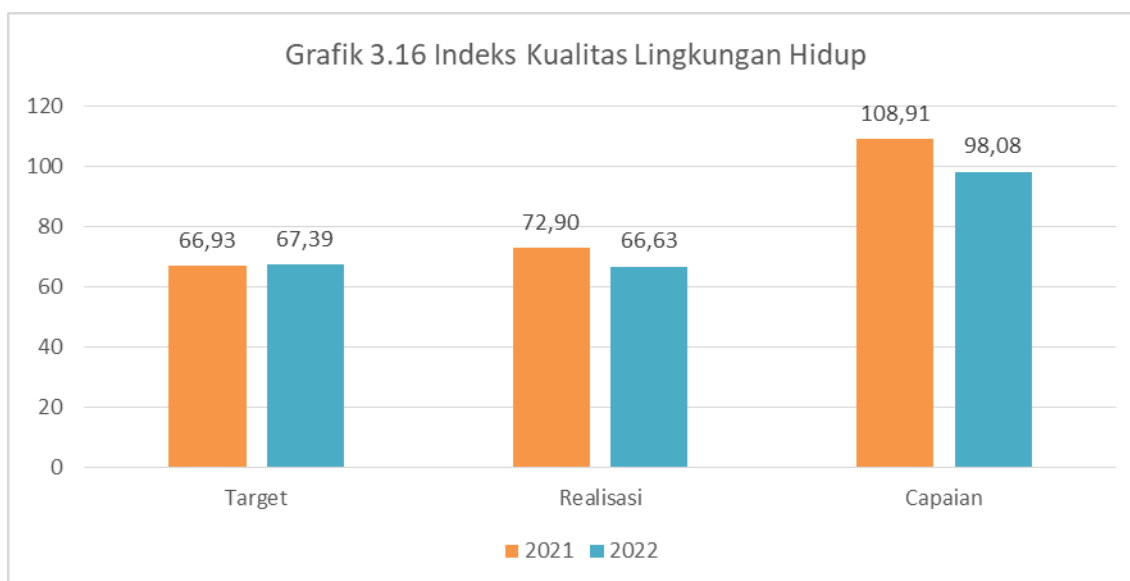
IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Perbandingan antara target dan realisasi pada indikator kinerja utama angka indeks kualitas lingkungan hidup mulai tahun 2021-2022, dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 3.27 Target, Realisasi dan Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2022

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2021	66,93	72,90	108,91%
2022	67,39	66,63	98,08%

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan, Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Sibolga



Hasil realisasi indeks kualitas lingkungan hidup Kota Sibolga mengalami penurunan yaitu pada angka 72,90 dari 66,93 dari target yang ditentukan pada tahun 2021 menjadi angka 66,63 dari 67,39 dari target yang ditentukan pada tahun 2022.

Kendala dan Permasalahan dalam perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH):

- Pendataan/ Monitoring tutupan lahan yang meliputi hutan, mangrove, belukar, sempadan sungai, sempadan pantai, ruang terbuka hijau (RTH), taman dan lahan yang sudah beralih fungsi belum pernah dilaksanakan.
- Kurangnya kegiatan / program yang mendukung perhitungan indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH).

Solusi untuk menyelesaikan permasalahan perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH):

- Melakukan pendataan/ Monitoring secara berkala (minimal 2 kali dalam satu tahun), untuk melengkapi perhitungan indeks kualitas tutupan lahan.



- b. Mengikuti bimtek/Pelatihan mengenai aplikasi pendataan tutupan lahan yang diselenggarakan oleh pihak kementerian lingkungan hidup dan kehutanan.

## 26. RPPLH Kota Sibolga

Dalam menilai indikator Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Sibolga dengan menggunakan pencapaian pelaksanaan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Sibolga berdasarkan kegiatan pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kota Sibolga. Berikut data perbandingan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Sibolga mulai tahun 2021-2022.

Tabel 3.28 Target, Realisasi dan Capaian RPPLH Kota Sibolga  
Tahun 2021-2022

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2021	Tidak ada	Tidak ada	-
2022	Ada	Tidak ada	-

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan, Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Sibolga

Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Sibolga merupakan kumpulan dari data-data terkait Lingkungan hidup yang disusun dan dikaji menjadi sebuah Perencanaan terkait Lingkungan Hidup di Kota Sibolga untuk beberapa tahun ke depannya. Penyusunan dokumen ini melibatkan banyak pihak, instansi maupun informasi dari masyarakat sehingga membutuhkan proses yang lama. Secara berjenjang, penyusunan dokumen ini juga harus mengacu kepada Dokumen DDTLH dan RPPLH yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara sudah menyelesaikan Dokumen DDTLH Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2017 dan Dokumen RPPLH Provinsi Sumatera Utara masih dalam proses. Sesuai koordinasi kami dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara, seharusnya Dokumen RPPLH Provinsi Sumatera Utara selesai terlebih dahulu kemudian diikuti oleh Dokumen RPPLH Kabupaten/Kota. Namun dikarenakan proses yang memakan waktu yang cukup lama maka Kota Sibolga diperbolehkan untuk memproses penyusunan RPPLH sesuai tahapannya. Pengusulan Penyusunan Dokumen RPPLH Kota Sibolga telah diusulkan mulai Pada Tahun 2020 dan 2021, namun dikarenakan Masa Pandemi maka kegiatan ini terkena Refocussing Anggaran di Dinas PKPLH Kota Sibolga sehingga ditunda untuk tahun berikutnya.

Kendala dan Permasalahan dalam menyelesaikan Penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kota Sibolga.



- a. Penyusunan Dokumen RPPLH Kota Sibolga dilaksanakan melalui 2 (dua) tahap yaitu Penyusunan Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDTLH) Kota Sibolga dan perangkuman dalam Dokumen RPPLH Kota Sibolga. Dua kegiatan ini dilakukan secara terpisah dan harus melibatkan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Beberapa Instansi di Pemerintah Kota Sibolga.
- b. Kurangnya pengetahuan dan keahlian Sumber Daya Manusia (SDM) di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Sibolga terkait Penyusunan Dokumen DDTLH dan Dokumen RPPLH.
- c. Diperlukannya dana yang cukup besar untuk melaksanakan kedua kegiatan tersebut sehingga menjadi pertimbangan untuk dilaksanakan sekaligus.

Solusi untuk menyelesaikan permasalahan dalam menyelesaikan Penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kota Sibolga yaitu:

- a. Bekerjasama dan berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara untuk melaksanakan Bimbingan Teknis terkait penyusunan dokumen tersebut.
- b. Untuk mendukung dalam penyelesaian Dokumen RPPLH Kota Sibolga, akan diperbantukan tenaga ahli agar memperlancar proses penyusunannya.
- c. Pada tahun 2023, Dinas PKPLH sudah menganggarkan untuk pelaksanaan Bimtek Penyusunan Dokumen DDTLH Kota Sibolga sekaligus penyusunan dokumennya dan direncanakan Penyusunan Dokumen RPPLH Kota Sibolga dilaksanakan pada penganggaran P-APBD TA. 2023.

## **27. Air Minum Layak dan Berkelanjutan**

Air yang layak minum adalah air yang berwarna jernih, tidak berbau, rasanya tawar, dan tidak terpapar sinar matahari secara langsung. Selain itu, air yang aman untuk diminum juga harus bebas dari sumber pencemaran, seperti binatang yang membawa penyakit, logam atau bahan kimia lainnya.

Pemerintah Indonesia sudah menetapkan standar air bersih yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan Dan Persyaratan Kesehatan Air Untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, Solusi Per Aqua, Dan Pemandian Umum.

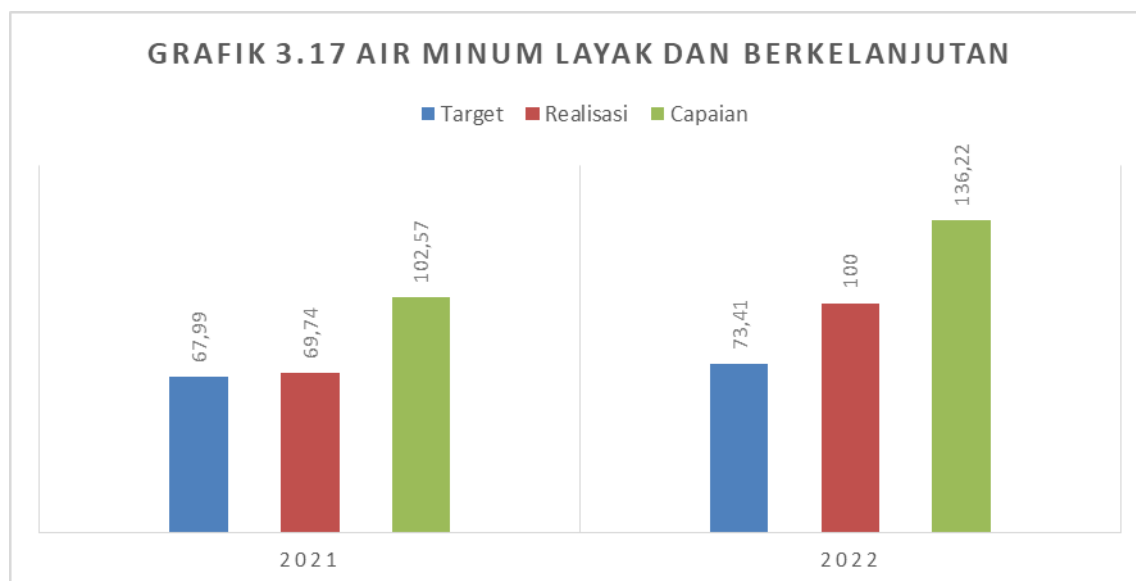
Perbandingan antara target dan realisasi pada indikator kinerja utama angka air minum layak dan berkelanjutan mulai tahun 2021-2022, dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 3.29 Target, Realisasi dan Capaian Air Minum Layak dan Berkelanjutan Tahun 2021-2022

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2021	67,99%	69,74%	102,57%
2022	73,41%	100%	136,22%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sibolga



Kebutuhan air bersih dalam satu rumah tangga berbeda-beda tergantung dari keperluannya, seperti untuk minum, mandi, dan mencuci. Kebutuhan air bersih per rumah tangga dapat dihitung berdasarkan rumus : Kapasitas Kebutuhan air = 250 L x Jumlah anggota keluarga. Sedangkan kebutuhan air per individu khusus pada orang dewasa, konsumsi air putih yang disarankan yaitu sekitar delapan gelas berukuran 230 ml per hari atau total 2 liter. Selain dari minuman, makanan juga dapat memberikan asupan cairan pada tubuh yaitu sekitar 20%.

Sumber air minum di kota Sibolga berasal dari Aek Huta Naimbaru, Aek Sarudik Sipan dan Aek Parombunan. Data Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum dapat dilihat di Tabel. 1 (Terlampir).

Dalam hal untuk meningkatkan penataan lingkungan permukiman yang sehat melalui pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi berkelanjutan khusus pemenuhan persentase jumlah penduduk dengan akses terhadap sumber air minum yang terlindungi dan berkelanjutan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sibolga dalam RPJMD Kota Sibolga



mentargetkan tahun 2023 sebesar 78,83 %.

Untuk mencapai target yang diharapkan didapati kendala/permasalahan dilapangan antara lain:

- a. Sumber air permukaan masih bergantung dari daerah lain (daerah tetangga).
- b. Sebaran lokasi rumah tinggal penduduk lebih banyak di atas laut sehingga kesulitan dalam penempatan pipa tertier untuk sambungan pipa air minum dan juga lokasi rumah tinggal di punggung dan diperbukitan sehingga pelayanan air minum mengalami kesulitan.
- c. Debit air kurang memadai.

Solusi yang diambil untuk pemecahan masalah dan kendala di lapangan antara lain:

- a. Mencari sumber air yang baru melalui kerjasama dengan pemda Tapanuli Tengah.
- b. Agar kiranya penganggaran dana dari Pusat (DAK) ditambahi/dibantu dari APBD Kota Sibolga.
- c. Pengadaan pompa air untuk mengalirkan air di daerah yang lebih tinggi elevasinya.

#### 28. Rumah Tangga Bersanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

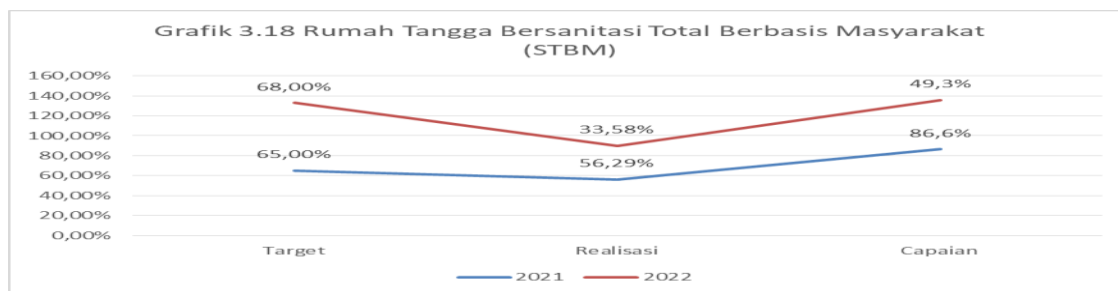
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) merupakan pendekatan untuk merubah perilaku higienes dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan. Program STBM memiliki indikator outcome dan output. Indikatoroutcome STBM yaitu menurunnya kejadian penyakit diare dan penyakit berbasis lingkungan lainnya yang berkaitan dengan sanitasi dan perilaku. Perbandingan antara target dan realisasi pada indikator kinerja utama angka rumah tangga bersanitasi total berbasis masyarakat mulai tahun 2021-2022, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.30 Target, Realisasi dan Capaian Rumah Tangga Bersanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Tahun 2021-2022

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2021	65,00%	56,29%	86,6%
2022	68,00%	33,58%	49,3%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sibolga





Kota Sibolga berdiri di atas daratan pantai, lereng, dan pegunungan, dimana hampir seluruh penduduknya bermukim di dataran pantai yang rendah. Terletak pada ketinggian berkisar antara 0 – 150 meter dari atas permukaan laut, dengan kemiringan lahan kawasan kota ini bervariasi antara 0-2 % sampai lebih dari 40 %.

Sanitasi lingkungan yang sehat di daerah pesisir sangat di butuhkan agar terhindar dari penyakit-penyakit infeksi dan pencemaran lingkungan. Ruang lingkup sanitasi dasar yakni sarana penyediaan air bersih, sarana jamban keluarga, sarana pembuangan sampah, dan sarana pembuangan air limbah.

Untuk mencapai target yang diharapkan didapati kendala/permasalahan dilapangan antara lain:

- Ketersediaan lahan kurang memadai untuk tempat pembuatan tangka septik baik individual maupun komunal.
- Hampir sebagian besar penduduk kota Sibolga berlokasi di pesisir pantai dan diatas laut sehingga sulit menempatkan tangka septik di lokasi tersebut.
- Kesadaran masyarakat tentang pentingnya tangka septik.

Solusi yang diambil untuk pemecahan masalah dan kendala di lapangan antara lain:

- Pemerintah Kota diharapkan dapat mempersiapkan lahan untuk pembangunan tangka septik tersebut.
- Pembuatan tangki septik komunal yang bisa diakses oleh alat penyedotan tinja.
- Perlunya sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya sanitasi lingkungan dan penegasan Perda tentang bangunan gedung yang mensyaratkan harus adanya tangka septik.



- D. Misi Keempat **MEWUJUDKAN PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS, MEMBERIKAN SUBSIDI PENUH TERHADAP KEBUTUHAN BELAJAR 9 TAHUN, DAN MEMBERIKAN BEASISWA BAGI SISWA BERPRESTASI UNTUK MELANJUTKAN STUDI KE PERGURUAN TINGGI, SERTA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN GURU.**

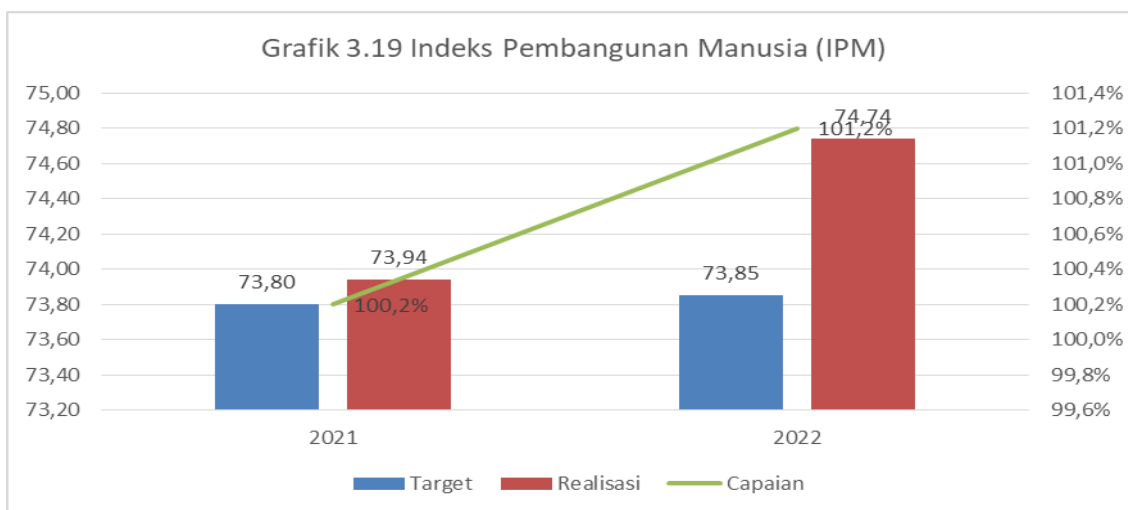
### 29. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran perbandingan dari [harapan hidup](#), [melek huruf](#), [pendidikan](#) dan [standar hidup](#). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Perbandingan antara target dan realisasi pada indikator kinerja utama angka indeks pembangunan manusia mulai tahun 2021-2022, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.31 Target, Realisasi dan Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM)  
Tahun 2021-2022

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2021	73,80	73,94	100,2%
2022	73,85	74,74	101,2%

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sibolga



Hasil realisasi indeks pembangunan manusia Kota Sibolga mengalami peningkatan tahun 2021 dari angka 73,94 menjadi 74,74 pada tahun 2022. Capaian tahun 2021 berada pada angka 100,2% dari angka 73,80 dari target yang ditentukan dan 101,2% dari angka 73,85 dari target yang ditentukan pada tahun 2022.



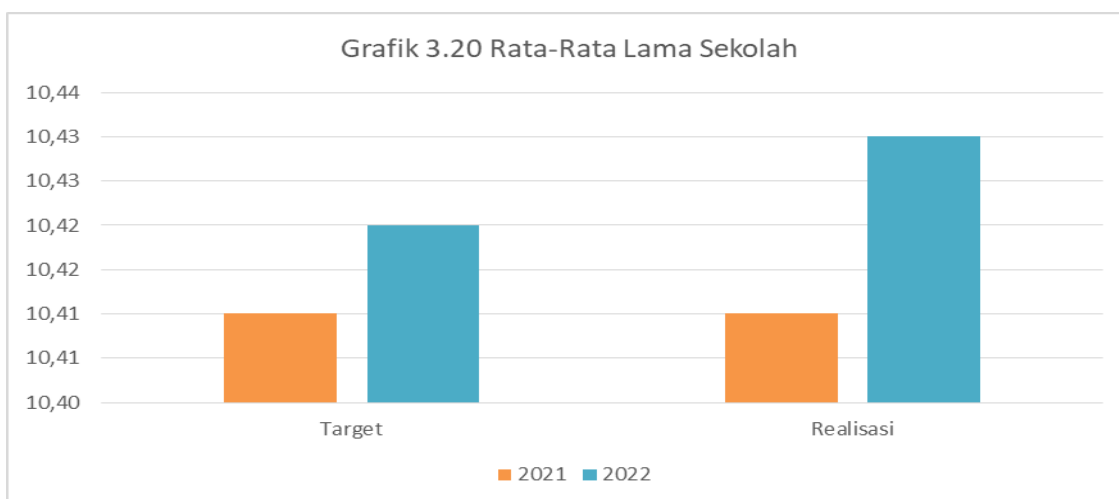
### 30. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-Rata Lama Sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani. Perbandingan antara target dan realisasi pada indikator kinerja utama angka rata-rata lama sekolah mulai tahun 2021-2022, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.32 Target, Realisasi dan Capaian Rata – Rata Lama Sekolah Tahun 2021-2022

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2021	10,41	10,41	100%
2022	10,42	10,43	100%

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sibolga



Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) akan menjadi salah satu komponen pembentuk indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) yaitu pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup di suatu wilayah. Angka Rata-rata Lama Sekolah akan menjadi salah satu dari 4 komponen yaitu: Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, Angka Rerata Lama Sekolah serta Pengeluaran per Kapita.



Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kota Sibolga pada Tahun 2022 di targetkan sebesar 10,42 Tahun, dengan capaian kinerja pada tahun 2022 mampu melampaui target yang telah ditetapkan yaitu menjadi 10,43 Tahun, Ini maknanya bahwa rata-rata lama sekolah penduduk Kota Sibolga adalah 10,43 Tahun atau penduduk Kota Sibolga rata-rata telah menyelesaikan pendidikan sampai kelas IX SMA pada semester I. Dengan ini formasi ini pimpinan daerah dapat mengambil kebijakan, dalam rangka meningkatkan Angka Rata-rata Lama Sekolah dengan meningkatkan pembangunan unit sekolah atau ruang kelas baru, pemberian beasiswa bagi penduduk kurang mampu, pembebasan uang sekolah, pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi, dan lain sebagainya.

### 31. Harapan Lama Sekolah

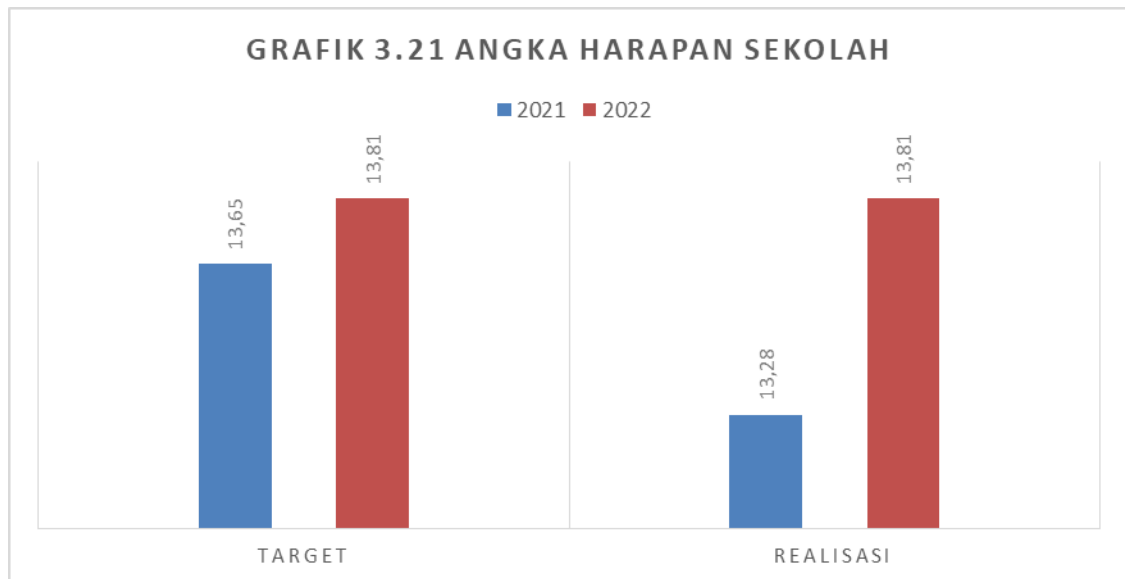
Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang.

Angka Harapan Lama Sekolah Kota Sibolga Tahun 2022 belum berhasil mencapai target sebesar 13,81 Tahun, sedangkan Capaian Kinerja yaitu hanya sebesar 13,28 Tahun, ini berarti anak-anak di Kota Sibolga yang berusia 7 tahun memiliki harapan menempuh pendidikan hingga Diploma I. Perbandingan antara target dan realisasi pada indikator kinerja utama angka angka harapan lama mulai tahun 2021-2022, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.33 Target, Realisasi dan Capaian Angka Harapan Lama Sekolah  
Tahun 2021-2022

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2021	13,65	13,28	97,3%
2022	13,81	13,81	100%

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sibolga



Hasil realisasi harapan lama Kota Sibolga mengalami peningkatan yaitu angka 13,28 pada tahun 2021 menjadi 13,81 pada tahun 2022. Angka lama sekolah tahun 2021 masih di bawah target yaitu 13,65 dan pada tahun 2022 dengan angka 13,81 sama nilainya dengan target yang ditentukan.

Berikut berbagai kendala atau permasalahan yang dihadapi pemerintah Kota Sibolga dalam pencapaian target angka harapan hidup, yaitu :

- a. Akses dan kualitas pendidikan yang masih belum merata.
- b. Masih tingginya beban biaya yang ditanggung masyarakat untuk menyekolahkan anak.

Solusi yang di tempuh Pemerintah Kota Sibolga untuk menyelesaikan kendala pencapaian target adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan.
- b. Menurunkan beban biaya masyarakat untuk menyekolahkan anak dengan cara memberikan beasiswa baik kepada siswa yang berprestasi maupun beasiswa bagi yang berasal dari keluarga kurang mampu.

- E. Misi Kelima MEMBUKA LAPANGAN KERJA DAN PELUANG BERUSAHA DENGAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG EKONOMI DAN KEWIRAUSAHAAN SERTA MENJALIN KERJASAMA DENGAN PELAKU EKONOMI LAINNYA DI KOTA SIBOLGA MAUPUN DI LUAR KOTA SIBOLGA.**



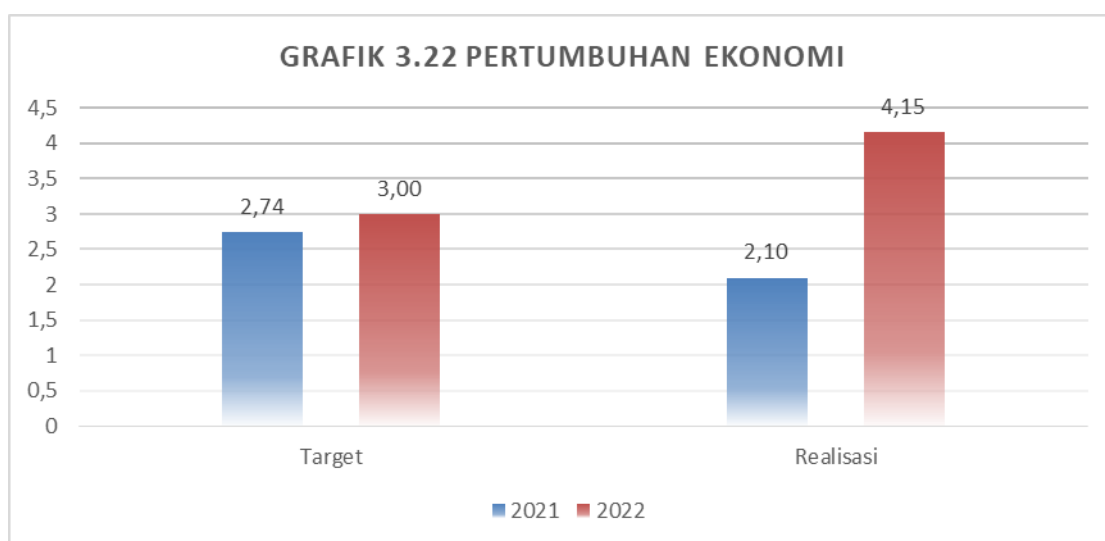
### 32. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan dalam kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi lebih menunjuk pada perubahan yang bersifat kuantitatif (*quantitatif change*) dan biasanya diukur dengan menggunakan data produk domestik bruto (PDB) atau pendapatan output perkapita. Perbandingan antara target dan realisasi pada indikator kinerja utama angka pertumbuhan ekonomi mulai tahun 2021-2022, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.34 Target, Realisasi dan Capaian Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2021-2022

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2021	2,74	2,10	76.6%
2022	3,00	4,15	138,3%

Sumber : Pertumbuhan ekonomi Kota Sibolga mengalami peningkatan yaitu



2,10 dari 2,74 dari target yang ditentukan pada tahun 2021 menjadi 4,15 dari angka 3 dari target yang ditentukan pada tahun 2022. Pertumbuhan ekonomi ini tidak terlepas dari usaha Pemerintah Kota Sibolga untuk memfasilitasi program-program ekonomi kreatif dan dukungan terhadap usaha-usaha yang ada di Kota Sibolga.



### 33. Gini Rasio

*Gini Ratio* adalah menggambarkan pemerataan dan ketimpangan secara keseluruhan, mulai dari pendapatan hingga distribusi. Rentang skor 0 - 1. Perbandingan antara target dan realisasi pada indikator kinerja utama angka gini rasio mulai tahun 2021-2022, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.35 Target, Realisasi dan Capaian Gini Rasio  
Tahun 2021-2022

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2021	0,280	0,276	98,6%
2022	0,2760	0,346	125,4%

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sibolga

### 34. Angka Kemiskinan

Angka kemiskinan yang dirilis BPS merupakan data makro dan merupakan hasil Susenas (Survey Sosial Ekonomi Nasional) yang menunjukkan persentase penduduk miskin terhadap jumlah penduduk dalam suatu wilayah. Perbandingan antara target dan realisasi pada indikator kinerja utama angka kemiskinan mulai tahun 2021-2022, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.36 Target, Realisasi dan Capaian Angka Kemiskinan  
Tahun 2021-2022

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2021	11,90	12,33	Tidak tercapai
2022	11,00	11,47	Tidak Tercapai

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sibolga

Terjadi penurunan angka kemiskinan dari tahun 2021 dengan angka 12,33 menjadi 11,47 pada tahun 2022. Akan tetapi realisasi tersebut masih dibawah target yang telah ditetapkan yaitu 11,90 pada tahun 2021 dan 11,00 pada tahun 2022.



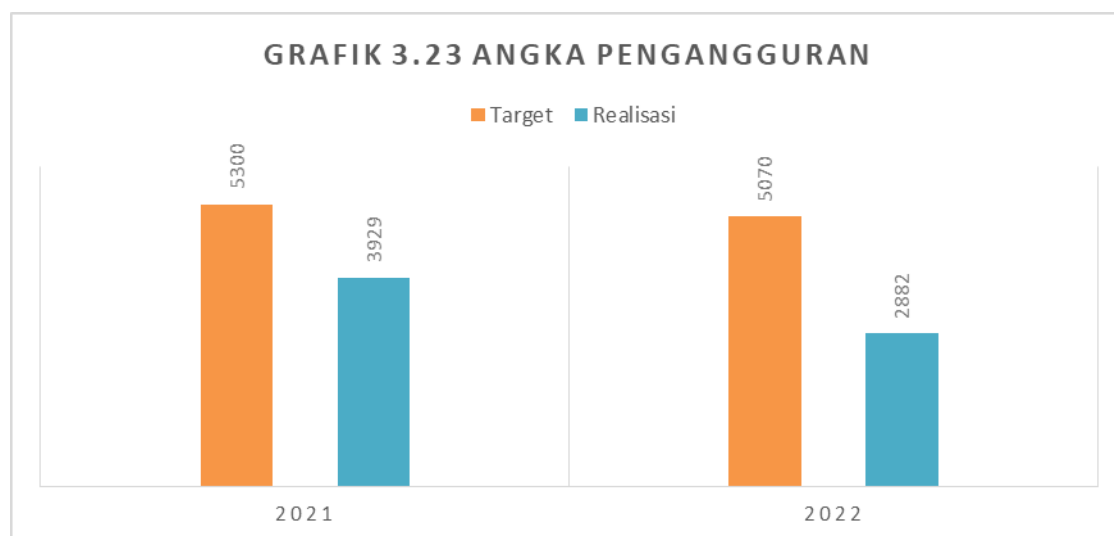
### 35. Angka Pengangguran

Tingkat pengangguran adalah persentase mereka yang ingin bekerja, namun tidak memiliki pekerjaan. Tingkat pengangguran diperoleh melalui survei terhadap ribuan rumah tangga. Tingkat pengangguran dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam persen. Perbandingan antara target dan realisasi pada indikator kinerja utama angka pengangguran mulai tahun 2021-2022, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.37 Target, Realisasi dan Capaian Angka Pengangguran  
Tahun 2021-2022

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2021	5300	3929	Tercapai
2022	5070	2882	Tercapai

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sibolga



Angka pengangguran Kota Sibolga tahun 2021 dan 2022 mengalami penurunan yaitu 3929 pada tahun 2021 menjadi 2882 pada tahun 2022. Dari hasil tersebut dapat dilihat capaian dari target yang telah ditentukan. Berbagai upaya yang dilaksanakan Pemerintah Kota Sibolga untuk mengurangi angka pengangguran.





### 36. Pendapatan Per Kapita Penduduk (Juta)

Pendapatan Per Kapita adalah ukuran jumlah uang yang diperoleh per orang di suatu negara atau wilayah geografis. Pendapatan per kapita dapat digunakan untuk menentukan pendapatan rata-rata per orang untuk suatu daerah dan untuk mengevaluasi standar hidup dan kualitas hidup penduduk. Perbandingan antara target dan realisasi pada indikator kinerja utama angka pendapatan perkapita penduduk mulai tahun 2021-2022, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.38 Target, Realisasi dan Capaian Pendapatan Per Kapita Penduduk (Juta)  
Tahun 2021-2022

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2021	64,32	64,46	100%
2022	66,12	n/a	n/a

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sibolga

### 37. Pendapatan Daerah

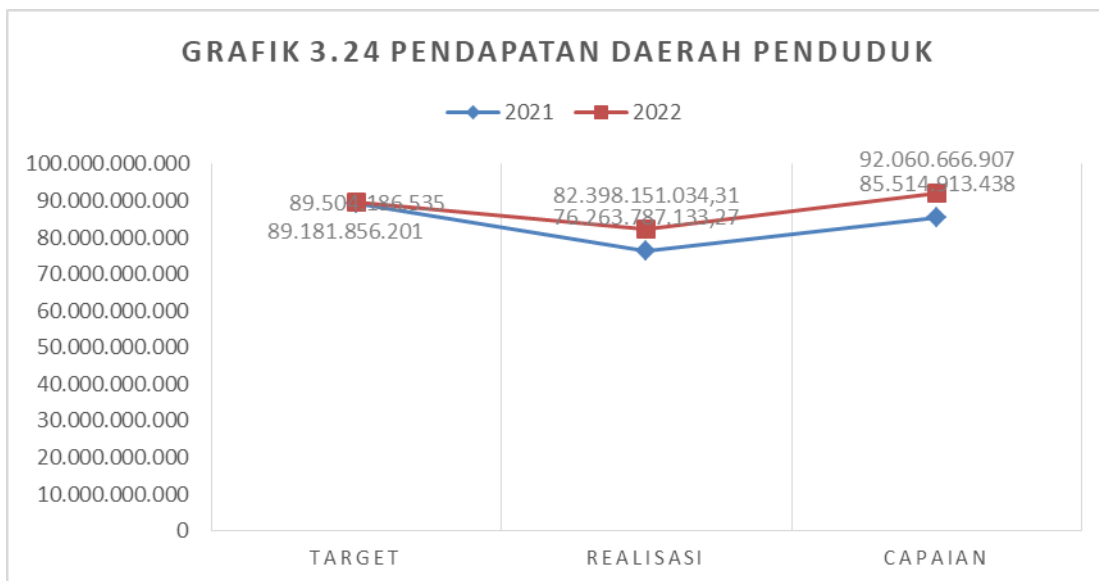
Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih (UU No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah).

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah (PP No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan). Perbandingan antara target dan realisasi pada indikator kinerja utama angka pendapatan daerah mulai tahun 2021-2022, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.39 Target, Realisasi dan Capaian Pendapatan Daerah  
Penduduk (Juta) Tahun 2021-2022

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2021	89.181.856.201	76.263.787.133,27	85.514.913.438
2022	89.504.186.535	82.398.151.034,31	92.060.666.907

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kota Sibolga



Realiasi pendapatan Kota Sibolga untuk tahun 2021 dan 2022 berada dibawah target angka yang ditetapkan di RPJMD Kota Sibolga. Pada tahun 2021 berada pada angka 76.263.787.133,27 dan mengalami peningkatan pada tahun 2022 pada angka 82.398.151.034,31.

Dalam upaya peningkatan pencapaian target pendapatan daerah berbagai permasalahan dan kendala yang di hadapi oleh Pemerintah Kota Sibolga. Pemasalahan atau kendala tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Terlambatnya penyampaian laporan realisasi PAD ke Pemerintah Pusat sehingga DAU tidak tertunda.
- b. Kurangnya pengetahuan wajib pajak tentang pajak daerah, maka BPKPAD melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan memasang himbauan-himbauan tentang tarif pajak daerah agar penerimaan PAD dari sektor pajak daerah lebih optimal.
- c. Rendahnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak daerah sehingga BPKPAD melakukan monitoring pembayaran pajak setiap bulannya untuk memenuhi target peningkatan PAD dari pajak daerah.

Pemerintah Kota Sibolga berusaha untuk meningkatkan pendapatan daerah. Berikut berbagai upaya yang dilaksanakan dalam peningkatan pendapatan yaitu:

- a. Penyampaian laporan realisasi PAD ke Pemerintah Pusat. Hal ini dapat diatasi dengan menyurati OPD agar menyampaikan laporan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan sehingga Laporan PAD dapat disajikan dengan tepat waktu dan DAU tidak tertunda.



- b. Melakukan pendataan terhadap objek pajak yang baru dalam meningkatkan Capaian Target Pendapatan Asli Daerah.
- c. Melakukan monitoring dan penagihan secara berkesinambungan terhadap wajib pajak / wajib retribusi.

Berbagai usaha/solusi dilakukan dalam menyelesaikan kendala atau permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kota Sibolga dalam upaya mencapai target yang telah ditentukan. Solusi yang diambil adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan koordinasi dan monitori kepada OPD terkait untuk meningkatkan realisasi capaian target PAD sehingga Laporan PAD dapat disajikan, dan dilaporkan ke Pemerintah Pusat sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan dan DAU tidak tertunda.
- b. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat/ Wajib Pajak dan memasang himbauan-himbauan tentang tarif pajak daerah agar penerimaan PAD dari sektor pajak daerah lebih optimal.
- c. Menerapkan sanksi wajib pajak atas keterlambatan dalam membayar pajak daerah.

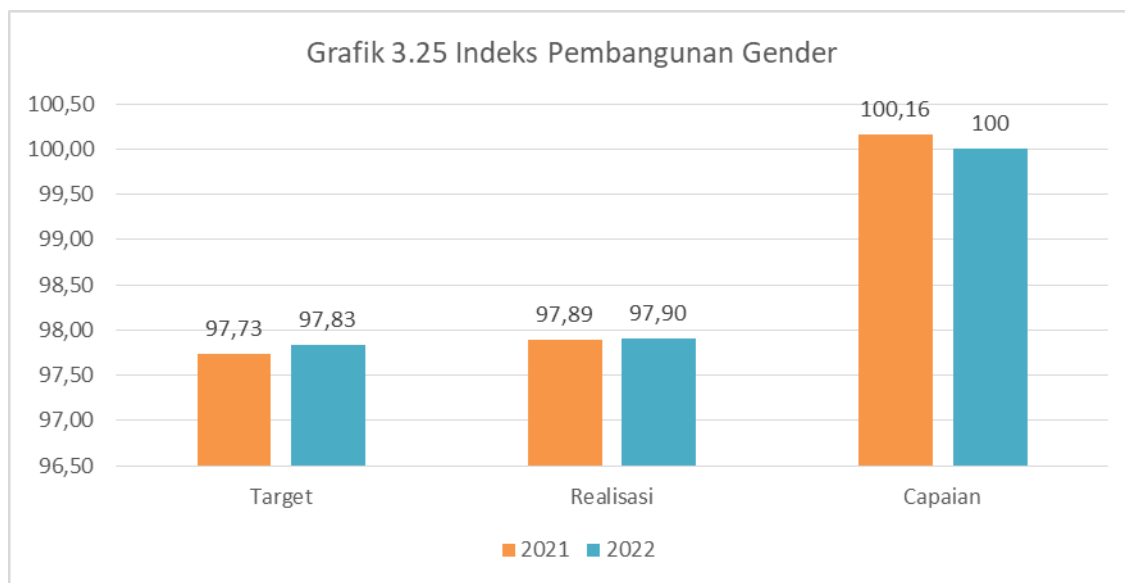
### 38. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indikator yang mengukur pencapaian pembangunan manusia dengan mempertimbangkan aspek gender. Ketimpangan antara capaian IPM dan IPG yang dilihat dari rasio keduanya, selama kurun waktu 2004-2012 masih cukup tinggi dan cenderung tetap. Perbandingan antara target dan realisasi pada indikator kinerja utama angka indeks pembangunan gender mulai tahun 2021-2022, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.40 Target, Realisasi dan Capaian Indeks Pembangunan Gender Tahun 2021-2022

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2021	97,73	97,89	100,16%
2022	97,83	97,90	100%

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sibolga



### 39. Indeks Kesetaraan Gender

IDG merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan gender berdasarkan partisipasi politik dan ekonomi. Kesetaraan gender masih menjadi masalah di Indonesia. Laporan The Global Gender Gap Index 2020 yang dirilis oleh World Economic Forum, mengungkapkan bahwa Indonesia berada di peringkat 85 dari 153 negara dengan skor 0.70. Angka tersebut tidak mengalami perubahan sejak 2018.

Shinta Kamdani selaku Anggota Dewan Pembina IBCWE (Indonesia Business Coalition For Women Empowerment), mengungkapkan pentingnya kesetaraan gender di dunia kerja merupakan salah satu langkah untuk memperkecil celah ketidaksetaraan gender di Indonesia. Perbandingan antara target dan realisasi pada indikator kinerja utama angka indeks kesetaraan gender mulai tahun 2021-2022, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.41 Target, Realisasi dan Capaian Indeks Kesetaraan Gender  
Tahun 2021-2022

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2021	73,53	Belum rilis	-
2022	74,03	Belum rilis	-

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sibolga



Hasil realisasi indeks kesetaraan gender untuk tahun 2021 dan 2022 belum kami sajikan dikarenakan belum ada data resmi dari pihak-pihak yang berkaitan.

Bahwa pelaksanaan PUG di Kota Sibolga belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, dikarenakan pemahaman tentang kesetaraan gender dan pentingnya PUG dan perencanaan dan penganggaran Responsif Gender (PPRG) di beberapa OPD masih rendah, sehingga didalam penganggaran masih belum menggunakan analisis Gender.

Solusi yang diambil dalam menyelesaikan permasalahan/kendala tersebut adalah memberikan pelatihan dan sosialisasi bagi OPD dan penanggung jawab program PU/PPRG serta membuat komitmen bersama seluruh OPD tentang penyusunan Anggaran yang Responsif Gender pada OPD masing-masing

#### 40. Meningkatnya Jumlah Ekonomi Kreatif

Kondisi para pelaku ekonomi kreatif pada tahun 2021 yang masih tergolong masa pandemi Indonesia mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021. Hal ini menyebabkan perekonomian Indonesia pada tahun tersebut mengalami deflasi atau penurunan drastis karena perkembangan ekonomi di Indonesia mempunyai pergerakan yang kurang stabil. Tapi pada kenyataannya target peningkatan atau bertambahnya usaha ekonomi kreatif di Sibolga tercapai, hal ini disebabkan oleh masyarakat tidak berpangku tangan untuk diam saja dikondisi pandemi tersebut, masyarakat bangkit dan membuka usaha baru yang merupakan usaha disektor kuliner.

Pada tahun 2022 peningkatan usaha kreatif berada pada penambahan 3 usaha yang juga berasal dari sektor kuliner dan photography. Yang mana jumlah Pelaku Ekraf Tahun 2021 sebesar 62 Usaha sedangkan pada Tahun 2022 berjumlah 65 Orang. Walaupun angka tersebut tidak sesuai dengan target yang seharusnya di angka 5 (penambahan jumlah usaha). Perbandingan antara target dan realisasi pada indikator kinerja utama angka meningkatnya jumlah ekonomi kreatif mulai tahun 2021-2022, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.42 Target, Realisasi dan Capaian Meningkatnya Jumlah Ekonomi Kreatif Tahun 2021-2022

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2021	5	35	700%
2022	5	3	60%

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Kota Sibolga



Pada tahun 2022 terdapat 3 jumlah usaha yang bisa di bina dari 5 usaha yang di targetkan. Terjadi penurunan yang sangat signifikan dari jumlah usaha yang bias di bina pada tahun 2021 yaitu 35 usaha.

Kendala yang didapati mengapa angka peningkatan tersebut tidak sesuai target adalah:

- a. Kondisi perekonomian masyarakat belum stabil akibat dari *Covid 19*, yang mengakibatkan masyarakat kesulitan mencari modal usaha.
- b. Masih dalam perbaikan kesejahteraan dan pen-stabilan kondisi finansial. Walaupun adanya peningkatan tapi ada juga beberapa usaha yang malah gulung tikar.
- c. Sulit dalam penentuan market segmen dikarenakan masyarakat selaku konsumen masih berfokus pada pemenuhan kebutuhan pokok.

Solusi yang diupayakan dalam membantu peningkatan angka pelaku usaha ekonomi kreatif yaitu diantaranya dengan:

- a. Melaksanakan pelatihan untuk pelaku ekonomi kreatif untuk menambah kemampuan dan wawasan dalam menjalankan usaha.
- b. Membantu dan memfasilitasi pembukaan toko online bagi pelaku usaha ekonomi kreatif.
- c. Membantu penyebaran informasi online marketing bagi pelaku usaha ekonomi kreatif.



## B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam pengelolaan keuangan daerah, terdapat 5 (lima) siklus utama yang wajib dilaksanakan terdiri dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, pengawasan dan pertanggungjawaban. Perencanaan merupakan siklus paling awal yang pada dasarnya.

Era pembangunan berbasis kinerja bukan masalah bagaimana program / kegiatan sudah dilaksanakan atau belum dan seberapa besar realisasi serapan anggaran, melainkan bagaimana target sasaran strategis jangka menengah yang telah ditetapkan tercapai atau tidak, sehingga pembangunan berbasis kinerja sesungguhnya merupakan upaya untuk mencapai efisiensi pelaksanaan program / kegiatan dan sumber daya anggaran yang diukur dari keluaran, hasil maupun dampak.

Era pembangunan berbasis kinerja bukan masalah bagaimana program / kegiatan sudah dilaksanakan atau belum dan seberapa besar realisasi serapan anggaran, melainkan bagaimana target sasaran strategis jangka menengah yang telah ditetapkan tercapai atau tidak, sehingga pembangunan berbasis kinerja sesungguhnya merupakan upaya untuk mencapai efisiensi pelaksanaan program / kegiatan dan sumber daya anggaran yang diukur dari keluaran, hasil maupun dampak.

### Realisasi Anggaran pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Sibolga Tahun 2022

No	Perangkat Daerah	Anggaran	Realisasi	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	145.593.101.107,00	124.563.135.371,00	85,56
2	Dinas Kesehatan	78.042.199.358,00	68.282.513.237,00	87,49
3	RSU dr. F.L. Tobing	40.853.688.108,00	27.132.017.438,84	66,41
4	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	26.078.887.032,00	22.274.664.870,00	85,41
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.267.408.400,00	4.810.338.884,00	91,32
6	Satuan Polisi Pamong Praja	11.363.794.994,00	11.080.840.632,00	97,51
7	Dinas Sosial	12.655.827.903,00	11.836.254.150,00	93,52
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.663.148.550,00	5.356.152.162,00	94,58
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.568.837.968,00	4.782.238.966,00	85,87



10	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7.744.393.061,00	7.196.649.614,00	92,93
11	Dinas Perhubungan	7.078.662.636,00	6.667.468.326,00	94,19
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	8.636.891.052,00	8.166.090.106,00	94,55
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan	7.506.644.918,00	6.394.751.530,00	85,19
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	5.209.097.842,00	4.716.763.682,00	90,55
15	Dinas Perpustakaan	3.547.737.757,00	3.348.494.331,00	94,38
16	Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan dan Pertanian	32.951.286.533,00	13.064.057.144,00	39,65
17	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	43.619.251.130,00	41.723.140.202,00	95,65
18	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	13.087.847.974,00	18.397.938.620,00	140,57
19	Sekretariat Daerah	48.536.199.459,00	46.318.149.984,00	95,43
20	Inspektorat	8.190.289.171,00	7.656.602.543,00	93,48
21	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.876.390.538,00	5.028.804.955,00	85,58
22	Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah	701.997.938.584,67	689.300.956.569,22	98,19
23	Badan Kepegawaian Daerah	6.546.035,00	5.549.212.450,00	84,77
24	Sekretariat DPRD	46.212.150.061,00	34.066.616.828,00	73,72
25	Kecamatan Sibolga Utara	5.890.096.236,00	5.578.050.018,00	94,70
26	Kecamatan Sibolga Kota	4.886.318.412,00	4.390.807.675,00	89,86
27	Kecamatan Sibolga Selatan	5.528.135.519,00	5.154.197.844,00	93,23
28	Kecamatan Sibolga Sambas	4.915.327.780,00	4.702.528.753,00	95,67
29	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	10.439.641.141,00	9.423.950.989,00	90,27
30	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<b>94.508.101.846,00</b>	<b>82.169.413.062,00</b>	<b>86,9</b>
	<b>JUMLAH</b>	<b>162.972.300.966,19</b>	<b>175.814.578.217,39</b>	





### BAB III

#### CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

##### 3.1 Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

- A. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
  - Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022
  - Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022
  - Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Satuan Pendidikan; dan
  - Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan
- B. Dinas Kesehatan
  - Perpres Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022;
  - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 116 Tahun 2022 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun Anggaran 2022; dan
  - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2022.
- C. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
  - Peraturan Kepala BKKBN Nomor 2 Tahun 2022
- D. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
  - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik

##### 3.2 Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa yang dimaksudkan dengan Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

Urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten/Kota merupakan urusan pemerintahan konkuren. Anggaran untuk melaksanakan Tugas Pembantuan disediakan oleh Kementerian/Lembaga. Selanjutnya penugasan oleh Pemerintah kepada Daerah berdasarkan asas Tugas Pembantuan ditetapkan dengan peraturan menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian. Dalam penyelenggaraan Tugas Pembantuan, daerah



berhak menetapkan kebijakan daerah dalam melaksanakan Tugas Pembantuan, terkait dengan pengaturan mengenai pelaksanaan Tugas Pembantuan di daerahnya.

### 3.3 Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

#### 3.3.1 TARGET KINERJA

##### a. DINAS PENDIDIKAN

##### Dana Alokasi Khusus (Dak) Fisik Reguler/Penugasan/Afirmasi\*)

No	Sub Bidang /Tematik/Kegiatan	Kegiatan			
		Volume	Satuan	Jumlah	Pagu DAK Fisik (Rp)
1	2	3	4	5	6
I	<b>SUBBIDANG SD</b>				<b>1.000.000.000</b>
	Bukan Tematik				
	<b>A. Revitalisasi SD</b>				<b>951.000.000</b>
	<b>Pengadaan Peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK)</b>				<b>411.000.000</b>
	1 Pengadaan peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) SDN 085116 Sibolga	1	Paket	1 Sekolah	137.000.000
	2 Bantuan Hibah Pengadaan peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) SD HKBP 2	1	Paket	1 Sekolah	137.000.000
	3 Bantuan Hibah Pengadaan peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) SD MUHAMMADIYAH I	1	Paket	1 Sekolah	137.000.000
	<b>Pengadaan Media Pendidikan</b>				<b>540.000.000</b>
	1 Pengadaan media pendidikan SDN 085116 SIBOLGA	3	Paket	1 Sekolah	180.000.000
	2 Bantuan Hibah Pengadaan media pendidikan SD HKBP 2	3	Paket	1 Sekolah	180.000.000
	3 Bantuan Hibah Pengadaan media pendidikan SD MUHAMMADIYAH I	3	Paket	1 Sekolah	180.000.000
	<b>B. Kegiatan Penunjang</b>				<b>49.000.000</b>
	1 Penyelenggaraan rapat	4	Frekuensi		43.600.000



No	Sub Bidang /Tematik/Kegiatan	Kegiatan			
		Volume	Satuan	Jumlah	Pagu DAK Fisik (Rp)
1	2	3	4	5	6
	koordinasi di pemerintah daerah				
2	Perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pengawasan	2	Frekuensi		5.400.000
	<b>Subbidang SMP</b>				<b>2.060.514.000</b>
	Bukan Tematik				
	<b>A. Revitalisasi SMP</b>				<b>2.030.366.000</b>
	<b>Rehabilitasi</b>				<b>1.547.009.000</b>
1	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya SMP Negeri 6 Sibolga	3	Ruang	1 Sekolah	530.511.000
2	Rehabilitasi ruang perpustakaan dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya SMP Negeri 6 Sibolga	1	Ruang	1 Sekolah	294.735.000
3	Rehabilitasi ruang laboratorium Ilmu pengetahuan alam (IPA) dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya SMP Negeri 6 Sibolga	1	Ruang	1 Sekolah	331.574.000
4	Rehabilitasi ruang guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya SMP Negeri 6 Sibolga	1	Ruang	1 Sekolah	294.735.000
5	Rehabilitasi toilet (jamban) dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta sanitasinya SMP Negeri 6 Sibolga	1	Ruang	1 Sekolah	95.454.000
	<b>Pengadaan Peralatan Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Fisika</b>				<b>212.320.000</b>



No	Sub Bidang /Tematik/Kegiatan	Kegiatan			
		Volume	Satuan	Jumlah	Pagu DAK Fisik (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Pengadaan peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA) Fisika SMP Negeri 4 Sibolga	1	Paket	1 Sekolah	26.540.000
2	Pengadaan peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA) Fisika SMP Negeri 6 Sibolga	1	Paket	1 Sekolah	26.540.000
3	Bantuan Hibah Pengadaan peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA) Fisika SMP Swasta FATIMA Sibolga	3	Paket	1 Sekolah	79.620.000
4	Pengadaan peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA) Fisika SMP Negeri 7 Sibolga	3	Paket	1 Sekolah	79.620.000
<b>Pengadaan Peralatan Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Biologi</b>					<b>198.160.000</b>
1	Pengadaan peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA) Biologi SMP Negeri 4 Sibolga	1	Paket	1 Sekolah	24.770.000
2	Pengadaan peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA) Biologi SMP Negeri 6 Sibolga	1	Paket	1 Sekolah	24.770.000
3	Bantuan Hibah Pengadaan peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA) Biologi SMP Swasta FATIMA Sibolga	3	Paket	1 Sekolah	74.310.000
4	Pengadaan peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA) Biologi SMP Negeri 7 Sibolga	3	Paket	1 Sekolah	74.310.000



No	Sub Bidang /Tematik/Kegiatan	Kegiatan			
		Volume	Satuan	Jumlah	Pagu DAK Fisik (Rp)
1	2	3	4	5	6
	<b>B. Kegiatan Penunjang</b>				<b>72.877.000</b>
1	Desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual	3	Paket		30.822.000
2	Jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual	12	Orang / Bulan		14.400.000
3	Penyelenggaraan pengawas rapat koordinasi di pemerintah daerah	4	Frekuensi		22.560.000
4	Perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengadilan, dan pengawasan	1	Frekuensi		5.095.000

**Dak Non Fifik Paud, Paket B Dan Paket C Tahun 2022**

No	Sub Bidang /Tematik/Kegiatan	Kegiatan			
		Volume	Satuan	Jumlah	Pagu DAK Fisik (Rp)
1	2	3	4	5	6
	BOP PAUD (DAK Non Fisik)	2 Tahap	Orang	4814	1.624.381.000
	BOP Pendidikan Kesetaraan Paket B (DAK Non Fisik)	2 Tahap	Orang	76	57.000.000
	BOP Pendidikan Kesetaraan Paket C (DAK Non Fisik)	2 Tahap	Orang	188	169.200.000

**Tunjangan Profesi Tahun 2022**

No	Sub Bidang /Tematik/Kegiatan	Kegiatan			
		Volume	Satuan	Jumlah	Pagu DAK Fisik (Rp)
1	2	3	4	5	6
	TK	4 Triwulan	Orang	45	477.970.200
	SD	4 Triwulan	Orang	890	9.881.692.100
	SMP	4 Triwulan	Orang	605	7.254.794.320
	PENGAWAS	4 Triwulan	Orang	13	184.678.600



### Tambahan Penghasilan Guru Pns Tahun 2022

No	Sub Bidang /Tematik/Kegiatan	Kegiatan			
		Volume	Satuan	Jumlah	Pagu DAK Fisik (Rp)
1	2	3	4	5	6
	TK	4 Triwulan	Orang	4	3.000.000
	SD	4 Triwulan	Orang	496	71.000.000
	SMP	4 Triwulan	Orang	241	80.250.000

### Program Indonesia Pintar Tahun 2022

No	Sub Bidang /Tematik/Kegiatan	Kegiatan			
		Volume	Satuan	Jumlah	Pagu DAK Fisik (Rp)
1	2	3	4	5	6
	SD	4 Triwulan	Orang	4546	1.806.975.000
	SMP	4 Triwulan	Orang	2653	1.597.500.000

#### b. DINAS KESEHATAN

No	Sub Bidang /Tematik/Kegiatan	Kegiatan			
		Volume	Satuan	Jumlah	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5	6
	<b>DAK FISIK</b>				
	<b>Penguatan Percepatan Penurunan Stunting</b>	3 Puskesmas	Puskesmas	3 Puskesmas	<b>169.089.450</b>
	- 02-Penguatan promosi, surveilans dan tata laksana gizi				169.089.450
	<b>Pengendalian Penyakit</b>	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	<b>979.832.960</b>
	- Bahan Habis Pakai (BHP)				979.832.960
	<b>Penguatan Sistem Kesehatan</b>	1 Puskesmas	Puskesmas	1 Puskesmas	<b>138.200.000</b>
	- Penyediaan alat kesehatan Puskesmas				138.200.000
	<b>Kefarmasian</b>	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	<b>3.068.906.000</b>
	- Penyediaan obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)				3.068.906.000
	<b>DAK NON FISIK</b>				
	<b>BOK Kabupaten/Kota</b>				<b>1.429.606.100</b>
	Upaya Penurunan AKI-AKB	6 Kegiatan	Kegiatan	6 Kegiatan	227.917.100



No	Sub Bidang /Tematik/Kegiatan	Kegiatan			
		Volume	Satuan	Jumlah	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5	6
	Upaya Percepatan perbaikan gizi masyarakat	5 Kegiatan	Kegiatan	5 Kegiatan	284.458.700
	Upaya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	4 Kegiatan	Kegiatan	4 Kegiatan	96.162.200
	Upaya deteksi dini, preventif, dan respons penyakit	8 Kegiatan	Kegiatan	8 Kegiatan	415.530.900
	Akselerasi Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK)	3 Kegiatan	Kegiatan	3 Kegiatan	38.728.000
	Upaya Penyehatan Lingkungan	5 Kecamatan	Kecamatan	5 Kec.	20.142.000
	Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 19 (COVID-19)	3 Kegiatan	Kegiatan	3 Kegiatan	193.094.800
	Akreditasi Puskesmas	5 Kali	Kali	5 Kali	85.602.400
	Distribusi Obat, Vaksin Dan BMHP Dari Instalasi Farmasi Kab/Kota ke Puskesmas	1 Kegiatan	Kegiatan	1 Kegiatan	67.970.000
	<b>BOK Puskesmas</b>				<b>12.999.730.900</b>
	Upaya Penurunan AKI-AKB	12 Bulan	Bulan	12 Bulan	2.656.740.400
	Upaya Perbaikan gizi masyarakat	12 Bulan	Bulan	12 Bulan	2.784.654.000
	Upaya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	12 Bulan	Bulan	12 Bulan	1.747.558.700
	Upaya deteksi dini, preventif, dan respons penyakit	12 Bulan	Bulan	12 Bulan	3.399.910.400
	STBM Desa/ Kelurahan Prioritas	12 Bulan	Bulan	12 Bulan	45.000.000
	Akselerasi Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK)	12 Bulan	Bulan	12 Bulan	478.510.500
	Fungsi Manajemen Puskesmas (P1, P2, P3)	12 Bulan	Bulan	12 Bulan	148.361.200
	Upaya Kesehatan Lanjut Usia	12 Bulan	Bulan	12 Bulan	114.398.000
	Upaya Pencegahan Pengendalian Covid-19	12 Bulan	Bulan	12 Bulan	649.866.300
	Insentif UKM	12 Bulan	Bulan	12 Bulan	974.731.400
	<b>BOK Stunting</b>				<b>66.951.000</b>
	Penyusunan Regulasi daerah terkait	2 Pertemuan	Pertemuan	2 Pertemuan	4.330.000



No	Sub Bidang /Tematik/Kegiatan	Kegiatan			
		Volume	Satuan	Jumlah	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5	6
	stunting, termasuk regulasi dan Strategi komunikasi Perubahan Perilaku Pencegahan Stunting tingkat Kabupaten/kota.				
	Pemetaan dan Analisis Situasi program stunting.	1 Pertemuan	Pertemuan	1 Pertemuan	6.485.000
	Pelaksanaan rembuk stunting.	4 Pertemuan	Pertemuan	4 Pertemuan	11.980.000
	Pembinaan kader pembangunan manusia terkait seribu hari pertama kehidupan, pemantauan pertumbuhan dan perkembangan bayi dan balita, optimaliasi dana desa untuk intervensi stunting termasuk peningkatan kapasitas kader dalam Komunikasi Antar Pribadi (KAP) terkait stunting; implementasi KAP dan Penggerakan masyarakat.	12 Bulan	Bulan	12 Bulan	7.568.700
	Pengukuran dan publikasi stunting.	12 Bulan	Bulan	12 Bulan	22.202.500
	Pencatatan dan Pelaporan (termasuk dokumentasi) intervensi dan hasil.	12 Bulan	Bulan	12 Bulan	5.270.000
	Reviu kinerja tahunan aksi integrasi stunting.	12 Bulan	Bulan	12 Bulan	9.114.800
	<b>Jampersal</b>				<b>57.670.000</b>
	Rujukan persalinan dan neonatal (biaya transportasi dan/atau sewa alat transportasi)	1 Kegiatan	Kegiatan	1 Kegiatan	57.670.000
	<b>BPOM</b>	12 Bulan	Bulan	12 Bulan	
	Pengawasan Obat dan Makanan	12 Bulan	Bulan	12 Bulan	<b>406.876.000</b>





**c. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK**

No	Sub Bidang /Tematik/Kegiatan	Kegiatan			
		Volume	Satuan	Jumlah	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5	6
	Penyediaan dan distribusi sarana KIE program KKBPK	1 Tahun			1.280.569.000

**d. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

No	Sub Bidang /Tematik/Kegiatan	Kegiatan			
		Volume	Satuan	Jumlah	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	<b>AIR MINUM</b>				<b>525.000.000</b>
	<b>PERLUASAN SPAM JP</b>				<b>525.000.000</b>
	<b>Pengembangan jaringan distribusi dan sambungan rumah (SR) Kecamatan Sibolga Utara Kelurahan Sibolga Ilir</b>				<b>498.750.000</b>
	Jaringan Perpipaan	3000 M	Meter	3000 M	498.750.000
	Sambungan Rumah/SR	150 SR	SR	150 SR	
	<b>Kegiatan Penunjang</b>				<b>26.250.000</b>
	1. Jasa pendamping/fasilitator non Aparatur Sipil Negara kegiatan DAK Fisik yang dilakukan secara swakelola	12 Orang/bulan	Orang/bulan	12 Orang/bulan	19.200.000
	2. Penyelenggaraan rapat koordinasi di pemerintah daerah (Penugasan)	5 Frekuensi	Frekuensi	5 Frekuensi	7.050.000
	<b>SANITASI</b>				<b>1.121.300.000</b>
	<b>PEMBANGUNAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK SETEMPAT (SPALD-S)</b>	<b>120</b>		<b>120</b>	<b>1.065.300.000</b>
	Pembuatan Tangki Septik Individual di Kelurahan Angin Nauli, Kecamatan Sibolga Utara	40 Unit	Unit	40 Unit	355.100.000
	Tangki septic individual				
	Pembuatan Tangki Septik Individual di Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan	40 Unit	Unit	40 Unit	355.100.000
	Tangki septic individual				
	Pembuatan Tangki Septik Individual di Kelurahan Pancuran Pinang, Kecamatan Sibolga Sambas	40 Unit	Unit	40 Unit	355.100.000



No	Sub Bidang /Tematik/Kegiatan	Kegiatan			
		Volume	Satuan	Jumlah	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5	6
	Tangki septic individual				
	<b>Kegiatan Penunjang</b>				<b>56.000.000</b>
	1. Jasa pendamping/fasilitator non Aparatur Sipil Negara kegiatan DAK Fisik yang dilakukan secara swakelola	12 Orang/ Bulan	Orang/ Bulan	12 Orang/ Bulan	36.000.000
	2. Penyelenggaraan rapat koordinasi di pemerintah daerah (Penugasan)	8 Frekuensi	Frekuensi	8 Frekuensi	20.000.000
	<b>Penanganan Jalan</b>				
	<b>Pemeliharaan Berkala Jalan</b>	<b>2,77 km</b>	<b>km</b>	<b>2,77 km</b>	<b>22.068.168.000</b>
	1. Pemeliharaan Berkala dan Peningkatan Jl. Bukit Barisan Kota Sibolga	0,21 km	km	0,21 km	2.300.000.000
	2. Pemeliharaan Berkala dan Peningkatan Jl. Sibolga Baru Kota Sibolga	0,400 km	km	0,400 km	2.331.312.000
	3. Pemeliharaan Berkala dan Peningkatan Jl. Rasak Kota Sibolga	0,29 km	km	0,29 km	1.300.000.000
	4. Pemeliharaan Berkala dan Peningkatan Jl. KH. Ahmad Dahlan Kota Sibolga	0,627 km	km	0,627 km	5.459.198.000
	5. Peningkatan Jl. Ke Sumber Mata Air PDAM Tirta Nauli (Lapen-Hotmix)	0,600 km	km	0,600 km	2.863.932.000
	6. Peningkatan Jl. Kakap (Hotmix-Rigid) Kota Sibolga	0,640 km	km	0,640 km	7.813.726.000
	<b>Kegiatan Penunjang</b>				<b>518.400.000</b>
	1. Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual	2 Paket	Paket	2 Paket	518.400.0

### 3.3.2 Realisasi Kinerja

#### a. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SIBOLGA

##### Dana Alokasi Khusus (Dak) Fisik Reguler/Penugasan/Afirmasi\*)

No	Sub Bidang /Tematik/Kegiatan	Realisasi			
		Volume	Satuan	%	Keuangan (Rp)
1	2	3	4	5	6
I	<b>SUBBIDANG SD</b>				
	Bukan Tematik				



No	Sub Bidang /Tematik/Kegiatan	Realisasi			
		Volume	Satuan	%	Keuangan (Rp)
1	2	3	4	5	6
	<b>A. Revitalisasi SD</b>				<b>950.182.180</b>
	<b>Pengadaan Peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK)</b>				<b>411.000.000</b>
	1 Pengadaan peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) SDN 085116 Sibolga	1	Paket	100%	136.872.990
	2 Bantuan Hibah Pengadaan peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) SD HKBP 2	1	Paket	100%	136.872.990
	3 Bantuan Hibah Pengadaan peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) SD MUHAMMADIYAH I	1	Paket	100%	136.872.990
	<b>Pengadaan Media Pendidikan</b>				<b>539.563.210</b>
	1 Pengadaan media pendidikan SDN 085116 SIBOLGA	3	Paket	100%	179.943.210
	2 Bantuan Hibah Pengadaan media pendidikan SD HKBP 2	3	Paket	100%	179.810.000
	3 Bantuan Hibah Pengadaan media pendidikan SD MUHAMMADIYAH I	3	Paket	100%	179.810.000
	<b>B. Kegiatan Penunjang</b>				<b>49.000.000</b>
	1 Penyelenggaraan rapat koordinasi di pemerintah daerah	4	Frekuensi	100%	43.600.000
	2 Perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pengawasan	2	Frekuensi	100%	5.400.000
	<b>Subbidang SMP</b>				<b>2.060.514.000</b>
	Bukan Tematik				
	<b>A. Revitalisasi SMP</b>				<b>2.030.366.000</b>
	Rehabilitasi				<b>879.938.000</b>



No	Sub Bidang /Tematik/Kegiatan	Realisasi			
		Volume	Satuan	%	Keuangan (Rp)
1	2	3	4	5	6
	1 Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya SMP Negeri 6 Sibolga	3	Ruang	100%	488.292.400
	2 Rehabilitasi ruang perpustakaan dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya SMP Negeri 6 Sibolga	1	Ruang	100%	Sudah dikerjakan dari Dana P.APBD Tahun 2021 dikarenakan tidak dapat ditunda
	3 Rehabilitasi ruang laboratorium Ilmu pengetahuan alam (IPA) dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya SMP Negeri 6 Sibolga	1	Ruang	100%	
	4 Rehabilitasi ruang guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya SMP Negeri 6 Sibolga	1	Ruang	100%	259.365.200
	5 Rehabilitasi toilet (jamban) dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta sanitasinya SMP Negeri 6 Sibolga	1	Ruang	100%	88.283.500
	<b>Pengadaan Peralatan Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Fisika</b>				<b>211.935.526</b>
	1 Pengadaan peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA) Fisika SMP Negeri 4 Sibolga	1	Paket	100%	26.530.000
	2 Pengadaan peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA) Fisika SMP Negeri 6 Sibolga	1	Paket	100%	26.535.000



No	Sub Bidang /Tematik/Kegiatan	Realisasi			
		Volume	Satuan	%	Keuangan (Rp)
1	2	3	4	5	6
	3 Bantuan Hibah Pengadaan peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA) Fisika SMP Swasta FATIMA Sibolga	3	Paket	100%	79.435.263
	4 Pengadaan peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA) Fisika SMP Negeri 7 Sibolga	3	Paket	100%	79.435.263
	<b>Pengadaan Peralatan Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Biologi</b>				<b>197.583.122</b>
	1 Pengadaan peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA) Biologi SMP Negeri 4 Sibolga	1	Paket	100%	24.760.000
	2 Pengadaan peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA) Biologi SMP Negeri 6 Sibolga	1	Paket	100%	24.760.000
	3 Bantuan Hibah Pengadaan peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA) Biologi SMP Swasta FATIMA Sibolga	3	Paket	100%	74.031.561
	4 Pengadaan peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA) Biologi SMP Negeri 7 Sibolga	3	Paket	100%	74.301.561
	<b>B. Kegiatan Penunjang</b>				<b>72.857.000</b>
	1 Desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual	3	Paket	100%	30.822.000
	2 Jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual	12	Orang / Bulan	100%	14.400.000
	3 Penyelenggaraan pengawas rapat koordinasi di pemerintah	4	Frekuensi	100%	22.560.000



No	Sub Bidang /Tematik/Kegiatan	Realisasi			
		Volume	Satuan	%	Keuangan (Rp)
1	2	3	4	5	6
	daerah				
4	Perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengadilan, dan pengawasan	1	Frekuensi	100%	5.095.000

**Dak Non Fifik Paud, Paket B Dan Paket C Tahun 2022**

No	Sub Bidang /Tematik/Kegiatan	Realisasi			
		Volume	Satuan	Jumlah	Keuangan (Rp)
1	2	3	4	5	6
	BOP PAUD (DAK Non Fisik)	2 Tahap	Orang	4814	1.624.381.000
	BOP Pendidikan Kesetaraan Paket B (DAK Non Fisik)	2 Tahap	Orang	76	57.000.000
	BOP Pendidikan Kesetaraan Paket C (DAK Non Fisik)	2 Tahap	Orang	188	169.200.000

**Tunjangan Profesi Tahun 2022**

No	Sub Bidang /Tematik/Kegiatan	Realisasi			
		Volume	Satuan	Jumlah	Keuangan (Rp)
1	2	3	4	5	6
	TK	4 Triwulan	Orang	45	477.970.200
	SD	4 Triwulan	Orang	890	9.881.692.100
	SMP	4 Triwulan	Orang	605	7.254.794.320
	PENGAWAS	4 Triwulan	Orang	13	184.678.600

**Tambahan Penghasilan Guru Pns Tahun 2022**

No	Sub Bidang /Tematik/Kegiatan	Realisasi			
		Volume	Satuan	Jumlah	Keuangan (Rp)
1	2	3	4	5	6



	TK	4 Triwulan	Orang	4	3.000.000
	SD	4 Triwulan	Orang	496	71.000.000
	SMP	4 Triwulan	Orang	241	80.250.000

**Program Indonesia Pintar Tahun 2022**

No	Sub Bidang /Tematik/Kegiatan	Realisasi			
		Volume	Satuan	Jumlah	Keuangan (Rp)
1	2	3	4	5	6
	SD	4 Triwulan	Orang	4546	1.806.975.000
	SMP	4 Triwulan	Orang	2653	1.597.500.000

**b. DINAS KESEHATAN**

No	Sub Bidang /Tematik/Kegiatan	Realisasi			
		Volume	Satuan	%	Keuangan (Rp)
1	2	3	4	5	6
	<b>DAK FISIK</b>				
	<b>Penguatan Percepatan Penurunan Stunting</b>	3 Puskesmas	Puskesmas	100	160.750.000
	- 02-Penguatan promosi, surveilans dan tata laksana gizi				160.750.000
	<b>Pengendalian Penyakit</b>	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	100	947.956.640
	- Bahan Habis Pakai (BHP)				950.389.891
	<b>Penguatan Sistem Kesehatan</b>	1 Puskesmas	Puskesmas	100	136.068.791
	- Penyediaan alat kesehatan Puskesmas				134.897.000
	<b>Kefarmasian</b>	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	100	2.832.768.714
	- Penyediaan obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)				2.832.768.714
	<b>DAK NON FISIK</b>				
	<b>BOK Kabupaten/Kota</b>				
	Upaya Penurunan AKI-AKB	6 Kegiatan	Kegiatan	100	213.230.400
	Upaya Percepatan perbaikan gizi masyarakat	5 Kegiatan	Kegiatan	100	266.074.300
	Upaya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	4 Kegiatan	Kegiatan	100	94.987.500



No	Sub Bidang /Tematik/Kegiatan	Realisasi			
		Volume	Satuan	%	Keuangan (Rp)
1	2	3	4	5	6
	Upaya deteksi dini, preventif, dan respons penyakit	8 Kegiatan	Kegiatan	100	379.896.500
	Akselerasi Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK)	3 Kegiatan	Kegiatan		-
	Upaya Penyehatan Lingkungan	5 Kecamatan	Kecamatan	100	19.555.200
	Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 19 (COVID-19)	3 Kegiatan	Kegiatan	100	192.288.000
	Akreditasi Puskesmas	5 Kali	Kali		-
	Distribusi Obat, Vaksin Dan BMHP Dari Instalasi Farmasi Kab/Kota ke Puskesmas	1 Kegiatan	Kegiatan	100	66.775.300
	<b>BOK Puskesmas</b>				8.924.078.150
	Upaya Penurunan AKI-AKB	12 Bulan	Bulan	100	2.312.424.800
	Upaya Perbaikan gizi masyarakat	12 Bulan	Bulan	100	2.207.298.600
	Upaya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	12 Bulan	Bulan	100	1.327.595.800
	Upaya deteksi dini, preventif, dan respons penyakit	12 Bulan	Bulan	100	2.298.427.150
	STBM Desa/ Kelurahan Prioritas	12 Bulan	Bulan	100	31.630.000
	Akselerasi Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK)	12 Bulan	Bulan	100	314.767.500
	Fungsi Manajemen Puskesmas (P1, P2, P3)	12 Bulan	Bulan	100	122.237.200
	Upaya Kesehatan Lanjut Usia	12 Bulan	Bulan	100	97.944.500
	Upaya Pencegahan Pengendalian Covid-19	12 Bulan	Bulan	100	211.752.600
	Insentif UKM	12 Bulan	Bulan		-
	<b>BOK Stunting</b>				58.936.450
	Penyusunan Regulasi daerah terkait stunting, termasuk regulasi dan Strategi komunikasi Perubahan Perilaku Pencegahan Stunting tingkat Kabupaten/kota.	2 Pertemuan	Pertemuan	100	4.095.000
	Pemetaan dan Analisis Situasi program	1 Pertemuan	Pertemuan	100	6.197.500





No	Sub Bidang /Tematik/Kegiatan	Realisasi			
		Volume	Satuan	%	Keuangan (Rp)
1	2	3	4	5	6
	stunting.				
	Pelaksanaan rembuk stunting.	4 Pertemuan	Pertemuan	100	10.205.000
	Pembinaan kader pembangunan manusia terkait seribu hari pertama kehidupan, pemantauan pertumbuhan dan perkembangan bayi dan balita, optimaliasi dana desa untuk intervensi stunting termasuk peningkatan kapasitas kader dalam Komunikasi Antar Pribadi (KAP) terkait stunting; implementasi KAP dan Penggerakan masyarakat.	12 Bulan	Bulan	100	6.920.050
	Pengukuran dan publikasi stunting.	12 Bulan	Bulan	100	21.230.000
	Pencatatan dan Pelaporan (termasuk dokumentasi) intervensi dan hasil.	12 Bulan	Bulan	100	1.762.500
	Reviu kinerja tahunan aksi integrasi stunting.	12 Bulan	Bulan	100	8.526.400
	<b>Jampersal</b>				-
	Rujukan persalinan dan neonatal (biaya transportasi dan/atau sewa alat transportasi)	1 Kegiatan	Kegiatan	0	-
	<b>BPOM</b>	12 Bulan	Bulan		361.288.800
	Pengawasan Obat dan Makanan	12 Bulan	Bulan	100	361.288.800

**c. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK**

No	Sub Bidang /Tematik/Kegiatan	Realisasi			
		Volume	Satuan	%	Keuangan (Rp)
1	2	3	4	5	6
	Penyediaan dan distribusi sarana KIE program KKBPK	1 Tahun		100	1.221.693.890



**d. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

No	Sub Bidang /Tematik/Kegiatan	Realisasi			
		Volume	Satuan	%	Keuangan (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	<b>AIR MINUM</b>				
	<b>PERLUASAN SPAM JP</b>				
	<b>Pengembangan jaringan distribusi dan sambungan rumah (SR) Kecamatan Sibolga Utara Kelurahan Sibolga Ilir</b>				<b>498.750.000</b>
	Jaringan Perpipaan	3000 M	Meter	100	498.750.000
	Sambungan Rumah/SR	150 SR	SR		
	<b>Kegiatan Penunjang</b>				<b>26.240.100</b>
	1. Jasa pendamping/fasilitator non Aparatur Sipil Negara kegiatan DAK Fisik yang dilakukan secara swakelola	12 Orang/bulan	Orang/bulan	100	19.200.000
	2. Penyelenggaraan rapat koordinasi di pemerintah daerah (Penugasan)	5 Frekuensi	Frekuensi	100	7.040.100
	<b>SANITASI</b>				
	<b>PEMBANGUNAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK SETEMPAT (SPALD-S)</b>	<b>120</b>		<b>100</b>	<b>1.065.300.000</b>
	Pembuatan Tangki Septik Individual di Kelurahan Angin Nauli, Kecamatan Sibolga Utara	40 Unit	Unit	100	355.100.000
	Tangki septic individual				
	Pembuatan Tangki Septik Individual di Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan	40 Unit	Unit	100	355.100.000
	Tangki septic individual				
	Pembuatan Tangki Septik Individual di Kelurahan Pancuran Pinang, Kecamatan Sibolga Sambas	40 Unit	Unit	100	355.100.000
	Tangki septic individual				
	<b>Kegiatan Penunjang</b>				<b>55.993.500</b>



No	Sub Bidang /Tematik/Kegiatan	Realisasi			
		Volume	Satuan	%	Keuangan (Rp)
1	2	3	4	5	6
	1. Jasa pendamping/fasilitator non Aparatur Sipil Negara kegiatan DAK Fisik yang dilakukan secara swakelola	12 Orang/ Bulan	Orang/ Bulan	100	36.000.000
	2. Penyelenggaraan rapat koordinasi di pemerintah daerah (Penugasan)	8 Frekuensi	Frekuensi	100	19.993.500
	<b>Penanganan Jalan</b>				
	<b>Pemeliharaan Berkala Jalan</b>	<b>2,77 km</b>	km	<b>85</b>	<b>19.442.903.200</b>
	1. Pemeliharaan Berkala dan Peningkatan Jl. Bukit Barisan Kota Sibolga	0,21 km	km	35	678.796.500
	2. Pemeliharaan Berkala dan Peningkatan Jl. Sibolga Baru Kota Sibolga	0,400 km	km	100	2.312.007.000
	3. Pemeliharaan Berkala dan Peningkatan Jl. Rasak Kota Sibolga	0,29 km	km	95	1.155.408.300
	4. Pemeliharaan Berkala dan Peningkatan Jl. KH. Ahmad Dahlan Kota Sibolga	0,627 km	km	100	5.421.705.000
	5. Peningkatan Jl. Ke Sumber Mata Air PDAM Tirta Nauli (Lapen-Hotmix)	0,600 km	km	80	2.125.442.400
	6. Peningkatan Jl. Kakap (Hotmix-Rigid) Kota Sibolga	0,640 km	km	100	7.749.544.000
	<b>Kegiatan Penunjang</b>			<b>100</b>	<b>505.549.637</b>
	1. Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual	2 Paket	Paket	100	505.549.637



MATRIKS CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN PUSAT  
YANG DILAKSANAKAN OLEH DAERAH KABUPATEN/KOTA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian	Dasar Pelaksanaan Penugasan (Tp)	Program, Kegiatan, Output, Dan Rincian Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	<b>DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK REGULER/PENUGASAN/AFIRMASI*)</b>										
	Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian	Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022	<b>BIDANG PENDIDIKAN REGULER SEKOLAH DASAR</b> <b>Pengadaan Peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK)</b> - Pengadaan peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) SDN 085116 Sibolga - Bantuan Hibah Pengadaan peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) SD HKBP 2 - Bantuan Hibah Pengadaan peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) SD MUHAMMADIYAH I	Kota Sibolga	Dinas Pendidikan	1.000.000.000	987.982.180	98,79			
						411.000.000	410.618.970	99,91			
						137.000.000	136.872.990	99,91	1 Paket	100%	
						137.000.000	136.872.990	99,91	1 Paket	100%	
						137.000.000	136.872.990	99,91	1 Paket	100%	



No	Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian	Dasar Pelaksanaan Penugasan (Tp)	Program, Kegiatan, Output, Dan Rincian Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>Pengadaan Media Pendidikan</b> - Pengadaan media pendidikan SDN 085116 SIBOLGA - Bantuan Hibah Pengadaan media pendidikan SD HKBP 2 - Bantuan Hibah Pengadaan media pendidikan SD MUHAMMADIYAH I  <b>Kegiatan Penunjang</b> - Penyelenggaraan rapat koordinasi di pemerintah daerah - Perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pengawasan	Kota Sibolga	Dinas Pendidikan	<b>540.000.000</b> 180.000.000 180.000.000 180.000.000  <b>49.000.000</b> 43.600.000 5.400.000	<b>539.563.210</b> 179.943.210 179.810.000 179.810.000  <b>49.000.000</b> 43.600.000 5.400.000 -	99,92 99,97 99,89 99,89  100 100 100	3 Paket 3 Paket 3 Paket  4 Frekuensi 2 Frekuensi	100% 100% 100%  100% 100%	
			<b>Subbidang SMP</b>								
			<b>Bukan Tematik</b>								
			<b>A. Revitalisasi SMP</b>			2.060.514.000					
			<b>Rehabilitasi</b> - Rehabilitasi ruang	Kota Sibolga	Dinas Pendidikan	<b>1.547.009.000</b> 530.511.000	<b>879.938.000</b> 488.292.400	95%	3 Ruang	100%	



No	Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian	Dasar Pelaksanaan Penugasan (Tp)	Program, Kegiatan, Output, Dan Rincian Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya SMP Negeri 6 Sibolga - Rehabilitasi ruang perpustakaan dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya SMP Negeri 6 Sibolga - Rehabilitasi ruang laboratorium Ilmu pengetahuan alam (IPA) dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya SMP Negeri 6 Sibolga - Rehabilitasi ruang guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya SMP Negeri 6 Sibolga		dan Kebudayaan	294.735.000	Sudah dikerjakan dari Dana P.APBD Tahun 2021 dikarenakan tidak dapat ditunda					
						331.574.000						
						294.735.000		259.365.200	95%	1 Ruang	100%	
			- Rehabilitasi toilet (jamban) dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta sanitasinya	Kota Sibolga	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	95.454.000	88.283.500	95%	1 Ruang	100%		



No	Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian	Dasar Pelaksanaan Penugasan (Tp)	Program, Kegiatan, Output, Dan Rincian Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			SMP Negeri 6 Sibolga <b>Pengadaan Peralatan Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Fisika</b> - Pengadaan peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA) Fisika SMP Negeri 4 Sibolga - Pengadaan peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA) Fisika SMP Negeri 6 Sibolga - Bantuan Hibah Pengadaan peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA) Fisika SMP Swasta FATIMA Sibolga			212.320.000  26.540.000  26.540.000  79.620.000	211.935.526  26.530.000  26.535.000  79.435.263	100%  100%  100%	1 Paket  1 Paket  3 Paket	100%  100%  100%	



No	Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian	Dasar Pelaksanaan Penugasan (Tp)	Program, Kegiatan, Output, Dan Rincian Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengadaan peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA) Fisika SMP Negeri 7 Sibolga</li> <li><b>Pengadaan Peralatan Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Biologi</b></li> <li>- Pengadaan peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA) Biologi SMP Negeri 4 Sibolga</li> <li>- Pengadaan peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA) Biologi SMP Negeri 6 Sibolga</li> <li>- Bantuan Hibah Pengadaan peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA) Biologi SMP Swasta FATIMA Sibolga</li> </ul>	Kota Sibolga	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	79.620.000	79.435.263	100%	3 Paket	100%	
						<b>198.160.000</b>	<b>197.583.122</b>				
						24.770.000	24.760.000	100%	1 Paket	100%	
						24.770.000	24.760.000	100%	1 Paket	100%	
						74.310.000	74.031.561	100%	3 Paket	100%	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengadaan peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam</li> </ul>	Kota Sibolga	Dinas Pendidikan dan	74.310.000	74.301.561	100%	3 Paket	100%	





No	Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian	Dasar Pelaksanaan Penugasan (Tp)	Program, Kegiatan, Output, Dan Rincian Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			(IPA) Biologi SMP Negeri 7 Sibolga		Kebudayaan						
			<b>B. Kegiatan Penunjang</b>			<b>72.877.000</b>	<b>72.857.000</b>				
			- Desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual	Kota Sibolga	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	30.822.000	30.822.000	100%	3 Paket	100%	
			- Jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual			14.400.000	14.400.000	100%	12 Orang / Bulan	100%	
			- Penyelenggaraan pengawas rapat koordinasi di pemerintah daerah			22.560.000	22.560.000	100%	4 Frekuensi	100%	
			- Perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengadilan, dan pengawasan			5.095.000	5.075.000	99,6%	1 Frekuensi	100%	
2.	<b>DANA BOS TAHUN 2022</b>										
	a. Peraturan Menteri		<b>DAK NON FIFIK PAUD, PAKET B DAN PAKET C TAHUN 2022</b>								



No	Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian	Dasar Pelaksanaan Penugasan (Tp)	Program, Kegiatan, Output, Dan Rincian Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Satuan Pendidikan; dan b. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan		- BOP PAUD (DAK Non Fisik) - BOP Pendidikan Kesetaraan Paket B (DAK Non Fisik) - BOP Pendidikan Kesetaraan Paket C (DAK Non Fisik)	Kota Sibolga	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.624.381.000 57.000.000 169.200.000	1.624.381.000 57.000.000 169.200.000	100 100 100	4814 Orang 76 Orang 188 Orang	100 100 100		
			<b>TUNJANGAN PROFESI TAHUN 2022</b>									
				- TK - SD - SMP - PENGAWAS	Kota Sibolga	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	477.970.200 9.881.692.100 7.254.794.320 184.678.600	477.970.200 9.881.692.100 7.254.794.320 184.678.600	100 100 100 100	45 Orang 890 Orang 605 Orang 13 Orang	100 100 100 100	
				<b>TAMBAHAN PENGHASILAN GURU PNS TAHUN 2022</b>								
				- TK - SD - SMP	Kota Sibolga	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.000.000 371.000.000 180.250.000	3.000.000 371.000.000 180.250.000	100 100 100	4 Orang 496 Orang 241 Orang	100 100 100	
				<b>PROGRAM INDONESIA PINTAR TAHUN 2022</b>								
				- SD - SMP	Kota Sibolga	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.806.975.000 1.597.500.000	1.806.975.000 1.597.500.000	100 100	4546 Org 2653 Org	100 100	



**DINAS KESEHATAN**

No	Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian	Dasar Pelaksanaan Penugasan (Tp)	Program, Kegiatan, Output, Dan Rincian Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	a. Perpres Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022;		<b>DAK FISIK</b>								
			<b>Penguatan Percepatan Penurunan Stunting</b> - 02-Penguatan promosi, surveilans dan tata laksana gizi	Kota Sibolga	Dinas Kesehatan	<b>169.089.450</b> 169.089.450	<b>160.750.000</b> 160.750.000	<b>95,07</b>	3 Puskesmas	100	
	b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 116 Tahun 2022 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun Anggaran 2022; dan		<b>Pengendalian Penyakit</b> - Bahan Habis Pakai (BHP)	Kota Sibolga	Dinas Kesehatan	<b>979.832.960</b> 979.832.960	<b>947.956.640</b> 950.389.891	<b>97,00</b>	Dinas Kesehatan	100	
			<b>Penguatan Sistem Kesehatan</b> - Penyediaan alat kesehatan Puskesmas	Kota Sibolga	Dinas Kesehatan	<b>138.200.000</b> 138.200.000	<b>136.068.791</b> 134.897.000	<b>98,46</b>	1 Puskesmas	100	
	c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2022.		<b>Kefarmasian</b> - Penyediaan obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)	Kota Sibolga	Dinas Kesehatan	<b>3.068.906.000</b> 3.068.906.000	<b>2.832.768.714</b> 2.832.768.714	92,31	Dinas Kesehatan	100	
			<b>DAK NON FISIK</b>								
			<b>BOK Kabupaten/Kota</b>			<b>1.429.606.100</b>	<b>1.232.807.200</b>	<b>86,23</b>			
			Upaya Penurunan AKI- AKB	Kota Sibolga	Dinas Kesehatan	227.917.100	213.230.400	93,56	6 Kegiatan	100	
			Upaya Percepatan perbaikan gizi masyarakat	Kota Sibolga	Dinas Kesehatan	284.458.700	266.074.300	93,54	5 Kegiatan	100	
			Upaya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	Kota Sibolga	Dinas Kesehatan	96.162.200	94.987.500	98,78	4 Kegiatan	100	



No	Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian	Dasar Pelaksanaan Penugasan (Tp)	Program, Kegiatan, Output, Dan Rincian Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Upaya deteksi dini, preventif, dan respons penyakit	Kota Sibolga	Dinas Kesehatan	415.530.900	379.896.500	91,42	8 Kegiatan	100	
			Akselerasi Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK)	Kota Sibolga	Dinas Kesehatan	38.728.000	-	0	3 Kegiatan		
			Upaya Penyehatan Lingkungan	Kota Sibolga	Dinas Kesehatan	20.142.000	19.555.200	97,09	5 Kecamatan	100	
			Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 19 (COVID-19)	Kota Sibolga	Dinas Kesehatan	193.094.800	192.288.000	99,58	3 Kegiatan	100	
			Akreditasi Puskesmas	Kota Sibolga	Dinas Kesehatan	85.602.400	-	0	5 Kali		
			Distribusi Obat, Vaksin Dan BMHP Dari Instalasi Farmasi Kab/Kota ke Puskesmas	Kota Sibolga	Dinas Kesehatan	67.970.000	66.775.300	98,24	1 Kegiatan	100	
			<b>BOK Puskesmas</b>	Kota Sibolga	Dinas Kesehatan	<b>12.999.730.900</b>	<b>8.924.078.150</b>	<b>68,65</b>			
			Upaya Penurunan AKI-AKB	Kota Sibolga	Dinas Kesehatan	2.656.740.400	2.312.424.800	87,04	12 Bulan	100	
			Upaya Perbaikan gizi masyarakat	Kota Sibolga	Dinas Kesehatan	2.784.654.000	2.207.298.600	79,27	12 Bulan	100	
			Upaya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	Kota Sibolga	Dinas Kesehatan	1.747.558.700	1.327.595.800	75,97	12 Bulan	100	
			Upaya deteksi dini,	Kota	Dinas	3.399.910.400	2.298.427.150	67,60	12 Bulan	100	



No	Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian	Dasar Pelaksanaan Penugasan (Tp)	Program, Kegiatan, Output, Dan Rincian Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			preventif, dan respons penyakit	Sibolga	Kesehatan						
			STBM Desa/ Kelurahan Prioritas	Kota Sibolga	Dinas Kesehatan	45.000.000	31.630.000	70,29	12 Bulan	100	
			Akselerasi Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK)	Kota Sibolga	Dinas Kesehatan	478.510.500	314.767.500	65,78	12 Bulan	100	
			Fungsi Manajemen Puskesmas (P1, P2, P3)	Kota Sibolga	Dinas Kesehatan	148.361.200	122.237.200	82,39	12 Bulan	100	
			Upaya Kesehatan Lanjut Usia	Kota Sibolga	Dinas Kesehatan	114.398.000	97.944.500	85,62	12 Bulan	100	
			Upaya Pencegahan Pengendalian Covid-19	Kota Sibolga	Dinas Kesehatan	649.866.300	211.752.600	32,58	12 Bulan	100	
			Insentif UKM	Kota Sibolga	Dinas Kesehatan	974.731.400	-	0	12 Bulan		
			<b>BOK Stunting</b>	Kota Sibolga	Dinas Kesehatan	<b>66.951.000</b>	<b>58.936.450</b>	<b>88,03</b>			
			Penyusunan Regulasi daerah terkait stunting, termasuk regulasi dan Strategi komunikasi Perubahan Perilaku Pencegahan Stunting tingkat Kabupaten/kota.	Kota Sibolga	Dinas Kesehatan	4.330.000	4.095.000	94,57	2 Pertemuan	100	
			Pemetaan dan Analisis Situasi program stunting.	Kota Sibolga	Dinas Kesehatan	6.485.000	6.197.500	95,57	1 Pertemuan	100	
			Pelaksanaan rembuk stunting.	Kota Sibolga	Dinas Kesehatan	11.980.000	10.205.000	85,18	4 Pertemuan	100	



No	Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian	Dasar Pelaksanaan Penugasan (Tp)	Program, Kegiatan, Output, Dan Rincian Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pembinaan kader pembangunan manusia terkait seribu hari pertama kehidupan, pemantauan pertumbuhan dan perkembangan bayi dan balita, optimaliasi dana desa untuk intervensi stunting termasuk peningkatan kapasitas kader dalam Komunikasi Antar Pribadi (KAP) terkait stunting; implementasi KAP dan Penggerakan masyarakat.	Kota Sibolga	Dinas Kesehatan	7.568.700	6.920.050	91,43	12 Bulan	100	
			Pengukuran dan publikasi stunting.	Kota Sibolga	Dinas Kesehatan	22.202.500	21.230.000	95,62	12 Bulan	100	
			Pencatatan dan Pelaporan (termasuk dokumentasi) intervensi dan hasil.	Kota Sibolga	Dinas Kesehatan	5.270.000	1.762.500	33,44	12 Bulan	100	
			Reviu kinerja tahunan aksi integrasi stunting.	Kota Sibolga	Dinas Kesehatan	9.114.800	8.526.400	93,54	12 Bulan	100	
			<b>Jampersal</b>	Kota Sibolga	Dinas Kesehatan	<b>57.670.000</b>	-	<b>0</b>			
			Rujukan persalinan dan	Kota	Dinas	57.670.000	-	0	12 Bulan	100	



No	Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian	Dasar Pelaksanaan Penugasan (Tp)	Program, Kegiatan, Output, Dan Rincian Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			neonatal (biaya transportasi dan/atau sewa alat transportasi)	Sibolga	Kesehatan						
			<b>BPOM</b>	Kota Sibolga	Dinas Kesehatan	<b>406.876.000</b>	<b>361.288.800</b>	<b>88,80</b>			
			Pengawasan Obat dan Makanan	Kota Sibolga	Dinas Kesehatan	406.876.000	361.288.800	88,80	14 Kegiatan	100	

**Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

No	Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian	Dasar Pelaksanaan Penugasan (Tp)	Program, Kegiatan, Output, Dan Rincian Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Peraturan Kepala BKKBN Nomor 2 Tahun 2022		Penyediaan dan distribusi sarana KIE program KKBPK	Kota Sibolga	Dinas PP dan KB	1.280.569.000	1.221.693.890	95,40	Pengadaan	100	



Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian	Dasar Pelaksanaan Penugasan (Tp)	Program, Kegiatan, Output, Dan Rincian Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik		<b>AIR MINUM</b>			<b>525.000.000</b>						
			<b>PERLUASAN SPAM JP</b>			<b>525.000.000</b>						
				<b>Pengembangan jaringan distribusi dan sambungan rumah (SR) Kecamatan Sibolga Utara Kelurahan Sibolga Ilir</b>	Kota Sibolga	Dinas PU dar PR	<b>498.750.000</b>	<b>498.750.000</b>				
				Jaringan Perpipaan			498.750.000	498.750.000	100	3000 M 150 SR	100	
				Sambungan Rumah/SR								
				<b>Kegiatan Penunjang</b>			<b>26.250.000</b>	<b>26.240.100</b>				
				1. Jasa pendamping/fasilitator non Aparatur Sipil Negara kegiatan DAK Fisik yang dilakukan secara swakelola	Kota Sibolga	Dinas PU dar PR	19.200.000	19.200.000	100	12 Orang/bulan	100	
				2. Penyelenggaraan rapat koordinasi di pemerintah daerah (Penugasan)	Kota Sibolga	Dinas PU dar PR	7.050.000	7.040.100	100	5 Frekuensi	100	
				<b>SANITASI</b>			<b>1.121.300.000</b>					
			<b>PEMBANGUNAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK SETEMPAT (SPALD-S)</b>	Kota Sibolga	Dinas PU dar PR	<b>1.065.300.000</b>	<b>1.065.300.000</b>	<b>100</b>	<b>120</b>	<b>100</b>		
			Pembuatan Tangki Septik Individual di Kelurahan Angin Nauli, Kecamatan Sibolga Utara	Kota Sibolga	Dinas PU dar PR	355.100.000	355.100.000	<b>100</b>	40 Unit	100		
			Tangki septic individual									





No	Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian	Dasar Pelaksanaan Penugasan (Tp)	Program, Kegiatan, Output, Dan Rincian Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pembuatan Tangki Septik Individual di Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan	Kota Sibolga	Dinas PU dar PR	355.100.000	355.100.000	100	40 Unit	100	
			Tangki septic individual								
			Pembuatan Tangki Septik Individual di Kelurahan Pancuran Pinang, Kecamatan Sibolga Sambas	Kota Sibolga	Dinas PU dar PR	355.100.000	355.100.000	100	40 Unit	100	
			Tangki septic individual								
			<b>Kegiatan Penunjang</b>			<b>56.000.000</b>	<b>55.993.500</b>	<b>99,97</b>			
			1. Jasa pendamping/fasilitator non Aparatur Sipil Negara kegiatan DAK Fisik yang dilakukan secara swakelola	Kota Sibolga	Dinas PU dar PR	36.000.000	36.000.000	100	12 Orang/ Bulan	100	
			2. Penyelenggaraan rapat koordinasi di pemerintah daerah (Penugasan)	Kota Sibolga	Dinas PU dar PR	20.000.000	19.993.500	99,97	8 Frekuensi	100	
			<b>Penanganan Jalan</b>								
			<b>Pemeliharaan Berkala Jalan</b>			<b>22.068.168.000</b>	<b>19.442.903.200</b>	<b>8,10</b>	<b>2,77 km</b>	<b>85</b>	
			1. Pemeliharaan Berkala dan Peningkatan Jl. Bukit Barisan Kota Sibolga	Kota Sibolga	Dinas PU dar PR	2.300.000.000	678.796.500	29,51	0,21 km	35	
			2. Pemeliharaan Berkala dan Peningkatan Jl. Sibolga Baru Kota Sibolga	Kota Sibolga	Dinas PU dar PR	2.331.312.000	2.312.007.000	99,17	0,400 km	100	
			3. Pemeliharaan Berkala dan Peningkatan Jl.	Kota Sibolga	Dinas PU dar PR	1.300.000.000	1.155.408.300	88,88	0,29 km	95	



No	Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian	Dasar Pelaksanaan Penugasan (Tp)	Program, Kegiatan, Output, Dan Rincian Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Rasak Kota Sibolga								
			4. Pemeliharaan Berkala dan Peningkatan Jl. KH. Ahmad Dahlan Kota Sibolga	Kota Sibolga	Dinas PU dar PR	5.459.198.000	5.421.705.000	99,31	0,627 km	100	
			5. Peningkatan Jl. Ke Sumber Mata Air PDAM Tirta Nauli (Lapen-Hotmix)	Kota Sibolga	Dinas PU dar PR	2.863.932.000	2.125.442.400	74,21	0,600 km	80	
			6. Peningkatan Jl. Kakap (Hotmix-Rigid) Kota Sibolga	Kota Sibolga	Dinas PU dar PR	7.813.726.000	7.749.544.000	99,18	0,640 km	100	
			<b>Kegiatan Penunjang</b>			<b>518.400.000</b>	<b>505.549.637</b>	<b>97,52</b>		<b>100</b>	
			1. Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual	Kota Sibolga	Dinas PU dar PR	518.400.000	505.549.637	97,52	2 Paket	100	



### 3.3.3 HAMBATAN/PERMASALAHAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN UPAYA PENYELESAIAN

Kota Sibolga pada tahun 2022 melaksanakan tugas pembantuan terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya. Namun secara keseluruhan pelaksanaan tugas pembantuan berjalan dengan baik. Berikut hambatan yang dialami dalam pelaksanaan tugas pembantuan tahun 2022.

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Secara Umum didalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan tidak mengalami hambatan dan permasalahan yang berarti.
- b. Dinas Kesehatan
  - a) Adanya beberapa kontrak kerja yang di addendum dikarenakan beberapa penyedia tidak dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan obat yang dituangkan dalam perjanjian kerja dikarenakan kendala proses produksi, bahan baku, dan yang lainnya;
  - b) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) tidak terealisasi karena sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2022 bahwa “biaya persalinan bagi ibu hamil miskin, diberikan kepada ibu hamil yang tidak mempunyai jaminan kesehatan” sementara seluruh sasaran ibu hamil dan ibu bersalin di Kota Sibolga sudah menjadi peserta BPJS;
  - c) Akreditasi Puskesmas tidak terealisasi dikarenakan Petunjuk Teknis untuk Akreditasi Puskesmas baru keluar pada bulan desember 2022, sementara untuk melakukan Akreditasi tersebut Puskesmas harus mempersiapkan data 3 bulan sebelum pelaksanaan Akreditasi; dan
  - d) Insentif Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) sama sekali tidak terealisasi dikarenakan Peraturan Wali Kota untuk pembagian Insentif UKM ini belum diundangkan, dan untuk anggaran Insentif UKM itu sendiri dianggarkan pada Perubahan APBD Kota Sibolga Tahun 2022.
- c. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
Peraturan yang terlambat dan dari pusat menyulitkan untuk penyusunan anggaran sehingga anggaran yang sudah disusun selalu berubah-ubah untuk menyesuaikan dengan juknis.



- d. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
  - a. keterlambatan pekerjaan disebabkan oleh kondisi curah hujan yang cukup tinggi pada akhir tahun serta medan lapangan yang merupakan pinggiran tebing sehingga rawan longsor jika curah hujan tinggi; dan
  - b. tidak tersedianya bahan material yang diperlukan sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk memulai pekerjaan.

#### **3.3.4 SARAN DAN TINDAK LANJUT**



## BAB IV

### PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

#### 4.1 URUSAN PENDIDIKAN

##### 4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Sibolga.

Jenis Pelayanan Dasar yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sibolga Tahun 2022 yaitu :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia 7- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar
		Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional
		Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional
		ata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasio
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara usia 7- 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD



4.1.2 Target Pencapaian

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Jumlah penduduk usia sekolah	Target
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia 7- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	16629	100
		Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	1.71	
		Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	1.69	
		Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasio	1.79	
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	1.72	
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara usia 7- 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	223	100
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	3260	100



#### 4.1.3 Realisasi Capaian

Hasil capaian adalah realisasi dari target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran baik dari anggaran maupun penerima layanan.

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah penduduk usia sekolah	Jumlah penduduk yang mendapatkan pelayanan pendidikan	Capaian = (5):(4)X100 %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PENDIDIKAN DASAR	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	16629	15347	92,29
2.	PENDIDIKAN KESETARAAN	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.	223	223	100
3.	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	3260	2709	83,09

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Realisasi
1	Pendidikan Dasar	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	1.71	1.81
		Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen Nasional	1.69	1.49
		Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasio	1.79	1.73



	Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	1.72	1.64
--	--	------	------

#### 4.1.4 Alokasi Anggaran

Anggaran adalah alokasi jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan ke dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan di Kota Sibolga bersumber dari APBD Kota Sibolga dan juga bersumber dari APBN untuk tahun anggaran 2022, anggaran penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan per setiap Jenis Layanan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

No	Jenis Layanan	Pagu Anggaran	Realisasi	Persentase
1	Pendidikan Dasar	53.006.967.879	49.897.220.796	94,13
2	Pendidikan Kesetaraan	1.707.928.500	1.580.523.000	92,54
3	Pendidikan Anak Usia Dini	4.616.131.400	4.207.377.200	91,15

#### 4.1.5 Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Pendidik/Guru	Jumlah Tenaga Kependidikan	Total
1	PAUD	255		255
2	SD	642	36	678
3	SMP	370	73	443
4	Pendidikan Kesetaraan	44		44





#### 4.1.6 Permasalahan Dan Solusi

Tidak terdapat kendala dan permasalahan yang menjadi hambatan dan tantangan bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sibolga dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM, baik internal maupun eksternal.

#### 4.1.7 Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sibolga Tahun 2022 yang menunjang pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan yaitu :

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	
1	2	
<b>I</b>	<b>Program</b>	<b>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>
<b>A</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
1	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
<b>II</b>	<b>Program</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan</b>
<b>B</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>
1	Sub Kegiatan	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas
2	Sub Kegiatan	Pengadaan Mebel Sekolah
3	Sub Kegiatan	Pengadaan Perlengkapan Sekolah
4	Sub Kegiatan	Pengadaan Perlengkapan Siswa
5	Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
6	Sub Kegiatan	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
7	Sub Kegiatan	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
8	Sub Kegiatan	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
<b>C</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>
1	Sub Kegiatan	Penambahan Ruang Kelas Baru
2	Sub Kegiatan	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah
3	Sub Kegiatan	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
4	Sub Kegiatan	Pengadaan Mebel Sekolah
5	Sub Kegiatan	Pengadaan Perlengkapan Sekolah
6	Sub Kegiatan	Pengadaan Perlengkapan Siswa
7	Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	
1	2	
8	Sub Kegiatan	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
9	Sub Kegiatan	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
<b>D</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>
1	Sub Kegiatan	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD
2	Sub Kegiatan	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
3	Sub Kegiatan	Pengelolaan Dana BOP PAUD
<b>E</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>
1	Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan
<b>III</b>	<b>Program</b>	<b>Pendidik dan Tenaga Kependidikan</b>
<b>F</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satua Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>
1	Sub Kegiatan	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satua Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan
2	Sub Kegiatan	Program Indonesia Pintar Jenjang SD
3	Sub Kegiatan	Program Indonesia Pintar Jenjang SMP

## 4.2. URUSAN KESEHATAN

### 4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Peningkatan Pelayanan kesehatan bagi masyarakat secara minimal tetap mengacu kepada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019.

Adapun Jenis Pelayanan dasar yang dimaksud antara lain :

- a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
- b. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
- c. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
- d. Pelayanan Kesehatan Balita
- e. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar
- f. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif
- g. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut
- h. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
- i. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus



- j. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)Berat
- k. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
- l. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus = HIV)

#### 4.2.2 Target Pencapaian

Target atas pencapaian Standar Pelayanan Minimal dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini :

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Target		Ket
		Volume	%	
1	2	3	4	5
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1785	100%	
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1702	100%	
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1622	100%	
4	Pelayanan Kesehatan Balita	7847	100%	
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0	100%	
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	63253	100%	
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	7013	100%	
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	14990	100%	
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	1644	100%	
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)Berat	123	100%	
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2964	100%	
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus = HIV)	3604	100%	

#### 4.2.3 Realisasi Capaian Kinerja

No	Jenis Pelayanan Dasar	Target		Realisasi		Ket.
		Volume	%	Volume	%	
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1785	100%	1757	98,43	
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1702	100%	1673	98,30	
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1622	100%	1587	97,84	
4	Pelayanan Kesehatan Balita	7847	100%	7361	93,81	
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia	0	100%	0	0,00	



	Pendidikan Dasar					
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	63253	100%	63253	100,00	
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	7013	100%	6921	98,69	
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	14990	100%	14594	97,36	
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	1644	100%	1592	96,84	
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	123	100%	78	63,41	
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2964	100%	1561	52,67	
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus = HIV)	3604	100%	2156	59,82	

#### 4.2.4 Alokasi Anggaran

No.	Program/Kegiatan	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	%
1	2	3	4	5
I	<b>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</b>	46.094.839.458	32.546.256.657	70,61
	1 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			
	2 Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			
	3 Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			
	4 Pelayanan Kesehatan Balita			
	5 Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			
	6 Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			
	7 Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			
	8 Pelayanan Kesehatan Penderita			



No.	Program/Kegiatan	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	%
1	2	3	4	5
	Hipertensi			
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)Berat			
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus = HIV)			

#### 4.2.5 Dukungan Personil

No	Jenis Pelayanan Dasar	Personil		
		Jumlah	ASN	THL
1	2	3	4	5
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	97	55	42
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	61	46	15
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	24	13	11
4	Pelayanan Kesehatan Balita	245	170	75
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	155	122	33
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	164	147	17
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	64	32	32
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	14	9	5
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	15	7	8
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)Berat	29	20	9
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	37	24	13
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus = HIV)	30	28	2



4.2.6 Permasalahan dan Solusi

No	Jenis Pelayanan Dasar	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Keterbatasan Alat pemeriksaan kesehatan dasar dalam pemeriksaan ANC terpadu dan skrining PPIA triple eliminasi belum lengkap	Diperlukan ketersediaan alat skrining dan pemeriksaan ibu hamil lengkap di laboratorium
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Masih terdapatnya beberapa ibu hamil yang akan bersalin mobile/pindah untuk bersalin di tempat lain.	Koordinasi dengan tenaga kesehatan di FKTP masing-masing tentang mobilitas ibu hamil agar tetap tercatat dan terpantau.
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Pelaksanaan AMP yang belum maksimal sehingga mengakibatkan masih terdapatnya kematian neonatus sebanyak 7 orang,	Meningkatkan pelayanan ANC Terpadu dan melaksanakan pengkajian kematian supaya tidak terjadi kasus yang berulang
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Kekurangan peralatan antropometri kit untuk melakukan pelayanan kesehatan Balita	Pengusulan peralatan antropometri kit untuk seluruh Posyandu Balita
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Pelaksanaan Pembatasan Pembelajaran Tatap Muka disatuan Pendidikan Sekolah Dasar sehingga menyebabkan keterbatasan pelayanan kesehatan	Menggalakkan pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 guna mendukung Pembelajaran Tatap Muka
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	MENCAPAI 100%	
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Faktor sikap dan perilaku lansia yang tertutup terhadap pelaksanaan posyandu lansia	Tenaga Kesehatan dapat meningkatkan kegiatan sosialisasi program



No	Jenis Pelayanan Dasar	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4
			posyandu lansia terhadap masyarakat
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Berkurangnya kunjungan pasien penderita Hipertensi di Puskesmas	Mendata pasien terdiagnosa hipertensi untuk dilakukan kunjungan rumah
9	Pelayanan Kesehatan	Penderita Diabetes Melitus	
10	Pelayanan Kesehatan (ODGJ) Berat	Orang Dengan Gangguan Jiwa	
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Pemeriksaan TB hanya dilakukan pada kontak serumah penderita TB saja sementara untuk kelompok – kelompok tertentu seperti ibu hamil, warga binaan lapas dan panti asuhan belum dilakukan pemeriksaan TB, Pasien – pasien anak masih sulit dilakukan pemeriksaan,	Melakukan Sosialisasi dan Mengaktifkan Promosi Kesehatan di Puskesmas
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus = HIV)	masyarakat lebih enggan untuk mengunjungi layanan kesehatan baik itu ke puskesmas ataupun ke rumah sakit untuk memeriksakan diri, Kurangnya kegiatan screening deteksi dini HIV dibeberapa kelompok berisiko (Narapidana, Penasun) serta populasi kunci (Wanita Pekerja Seksual dll) akibat keterbatasan kegiatan	Meningkatkan kinerja petugas dan sinergi lintas sector



4.2.7 Program dan Kegiatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Kegiatan (Sub Kegiatan)
1	2	3	4
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil)
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin)
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir)
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita)
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar)
6	Pelayanan Kesehatan pada	Program Pemenuhan	Penyediaan Layanan





No	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Kegiatan (Sub Kegiatan)
1	2	3	4
	Usia Produktif	Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota ( Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif)
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota ( Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut)
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota ( Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi)
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota ( Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus)
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota ( Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat)
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah



No	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Kegiatan (Sub Kegiatan)
1	2	3	4
		Kesehatan Masyarakat	Kabupaten/Kota ( Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis)
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus = HIV)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota ( Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV)

#### 4.3 URUSAN PEKERJAAN UMUM

##### 4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

- 1 Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari hari
- 2 Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik

##### 4.3.2 Target Pencapaian

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	
			Rumah Tangga	%
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari hari	Persentase jumlah rumah tangga berakses air bersih	11890	100
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Persentase rumah tangga bersanitasi berbasis masyarakat (STBM)	11014	100



#### 4.3.3 Realisasi

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target SR / RT	Capaian SR / RT	Realisasi (%)
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari hari	Persentase jumlah rumah tangga berakses air bersih	150	150	100
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Persentase rumah tangga bersanitasi berbasis masyarakat (STBM)	150	120	80

#### 4.3.4 Alokasi Anggaran

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Anggaran		
			Pagu	Realisasi	Sumber dana
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari hari	Persentase jumlah rumah tangga berakses air bersih	796.696.096	793.253.377	APBN, APBD
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Persentase rumah tangga bersanitasi berbasis masyarakat (STBM)	1.207.942.748	1.176.125.200	APBN, APBD

#### 4.3.5 Dukungan Personil

Dalam melaksanakan pekerjaan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sibolga dilaksanakan oleh 137 ( Seratus tiga puluh tujuh) orang Pegawai, yang terdiri dari:

1. 55 (enam Puluh ) orang PNS
2. 86 (tujuh puluh tujuh) orang THL

#### 4.3.6 Permasalahan dan Solusi

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Permasalahan	Solusi
	Dalam penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal bidang urusan pekerjaan umum dan penataan	- masih belum terkoneksi dengan pemanfaatan ruang dikarenakan belum adanya dokumen RDTR kota sibolga dan belum lengkapnya sarana/produk hukum pemanfaatan ruang lainnya sebagai pendukung	Meningkatkan pemahaman tentang SPM khususnya kepada pemangku bidang SPM terkait.



ruang	<p>RTRW</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemahaman tentang penerapan SPM pada Dinas PUPR Kota Sibolga masih rendah, khususnya di kalangan pemangku bidang SPM terkait</li> <li>- Keterbatasan dana, sarana prasarana dan SDM pelaksana kegiatan untuk mendukung pencapaian SPM bidang ke PU-an</li> </ul>	
-------	---	--

#### 4.4 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

##### 4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pasal 9 ayat (2), Jenis Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat terdiri dari:

1. Penyediaan dan Rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota.
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

##### 4.4.2 Target Capaian

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah orang Yang berhak mendapatkan Pelayanan	Target Capaian	Rancangan APBD Tahun 2022
1	Penyediaan dan Rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	0	0	0
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah	0	0	0



#### 4.4.3 Realisasi Capaian

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah orang Yang berhak mendapatkan Pelayanan	Target	Realisasi %
1.	Penyediaan dan Rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	0	0	0
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah	0	0	0

#### 4.4.4 Alokasi Anggaran

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Anggaran
1.	Penyediaan dan Rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	0
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah	0

#### 4.4.5 Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM. Sumber Daya Manusia yang terlibat di dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman tahun 2022 juga belum di rinci.:

#### 4.4.6 Permasalahan dan Solusi

- Permasalahan dalam pemenuhan SPM di bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman adalah bahwa dalam pelayanan dasar penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang



terkena relokasi program pemerintah Kabupaten/Kota dan Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah tidak dapat di tetapkan karena kegiatan yang belum di tampung akibat Refocusing Anggaran APBD Kota Sibolga Tahun Anggaran 2022.

- Solusi atas permasalahan tersebut adalah dengan melanjutkan program di tahun 2023 dengan menampung kegiatan penerapan dan pencapaian SPM di APBD Pemerintah Kota Sibolga Tahun Anggaran 2023 untuk di peruntukkan bagi warga yang belum memperoleh layanan di dibidang SPM Perumahan Rakyat dan Permukiman..

#### 4.4.7 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang terkait dengan Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman masih terkendala akibat Refocusing APBD Pemerintah Kota Sibolga Tahun Anggaran 2022.

#### 4.5.1 URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Laporan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Sesuai Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal

##### 4.5.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

- Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

##### 4.5.1.2 Target Capaian

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100%
2.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	30 Kejadian Kebakaran



#### 4.5.1.3 Realisasi Capaian

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	%
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	0	0
2.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	30 Kejadian Kebakaran	100%

#### 4.5.1.4 Alokasi Anggaran

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Anggaran
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	-
2.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	109.440.000,-

#### 4.5.1.5 Dukungan Personil

Pelaksanaan SPM Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Penanggulangan Bencana Kebakaran pada Tahun 2022 didukung oleh personil sebanyak 302 orang.

- Jumlah Pegawai Satpol PP Januari s.d bulan Desember 2022 adalah 302 Orang.

#### 4.5.1.6 Permasalahan dan Solusi

##### Permasalahan

- Belum adanya gedung kantor Satpol PP Kota Sibolga sehingga kurangnya kenyamanan dalam melaksanakan tugas.
- Kurangnya pemahaman aparat Satpol PP tentang Standar Pelayanan Minimal
- Kurangnya dukung anggaran dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal



**Solusi**

- Perlunya pembangunan gedung kantor Satpol PP yang layak untuk menampung personil dan kendaraan dinas
- Perlu dilakukan kegiatan sosialisasi kepada para pejabat SatpolPP tentang pentingnya penganggaran dan perencanaan Standar Pelayanan Minimal
- Agar setiap OPD diberikan anggaran yang cukup serta memprioritaskan penerapan Standar pelayanan minimal

**4.5.1.7 Program / Kegiatan**

NO	PROGRAM	SUB. KEGIATAN
I	<b>Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum</b>	
		Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada
II	<b>Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran</b>	
		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

**4.5.2 Perlindungan Masyarakat**

**4.5.2.1 Jenis pelayanan dasar**

BPBD berdasarkan tupoksinya berada pada urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sub urusan bencana. Jenis pelayanan dasar sub-urusan bencana meliputi:

- Pelayanan Informasi Rawan Bencana;
- Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana;
- Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana..

**4.5.2.2 Target Capaian**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 %
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %





#### 4.5.2.3 Realisasi Capaian

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 %	28.15%
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	28.15%
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %	100 %

#### 4.5.2.4 Alokasi Anggaran

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Alokasi Anggaran pada APBD TA.2022		
			APBN	APBD	Sumber Dana Lain yang sah
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh layanan informasi rawan bencana	-	-	-
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	-	-	-
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	-	-	3.951.999.789 (BTT)

#### 4.5.2.5 Dukungan Personil

No	Jenis Pelayanan Dasar	Dukungan Personil	
		PNS	Non PNS
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	19	100
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	19	100
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	19	100



#### 4.5.2.6 Permasalahan dan Solusi

##### Permasalahan

1. Belum adanya dokumen-dokumen kebencanaan berupa dokumen Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana, Kajian Resiko Bencana (KRB), Indeks Resiko Bencana (IRB), Rencana Kontijensi, Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), Pengurangan Resiko Bencana (PRB) dan Peta Rawan Bencana Kota Sibolga.
2. Kurangnya kualitas SDM aparatur BPBD dikarenakan minimnya pelatihan penyusunan dokumen kebencanaan dan pelatihan penanggulangan bencana.
3. Belum terbentuknya tim penanggulangan bencana lintas sektor seperti, Tim Reaksi Cepat (TRC) tingkat Kota, Komando Tanggap Darurat.
4. Belum terbentuknya Kelurahan Tangguh Bencana.
5. Kejadian bencana bisa datang setiap saat, dengan permasalahan yang kompleks, dimungkinkan menguras sumberdaya yang besar, sedangkan sarana prasarana pada BPBD Kota Sibolga masih minim.
6. Kurangnya sarana peringatan dini yang belum menjangkau seluruh Kota Sibolga.
7. Belum berjalannya fungsi Pusdalops secara maksimal, sehingga dalam melakukan assaement menindak lanjuti laporan masyarakat masih terbentur dengan sistem komunikasi intern BPBD.
8. Perubahan Paradigma dan sulitnya menerapkan sadar bencana pada masyarakat dalam penanggulangan bencana.

##### Solusi

1. Mencoba mendapatkan/memperoleh dana APBD untuk penyusunan dokumen-dokumen kebencanaan.
2. Meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan-pelatihan kebencanaan.
3. Melakukan pertemuan lintas sektor penanggulangan bencana untuk pembentukan tim lintas kota.
4. Membentuk kelurahan tangguh bencana.
5. Menambah sarana dan prasarana penanggulangan bencana melalui APBD, permohonan bantuan sarana dan prasarana baik ke provinsi maupun ke BNPB.
6. Lebih mengefektifkan fungsi PUSDALOPS.
7. Sosialisasi dan pendekatan secara intens di setiap desa terhadap masyarakat, dan juga membuka diskusi-diskusi serta mendengarkan kritik dan saran dari masyarakat langsung di dalam sebuah forum.

#### 4.5.2.7 Program dan Kegiatan

NO	Jenis Pelayanan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Ket
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	-	-	-	Tahun 2022 Tidak ada dana di program penanggulangan bencana
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapan Terhadap Bencana	-	-	-	
3	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	-	-	-	



#### 4.6 Urusan Sosial

Penerapan SPM Urusan Sosial di Kota Sibolga dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Sibolga sebagai implementasi dari kebijakan dan strategi penanganan masalah-masalah kesejahteraan sosial yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI dan dijadikan acuan dalam target pencapaiannya.

##### 4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

SPM Bidang Urusan Sosial merupakan penjabaran dari target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 09 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM bidang sosial di daerah kabupaten/kota terdiri atas :

- a) Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luar Panti Sosial;
- b) Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar Panti Sosial;
- c) Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial;
- d) Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial;
- e) Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota.



4.6.2 Target Capaian

No.	Jenis Pelayanan	Standar Pelayanan Minimal (SPM)				
		Sasaran/Indikator	Target Nasional (%)	Target Pemerintah Kota Sibolga (%)		
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rehabilitas Sosial Dasar penyandang Disabilitas terlantar, Anak terlantar, lanjut usia terlantar serta Gelandangan pengemais di Luar Panti,	<p>Sasaran :</p> <p>Terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar serta Gelandangan dan pengemis di Luar Panti.</p> <p>Indikator :</p> <p>Persentase penyandang Disabilitas terlantar, Anak terlantar, lanjut Usia terlantar, serta Gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar panti</p>	100,00	10,00	20,00	30,00
2.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Sosial.	<p>Sasaran:</p> <p>Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial daerah kabupaten /kota.</p> <p>Indikator:</p> <p>Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah</p>	100,00	80,00	80,00	80,00



No.	Jenis Pelayanan	Standar Pelayanan Minimal (SPM)				
		Sasaran/Indikator	Target Nasional (%)	Target Pemerintah Kota Sibolga (%)		
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	2	3	4	5	6	7
		tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota				

#### 4.6.3 Realisasi Capaian

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal (SPM)				
		Sasaran/Indikator	Target SPM Tahun 2022 (%)	Realisasi SPM Tahun 2021 (%)	Realisasi SPM Tahun 2022 (%)	Ket
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti.	<p>Sasaran :</p> <p>Terpenuhinya kebutuhan dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti.</p> <p>Indikator :</p> <p>Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti.</p>	20,00	0,00	53,01	.



No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal (SPM)				
		Sasaran/Indikator	Target SPM Tahun 2022 (%)	Realisasi SPM Tahun 2021 (%)	Realisasi SPM Tahun 2022 (%)	Ket
1	2	3	4	5	6	7
		$\frac{44}{83} \times 100$				
2.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Sosial.	<p>Sasaran : Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial daerah kabupaten/kota.</p> <p>Indikator : Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota.</p>	80,00	100,00	100,00	
		$\frac{656}{656} \times 100$				

#### 4.6.4 Alokasi Anggaran

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Target	Realisasi	Ket
1	2	3	4	5
1	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>6.322.637.803,00</b>	<b>6.139.312.920,00</b>	-
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	123.441.700,00	77.741.700,00	-
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	279.743.800,00	229.286.740,00	-



	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	5.919.452.303,00	5.832.284.480,00	-
2	<b>Program Penanganan Bencana</b>	<b>385.885.000,00</b>	<b>268.547.200,00</b>	-
	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>	<b>385.885.000,00</b>	<b>268.547.200,00</b>	-
	Penyediaan Makan	185.885.000,00	153.047.200,00	-
	Penyediaan Sandang	200.000.000,00	115.500.000,00	-

#### 4.6.5 Dukungan Personil.

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM. Seluruh Pegawai pada Dinas Sosial Kota Sibolga pada tahun 2022 berjumlah 24 (dua puluh empat) orang PNS.

#### 4.6.6 Permasalahan dan Solusi.

Beberapa permasalahan dan Solusi dalam penerapan SPM bidang urusan Sosial pada Dinas Sosial Kota Sibolga antara lain:

- a) Kurangnya tenaga aparatur yang berlatar belakang pendidikan kesejahteraan sosial, berjiwa sosial dan yang mempunyai sertifikat sosial sehingga program dan kegiatan yang disusun belum maksimal menerapkan capaian SPM,

Solusi : Menyampaikan kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) agar menempatkan aparatur yang berlatar belakang pendidikan kesejahteraan sosial, berjiwa sosial dan yang mempunyai sertifikat sosial

- b) Belum adanya tempat penampungan yang memadai bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis di Kota Sibolga.

Solusi : Merencanakan rehab total Kantor Dinas Sosial Kota Sibolga yang didalamnya tersedia satu ruangan sebagai rumah singgah/shelter di kota Sibolga.

- c) Kegiatan yang diaggarkan oleh Dinas Sosial Kota Sibolga belum terfokus kepada pencapaian SPM.

Solusi : Membuat perencanaan program dan kegiatan tahun berikutnya dengan lebih memperhatikan pencapaian SPM dan RPJMD.

- d) Belum sinkronnya data PMKS/PPKS dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kota Sibolga sehingga sulit menentukan siapa saja yang berhak menerima pelatihan keterampilan dan Bantuan Sosial.

Solusi : Melakukan kegiatan pendataan yang lebih baik dan berkelanjutan, dengan menggunakan aplikasi yang terkoordinasi langsung dengan Pusdatin Kementerian Sosial.

#### 4.6.7 Program dan Kegiatan



## BAB V PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Sibolga adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Sibolga Tahun Anggaran 2022 merupakan laporan pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2022 dengan mengacu pada kewenangan Pemerintah Kota Sibolga, pelaksanaan asas desentralisasi, pengelolaan keuangan, tugas pembantuan serta tugas umum pemerintahan. Dari hasil kinerja yang dilaporkan pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Sibolga Tahun Anggaran 2022, dapat disimpulkan bahwa dalam pembangunan yang telah dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan, pada umumnya dinilai berjalan dengan baik dan lancar. Hasil pembangunan di Kota Sibolga pada hakekatnya merupakan hasil sinergi dari kinerja eksekutif, legislatif, masyarakat dan dunia usaha. Keberhasilan pembangunan tersebut, tidak terlepas dari itikad baik, kerja keras, kreativitas, dan inovasi dari semua pihak yang memiliki keterkaitan fungsi sesuai dengan bidang tugas dan usahanya masing-masing khususnya DPRD Kota Sibolga, Forum Pimpinan Daerah, Organisasi Kemasyarakatan, Orsospol, Lembaga Profesi, Perguruan Tinggi, Tokoh-tokoh Agama, Insan Pers, dan seluruh lapisan masyarakat Kota Sibolga lainnya.

Hasil pembangunan yang telah dicapai pada tahun 2022, tentunya masih perlu untuk ditingkatkan kembali agar apa yang menjadi target dan sasaran pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Sibolga tahun 2021-2026 dapat dicapai dan dilaksanakan. Terhadap berbagai kekurangan, kelemahan dan permasalahan yang ada dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2022 akan dilakukan evaluasi untuk dapat dijadikan acuan





bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun-tahun mendatang. Semoga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Sibolga ini dapat menjadi bahan bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk memberikan catatan-catatan sebagai bahan penyempurnaan dan perbaikan pembangunan kedepan di Kota Sibolga.

Demikian penyampaian LPPD Kota sibolga Tahun 2022, diiringi harapan semoga di tahun-tahun mendatang keberhasilan senantiasa mengiringi segala upaya dan perjuangan kita demi kemajuan Kota Sibolga, semoga Allah SWT memberkahi kita semua

Sibolga, Maret 2023

WALI KOTA SIBOLGA

*[Handwritten signature in blue ink]*

H. JAMALUDDIN POHAN